



# TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA

Fakta Sosial, Definisi Sosial,  
& Perilaku Sosial



PROF. DR. I.B. WIRAWAN

# TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA

(FAKTA SOSIAL, DEFINISI SOSIAL,  
DAN PERILAKU SOSIAL)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA

(FAKTA SOSIAL, DEFINISI SOSIAL,  
DAN PERILAKU SOSIAL)

PROF. DR. I.B. WIRAWAN



**TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA  
(Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2012

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-9413-63-2 300

15 x 23 cm

xii, 326 hlm

Cetakan ke-4, Mei 2015

Cetakan ke-3, September 2014

Cetakan ke-2, September 2013

Cetakan ke-1, November 2012

**Kencana. 2012.0398**

**Penulis**

Prof. Dr. I.B. Wirawan

**Desain Sampul**

control.design@yahoo.com

**Penata Letak**

Y. Rendy

**Percetakan**

Kharisma Putra Utama

**Divisi Penerbitan**

K E N C A N A

**Penerbit**

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# Kata Pengantar

---

Buku yang tengah berada di tangan sidang pembaca yang budi-man seperti bentuknya saat ini, untuk sebagian merupakan hasil dari pengalaman mengasuh mata kuliah Tema dan Perspektif Sosiologi pada S-1 dan Program Magister Sosiologi di FISIP—Universitas Airlangga, selama empat semester pada semester ganjil. Sebagian lagi merupakan hasil tugas saat menempuh pendidikan doktor di Universitas Airlangga. Dorongan lainnya adalah adanya kenyataan, bahwa cukup banyak di antara mahasiswa pemula yang bukan berasal dari *basic* sosiologi tampak kesulitan “menangkap” peta teori sosial menurut paradigma ilmu sosial yang sudah dikenal selama ini. Sebenarnya sudah ada buku teks yang memetakan teori-teori sosial dalam bahasa asing, yang disajikan secara tematik, antara lain oleh George Ritzer, Margaret M. Poloma, Patrick Baert, Ian Craib, Karel J. Veeger, dkk., dan penulis lainnya. Karena itu, ada kesan sangat kuat dalam pengalaman menyampaikan materi kuliah kepada para mahasiswa, bahwa ada beberapa mahasiswa yang sangat kritis, tetapi ada sebagian besar mahasiswa pemula yang masih gamang dalam melihat posisi teori di dalam paradigma-paradigma itu. Lebih-lebih lagi dalam persoalan epistemologi, terutama bagi mahasiswa yang menempuh studi tahap akhir. Cukup banyak di antara mahasiswa yang bimbang ketika harus memilih metode penelitian (kuantitatif vs. kualitatif) yang konsisten dengan paradigma dan teori (makro vs.

mikro) yang sudah dipilihnya.

Berdasar pengalaman dan kenyataan itulah, penulis berupaya merangkum dan menampilkan sebuah buku yang dapat memandu dan memenuhi kebutuhan para mahasiswa yang kesulitan melihat posisi teori dalam peta teori-teori sosial yang selama satu setengah abad belakangan ini diakui masuk dan terdistribusi ke dalam tiga paradigma besar sosiologi. Oleh karena itu, penyajian materi dalam buku ini lebih bercirikan ensiklopedia dibandingkan dengan cirinya yang tematik. Meskipun sudah ada begitu banyak buku teks sosiologi yang ditulis oleh pengarang terkenal, baik dalam bahasa asing maupun dalam bentuk alih bahasa—tetapi belum banyak yang secara khusus menunjukkan rumpun teori sosial ke dalam masing-masing paradigma secara sistematis. Buku ini mencoba mengisi kekurangan tersebut, agar para mahasiswa pemula dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang peta teori sosial menurut tiga paradigma sosiologi yang sudah dikenal selama ini.

Dalam penyajiannya, buku ini dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing bagian memuat paradigma dan rumpun teori yang bernaung di dalamnya, dirangkai kemudian dengan pembahasan tentang teori pilihan rasional dan teori kritis. Secara berturut-turut pembagian dalam buku ini dapat dipaparkan secara ringkas sebagai berikut. Bagian pertama memuat penjelasan tentang apa itu paradigma, dilanjutkan dengan pengenalan para tokoh paradigma fakta sosial, kemudian uraian tentang perspektif teori struktural fungsional dan perspektif teori struktural konflik. Pada bagian kedua dijelaskan tentang paradigma definisi sosial dilanjutkan kemudian dengan penjelasan ringkas tentang tokoh paradigma definisi sosial, dan dirangkai dengan teori-teori yang bernaung di bawah paradigma definisi sosial. Pada bagian ketiga dipaparkan secara ringkas pula paradigma perilaku sosial, berikut teori-teori yang berada dalam lingkup paradigma perilaku sosial ini. Sebagai penutup, disajikan pula penjelasan ringkas tentang teori pilihan rasional. Dalam perkembangan terakhir ada juga yang mengelompokkan paradigma ilmu sosial menurut kriteria paradigma positivis, paradigma konstruksionis, dan paradigma kritis. Pembagian



paradigma sebagaimana disebutkan terakhir tidak dibahas dalam kesempatan ini.

Buku ini berhasil disusun, bukan semata-mata hasil kerja mandiri penulis, melainkan telah memperoleh begitu banyak sumbangan dan masukan berharga dari teman satu angkatan, baik berupa saran dan kritik secara lisan, maupun cacatan kritis yang disampaikan langsung kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini sudah selayaknya penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak terutama Prof. Soetandyo Wignjosebroto, M.P.A., yang telah memberikan saran dan kritik beliau terhadap naskah buku ini. Prof. Dr. Hotman Siahaan, yang ikut memberikan catatan kritis mengenai siklus teori-teori sosial, tokoh-tokoh berikut paradigma yang memayunginya. Demikian pula saran-saran dan komentar dari Prof. Dr. Noer Sam, atas naskah buku ini, kami penulis mengucapkan banyak terima kasih. Sumbangan berharga dari para sejawat; Dr. Sukidin, M. Pd., Dr. Lenny Tammunu, Dr. Ir. Alisjahbana, M.A., Prof. Dr. Nasruddin, Dr. T. M. Jamil, dan Dr. H. Nandang Saefuddin, Zendju, Drs. Ali Sukamtono, Drs. Andiopenta Purba, terutama Dr. Basrowi, M.Si. yang telah ikut memberikan bahan berharga serta menelaah naskah buku ini, sebelum diterbitkan, kami ucapkan terima kasih.

Para kandidat Doktor Ilmu Sosial FISIP-Unair Angkatan 2010, yang telah memberikan dorongan semangat, dan membantu merapikan naskah untuk penerbitan buku ini, terutama Saudara Dr. Bagong Suyanto, M.Si. dan sejawat Novri Susan, M.A. yang tengah menyelesaikan program doktornya di Jepang, serta terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Saudara Adi Suhendra dan Titik Wulandari yang telah merapikan kembali naskah yang bercerai-berai ini menjadi satu kumpulan buku. Penulis menyadari benar bahwa paparan demi paparan dalam buku ini banyak kelemahan dan kekurangannya, apalagi bagi mereka yang selama ini mengasuh teori-teori sosial, maka sangatlah mudah melihat titik kelemahan dari buku ini. Tetapi, upaya menghadirkan buku yang memuat peta teori sosial yang terintegrasi seperti ini sungguh merupakan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap seluruh isi buku ini dan dengan segala kekurangan yang ada,





tetap menjadi tanggung jawab penulis. Penulis berharap kepada sidang pembaca berkenan memberikan saran dan kritik, untuk perbaikan terbitan yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dalam membantu para mahasiswa yang tengah belajar ilmu sosial, khususnya sosiologi di Tanah Air.

Surabaya, media Juli 2011

Salam dari Penulis

Prof. Dr. I. B. Wirawan



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>BAGIAN 1 PARADIGMA FAKTA SOSIAL</b>	<b>1</b>
PENJELASAN RINGKAS .....	1
BAB 1 MENGENAL TOKOH PARADIGMA FAKTA SOSIAL.....	5
Karl Marx (1818 – 1883).....	6
Emile Durkheim (1858 – 1917).....	13
Talcott Parsons (1902-1979) .....	19
Robert King Merton (1910- ).....	28
BAB 2 PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL .....	41
Pendahuluan .....	41
Karakteristik Perspektif Struktural Fungsional .....	42
Masyarakat dalam Model Integrasi Dahrendorf dan Durkheim .....	47
Pandangan Robert K. Merton tentang Fungsionalisme.....	48
Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme .....	51
Sistem Sosial .....	54
Kelemahan Teori Struktural Fungsional.....	56
Ringkasan .....	58
BAB 3 PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL KONFLIK .....	59
Pendahuluan .....	59
Beberapa Proposisi Teori Konflik .....	60

Karl Marx: Dasar Teori Konflik.....	66
Teori Konflik Perspektif Max Weber .....	69
Persamaan dan Perbedaan antara Max dan Weber .....	72
Masyarakat dalam Pandangan Dahrendorf dan Cohen .....	73
Teori Konflik Perspektif Mikro; Rendhall Collins.....	76
Teori Konflik Perspektif George Simmel .....	81
Teori Konflik Perspektif Lewis Coser .....	82
Fungsi Positif KONflik Menurut Lewis Coser.....	83
Teori Konflik dalam Pandangan Dehrendorf .....	87
Persamaan dan Perbedaan Struktural Fungsional dan Teori Konflik.....	90
Ringkasan .....	91
 <b>BAGIAN 2 PARADIGMA DEFINISI SOSIAL</b>	 <b>95</b>
PENJELASAN RINGKAS .....	95
BAB 4 MENGENAL TOKOH PARADIGMA DEFINISI SOSIAL.....	97
Pendahuluan .....	97
Max Weber.....	98
Peter L. Berger dan Thomas Luckman .....	106
BAB 5 TEORI INTERAKSI SIMBOLIS .....	109
Pendahuluan .....	109
Interaksi Simbolik dalam Perspektif Sejarah .....	110
Lingkup Pembahasan Interaksionisme Simbolik.....	114
Substansi dan Perbincangan Interaksi Simbolik.....	120
Interaksi Simbolik dalam Realitas Sosial .....	123
Manusia dan Makna dalam Perspektif Simbolis.....	128
Interaksi Simbolis dalam Paradigma Definisi Sosial .....	130
BAB 6 TEORI FENOMENOLOGI.....	133
Pendahuluan .....	133
Proses Pemahaman Terhadap Tindakan .....	134
Pengalaman Sehari-hari dan Kesadaran Melakukan Tindakan.....	137



<i>Aphoe</i> dalam Metode Fenomenologi.....	141
Proses Reduksi: Upaya Penjernihan Fenomena .....	142
Tesis, Antitesis, dan Sintesis dalam Fenomenologi.....	145
Kritik Terhadap Fenomenologi .....	148
Fenomenologi Kontemporer .....	149
<b>BAB 7 TEORI ETNOMETODOLOGI.....</b>	<b>153</b>
Pendahuluan .....	153
Inti Etnometodologi.....	156
Perbedaan antara Fenomenologi daan Etnometodologi.....	158
Etnometodologi Harold Garfinkel .....	160
 <b>BAGIAN 3 PARADIGMA PERILAKU SOSIAL.....</b>	 <b>169</b>
<b>PENJELASAN RINGKAS .....</b>	<b>169</b>
<b>BAB 8 TEORI PERTUKARAN SOSIAL .....</b>	<b>171</b>
Pengenalan Konsep .....	171
"Pertukaran" sebagai Teori Klasik.....	172
Teori Pertukaran Sosial Modern .....	173
Prinsip-prinsip Teori Pertukaran.....	174
Tatanan Sosial Menurut Teori Pertukaran.....	176
Teori Pertukaran Deduktif ; Proposisi George C Homans.....	176
Pertukaran dan Psikologi Sosial Kelompok: Thibaut dan Kelley.....	181
Kekuasaan dan Pertukaran Menurut Peter Blau .....	182
Penelitian Terkait Teori Pertukaran.....	185
<b>BAB 9 PERSPEKTIF TEORI SISOLOGI PILIHAN RASIONAL.....</b>	<b>189</b>
Pendahuluan .....	189
Apakah Pilihan Rasional itu?.....	191
Kontinuitas antara Pilihan Rasional dan Teori Sosiologi Tradisional .....	192
Inti struktur dalam Analisis Pilihan Rasional .....	208
<i>The Invasion of Economic Men (Rational Choice Theory Patrick Baert)</i> .....	209



Rasionalitas: Pemaksimalan Kepentingan Individu (Malcolm Waters) .....224

Talcott Parsons "Imperativisme Fungsional" .....230

Teori Pilihan Rasional (Ritzer) .....244

Keuntungan Komparatif Pilihan Rasional (Dehra Friedman & M. Hetchler) 246

Menuju Rational Choice Theory Masa Depan .....247

**BAB 10 TOKOH TEORI SOSIAL MODERN DAN POSTMODERN ..... 249**

Jeffrey C. Alexander .....249

Teori Foulcault: Post-Strukturalis .....254

Jurgen Habermas.....260

George Ritzer .....265

Pierre Bourdieu 5 .....272

Jacques Derrida.....280

**BAB 11 TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS..... 291**

Dasar Pemikiran Teori Strukturasi Anthony Giddens.....291

Dualitas Struktur.....294

Dualisme Subjek-Objek.....299

Konteks Ruang dan Waktu .....300

Pemahaman (*Hermeneutika*) Ganda .....303

Konsep Kekuasaan (*Power*) .....306

Perilaku Tindakan (*Agency*) .....307

Arus Pemikiran yang Memengaruhi Teori.....309

Fenomena Sosial yang Hendak Dijelaskan .....311

Jenis Penjelasan yang Ditawarkan .....313

Bias Teori Strukturasi.....315

**DAFTAR PUSTAKA..... 319**



# BAGIAN I

## PARADIGMA FAKTA SOSIAL

### PENJELASAN RINGKAS

Dalam perkembangan khazanah pengetahuan manusia dewasa ini, berbagai hal yang dijadikan sumber acuan atau sudut pandang bagi pemecahan suatu persoalan kerap juga disebut “paradigma”, seperti yang lazim kita dengar, “paradigma pembangunan” atau “paradigma belajar” dan sebagainya. Sebutan dan penggunaan kata “paradigma” semacam ini dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi, karena konteksnya sangat situasional. Tetapi apa yang dimaksud dengan Paradigma dalam konteks ilmu sosial khususnya sosiologi, sebaiknya kita mengacu pada konsep dan pemikiran Thomas S. Khun di dalam bukunya yang terkenal, berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Menurut Thomas Khun (Veeger, 1993: 22), paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan (sosial) tertentu. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa sebuah paradigma adalah jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk “melihat” dunia sosial. Persoalannya adalah jernih tidaknya sebuah “jendela ilmu” yang digunakan akan sangat memengaruhi pemahaman seseorang tentang apa dan bagaimana sesungguhnya dunia sosial itu, baik menurut fakta subjektif maupun fakta objektif. Tetapi yang jelas, bertitik tolak dari satu paradigma tertentu, seorang ilmuwan dapat memusatkan dan merumuskan permasalahan objek kajian yang menjadi sasaran bidang ilmunya, lalu memilih dan menetapkan teori dalam rumpun paradigma itu yang relevan dengan persoalan yang tengah dikaji, serta menetapkan metode penelitian untuk mencari dan menemukan jawaban atau bukti-bukti empirisnya di lapangan.

Sosiologi sendiri dikenal sebagai ilmu berparadigma ganda (Ritzer, 2008, Apendik :13). Perbedaan penting yang telah melahirkan bermacam-macam paradigma tersebut, sebenarnya terletak pada perbedaan sudut pandang di dalam melihat sebuah pokok persoalan dalam dunia sosial. Paradigma yang tampak susul-menyusul dalam sejarah perjalanan sosiologi itu, juga telah bersaing satu sama lain dewasa ini, dan sangat mungkin membingungkan mahasiswa-mahasiswa pemula yang mempelajari sosiologi (Veeger, 1993: 22). Belum berakhir perdebatan tentang pembagian paradigma menurut George Ritzer, belakangan sudah muncul pembagian paradigma menurut positivis, konstruksionis, dan paradigma kritis. Namun sebenarnya kebingungan itu tidak perlu terjadi, jika menyadari bahwa hidup dan kehidupan masyarakat dewasa ini pun memang telah diwarnai oleh dinamika dan berbagai macam persaingan, mulai dari yang laten hingga yang manifes dan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Dalam bukunya yang berjudul *Sociology; A Multiple Paradigm Science* (1980), George Ritzer, telah menjelaskan tiga paradigma yang dikenal dalam sosiologi selama satu setengah abad terakhir ini (Veeger, 1993: 23). Ketiga paradigma tersebut adalah: (1) paradigma fakta sosial; (2) paradigma definisi sosial; dan (3) paradigma perilaku sosial. Dalam perkembangan terakhir, ada juga penggolongan paradigma lain menjadi: (1) positivistik; (2) konstruksi sosial; dan (3) paradigma kritis seperti disinggung di atas. Ketiga paradigma yang disebutkan terakhir ini karena berbagai alasan, sengaja tidak dibahas pada kesempatan ini.

Paradigma Fakta Sosial. Paradigma ini melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Masyarakat jika dilihat dari struktur sosialnya (dalam bentuk pengorganisasiannya) tentulah memiliki seperangkat aturan (apakah itu undang-undang, hierarki kekuasaan dan wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma, pranata sosial, atau pendek kata kebudayaan) yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat—akan tetapi dapat memengaruhi perilaku kesehariannya (lihat: Veeger, 1993).

Ilustrasi yang dapat diajukan dalam konteks ini adalah, bahwa setiap individu sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh (bahkan daya paksa) dari masyarakat (sebagai sebuah struktur sosial). Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurinya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakatnya baik menurut aturan lisan maupun aturan tertulis, tentang “apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks hidup bermasyarakat. Segala bentuk pelanggaran atas



“larangan” tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks norma hidup dan kehidupan bermasyarakat itu—tentulah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya.

Berdasarkan ilustrasi di atas, tampak semakin jelas bahwa di luar individu ada kekuatan struktur yang melebihi keinginan atau kemauan orang per orang, apakah itu berupa norma, nilai, ataupun peraturan yang memiliki kekuatan memaksa kepada setiap individu warga masyarakat yang bersangkutan. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan (fakta) tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu semata. Kehidupan sosial memiliki seperangkat hukum, dampak dan akibatnya sendiri. Jika dicermati, memang dalam setiap individu ada fakta yang bersifat psikis, tetapi dalam konteks masyarakat, Durkheim melihatnya sebagai fakta sosial. Oleh karena itu, Durkheim juga tidak menyangkal bahwa hidup manusia yang bersifat tunggal dan utuh tersebut, ikut ditentukan oleh ciri-ciri personalnya. Tetapi dalam pandangan Durkheim, ia lebih menekankan kepada aspek kehidupan sosial manusia sebagai unsur otonom yang kurang lebih sama faktanya dengan aspek individualnya. Dari dasar pandangan inilah kemudian lahir paradigma fakta sosial dan beberapa teori sosiologi makro (lihat: Veeger, 1993: 24) yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam buku ini.

### TEORI-TEORI DALAM LINGKUP PARADIGMA FAKTA SOSIAL

Teori-teori besar yang berada dalam lingkup paradigma fakta sosial, antara lain: (a) teori struktural fungsional; (b) teori struktural konflik, atau kerap disebut juga teori konflik; (c) teori sistem; dan (d) teori-teori sosiologi makro lainnya. Teori-teori ini pada dasarnya menganalisis peran dan pengaruh dari struktur sosial terhadap individu dalam masyarakat, seperti: pranata-pranata sosial, norma sosial, kelas sosial, *social control*, atau kekuasaan dan lain-lain; yang tampak berada di luar individu, akan tetapi dapat memengaruhi kelangsungan dan mungkin juga perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan (Veeger, 1993: 30).

Pada bagian pertama buku ini, secara sengaja tidak semua tokoh sosiologi klasik yang pernah disebutkan dalam berbagai buku teks sosiologi akan dibahas pada kesempatan ini, tetapi hanya beberapa tokoh sosiologi dan teori sosiologi klasik yang memiliki pengaruh hingga saat ini. Beberapa tokoh sosiologi klasik itu, antara lain: Karl Marx, Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton.







# BAB 1

## MENGENAL TOKOH PARADIGMA FAKTA SOSIAL

---

Dalam perbincangan teori sosiologi klasik, tokoh Karl Marx (1818-1883) lebih dahulu muncul dan dikenal sebagai seorang Sosiolog handal sebelum Emile Durkheim (1858-1917). Begitu pula sebelum Durkheim dan Marx dikenal menyandang nama besar sebagai sosiolog di Eropa, sebenarnya sudah ada Auguste Comte (1789) yang diakui sebagai *the founding fathers*. Berikutnya, muncul nama Herbert Spencer (1820-1903) yang memopulerkan sosiologi di Inggris. Durkheim yang kemudian tercatat sebagai sosiolog besar di Perancis, hidup hampir bersamaan dengan sosiolog kelahiran Berlin-Jerman, bernama George Simmel (1858-1918) yang merupakan tokoh sosiologi interaksionis atau sosiologi formal tetapi tidak banyak dikenal kala itu. Namun dalam dasawarsa terakhir, beberapa karya George Simmel yang sebagian besar membahas sosiologi kebudayaan mulai banyak dipelajari. Karya Simmel tersebut antara lain tentang: *The Conflict in Modern Culture*, *The Crisis of Culture*, *The Problem of Style*, dan *On Social Differentiation* (Widyanta, 2002), yang banyak diapresiasi dewasa ini. Tokoh lain di luar itu, yang kerap dikelompokkan dan memiliki nama besar dalam teori sosiologi klasik adalah Max Weber (1864-1920) yang juga berasal dari Jerman. Tokoh Paradigma fakta sosial lain yang penting adalah Talcott Parsons (1902-1979) dan Robert King Merton (1910- ). Di samping itu, antara tahun 1830-1960-an, muncul pula teori-teori feminisme yang pada kesempatan ini belum sempat dibahas (lihat: Ritzer, 1996).

## A. KARL MARX (1818-1883)

### 1. Konteks Sosial dan Politik yang Melatarbelakangi Teori

Karl Marx merupakan sosok filsuf dan teoretikus yang sangat terkemuka pada abad ke-19. Sebagian besar hasil pemikirannya begitu berpengaruh terhadap pemikiran ahli abad berikutnya. Ideologi perjuangan politiknya yang disebut Marxisme, masuk dalam setiap gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan pada abad ke-20 menjadi dasar dari kebanyakan gerakan pembebasan. Istilah Marxisme adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx, terutama yang disebarkan oleh temannya yang bernama Marxis Karl Kautsky (1854-1958). Tidak diragukan lagi bahwa mahakarya hasil pemikiran Marx telah menjadi stimulus bagi perkembangan sosiologi, ekonomi, filsafat, sikap kritis, politik, dan budaya. Kehadiran teori-teorinya tidak pernah dirasakan sebagai suatu pemikiran intelektual, tetapi sebagai usaha Marx untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat manusia keluar dari penindasan dan kesewenang-wenangan.

Kehadiran teori Marx dilatarbelakangi oleh konteks sosial yang represif di Prusia—yakni sebuah negara yang menguasai sebagian besar Jerman Utara, dan merupakan salah satu dari puluhan negara yang berdaulat di tanah Jerman pada waktu itu. Negara tersebut telah menghapus semua kebebasan yang diperjuangkan oleh rakyat dalam perang melawan Napoleon Bonaparte.

### 2. Realitas Sosial yang Mendasari Teori

Realitas seperti digambarkan di atas itu membuat Marx selepas dari sekolah Gymnasium semakin membuka wawasannya, dan berpikir bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem reaksional politik? Marx melihat reaksi negara sebagai akibat keterasingan manusia pada dirinya sendiri. Marx berkeyakinan bahwa keterasingan itu sebagai akibat penguasaan hak milik pribadi. Oleh karena itu, hak milik pribadi harus dihapuskan melalui revolusi kaum buruh. Pada saat itu Marx mencapai posisi klasik sosialisme. Ia yakin kalau sosialismenya itu merupakan sosialis ilmiah yang akhirnya disebut sebagai “paham sejarah yang materialistik. Artinya, sejarah dipahami sebagai



dialektika antara perkembangan bidang ekonomi di satu pihak dan struktur di pihak lain.

### 3. Aliran Pemikiran yang Memengaruhi Teori Marx

Teori Marx sebenarnya banyak dipengaruhi oleh tiga aliran pemikiran, yaitu: (1) filsafat klasik Jerman; (2) sosialisme Perancis; dan (3) ekonomi Inggris. Ketika pertama kali Marx berada di Berlin, ia begitu tertarik dengan filsafat sosialnya Hegel. Ini kemudian terbukti dari pemikiran Marx yang mengarah kepada paham Hegelian, yang meliputi: (1) pengetahuan absolut; (2) filsafat sejarah dan negara sebagai gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan yang semakin besar; dan (3) dialektikanya Marx sebagai hasil inspirasi pemikiran Hegel dalam berfilsafat (meskipun pada perkembangan selanjutnya ia juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafatnya Feurbach).

Pada saat Marx melarikan diri menuju Perancis pada akhir tahun 1843, ia selalu bersinggungan dengan para pemikir sosialis. Para pemikir sosialis tersebut di antaranya Babeuf (1760-1797), Saint Simon (1790- ), Robert Owen (1771-1858), Fourier (1772-1837), Cabet (1788-1856), Blanqui (1805-1881), Weitling (1808-1871), Proudhon (1809-1865), Blanc (1811-1882), dan Hess (1812-1875). Mereka inilah yang akhirnya memengaruhi pikiran Marx menjadi sosialis. Ini pula yang kemudian menjadi orientasi dasar pemikiran sosiologisnya sekaligus perjuangannya.

Perhatian Marx pada masalah ekonomi baru benar-benar ia tekuni ketika ia berada di London. Pengaruh dari pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi klasik antara lain Adam Smith (1772-1823) J.B. Say (1767-1823), dan David Ricardo (1772-1823). Pemikiran Marx lebih mendalam lagi pada persoalan ekonomi ketika ia bersahabat dengan Engels, di Paris yang telah memberinya semangat dalam mendalami teori ekonomi. Itulah sebabnya banyak ahli yang muncul berikutnya mengatakan bahwa “tidak ada Marx kalau tidak ada Engels, dan sebaliknya.” Bagi Karl Marx sendiri, ekonomi merupakan faktor penentu dalam perubahan sosial.



#### 4. Latar Belakang Sosial Pencetus Teori

Karl Marx lahir di Kota Trier pada tahun 1818, yaitu sebuah kota di perbatasan Jerman Barat yang saat itu masuk ke dalam bagian negara Prusia. Ayahnya seorang Yahudi dan mempunyai mata pencaharian sebagai notaris yang berhaluan Protestan. Sejak kecil Karl Marx tidak begitu berminat terhadap masalah agama. Pada awalnya, ayahnya pernah menyarankan kepada Marx untuk mempelajari masalah hukum, akan tetapi Marx sendiri lebih tertarik pada sastra khususnya syair. Tanpa sepengetahuan ayahnya ia pergi ke Berlin untuk belajar Filsafat. Di kota Berlin ini ia bertemu dengan Hegel yang kemudian sangat memengaruhi pikiran-pikirannya, dan ia pun beranggapan bahwa “rasionalitas dan kebebasan merupakan nilai tertinggi” dalam hidup manusia.

Di Berlin ia masuk “klub para doktor” dan ia menjadi anggota yang paling radikal. Marx yang sudah mendapat pengaruh pemikiran filsafat Hegel (yang menekankan rasionalitas dan kebebasan) berani melancarkan kritik terhadap sistem politik yang otoriter yang anti-liberalisme, termasuk pengaruh agama Protestan kala itu yang begitu kuat. Oleh karena itu, Marx dan teman-temannya yang sepaham dianggap sebagai Hegel-Muda dan berada pada sayap kiri atas interpretasi resmi kaum Hegelian Kanan yang menganggap Hegel sebagai teolog Protestan dan pendukung negara Prusia.

Pada tahun 1841 Marx dipromosikan sebagai doktor filsafat di Universitas Jena dengan disertasi tentang “Filsafat Demokritos dan Epikurus”. Setelah lulus ia menjadi pemimpin redaksi “*Die Rheinische Zeitung*,” yaitu sebuah koran berpaham liberal yang terbit di kota Koeln. Tetapi karena selalu mendapat kesulitan dari sensor pemerintah Prusia, Marx menanggalkan pekerjaan itu pada tahun 1843. Marx menikah dengan Jenny, putri seorang bangsawan. Pada tahun 1843 ia menulis di *Critique of Hegel's Philosophy of Right* dan dua artikel lain yang dimuat dalam majalah yang sama “*Critique of Hegel's Philosophy of Right: introduction and On The Jewish Question*”.

Di Paris ia bertemu dengan tokoh-tokoh sosialis seperti Proudhon dan juga Friedrich Engels, yang kemudian menjadi teman seumur



hidupnya. Di kota Paris ia sekali lagi berhadapan dengan kaum industriawan, sehingga ia menjadi tokoh sosialis yang menerima anggapan dasar, bahwa sumber segala masalah sebenarnya terletak pada hak milik pribadi. Pada periode ini ada tiga karya penting yang ia hasilkan, yakni: (1) *Philosophical and Economic Manuscripts* (naskah-naskah Paris) yang diterbitkan pada tahun 1928; (2) *The Holy Family*; dan (3) *The German Ideology* yang ditulisnya bersama-sama Engels.

Pada tahun 1845 Karl Marx meninggalkan Paris karena diusir oleh pemerintah Perancis. Ia pindah ke Brussel (Belgia), dan pada tahun 1848 ia diusir lagi dari Brussel dan pindah menetap di London sampai akhir hayatnya. Pada waktu di Brussel ia sempat menuliskan idenya yang terkenal, yakni *Manifesto Komunis*. Di London ia mulai sadar bahwa ia merupakan seorang pemikir dan penemu hukum-hukum yang menentukan perkembangan masyarakat, bukan sebagai seorang konspiratif dan revolusioner. Oleh-oleh yang ia bawa dari Perancis tentang materialisme sejarah adalah sebuah ide yang beranggapan bahwa perkembangan masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan dalam bidang ekonomi, yang ia tulis di bawah judul *A Contribution to the Critique of Political Economics*. Pada tahun 1867 terbitlah buku karya Karl Marx pertama berjudul *Das Capital* sebanyak tiga jilid (tetapi dua jilid diterbitkan oleh Engels setelah Marx meninggal dunia pada tahun 1883 di London).

## 5. Fenomena yang Dijelaskan dan Dipertanyakan

Ada tiga isu sentral yang dijelaskan oleh Marx, yaitu: (1) teori perjuangan kelas; (2) teori materialisme dialektika/historis; dan (3) teori nilai lebih.

### a. Teori Perjuangan Kelas

Konsep berpikirnya berangkat dari konsep pemikiran revolusi. Revolusi merupakan suatu hal yang harus terjadi, sebagai akibat dari kondisi masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang pada akhirnya disebut dengan revolusi struktural, yang berusaha membongkar ideologi dengan mengatakan bahwa sistem sosial tidak dapat diubah. Padahal



secara realistis masyarakat dan strukturnya saling terkait. Pemikiran ini memberi wacana pandangan kritis masyarakat yang tidak berdaya menghadapi kemapanan kekuasaan negara yang menindas kemanusiaan.

Lebih lanjut, Marx menegaskan bahwa emansipasi manusia hanya dapat dicapai dengan perjuangan kelas. Kelas sosial menurut Marx merupakan gejala khas yang terdapat pada masyarakat pascafeodal. Marx kemudian menyebut di dalam struktur kelas ada perbedaan, yakni kelas atas (kaum pemilik modal dan alat-alat industri) dan kelas bawah (kaum proletar, buruh). Dalam masyarakat kapitalis Marx menyebutkan ada tiga kelas sosial, yaitu: (1) kaum buruh, yaitu mereka yang hidup dari upah; (2) kaum pemilik modal (yang hidup dari laba); dan (3) para tuan tanah (yang hidup dari rente tanah). Hubungan antarkelas ini menurut Marx ditandai oleh hubungan eksploitasi, pengisapan, dan hubungan kekuasaan (antara yang berkuasa dan yang dikuasai).

Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam teori kelas, yaitu: (1) Besarnya peran struktural ketimbang kesadaran dan moralitas. Implikasinya bukan perubahan sikap yang mengakhiri konflik, tetapi perubahan struktur ekonomi. (2) Adanya pertentangan kepentingan kelas pemilik dan kelas buruh. Implikasinya mereka mengambil sikap dasar yang berbeda dalam perubahan sosial. Kelas buruh cenderung progresif dan revolusioner, sementara kelas pemilik modal cenderung bersikap mempertahankan *status quo* menentang segala bentuk perubahan dalam struktur kekuasaan. (3) Setiap kemajuan dalam masyarakat hanya akan dapat dicapai melalui gerakan revolusioner. Pemikiran Karl Marx seperti itu semua bermuara pada tujuan akhir yang dicita-citakannya, yakni “masyarakat tanpa kelas.”

#### b. Teori Materialisme Dialektika

Materialisme dialektika merupakan ajaran Marx yang menyangkut hal ihwal alam semesta secara umum. Menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialistik dialektika. Jika teori ini diterapkan pada masyarakat, maka dalam pemikiran Marx dise-



but dengan materialisme historis. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang menentukan struktur masyarakat dan perkembangan dalam sejarah adalah kelas-kelas sosial. Kelas-kelas itu bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupan dengan mengadakan pembagian kerja.

Prinsip dasar teori ini “bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia.” Lebih lanjut Marx berkeyakinan bahwa untuk memahami sejarah dan arah perubahan, tidak perlu memerhatikan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi bagaimana dia bekerja dan memproduksi. Dengan melihat cara manusia itu bekerja dan memproduksi, ia yakin akan menentukan cara manusia itu berpikir.

#### c. Teori Nilai dan Nilai Lebih

Teori ini terdiri dari empat subteori: (1) teori tentang nilai pekerjaan; (2) teori tentang nilai tenaga kerja; (3) teori tentang nilai lebih; dan (4) teori tentang laba. Teori tentang nilai pekerjaan menyangkut bagaimana nilai ekonomis sebuah komoditas dapat ditentukan secara objektif. Nilai ini ditentukan oleh nilai pakai dan nilai tukar. Teori tentang nilai tenaga kerja merupakan upah. Dalam arti buruh mendapat upah yang senilai dengan apa kebutuhan buruh untuk memulihkan kembali tenaganya dan kebutuhan keluarganya.

Teori tentang nilai lebih adalah diferensi antara nilai yang diproduksi selama satu hari oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaganya setelah bekerja. Teori tentang laba merupakan satu-satunya sumber laba yang dimiliki oleh kapitalis yang sangat ditentukan oleh besar kecilnya nilai lebih.

### 6. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Jenis penjelasan yang diberikan dalam teori sosial Marx yaitu berupa penjelasan historis. Teori ini menjelaskan, bahwa semua perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kesadaran kolektif sangat ditentukan oleh basis material atau ekonomis. Oleh karena itu, kegagalan atau keberhasilan suatu masyarakat atau negara sangat ditentukan oleh kegagalan atau keberhasilan di bidang ekonominya.





## 7. Posisi Teori dalam Perdebatan Body and Mind

Sebagaimana diketahui, lahirnya teori Marx ini berangkat dari filsafat, sosialisme, dan ekonomi. Kritik Karl Marx terhadap Hegel adalah dalam hal titik berat pandangannya pada tataran idealisme. Marx menyatakan bahwa perubahan sosial itu tidak ditentukan hanya oleh pemikiran, ide, dan pandangan dunia. Melihat cara Karl Marx merumuskan teori-teorinya, maka dapat disimpulkan bahwa teorinya itu lebih condong pada *body* dari pada *mind* yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran Marx sebelumnya yang baru pada tataran *mind*, yakni menganggap bahwa ide atau pandangan merupakan penentu perubahan.

## 8. Posisi Teori dalam Paradigma Ilmu Sosial

Teori Marx ini memberi paradigma baru dalam tataran paradigma ilmu sosial, karena Marx lebih menekankan praksis, nilai kerja, dan produksi ekonomi. Teori Marx merupakan pandangan kritis atas pemikiran utopis yang tidak bersifat praktis, sehingga jenis realitas dari teori sosial Marx ini dapat dikatakan lebih merupakan realitas objektif dibandingkan realitas subjektif.

## 9. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme vs. Strukturalisme

Kalau dilihat dari pemikirannya yang juga dipengaruhi oleh filsafat Feuerbach yang cenderung materialistik, maka menurut Marx perkembangan sejarah dapat dijelaskan secara pasti dan ilmiah karena didasarkan pada sistem ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pandangan yang menganggap bahwa teori Marx sebagai teori yang bersifat deterministik (sejarah ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, sementara kebebasan manusia tidak memainkan peran dalam perubahan).

## 10. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Posisi teori Marx cenderung positivistik, karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran dialektikanya Hegel yang menganggap bahwa alam semesta itu mengalami perubahan terus-menerus secara dialek-



tik. Metode dialektik ini berlaku tidak hanya pada benda-benda, tetapi juga dalam masyarakat.

### 11. Bias yang Terkandung dalam Teori Sosial Marx

Bias yang sangat menonjol dalam teori Karl Marx adalah determinan yang dianut, juga penekanan pada praksis membuat segala sesuatu yang bersifat materialistik menjadi penting, sedangkan yang nonmaterialistik menjadi kurang penting. Negara, institusi, filsafat, dan pandangan dunia, menurut teori Marx hanyalah dianggap sebagai pelengkap dan oleh karenanya tidak mempunyai peran penentu. Faktor yang sangat menentukan dalam pandangan Marx adalah alat-alat produksi dan hubungan produksi, dan inilah yang sebenarnya menjadi bias dari teorinya itu.

## B. EMILE DURKHEIM (1858 – 1917)

Tokoh paradigma fakta sosial berikut ini memiliki nama besar dalam pemikiran sosiologi klasik di Eropa yang hidup antara tahun 1858 sampai tahun 1917. Apa dan bagaimana pemikiran Durkheim tentang sosiologi, berikut ini adalah penjelasannya.

### 1. Konteks Sosial dan Politik yang Melatarbelakangi Teori

Konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya teori Emile Durkheim adalah adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa masyarakat tidaklah selalu homogen dan juga tidak drastis dalam perkembangannya. Dari sini, Durkheim melihat bahwa pecah dan berkembangnya kesatuan-kesatuan sosial merupakan akibat langsung dari berkembangnya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana diceritakan di bagian awal bukunya, ia risau dengan banyaknya fenomena bunuh diri, sementara opini yang ada dalam masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa “bunuh diri itu adalah akibat penyakit kejiwaan.”

Konteks sosial itulah yang mengawali Durkheim menemukan berbagai teori besarnya. Pada awalnya Durkheim tidak menerima opini itu begitu saja, karena ia melihat bahwa data statistik yang dikum-



pulkan di negara yang tinggi angka sakit jiwanya seperti Norwegia, jumlah orang yang melakukan bunuh diri justru berada pada urutan keempat. Oleh karena itu, dengan menggunakan data statistik tentang bunuh diri di beberapa negara serta dipadukan dengan metode analisis yang kritis, akhirnya Durkheim sampai pada kesimpulan bahwa kasus bunuh diri harus dikaji dari konteks struktur sosial masyarakat dan negara itu.

## 2. Realitas Sosial yang Mendasari Teori

Realitas sosial yang mendasari teori Durkheim adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor “kesenangan” dan masyarakat terbentuk akibat adanya “kontrak sosial.” Tetapi sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu, yaitu adanya unsur-unsur yang “mengatur” terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terikat kontrak serta menentukan sah tidaknya sebuah kontrak itu. Aturan yang berada di luar kontrak itu menurut Durkheim adalah *collective consciousness*. Berangkat dari anggapan itulah, maka pola pemikiran Durkheim tampak pada kerangka teoretisnya tentang adanya “jiwa kelompok” yang memengaruhi kehidupan individu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di dalamnya ada dua jenis kesadaran, yakni *collective consciousness* dan *individual consciousness*.

Durkheim beranggapan bahwa tingkah laku hidup seseorang adalah akibat adanya “pemaksaan,” aturan perilaku yang datang dari luar individu dan memengaruhi pribadinya. Jika kemudian seseorang menentang (dalam bentuk tingkah laku) dan berlawanan dengan tingkah laku kolektif, maka kesepakatan kolektif itulah yang akan menantangnya. Dengan begitu, maka suatu kelompok manusia yang semula tidak bersifat agresif, kemudian bisa menjadi agresif setelah menjadi bagian dari suatu kerumunan (kelompok) seperti pada kasus demonstrasi anarkis.



### 3. Aliran Pemikiran yang Memengaruhi Teori

Aliran pemikiran yang sangat memengaruhi pemikiran Durkheim yaitu “sosiologistik”. Dengan latar belakang aliran pemikiran yang dianut tersebut, Durkheim menerapkan pola analisis dengan menggunakan interpretasi biologistik dan psikologistik terhadap masalah-masalah sosial yang ada pada saat itu. Durkheim juga dipengaruhi oleh pemikiran yang berusaha menerapkan metode yang benar-benar *scientific*, dan ia berangkat dari berbagai fakta dan data yang dikumpulkan secara detail. Semua teorinya didukung oleh fakta-fakta sosial yang konkret. Berdasarkan kenyataan itulah, maka teori-teori yang berhasil dirumuskannya sesungguhnya didasarkan pada kajian yang bersifat positivistik.

### 4. Latar Belakang Sosial Emile Durkheim

Emile Durkheim lahir di Lorraine Perancis Timur 15 April 1858, merupakan sosiolog Perancis pertama yang berlatar belakang akademik sosiologi. Disertasi doktornya di Universitas Sorbon dengan judul aslinya *De la division du travail social* atau *On the Division of Social Labor* diterbitkan tahun 1893 sebagai buku pertama. Buku keduanya yaitu *The Rules of Sociological Method* tahun 1895; sedangkan buku ketiga yang terkenal berjudul *Suicide* dan buku terakhirnya *The Elementary forms of Religious life* (Sorokin, 1982).

### 5. Fenomena Sosial yang Dipertanyakan dan Dijelaskan

Fenomena sosial yang dijelaskan oleh Durkheim pada prinsipnya berusaha menjawab persoalan-persoalan tentang “jiwa kelompok” yang memengaruhi derajat integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal yang secara eksplisit diperdebatkan antara lain: (1) Mengapa manusia dengan kepentingan dan perbedaan masing-masing dapat berintegrasi dalam satu kesatuan? (2) Mengapa manusia yang hidup semakin mandiri tetapi sekaligus semakin tergantung ia satu dengan yang lainnya? (3) Bagaimana mungkin dapat terjadi, ketika orang semakin individualistik justru semakin tergantung kepada orang lain dan menjadi semakin solider?



Durkheim kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pembagian kerja sosial yang semakin intens, maka muncullah kebutuhan akan spesialisasi peran atau pekerjaan yang kian spesifik. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa (contoh: dari penulis) “seorang insinyur arsitek menjadi begitu tergantung pada keahlian seorang psikolog dalam mengatasi masalah kenakalan anaknya” atau “seorang dokter ahli bedah menjadi begitu tergantung kepada keahlian seorang montir mobil, ketika kendaraannya tiba-tiba mogok di jalan raya,” dan sebagainya. Kenyataan ini pula yang ia simpulkan sebagai bentuk-bentuk munculnya solidaritas mekanis maupun organik dalam masyarakat.

## 6. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Jenis penjelasan yang diajukan oleh Durkheim termasuk dalam paparan mengungkapkan metode berpikir sosiologis. Menurutnya, metode berpikir sosiologi tidak hanya mengandalkan dasar pemikiran logika filosofis, tetapi akan lebih eksis dan unggul jika mengangkat data konkret dan gejala-gejala sosial sebagai fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan empiris yang cermat.

Menurut Durkheim, ilmu akan lebih objektif jika dimulai dari persepsi yang sama. Objek kajiannya didefinisikan secara jelas dan tegas dalam bentuk ciri-ciri eksternal dan harus dilakukan dengan seobjektif mungkin. Durkheim juga menyatakan bahwa agama adalah ibarat suatu sistem yang disatukan untuk diimani, dipraktikkan, dan bersifat sakral. Agama dalam masyarakat itu sendiri diyakini bersifat suci dan bukan duniawi, meskipun menurutnya semua agama di Bumi ini telah “tercemar” oleh budaya, sebagai akibat adanya interpretasi yang dilakukan oleh para pemuka dan pemeluknya. Agama juga merupakan perwujudan “kesadaran kolektif dan Tuhan adalah lambang “idealisme”.

## 7. Posisi Teori dalam Perdebatan Body vs. Mind

Posisi teori sosial Emile Durkheim sudah masuk pada tataran *body*, hal ini dapat dicermati dari penjelasan Durkheim yang mengatakan bahwa gejala-gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat itu



bukan semata-mata hanya ide dari manusia untuk membentuk nilai atau norma—melainkan kehidupan merupakan perkembangan dari gagasan-gagasan yang tidak hanya bisa dipahami sebagai realitas eksternal, tetapi juga dapat menyentuh perasaan moral individual.

## 8. Posisi Teori dalam Paradigma Ilmu Sosial

Posisi teori Durkheim dalam paradigma ilmu sosial masuk pada paradigma fakta sosial. Hal ini sangat nyata, tampak dari konsep teornya yang terkenal tentang “jiwa kelompok” yang dapat memengaruhi kehidupan individu. Dalam pandangan Durkheim, kesadaran kolektif dan kesadaran individual itu sangat berbeda sebagaimana perbedaan antara kenyataan sosial dengan kenyataan psikologis murni. Masyarakat terbentuk bukan karena sekadar kontrak sosial, melainkan lebih dari itu atas dasar kesadaran kelompok (*colective conciousness*).

Setidaknya dijumpai dua sifat kesadaran kolektif, yakni *exterior* dan *constraint*. *Exterior* merupakan kesadaran yang berada di luar individu, yang sudah mengalami proses internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan moral, agama, nilai (baik-buruk, luhur mulia), dan sejenisnya. *Constraint* adalah kesadaran kolektif yang memiliki daya ‘paksa’ terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika hal itu dilanggar. Ada dua tipe *constraint* yang ia sebutkan, yakni: a) represif; dan b) restitutif. Dengan begitu, kesadaran kolektif itu tidak lain adalah konsensus masyarakat yang mengatur hubungan sosial.

## 9. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme vs. Strukturalisme

Fenomena sosial yang dipertanyakan Durkheim telah mendapat jawaban, bahwa manusia dalam sifatnya yang *constraint* akan bersangkut paut dengan dua sifat aturan, yakni restitutif dan represif. Aturan represif berada dalam lingkup segmen seperti keluarga, klan, atau maraga. Aturan itu pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjamin kehidupan yang teratur dan baik, yang sifatnya mekanistik. Oleh karena itu, kesadaran semacam ini disebut juga sebagai solidaritas mekanis. Di sisi lain Durkheim juga mengakui



bahwa akibat adanya dinamika masyarakat, maka masyarakat homogen semacam itu akan mengalami perkembangan.

Pecahnya kesatuan masyarakat yang semula homogen itu sebagai akibat perkembangan pembagian kerja sosial, telah mendorong individu-individu warga masyarakat menjadi lebih bersifat otonom. Dari kondisi ini timbullah aturan-aturan baru yang berlaku bagi para individu yang otonom itu, misalnya aturan bagi para dokter, para guru, buruh atau pekerja, konglomerat, dan sebagainya, yang bersifat restitutif. Lebih lanjut, kemandirian akibat pembagian kerja sosial itu timbulah kesadaran individual yang lebih mandiri, tetapi sekaligus menjadi tergantung antara satu sama lainnya, karena masing-masing individu tersebut hanyalah merupakan bagian dari suatu sistem pembagian kerja sosial yang *integrated* dan lebih makro. Dengan begitu terjadilah pergeseran ikatan solidaritas dari solidaritas yang bersifat mekanis menjadi solidaritas yang bersifat organik.

## 10. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Menjadi semakin jelas, bahwa teori sosial yang dikemukakan oleh Durkheim berbasis pada teori positivisme yang bertumpu pada data empiris. Seperti yang dicontohkan dalam analisisnya tentang kasus bunuh diri. Diyakini bahwa manusia bunuh diri bukanlah akibat dari penyakit kejiwaan seperti yang selama ini dikatakan dalam teori psikologi, juga bukan akibat imitasi atau alkoholisme. Tetapi, kasus bunuh diri haruslah dipelajari dengan menghubungkan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan.

Metode yang digunakan Durkheim adalah metode positivisme dengan mengumpulkan bukti berupa data-data empiris kuantitatif dari berbagai negara. Dari temuannya, ternyata beberapa negara tertentu jumlah angka bunuh diri menunjukkan angka yang stabil (misalnya Perancis), dan negara yang memiliki angka sakit jiwa paling tinggi (Norwegia) justru tidak menunjukkan angka bunuh diri yang signifikan.

Tampaklah bahwa hampir semua teori yang dirumuskan oleh Durkheim didukung oleh fakta-fakta empiris yang konkret seperti



itu. Bahwa teori yang telah dicetuskan itu sangat jelas berdasarkan kajian positivistik dan empirikal. Pada level ini Durkheim boleh dikategorikan sebagai pemikir *post-positivistik* pada zamannya. Meskipun demikian, sebagai karya ilmiah, teori-teori Emile Durkheim akan selalu menampakkan dua sisi berseberangan, yakni berupa keunggulan di satu sisi sekaligus sisi kelemahannya. Kelemahan teori Durkheim tampak dari kekurangtajaman analisisnya tentang kondisi psikologi yang ia katakan dapat memengaruhi pola budaya sekelompok masyarakat, dan kaitan antara budaya dengan struktur sosial suatu masyarakat. Dalam realitas kekinian, perkembangan masyarakat modern tidak hanya linier, tetapi lebih dari itu, dapat bersifat siklus dan holistik.

### 11. Bias yang Terkandung dalam Teori-teori Durkheim

Tidak disangsikan lagi bahwa Durkheim adalah penganut positivisme sejati. Padahal, menurut Michael Polanyi (1996) dalam bukunya yang berjudul *Segi Tak Terungkap Ilmu Pengetahuan* menyatakan, bahwa pemahaman mengenai realitas manusia tidak selamanya bisa diukur secara kuantitatif, banyak ilmu pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan metode-metode pengukuran justru merupakan hakikat dari fakta.

Pandangan Durkheim juga bertentangan dengan pemikiran Popper yang menolak paham positivism. Bagi Popper positivisme hanya mendasarkan diri pada kriteria dapat tidaknya suatu teori dibenarkan secara empiris. Popper tidak yakin dengan hasil pengamatan, dan ia menunjuk buktinya dengan observasi angsa putih. Dalam observasi ini Popper menunjukkan berapa pun jumlah angsa itu tidak bisa disimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih, karena dengan satu kali observasi saja terhadap kenyataan angsa yang berbulu oranye atau hitam, bisa menyangkal pendapat itu.

### C. TALCOTT PARSONS (1902- 1979)

#### 1. Konteks Sosial dan Politik yang Melatarbelakangi Teori

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap teori tidak muncul begitu saja akan tetapi selalu terkait dengan suasana zaman yang berkembang.





Durkheim, Weber, dan Marx berkembang karena merebaknya industrialisasi di Eropa Barat abad ke-18. Pada waktu Parsons hidup, ia berada di tengah gempuran Marxisme yang menentang secara langsung terhadap kebobrokan kapitalisme. “Pembenaran” secara tidak langsung terhadap kenyataan itu ialah adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an. Pada saat seperti itulah muncul sebuah karya dari Alvin Gouldner berjudul *The Coming Crisis of Western Sociology*, yang merupakan serangan terhadap kelompok Marxisme yang mengutuk kapitalisme.

Seperti diketahui, bahwa teori Marxian bertumpu pada konflik yang dianggapnya sebagai inti dinamika masyarakat. Suatu masyarakat tanpa konflik berarti tidak ada dinamika. Penjelasan yang dihasilkan ialah penjelasan konflikual mengenai kehidupan masyarakat. Hal inilah yang membedakannya dengan penjelasan fungsional yang lebih menekankan pada keteraturan sosial. Dalam situasi pertentangan teori seperti itu, Parsons lebih memilih karier intelektualnya dengan mengedepankan persoalan tindakan sosial, fungsionalisme tradisional, dan teori sistem umum.

## 2. Realitas Sosial yang Mendasari Teori

Realitas sosial yang berkembang yang mendasari teori Parsons, yaitu realitas sosial yang didasari pada hasil pemikiran beberapa ahli. Dapat disebutkan di antaranya, yakni pemikiran a-historis dari teoretisi struktural fungsional. Misalnya, Lensky dalam menganalisis pelapisan sosial, Coser hanya mengkaji konflik sebagai satu-satunya bentuk asosiasi. Kemudian, pada tataran sosiologi klasik, misalnya Auguste Comte yang mendasarkan analisisnya pada hukum tiga tahap—periode teologis ke metafisik dan ke positif, Durkheim membahas dinamika masyarakat yang bergerak secara evolusioner, yaitu dari solidaritas mekanis ke bentuk solidaritas organis, di mana terbentuk pembagian kerja yang lebih besar serta perubahan dalam sistem hukum. Kemudian di Italia, Pareto membahas tentang sirkulasi elite lewat periode inovasi yang lebih konservatif, dan Weber membahas peningkatan sifat-sifat rasional masyarakat modern.



Dari sini, Parsons melihat bahwa teori-teori tersebut bersifat parsial, sebab kurang “saling menyapa.” Masing-masing ahli menganggap teorinya yang paling relevan. Dari situasi pemikiran sosial seperti ini, maka Parsons memikirkan sebuah teori umum yang komprehensif yang berusaha menjelaskan tindakan sosial yang bersifat utuh dan menyeluruh.

### 3. Aliran Pemikiran yang Memengaruhi Teori Parsons

Parsons sangat tertarik kepada pemikiran empat ilmuwan terkemuka pendahulunya, yaitu sosiolog Emile Durkheim, ekonom Alfred Marshall, sosiolog Engineer Vilfredo Pareto, dan sosiolog-ekonom Max Weber. Ketertarikannya terhadap karya Marshall, Weber, dan Pareto ini menghasilkan sebuah buku yang berjudul *The Structure of Social Action*. Buku tersebut merupakan sintesis dari empat karya sarjana tersebut yang menyangkut masalah tata sosial ekonomi, yang bertujuan untuk mengetengahkan studi tentang teori sosial, bukan beberapa teori sosial. Parsons menginginkan sebuah teori yang umum (*general theory*) dan bukannya teori parsial (*partial theory*). Ia juga bermaksud menyatukan berbagai aliran yang berbeda yang lahir di abad ke-19 dan 20 ke dalam suatu sintesis yang komprehensif. Untuk maksud ini, maka ia secara saksama memikirkan teori-teori tindakan sosial yang bersifat “holistik” dan sekaligus bersifat “individualistik”.

Pengaruh Weber terhadap Parsons sangat mengedepan terkait dengan tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain (tindakan sosial). Tindakan itu tidak dilihat dari serangkaian alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan seperti ini hanya dapat dipahami dari serangkaian makna yang terkandung di dalamnya, yang diberikan oleh individu dalam interaksi itu.

Pemikiran Durkheim juga berpengaruh terhadap pandangannya. Berbeda dengan Durkheim yang juga menjelaskan tentang “kesadaran” yang dimulai dari “kesadaran kolektif—melampaui batas individu-individu,” sedangkan Weber melihat justru kesadaran individu kemudian menjadi kesadaran umum. Parsons, melihat keduanya sebagai sesuatu yang dapat dikompromikan, yaitu teori mengenai ide dan tindakan.



Pareto juga berpengaruh terhadap pemikiran Parsons, yaitu tentang konsep sistem sosial. Di antara pengaruhnya yang nyata adalah mengenai konsep keseimbangan sistem, dan oleh sebab itu Parsons berpikiran bahwa sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau stabilitas. Keteraturan sosial merupakan norma dari suatu sistem. Jika kemudian terjadi kekacauan, maka akan ada proses dan mekanisme penyesuaian dan akhirnya akan kembali kepada keadaan normal. Salah satu bukunya yang terbit tahun 1951 ialah *The Social System*, yang merupakan pengembangan dari konsep Pareto tersebut. Bukunya yang lain, *Durkheim's Contribution to the Theory of Integration on Social System*, merupakan pengaruh secara langsung pemikiran Durkheim terhadap Parsons tentang integrasi yang berfungsi menyatukan masyarakat secara damai.

Pemikiran Weber juga berpengaruh terhadap teori Parsons, dan ini terbukti dari bukunya tentang *The Structure of Social Action* menyangkut konsep tindakan sosial yang rasional. Konsep ini semula dikembangkan oleh Weber untuk membedakan antara tindakan sosial dengan yang bukan tindakan sosial. Tindakan sosial selalu ditujukan kepada orang lain (tindakan rasional bertujuan). Misalnya, jika ada orang melempar batu ke sungai dengan tujuan untuk mengagetkan orang lain yang ada di situ, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan sosial, sedangkan jika tidak dimaksudkan begitu, maka tindakan itu tidak dikategorikan sebagai tindakan sosial.

#### 4. Latar Belakang Sosial Parsons

Talcott Parsons dilahirkan tahun 1902 di Colorado Springs, Colorado. Parsons berasal dari latar belakang keluarga dengan kehidupan agama dan intelektual yang mapan. Ayahnya adalah seorang guru besar dan pemimpin perguruan tinggi, serta seorang Menteri Kongregasi. Parsons memperoleh pendidikan *undergraduate* dari Amherst College, dan kemudian melengkapi *graduate*-nya di London School of Economic. Parsons kemudian pindah ke Heidelberg, Jerman, pada saat Weber berada dalam masa akhir posisinya di Heidelberg sebelum meninggal lima tahun kemudian, setelah Parsons berada di Heidelberg.



Oleh karenanya, Weber banyak memengaruhi pemikiran Parsons karena keterlibatannya dalam diskusi-diskusi di rumah Weber tersebut. Bahkan ketika Parsons menyusun tesis doktoralnya juga meniru cara kerja Weber ketika hidup.

Parsons menjadi instruktur di Harvard tahun 1927, dan meskipun pernah bekerja di tempat lain tetapi ia menghabiskan waktunya di Harvard sampai meninggalnya, pada tahun 1979. Kariernya di dunia akademik tidak berjalan cepat dan lancar, bahkan sampai kira-kira tahun 1939. Dua tahun berikutnya, ia menerbitkan karyanya *The Structure of Social Action*, sebuah buku yang tidak hanya memperkenalkan teori-teori sosiologi umum akan tetapi juga mendasari kerja besar Parsons dalam mengembangkan teorinya. Setelah itu, karier Parsons berjalan sangat cepat sehingga ia menjadi pimpinan Departemen Sosiologi di Harvard tahun 1944, dan dua tahun kemudian memimpin Innovative Departemen of Social Relation, yang tidak hanya memasukkan disiplin sosiologi tetapi juga variasi-variasi ilmu lainnya. Pada tahun 1949 ia terpilih menjadi Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika. Dan, pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an berkat tulisannya tentang *The Social System* telah mengangkat namanya dan menjadikannya sebagai figur dominan dalam masyarakat sosiologi Amerika.

Parsons tersingkir dari posisi itu karena munculnya kritik dari sayap radikal sosiologi Amerika pada waktu itu. Parsons telah menjadi seorang politisi konservatif, dan teorinya juga kelihatan sangat konservatif dan hanya sedikit dalam mengelaborasi skema kategorisasinya. Pada tahun 1980-an, yang terjadi ialah kemunduran kecenderungan untuk mengembangkan teori Parsons, tidak hanya di Amerika tetapi juga di hampir seluruh dunia. Akan tetapi, kemunduran itu tidak sekadar dipengaruhi karena posisi teorinya yang konservatif tetapi juga karena munculnya teori-teori baru neo-Marxian.

## 5. Fenomena yang Dijelaskan dan Dipertanyakan

Fenomena yang dijelaskan oleh Parsons adalah teori struktural fungsional. Pokok persoalan yang dikaji adalah adanya keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Namun demikian, ia juga mengkaji



tindakan sosial yang rasional dan sistem sosial. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, ia mengkaji konsep tindakan sosial rasional. Basis dasar dari teori aksi Parsons ini yaitu apa yang dinamakan unit aksi, yang memiliki empat komponen. Keempat komponen tersebut antara lain, eksistensi aktor, kemudian unit aksi yang terlibat tujuan, lalu situasi-kondisi, dan sarana-sarana lainnya, yaitu norma dan nilai-nilai.

Iniilah yang kemudian dikenal sebagai konsep voluntarisme dalam teorinya Parsons. Inti persoalannya adalah kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan. Perilaku sukarela tersebut memiliki elemen pokok, yaitu: (1) aktor sebagai individu; (2) aktor yang memiliki tujuan yang ingin dicapai; (3) aktor yang memiliki berbagai cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut; (4) aktor yang tengah dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat memengaruhi pemilihan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut; (5) aktor yang dibatasi oleh nilai-nilai, norma dan ide-ide dalam menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan (6) perilaku, termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang tata cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan setelah dipengaruhi oleh ide dan situasi kondisi yang ada.

Voluntarisme adalah konsep yang diperdebatkan posisinya di dalam jajaran paradigma teori sosial. Ritzer menganggapnya sebagai interaksionisme simbolik yang berada dalam paradigma definisi sosial. Akan tetapi, menurut Poloma, bahwa masalah utama bagi Parsons sebagai ahli teori makro bukanlah tindakan individu, melainkan norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku. Oleh karena itu juga, ada yang berpendapat bahwa konsep *Voluntaristic of Actins* ini memiliki dimensi dengan sosiologi berskala kecil, seperti yang dinyatakan oleh John F. Scot. Tetapi, ada juga yang menyatakan bahwa teori Parsons ini bergerak dari sosiologi berskala kecil ke skala besar. Perdebatan ini, bagaimanapun juga mengindikasikan betapa rumitnya memahami teori Parsons yang berkeinginan menyatukan



teori-teori yang berspektrum individualis dan strukturalis.

Aspek lain yang dikaji Parsons adalah sistem sosial sebagaimana ter-cover dalam bukunya *The Social System* yang terbit tahun 1951. Karya ini dipengaruhi oleh Pareto tentang sistem sosial. Sistem sosial menurutnya ialah sebagai satu dari tiga cara di mana tindakan sosial bisa diorganisasi. Di samping itu juga terdapat dua sistem tindakan lain yang saling melengkapi, yakni sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol serta sistem kepribadian para pelaku individual.

Terkait dengan sistem sosial itu, Parsons mengembangkan variabel pola yang dapat dipakai untuk menjelaskan kategorisasi tindakan atau untuk mengklasifikasikan tipe peranan dalam sistem sosial. Variabel pola itu antara lain: 1) efektif vs. netralitas efektif (orang bertindak untuk memuaskan kebutuhan emosi atau netral); 2) orientasi diri vs. orientasi kolektif (mengejar kepentingan diri atau kepentingan kolektif), 3) universal vs. partikular (bertindak berdasar kriteria umum atau ukuran tertentu); 4) kualitas vs. performan (status tertutup atau status terbuka, perolehan atau prestasi); 5) spesifitas vs. difusi (situasi terbatas atau *segmented*).

Dalam kerangka ini dikenal konsep sibernetika Parsons, yang mengandaikan adanya mekanisme kelangsungan sistem sosial pada masyarakat. Caranya ialah setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki, yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem personal dan sistem kultural ke dalam sistem sosial. Dalam hal ini, sistem kultural menjadi landasan sistem sosial, kemudian sistem sosial menjadi landasan individual, dan kemudian sistem individual menjadi landasan sistem organisme biologistik.

Agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung, maka terdapat fungsi atau kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan, serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan. Dari premis ini, secara deduktif Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional, yakni: *latent maintenance*, *integration*, *goal attainment*, dan *adaptation* yang



kita kenal dengan teori AGIL itu.

*Latent maintenance* menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem yang sesuai dengan beberapa aturan atau norma dalam masyarakat. *Integration* adalah koordinasi atau kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya menjadi fungsional.

*Goal attainment* adalah masalah pemenuhan tujuan itu tergantung pada prasyarat yang dimiliki. *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem dalam menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan, serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Dengan pernyataan lain, prasyarat fungsional itu antara lain: (1) setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*adaptation*); (2) setiap sistem harus memiliki alat untuk memobilisasi sumbernya agar dapat mencapai tujuan, dan dengan demikian akan mencapai gratifikasi (*goal attainment*); (3) setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagian dan membangun cara-cara yang berpautan dengan deviasi atau harus mempertahankan kesatuannya (*integration*); 4) setiap sistem harus mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang (*pattern maintenance*).

## 6. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Parsons menginginkan suatu spektrum teori yang umum yang melingkupi skala mikro dan makro. Hal ini menyebabkan para ahli kesulitan untuk menempatkannya ke dalam paradigma mana sebenarnya perspektif teorinya itu. Ritzer, misalnya menempatkannya di dalam paradigma definisi sosial, sebab teori ini menempatkan manusia sebagai aktor kreatif yang memiliki tujuan sendiri dan memiliki cara-cara tersendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah sebabnya, Parsons membedakan antara tindakan (*action*) dengan perilaku (*behavior*). Tindakan menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas dan menghayatan diri individu, sedangkan perilaku menyatakan secara tidak langsung kesesuaian secara mekanik antara perilaku (*respons*) dan rangsangan dari luar (*stimulus*). Adapun di sisi lain ada juga yang menempatkannya ke dalam paradigma fakta sosial. Tokoh yang



berpandangan seperti itu adalah, Zamroni, meskipun dia sebenarnya tetap menerima anggapan seperti yang dimaksud dalam pandangan George Ritzer. Tetapi tampaknya, pengelompokan di dalam paradigma ini lebih didasari oleh pengelompokan teoretis Parsons yang dianggap sebagai teori struktural fungsional.

## 7. Posisi Teori dalam Perdebatan Body dan Mind

Meskipun banyak aliran pemikiran yang memengaruhi jalannya pemikiran teoretis Parsons, namun secara tegas dapat dinyatakan bahwa teorinya berada dalam lingkup ide memengaruhi tindakan. Atau dengan kata lain berada dalam lingkup *mind* (ide) sebagaimana pemikiran ahli teori fungsional lainnya.

Di sini tampak bahwa pengaruh Hegel sebagai aliran filsafat sosial sangat kentara. Hegel menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau perilaku manusia pada dasarnya bermuara dari ide (*mind*). Dia menyatakan dalam *Phenomenology of Mind*, “pada hakikatnya tampak memperlihatkan bahwa segalanya dapat dimengerti, dan kalau dapat dimengerti maka segalanya dapat dipahami, dan apa yang dapat dipahami juga tentu dapat diterima.” Dengan demikian, segala sesuatu (empiris) adalah bersumber dari ide manusia tentang sesuatu itu.

## 8. Posisi Teori dalam Menjelaskan Paradigma Ilmu Sosial

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, Parsons berkeinginan untuk menyatukan teori yang terkotak-kotak. Oleh karena itu, tampak juga agak sulit untuk membuat kategorisasi di mana sebenarnya posisi teori tersebut dalam paradigma ilmu sosial. Namun, secara umum dapat dinyatakan bahwa sebagai *general theory* ada tarik-menarik di antara realitas subjektif—di mana aktor memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan tindakan—dan bergerak ke arah realitas objektif—di mana tindakan tersebut didasari oleh norma yang berlaku umum atau berangkat dari lingkup realitas mikro ke makro, inilah sebabnya mengapa muncul anggapan lain dalam perdebatan itu bahwa teori aksi Parsons sebetulnya merupakan jembatan penghubung antarparadigma dalam ilmu sosial.





## 9. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme dan Strukturalisme

Teori-teori yang ada selama ini menurut Parsons masih bersifat parsial sebagaimana disinggung di muka, karena kurang “saling menyapa.” Masing-masing menganggap teorinya yang paling relevan. Dari situasi teoretis seperti ini, maka Parsons menginginkan sebuah teori umum yang komprehensif yang berusaha menjelaskan hal-hal yang bersifat utuh. Berkaitan dengan hal itulah maka kajian teoretis Parsons agak sulit dipetakan dan diposisikan, apakah ia termasuk berspektrum individualisme atau strukturalisme, ataukah di antara keduanya.

## 10. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Metode yang digunakan oleh Parsons ialah berangkat dari interpretatif, yaitu usaha untuk memahami tindakan individu bergerak ke survei-survei sebagaimana yang digunakan dalam paradigma positivistik sebagai tuntutan lingkup realitas makronya.

## 11. Bias yang Terkandung dalam Teori Parsons

Ada anggapan yang menyatakan bahwa problem teoretis yang dijumpai dalam teori Parsons adalah membingungkan dan kacau balau. Kritik tersebut bersumber dari orientasi teori Parsons yang semula berorientasi mikro, akan tetapi sebelum karyanya berakhir ia bergerak ke teori struktural fungsional yang berorientasi makro. Ini juga yang telah menyebabkan banyak ahli sulit menempatkan posisi teori Parsons tersebut ke dalam paradigma yang ada.

Bias yang lain ialah ketidaksempurnaan teorinya dari teori aksi ke teori struktural fungsional, bahkan juga terkesan melompat-lompat tanpa ada kesinambungan. Parsons misalnya, tidak pernah merekonsiliasi teori aksinya Weber dengan teori struktural fungsionalnya Durkheim.

## D. ROBERT KING MERTON (1910 – )

### 1. Konteks Sosial dan Politik yang Melatarbelakangi Teori

Konteks sosial yang terjadi pada abad ke-17 di Inggris, yaitu adanya berbagai perilaku menyimpang, kerja birokrasi, persuasi media massa, dan komunikasi di masyarakat secara kompleks yang tidak terantisipasi



(*unanticipated consequences*) oleh keadaan politik dan pemerintahan secara baik. Itu semua dijadikan lahan pengkajian teoretisnya, meskipun kemudian melebar pada pengkajian mengenai sumber-sumber sosial.

## 2. Konteks Sosial yang Mendasari Teori

Konteks sosial yang mendasari teori Robert K. Merton mirip dan sebanding dengan konteks sosial yang terjadi pada zaman Talcott Parsons.

Itu pula sebabnya gaya teorinya masih mirip dengan teori Parsons yang abstrak dan agak muluk (*grandiose*).

Dalam membangun teori sosialnya, dia juga banyak tertarik terhadap keadaan struktur sosial dan fungsi sosial sebagaimana organisme kehidupan, yang dia amati di dalam kehidupan sosial di sekelilingnya. Tak pelak lagi maka teori yang dihasilkannya disebut sebagai teori struktural fungsional.

Begitu juga dalam karyanya *The Self Fulfilling Prophecy* (*Ramalan yang Terpenuhi Karena Kekuatannya Sendiri*), yang merupakan penyempurnaan pernyataan klasik W.I. Thomas. Hal ini dipengaruhi oleh situasi yang ia hadapi saat itu. Merton menyatakan, bahwa pada mulanya *The Self Fulfilling Prophecy* adalah anggapan yang keliru tentang definisi situasi, yang kemudian menimbulkan suatu perilaku baru dengan akibat konsepsi yang pada mulanya keliru namun akhirnya menjadi kenyataan.” Dia mencontohkan kegagalan bank selama tahun 1929 karena disebabkan oleh definisi situasi yang menyebabkan orang meninggalkan bank yang diikuti dengan bangkrutnya bank tersebut.

Masa studinya banyak diperkenalkan dengan pemikiran sosial di Eropa oleh P.A. Sorokin, terutama Talcott Parsons mengenai struktur aksi sosial (*structure of social action*). Selain itu, pemikiran dari L.J. Handerson, seorang biokimia yang mengajarkannya mengenai disiplin ilmu penelitian ekonomi, E.F. Gay yang mengajarkannya mengenai pengembangan ekonomi, dan akhirnya George Sarton yang mengajarkannya untuk bekerja pada perpustakaan Widener Harvard. Lebih khusus pengalamannya dalam menekuni sosiologi adalah dari Emile Durkheim dan George Simmel.



### 3. Aliran Pemikiran yang Memengaruhi Teori

Robert K. Merton menapaki karier sosiologinya ketika sosiologi Amerika didominasi oleh dua tokoh besar yang berseberangan, yakni Paul Lazarsfeld yang teguh pada sosiologi empiris dan Parsons yang merupakan tokoh dengan pendirian teguh pada sosiologi teoretis. Dari keadaan inilah R.K. Merton bersikukuh untuk mengintegrasikan kedua pemikiran yang berseberangan tersebut (Dortier, dalam Cabin & Jean F. Dortier (ed.), 2008: 111). Dengan gaya bercanda Merton menentang kedua tokoh itu dan mengatakan, “*Kami tahu kalau hal itu benar, tetapi kami tidak tahu kalau hal itu bermakna,*” sedangkan dengan menirukan yang lain Merton menyatakan, “*kami tahu kalau itu bermakna, tetapi kami tidak tahu kalau hal itu benar.*” Merton memiliki pandangan yang berbeda dan memilih mengembangkan model *midle range theories*. Latar belakang pemikiran Merton ini juga banyak dipengaruhi oleh buah pikiran Durkheim yang banyak menjadi kajian Merton, seperti pembagian kerja (*division of labor*) dan beberapa kasus pengujian metode seperti kasus bunuh diri, agama, moral pendidikan yang sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan pemikirannya. Minatnya yang sangat besar untuk mengembangkan teori-teori sosial khususnya struktur sosial, perubahan budaya telah membantunya untuk memahami organisasi sosial dan karakter dari suatu masyarakat.

Meskipun di dalam biografinya tidak menyebut nama Weber sebagai orang yang cukup berpengaruh terhadap dirinya, namun dengan melihat karya disertasi doktoralnya sangat kelihatan bahwa dia tertarik untuk menyelidiki Protestanisme seperti halnya Weber. Dia meneliti hubungan antara Protestanisme dengan perkembangan ilmu. Di dalam kaitannya dengan berbagai tulisan *British Royal Society*, dia menemukan beberapa elemen etika Protestan terkandung di dalam dunia kegiatan keilmuan dan sangat membekas pada sikap-sikap ilmuwan terhadap pekerjaan mereka.

Pengaruh Weber juga dapat dilihat pada kajiannya tentang birokrasi. Dia berkesimpulan bahwa: a) Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisasi secara rasional dan formal. b) Ia meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas. c) Kegiatan-



kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan organisasi. d) Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis. e) Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hierarkis. f) Berbagai kewajiban serta hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci. g) Otoritas pada jabatan dan bukan pada orang. h) Hubungan antara orang-orang dibatasi secara formal. i) Struktur birokratis ini ternyata memberikan pengaruh pada individu, sehingga terjadi kedisiplinan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Struktur memiliki sifat untuk menekan dan mengarahkan perilaku manusia.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Merton untuk meneliti kelompok etnis dan efek sosial evaluasi untuk *in group* dan *out group*. Di dalam bukunya yang lain tentang *Anomie*, dia juga menegaskan dampak lembaga terhadap masyarakat. Di sini dia berusaha untuk menunjukkan bahwa sejumlah struktur sosial memberikan tekanan yang jelas terhadap orang-orang tertentu di dalam masyarakat tersebut, sehingga terdapat kelakuan yang konformis. Anomi ialah suatu keadaan di mana antara tujuan kultural dan semua kelembagaan untuk mencapainya tidak berjalan seiring.

#### 4. Latar Belakang Sosial Robert K. Merton

Merton dilahirkan pada tahun 1910. Dia memiliki banyak guru di dalam bidang yang tampaknya berlainan. Pitirim Sorokin ialah salah seorang gurunya pada saat ia belajar di tingkat *graduate* yang mengajarkan mengenai pemikiran sosial Eropa. Tetapi, Merton tidak pernah mengikuti cara berpikir Sorokin sebagaimana mahasiswa lainnya. Pada akhir tahun 1930-an, Parsons yang tidak lain adalah gurunya, telah menghasilkan karya tentang *Structure of Social Action*. Kemudian, L.J. Handerson, seorang ahli biokimia dan kadang-kadang juga berpikir sosiologi, mengajarkannya mengenai metode penelitian. Selain itu juga ada nama E.F. Gay, seorang ahli sejarah ekonomi mengajarkannya mengenai cara kerja dari perkembangan ekonomi yang kemudian dia menjadi dekan sejarah ilmu sosial. George Sarton, guru lainnya, memberikan kesempatan untuk menjadi asistennya dan mengikuti



*work shop* di Widener Library of Harvard. Melalui dia, Merton belajar sosiologinya Emile Durkheim dan George Simmel. Di samping itu juga ada beberapa nama lain seperti disinggung di atas, yakni Paul F. Lazarsfeld dan Gilbert Murray (seorang sosiolog sensitif humanis).

Dalam perkembangan pemikirannya, ketika memperoleh master, ia lebih dekat ke pemikiran Durkheim ketimbang pemikiran Sarton, meskipun ia diajar langsung oleh Sarton tetapi ia hanya membaca karya Emile Durkheim. Dalam pandangannya, Durkheim mengubah subjek yang menjadi penelitiannya, dimulai dengan studinya tentang *division of labor*, ia melihat Durkheim meneliti secara sosiologis secara berturut-turut dalam objek yang tidak berhubungan, yaitu *suicide*, *religion*, *moral education*, dan *socialism*. Adapun Sarton lebih mengkaji aspek historis keilmuan sehingga menghasilkan lima volume buku yang berjudul *Introduction (Sic) to the History of Science*. Dalam hal ini, Merton tertarik untuk mengkaji teori sosiologi tentang struktur sosial dan perubahan budaya yang dapat mengantarkan pemahamannya mengenai pranata sosial dan karakter kehidupan pada suatu masyarakat sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pengkajian terhadap berbagai subjek sangat diperlukan.

Mulai awal tahun 1940, saat Merton bekerja di Universitas Kolumbia dan bekerja sama dengan Paul K. Lazarsfeld dalam sejumlah penelitian empiris di Biro Penelitian Terapan, Merton telah membentuk kepekaannya yang besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empiris dan proses berteori seperti yang dilakukan oleh Parsons.

Pada tahun 1950-an, dia memfokuskan pada pengembangan teori sosiologi dari unit dasar struktur sosial; seperangkat peran dan status dan model peranan orang untuk menyeleksi tidak hanya latihannya, tetapi juga sumber nilai yang diadopsi sebagai basis dari penilaian diri yang akhirnya menghasilkan *the theory of reference group*. Dia juga bekerja sama dengan George Reader dan Patricia Kendall untuk melakukan studi sosiologis berskala besar dari pendidikan medis, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana mungkin terdapat perbedaan jenis dari ahli fisik (dokter) padahal mereka disosialisasikan pada pendidikan yang sama. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh



perbedaan karakter sebagai tipe dari aktivitas pekerjaan. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, dia kembali untuk mengkaji tentang struktur sosial dan interaksinya dengan struktur kognitif. Melalui studi ini, orientasi utamanya ialah pada hubungan antara teori sosiologi, metode pengkajian, dan substansi penelitian empiris. Selain itu, melalui konsekuensi yang telah terantisipasi dari tindakan sosial bertujuan, dia menghasilkan beberapa tulisan. Salah satunya ialah *The Self- Fullfilling Profecy*. Di samping itu, dia juga menghasilkan karya-karya yang terkait dengan analisis struktur sosial dengan referensi khusus tentang status, peran, konteks struktural pada sisi fungsional, fungsi manifes dan fungsi laten, disfungsi, fungsi alternatif dan mekanisme sosial pada sisi fungsional.

## 5. Fenomena Sosial yang Dipertanyakan

Analisis fungsional Merton berbeda dengan lainnya. Dia menekankan agar setiap konsep sosiologi memiliki batasan yang jelas, sehingga dapat diuji dalam hubungannya dengan konsep lainnya (*testable proposition*).

Ada beberapa postulat yang diangkat oleh Merton. *Pertama*, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. *Kedua*, fungsionalisme universal, bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. *Ketiga*, *indispensability* ialah dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiel dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Berbagai postulat ini tidak begitu saja dianggap benar, akan tetapi perlu diuji secara empiris dalam keterkaitannya untuk menghasilkan teori. Misalnya, suatu kelompok fungsional terhadap kelompok lain, akan tetapi juga disfungsional bagi kelompok lainnya. Oleh karena itu, di dalam melihat sebuah kelompok dan fungsi di



dalamnya perlu dilihat dari segi positif dan negatifnya, atau dengan kata lain bahwa seorang peneliti tidak boleh terlena kepada elemen integratifnya saja, tetapi juga harus melihat elemen disintegratif di dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sulit terjadi integrasi masyarakat secara tuntas, ada disfungsi dan fungsi positif dari elemen kultural dan ada alternatif fungsional yang perlu dipertimbangkan.

Konsep fungsional yang juga dikembangkan oleh Merton sebagaimana telah diungkap di depan ialah fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes ialah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi laten ialah fungsi yang tidak diharapkan. Keduanya di dalam struktur dan perubahan struktur, secara analitis ada perbedaan antara level manifes dan laten di dalam sebuah struktur sosial.

Bagi Merton, pendekatan fungsional bukanlah suatu teori komprehensif dan terpadu, melainkan suatu strategi untuk analisis. Strategi ini merupakan suatu titik tolak dalam memberi bimbingan, tetapi teori-teori taraf menengah yang dikembangkan dari titik tolak ini harus mampu berada dalam kesatuannya sendiri yang didukung oleh data empiris yang sesuai. Pada akhirnya teori tahap menengah ini dapat disatukan ke dalam suatu kerangka teoretis yang lebih luas.

Pertanyaan yang perlu dijawab untuk suatu teori *middle range* antara lain:

- a. Apakah teori itu dapat digunakan untuk menghasilkan hipotesis-hipotesis prediktif yang dapat diuji secara empiris dalam berbagai konteks atau tidak.
- b. Apakah teori itu dapat menjelaskan keseragaman secara memuaskan dalam hubungan antarvariabel-variabel dalam bermacam-macam konteks atau tidak.
- c. Apakah hasil dari teori taraf menengah ini dapat sesuai dengan pengertian yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari suatu orientasi teori fungsional dan/atau teoretis abstrak lainnya.
- d. Apakah suatu teori dapat digunakan untuk menghasilkan hipotesis-hipotesis empiris.



Berkaitan dengan pertanyaan di atas, Merton memperkenalkan beberapa kualifikasi dan pengecualian asumsi implisit yang kelihatannya sudah digunakan oleh para fungsionalis sebelumnya. Seperti halnya Parsons, Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial di mana tindakan itu berakar. Dalam hal ini Merton tidak menaruh perhatian pada konsekuensi-konsekuensi sosial objektif yang muncul dari tindakan itu, tetapi apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial itu untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektivitas individu.

Misalnya, suatu persyaratan dasar untuk suatu masyarakat adalah bahwa para anggotanya tetap ada dengan jalan reproduksi. Apabila para anggota sudah memperoleh anak, belum tentu mereka dengan sadar didorong oleh keinginan untuk menjamin bertahannya masyarakat untuk jangka waktu yang lama. Motivasi mereka lebih bersifat pribadi, seperti keinginan untuk menyatakan cinta, untuk mengalami kepuasan seksual, untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan sosial, dan untuk mengalami kepuasan memiliki anak secara emosional. Dalam mengikuti upacara agama, juga individu itu mungkin tidak didorong oleh suatu keinginan apa pun untuk memenuhi fungsi *laten pattern maintenance* ataupun untuk meningkatkan solidaritas sosial. Sebaliknya, motif-motif itu bersifat pribadi seperti memenuhi kewajiban agama, memperoleh keselamatan atau ketenteraman jiwa atau menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mapan.

Pembedaan antara motif dan fungsi ini dinyatakan Merton dalam pembedaan yang tajam antara fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah konsekuensi-konsekuensi objektif yang menyumbang pada penyesuaian terhadap sistem itu yang dimaksudkan dan diketahui (*recognized*) oleh partisipan dalam sistem itu; fungsi-fungsi laten adalah hal yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui.

Merton juga melakukan kritik terhadap dalil-dalil analisis fungsional yang dikembangkan oleh para antropolog seperti Malinowski dan Radcliffe Brown. Dalil *pertama* adalah fungsi integrasi dari suatu masyarakat. Menurut Merton itu hanya berlaku untuk suatu masyarakat





yang bersahaja atau masyarakat yang tradisional. Sebaliknya, hal itu tidak berlaku dalam masyarakat yang sudah mapan dan memiliki hubungan yang kompleks. Dalil *kedua*, fungsionalisme universal, fungsi positif yang diberikan oleh kehidupan sosial dan budaya untuk memelihara kesatuan masyarakat, menurut Merton malah justru yang ditemukan dalam masyarakat keadaan yang sebaliknya. Tidak semua struktur, kebiasaan, sistem kepercayaan gagasan, mempunyai fungsi positif. Dalil *ketiga* adalah unsur sosial budaya yang harus ada argumentasinya adalah bahwa semua aspek standar sosial tidak hanya memiliki fungsi positif, tetapi juga menunjukkan bagian-bagian yang diperlukan secara keseluruhan. Dalam hal ini Merton menyatakan bahwa kita harus mengakui bahwa terdapat berbagai macam struktur dan fungsi alternatif yang ditemukan dalam masyarakat.

## 6. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Merton mengemukakan bahwa para ahli sosiologi harus lebih maju lagi dalam meningkatkan disiplinnya dengan mengembangkan teori-teori taraf menengah (*theories of middle range*) daripada teori-teori besar, sekurang-kurangnya pada taraf kematangan disiplin. Teori taraf menengah didefinisikan sebagai: “Teori yang terletak di antara hipotesis kerja yang kecil tetapi perlu, dan berkembang semakin besar selama penelitian dari waktu ke waktu, dan usaha yang mencakup semuanya untuk mengembangkan suatu teori terpadu yang akan menjelaskan semua keragaman yang diamati dalam perilaku sosial organisasi sosial dan perubahan sosial.”

Teori taraf menengah pada prinsipnya digunakan dalam sosiologi untuk membimbing penelitian empiris. Dia merupakan jembatan penghubung antara teori umum mengenai sistem sosial yang terlalu jauh dari kelompok perilaku tertentu, organisasi, dan perubahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamati, dengan gambaran terperinci secara teratur mengenai hal-hal tertentu yang tidak digeneralisasi sama sekali.

Merton beranggapan bahwa analisis struktural dipengaruhi oleh Durkheim dan Marx, dan ditindaklanjuti dengan gerakan yang dikenal



sebagai strukturalisme. Analisis struktural yang dikehendaki dapat digunakan untuk analisis fenomena pada tataran mikro dan makro. Secara makro dapat digunakan untuk menganalisis distribusi otoritas, kekuasaan, pengaruh, dan prestise sosial, sedangkan secara mikro digunakan untuk menganalisis pilihan antara alternatif-alternatif sosial yang terstruktur. Ia digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat mendalam. Bedanya dengan analisis makro ialah analisis struktural dapat digunakan untuk menggeneralisasikan persoalan yang diketahui, misalnya konflik sosial yang didasari oleh diferensiasi.

### 7. Posisi Teori dalam Perdebatan *Body* dan *Mind*

Di sisi lain dalam perbincangan *body* vs. *mind*, maka dapat dinyatakan bahwa Merton tergolong ke dalam posisi *mind* (ide) menentukan terhadap perilaku. Dengan demikian, studinya merupakan kajian terhadap realitas empiris atau realitas objektif sehingga ruang lingkup kajian lebih cenderung ke makro-objektif.

### 8. Posisi Teori dalam Paradigma Ilmu Sosial

Ada beberapa catatan yang dapat diungkapkan terkait dengan posisi teori Merton dalam perdebatan teori sosial. Berdasarkan filsafat sosialnya, teori ini tergolong ke dalam filsafat positivistik, sebab yang dikaji ialah fakta objektif dari kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam melihat fungsi sosial dia beranggapan bahwa yang dikaji ialah hal-hal yang *observable*, dan bukan disposisi psikologis. Oleh karena itu, dilihat dari paradigmanya, maka termasuk berada dalam paradigma fakta sosial. Hal ini dapat dimaklumi mengingat anggapannya bahwa struktur sosial bersifat mengekang dan memengaruhi terhadap perilaku manusia. Adapun penjelasan teoretisnya ialah penjelasan fungsional, artinya dia melihat sebagaimana Durkheim dan Spencer, dia melihat bahwa masyarakat merupakan suatu bangunan yang tersusun dan berbagai subsistem yang antara satu dengan lainnya saling terkait dan mendukung.



## 9. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme vs. Strukturalisme

Secara keseluruhan, karya Merton mencerminkan kepekaannya yang lebih besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empiris dan proses berteori daripada karya Parsons. Robert K. Merton dikenal sebagai salah seorang pakar aliran fungsionalisme, karena kemampuannya dalam melakukan modifikasi terhadap pendekatan fungsional. Menurut Merton, pendekatan fungsional merupakan salah satu kemungkinan untuk mempelajari perilaku sosial. Pendekatan yang semula dogmatis dan eksklusif dilengkapi dengan berbagai kualifikasi, sehingga agak berkurang kekakuan dan keketatannya. Salah satu kualifikasi itu adalah pembedaan antara fungsi dan disfungsi, yang memungkinkan melakukan telaah terhadap perubahan sosial yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Demikian juga halnya dengan perbedaan fungsi manifes dan fungsi laten, yang memungkinkan penelitian terhadap lembaga-lembaga sosial aktual dan interpretasi tugas-tugasnya menurut warga masyarakat, oleh karena lembaga sosial mempunyai aneka ragam fungsi. Oleh karena itu, posisi teorinya lebih condong berada dalam spektrum strukturalisme.

## 10. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Teori-teori sosial yang dikemukakan oleh Merton berbasis pada teori fungsional Parsons dan lebih condong pada positivisme serta memilih mengembangkan model *middle range theories*. Latar belakang pemikiran Merton ini juga banyak dipengaruhi oleh Durkheim yang banyak menjadi kajian Merton, seperti; pembagian kerja (*division of labor*) dan beberapa kasus pengujian metode seperti kasus bunuh diri, agama, moral pendidikan yang sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan pemikirannya. Minatnya yang sangat besar untuk mengembangkan teori-teori sosial khususnya struktur sosial, perubahan budaya yang membantunya untuk memahami organisasi sosial dan karakter dari suatu masyarakat.



## 11. Bias yang Terkandung dalam Teori Merton

Merton mengembangkan paradigma teorinya tahun 1948, dengan sebuah paparan mengenai teori fungsionalisme struktural. Teorinya kemudian segera menarik minat para teoretisi di tengah mulai redupnya pengaruh Parsons, yang dianggap terlalu umum sehingga sulit dikaji di lapangan. Merton menawarkan teori struktural fungsional yang *middle range*. Namun demikian, ada beberapa catatan tentang teori ini, yaitu: teori ini sangat konservatif sehingga lebih menekankan pada *status quo*, sehingga mengabaikan adanya konflik sosial yang ada dalam tataran realitas sosial.

Teori Merton ini juga sarat dengan persoalan status dan peran yang secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma lembaga-lembaga yang memelihara norma tersebut. Manusia tidak bebas untuk melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Menghadapi kecaman tersebut, Merton kemudian mengembangkan pokok kajian struktur sosial “pilihan di antara alternatif yang terstruktur secara sosial.” Dengan cara ini, maka ia mengikuti Parsons tentang konsep voluntarisme. Akan tetapi, di balik semua kritikan terhadapnya, Merton justru menyatakan bahwa analisis struktural fungsional yang ditawarkannya hanyalah salah satu di antara analisis dalam ilmu sosial yang demikian beragam.





# BAB 2

## PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pemuatan teori integrasi, konsensus, atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral.

Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach*, atau *structural-functional approach* (fungsional struktural/fungsionalisme struktural) (Nasikun, 1995).

Pada mulanya, teori fungsional struktural diilhami oleh para pemikir klasik, di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Mereka dengan gamblang dan terperinci menuturkan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis *phenomene* sosial dan kultural.

## B. KARAKTERISTIK PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL

Teori ini menekankan keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan (*equilibrium*).

Menyangkut hal ini, Wallace dan Alison mengatakan bahwa:

*“Functionalists, as we have seen, look at societies and social institutions as system in which all the parts depend on each other and work together to create equilibrium. They do not deny the existence of conflict; but they believe society develops ways to control it, and it is these that analyze. Conflict theorists perception of society could hardly be more different. Where functionalists see interdependence and unity in society. Conflict theorists see an area in which groups fight for power, and the control of conflict simply means that one group is able, temporarily, to suppress its rivals. Functionalists see civil law, for example, as way of increasing social integration; but conflict theorists see civil law as a way of defining at the expense of others. (Wallace and Alison, 1986: 62)*

*Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain (Ritzer, 1992: 25).

Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka



struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat (Ritzer, 1992: 25).

Menurut Lawer, teori ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu: (1) masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi; (2) hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik; (3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis; penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh; (4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisasi lewat proses pelembagaan; (5) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian; (6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi; dan (7) sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama (Zamroni, 1988: 105-6).

Sementara itu, Pieere L. Van dan Berghe dalam *“Dialectic and Fungtionalism : Toward a Synthesis”* mengungkapkan tujuh ciri umum perspektif ini, yaitu:

1. Masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan, selaku sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Hubungan sebab dan akibatnya bersifat jamak dan juga timbal balik.
3. Sistem sosial senantiasa dalam keadaan keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu.
4. Integrasi sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisasi melalui mekanisme institusionalisasi.
5. Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang perubahan revolusioner.





6. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi, dan melalui penemuan-penemuan internal.
7. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama (Lawer H., 1989).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kalangan fungsional memandang masyarakat manusia itu sebagai berikut:

- a. Masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
- b. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.
- c. Setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus-menerus, karena hal itu fungsional. Contoh: sekolah, mendidik anak-anak, mempersiapkan para pegawai, mengambil tanggung jawab orangtua murid terutama pada siang hari, dan sebagainya.
- d. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat. Di contohkan bahwa, di daerah perbatasan Amerika terdapat beberapa penginapan dan hanya sedikit orang yang mampu menyenangkannya, timbullah suatu pola sikap yang penuh keramah-tamahan. Keluarga yang tengah bepergian pada waktu malam merupakan tamu yang disambut hangat oleh setiap penduduk. Mereka membawa berita-berita dan pelipur kebosanan, sementara itu tuan rumah menyediakan makanan dan penginapan. Tetapi dengan semakin bertambah mantapnya daerah perbatasan, pola keramah-tamahan tidak lagi penting, sehingga kadarnya menurun. Jadi, pola-pola perilaku timbul untuk memenuhi kebutuhan dan akan hilang apabila kebutuhan itu berubah (Horton & Chester L. Hunt, 1987).



Masyarakat menurut model konsensus, oleh Cohen digambarkan sebagai berikut: (1) Di dalam masyarakat terdapat norma dan nilai-nilai. Norma dan nilai merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. (2) Konsekuensi kehidupan sosial adalah komitmen. (3) Masyarakat pasti kompak. (4) Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas. (5) Kehidupan sosial didasarkan pada kerja sama dan saling memerhatikan dan saling membutuhkan. (6) Sistem sosial tergantung pada konsensus. (7) Masyarakat mengakui adanya otoritas yang absah. (8) Sistem sosial bersifat integratif. (9) Sistem sosial cenderung bertahan (Lawang, 1986).

Kesembilan hal di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Norma dan nilai sangat penting dalam model konsensus, karena nilai selalu berhubungan dengan yang diinginkan manusia, sehingga sangat memengaruhi perilaku manusia. Nilai berhubungan dengan norma. Norma diciptakan dalam rangka mempertahankan suatu nilai tertentu. Sebagaimana diketahui, di dalam pendekatan fungsional terdapat prinsip yang paling penting, yaitu adanya saling keterkaitan antarbagian-bagian dalam suatu sistem. Apabila saling keterkaitan ini diabaikan, maka mekanisme sistem itu akan terganggu (Sutaryo, 1992: 9).

Kemampuan suatu bagian untuk mengaitkan dirinya dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan disebut konsensus. Dengan demikian, konsensus merupakan kesepakatan bersama antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus (Sutaryo, 1992: 9) kemudian menjadi kesepakatan bersama antar-bagian-bagian.

Dalam penjelasan Parsons, konsensus merupakan persyaratan fungsional. Adapun pada penjelasan Durkheim, norma diajarkan kepada anak-anak melalui proses sosialisasi, agar anak dapat hidup dengan mudah dalam masyarakat. Dengan proses sosialisasi, orangtua berusaha agar sistem yang ada itu tetap dipertahankan, karena masih dianggap dapat menjamin hubungan sosial. Usaha mempertahankan sistem sosial yang berlaku, dalam bahasa Talcott Parsons disebut sebagai *laten pattern maintenance*.

Konsekuensi kehidupan sosial adalah komitmen. Komitmen dapat diartikan sebagai “janji untuk bertanggung jawab dan setia menepati



janji.” Jadi, dalam hubungannya dengan sistem sosial, begitu orang masuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu, dia harus benar-benar mengikuti sistem sosial tersebut. Kalau tidak, maka dia akan mengalami kesulitan untuk hidup bersama dengan teman-teman lainnya. Jika kita ingin hidup seperti orang Jawa, maka haruslah mengikuti nilai-nilai dan norma mereka. Hal inilah yang disebut dengan komitmen.

Konsep *adaptation* dan *integration* dalam sosiologi Talcott Parsons dapat menjelaskan hal tersebut dengan baik. Tingkat integrasi seseorang terhadap sistem sosial dapat diukur dengan melihat tingkat komitmennya. Semakin tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap suatu sistem tertentu, semakin tinggi pula tingkat integrasi yang dicapainya. Komitmen berhubungan dengan tindakan yang merupakan konsekuensi dari norma dan nilai. Segi lain dari komitmen adalah tindakan yang konsekuensi yang muncul dari dalam hati tanpa paksaan (Sutaryo, 1992: 10).

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat, maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian (Zamroni, 1988: 27).

Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk interaksi dikembangkan sehingga melembaga. Pola-pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi



sistem sosial yang dimiliki. Caranya dengan mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial (lihat: Zamroni, 1988: 29).

Menurut Parsons, mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural, seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Dengan proses ini anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Mekanisme kontrol juga mencakup sistem sosial, sehingga perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat bisa ditekan. Mekanisme kontrol ini, antara lain: a) pelemagaan, b) sanksi-sanksi, c) aktivitas ritual, d) penyelamatan pada keadaan yang kritis dan tidak normal, e) pengintegrasian kembali agar keseimbangan dapat dicapai kembali, dan f) pelemagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial (Zamroni, 1988).

### C. MASYARAKAT DALAM MODEL INTEGRASI DAHRENDORF DAN DURKHEIM

Ralf Dahrendorf di samping dikenal sebagai ahli dalam perspektif konflik, dia juga memiliki andil dalam mengembangkan perspektif integrasi antara lain memahami masyarakat. Pokok-pokok pikiran Dahrendorf antara lain: (1) setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng; (2) setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik; (3) setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki satu fungsi, yaitu menyumbang pada bertahannya sistem itu; dan (4) setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggotanya (Veeger, 1985: 213).

Turner dalam mengkritisi buku karya E. Durkheim yang berjudul *The Division of Labor in Society* menjelaskan, bahwa: pertama, “*Society was to be viewed as an entity in itself that should be distinguished from, and was not reducible to, its constituent parts. In conceiving of society as a reality, sui generis, Durkheim in effect gave analytical priority to the social whole.*” Masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan (*entity*). Sebagai suatu kesatuan, masyarakat itu bisa dibedakan dengan bagian-bagiannya, namun tidak bisa dipisahkan. Dengan menganggap masyarakat sebagai suatu “*realitas sui generis*” (realitas yang tak dapat



diragukan eksistensinya), maka Durkheim memberikan prioritas analisisnya pada masyarakat secara holistik.

Kedua, *“While such an emphasis by itself did not necessarily reflect organism inclinations, Durkheim, in giving causal priority to the whole, viewed system parts as fulfilling basic functions, needs, or requisites of that whole.”* Formulasi ini menegaskan, bahwa bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan utama dari sistem secara keseluruhan.

Ketiga, *“The frequent use of the notion “functional needs” is buttressed by Durkheim’s conceptualization of social systems in terms of “normal” and “pathological” states. Such formulations, at the very least, connote the view that social systems have needs that must be fulfilled if “abnormal” states are to be avoided.”* Formulasi ini mengandung pengertian bahwa *“functional needs”* digunakan oleh Durkheim dalam terminologi *“normal”* maupun *“patologis”*. Oleh karena itu, kebutuhan suatu sistem sosial harus terpenuhi agar tidak terjadi keadaan yang abnormal.

Keempat, *“In viewing systems as normal and pathological, as well as in terms of functions, there is the additional implication that systems have equilibrium points around which normal functioning occurs.”* Formulasi ini menyebutkan bahwa, dengan memandang sistem sebagai sesuatu yang normal dan patologis seperti yang dimaksud dalam terminologi fungsional, maka pada taraf tertentu, suatu sistem akan menunjukkan keadaan ekuilibrium dan dapat berfungsi secara normal (Turner, 1978: 25-6).

#### **D. PANDANGAN ROBERT K. MERTON TENTANG FUNGSIONALISME**

Dengan mengacu pada pemikiran Max Weber, William I. Thomas, dan Emile Durkheim, Merton berupaya memusatkan perhatian pada struktur sosial. Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiga postulat itu sebagai berikut.

**Pertama,** kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai,



tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur.

**Kedua**, postulat fungsionalisme universal. Postulat ini menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.”

**Ketiga**, postulat *indispensability*, bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiel, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.”

Ketiga postulat itu bagi Merton memiliki tiga kelemahan: (1) tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi masyarakat yang benar-benar tuntas; (2) kita harus mengakui adanya disfungsi maupun konsekuensi fungsional yang positif dari suatu elemen kultural; dan (3) kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam setiap analisis fungsional (Poloma, 2000: 26).

Merton menolak postulat-postulat fungsional yang masih mentah. Ia menyebarkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal, dan *indispensability*. Ia juga menyebarkan konsep disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional serta fungsi manifes dan laten, yang dirangkai dalam satu paradigma fungsionalis.

Menurut Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di dalamnya terdapat pola kegiatan, hierarki, hubungan formal, dan tujuan organisasi.

Analisis paradigma Merton antara lain: 1) *The functional unity postulat*, dengan konsep integrasi sosial; 2) *The issue of functional universality*, dengan konsep manifes dan laten, konsep *net balance of consequences*, 3) *The issue indispensability*, dengan konsep alternatif fungsi. Paradigma Merton bersifat fungsional, disfungsional, dan



fungsional universal. Hal ini menjadikan posisi individu tergantung pada sistem/struktur.

Struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifes dan fungsi laten. Pada posisi ini, Merton lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan peristiwa-peristiwa yang subjektif. Merton mengkritik bahwa asumsi fungsionalisme cenderung konservatif dan lebih terpusat pada struktur sosial daripada perubahan sosial. Ia menginginkan adanya keseimbangan fungsional. Merton menunjukkan bahwa struktural fungsional memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan nonkonformis ketimbang konformis. Hal ini secara implisit memperlakukan individu sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma atau aturan masyarakat individu yang tidak kreatif dalam aktivitasnya karena ia tidak independen. Merton lebih moderat karena ia menempatkan aktor sebagai entitas yang memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak sekadar robot yang otomatis, yang tindakannya ditentukan oleh struktur. Bagi Merton, struktur itu terintegrasi dan norma yang ada mengendalikan perilaku individu.

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Merton pada tahun 1948 mendapat beberapa kritik. *Pertama*, teori Merton masih bersifat konservatif yang terpusat pada struktur sosial daripada perubahan sosial. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Meskipun teori Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa fungsionalisme struktural cenderung menjadi suatu teori sosial yang bersifat konservatif.

*Kedua*, dengan menggunakan kekuatannya yang bersifat deskriptif, pendekatan Merton terlalu memusatkan diri pada struktur masyarakat dan memberikan tekanan pada *status quo*, oleh sebab itu teori fungsionalisme Merton lebih merupakan studi tentang utopia daripada tentang realitas.



### E. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme

Di dalam menyajikan perkembangan intelektual, Parsons membuat kerangka tiga fase yang berbeda:

1. Parsons 1, terdiri dari tahap-tahap perkembangannya atas teori voluntaristik dari tindakan sosial. Hal ini ia kembangkan dalam bukunya yang berjudul *"The Structure of Social Action"* tahun 1937.
2. Parsons 2, pembebasan dari kekangan teori tindakan sosial yang mengarah struktural fungsional ke dalam pengembangan suatu teori tindakan yang lebih umum yang berisikan konsep-konsep sistem dan kebutuhan-kebutuhan sistem yang sangat penting. Karya-karyanya antara lain: *The Social and Toward a General Theory of Action*, 1951; *Economy and Society*, 1956.
3. Parsons 3, mengenai model sibernetika dari sistem-sistem sosial (Hamilton, 1990). Bukunya antara lain: *Societies*, 1967; *The System of Modern Society*, 1971; *Sociological Theory and Modern Society*, 1967; *Politics and Social Structure*, 1971; *Social System and Evolution of Action Theory*, 1977; dan *Action Theory and the Human Condition*, 1978.

Pada awalnya Parsons mengkritik paham utilitarianisme yang berpendapat bahwa individu sebagai aktor yang atomistik, cenderung berlaku rasional, dan memunculkan ide-ide konstruksionisme dalam integrasi sosial. Parsons lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial, hingga melahirkan teori tindakan sosial atau *social action*. Posisi individu dalam sistem sosial selalu memiliki status dan perannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada.

Selain itu, Parsons juga mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut mengalami saling pertukaran dengan lingkungannya sehingga terjadi aksi sosial. Dalam menjalankan peran tersebut, terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan berpasangan antar-ego dan alter yang telah dikembangkan. Pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial.





Ada dua mekanisme dalam proses ini, yaitu: (1) mekanisme sosialisasi; (2) mekanisme kontrol sosial. *Pertama*, mekanisme sosialisasi merupakan proses sosial melalui mediasi antarpola kultural (nilai-nilai, kepercayaan, bahasa dan simbol-simbol). Seluruh nilai, kepercayaan, bahasa, dan simbol ditanamkan pada sistem personal. Lewat proses ini individu akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada.

*Kedua*, mekanisme kontrol, mencakup proses status dan peran yang ada di masyarakat yang diorganisasi ke dalam sistem sosial. Tujuan mekanisme ini adalah mereduksi ketegangan yang muncul. Mekanisme kontrol ini meliputi pelembagaan, sanksi, aktivitas ritual, penyelamatan keadaan kritis, pengintegrasian menuju keseimbangan, dan pelembagaan kekuasaan.

Parsons juga mengembangkan cara berpikir individu yang non-logis dan irasional dengan mencetuskan teori aksi sukarela. Teori aksi sukarela lebih menempatkan individu sebagai *agency* daripada sebagai bagian dari struktur. Keputusan subjektif selalu ada, akan tetapi dibatasi oleh nilai, norma, serta situasi. Hubungan struktur dan individu dapat dijelaskan melalui peran individu sebagai aktor terhadap integrasi dalam suatu sistem. Interaksi antar-individu perlu hadirnya institusionalisasi atau struktur yang mengatur pola relasi antar-aktor.

Jadi, elemen dasar teori aksi sukarela antara lain: (1) aktor atau individu; (2) tujuan; (3) seperangkat alternatif; (4) dipengaruhi nilai, norma dan ideologi; (5) keputusan subjektif; (6) peran individu sebagai aktor terhadap integrasi dalam suatu sistem, dan (7) perlu adanya institusionalisasi struktur yang mengatur pola relasi antar-aktor.

Parsons juga mengenalkan teori AGIL untuk menjelaskan hierarki pengendalian sibernetika. Hierarki sibernetika dapat dicermati melalui energi dan integrasi, yang meliputi sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisasi, subsistem dalam kesatuan holistik. Tindakan individu dan tindakan sosial yang dapat diamati menekankan pada sistem dan kondisi energi.

Struktur dalam pandangan Parsons bersifat fungsional. Hal inilah yang dijelaskan dalam teori AGIL (*adaptation, goal attainment,*



*integration, laten pattern maintenance*). Adaptasi, berarti keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungan dengan baik. *Goal attainment*, berarti persyaratan fungsional yang muncul dari pandangan bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya. Integrasi, berarti persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antarpada anggota dalam sistem sosial. *Laten Pattern Maintenance* (pola pemeliharaan), merupakan konsep latensi yang menunjukkan berhentinya interaksi.

Paradigma utama dari sistem tindakan menurut Parsons, antara lain: kognitif, *cathetic*, evaluatif dari orientasi motivasional. Argumen-tasi Parsons tentang sistem sosial meliputi: (1) sistem kekerabatan; (2) stratifikasi sosial; (3) teritorial dan tekanan; dan (4) agama dan integrasi nilai.

Teori Parsons mengalami perubahan dan dinamika. Ia mengem-bangkan paradigma perubahan evolusi dengan penekanan pada proses diferensiasi. Parsons juga memperkenalkan media antarhubungan (*generalized media of interchange*). Model ini dilaksanakan ke dalam medium ekonomi yang difokuskan pada fenomena materi uang. Namun demikian, ia lebih memfokuskan pada media simbolik pertukaran.

Senada dengan pendapat di atas, Nasikun juga mengemukakan bahwa anggapan dasar yang mendasari pemikiran Talcott Parsons: (1) masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain; (2) hubungan pengaruh memengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik; (3) sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis dalam menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar; (4) sekalipun disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu; (5) perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi



secara gradual, melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi; (6) pada dasarnya, perubahan sosial timbul dan terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*), pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat; dan (7) faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Di dalam setiap masyarakat, menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan dan prinsip dasar tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisasi sosial budaya itu sendiri (Nasikun, 1995).

Ada beberapa kritik pokok yang ditujukan pada fungsionalisme tradisional yang diterapkan Talcott Parsons, yaitu: (1) terlalu melebih-lebihkan kesatuan, stabilitas, dan keharmonisan sistem sosial; (2) terlalu meyakini adanya karakter yang positif terhadap seluruh institusi sosial; (3) merupakan pendekatan sistem sosial nonhistoris; (4) menganggap bahwa institusi-institusi yang ada sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan; (5) gagal menggambarkan adanya perubahan sosial.

## F. SISTEM SOSIAL

Sistem sosial adalah suatu sistem tindakan yang terbentuk dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang dengan tidak secara kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Interaksi sosial terjadi karena adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat dengan menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Ekuilibrium terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial, di antaranya mekanisme



sosialisasi dan pengawasan sosial.

Ciri-ciri sistem antara lain: (1) tiap bagian dari sistem saling tergantung satu sama lain dan memberikan konsekuensi secara bervariasi; (2) hubungan antarbagian merupakan hubungan saling ketergantungan hingga membentuk keteraturan, dan (3) keseimbangan tidak terbatas meskipun terjadi keanekaragaman (Zeitfin, 1998).

Kondisi minimal yang diperlukan dalam sebuah sistem sosial antara lain: (1) orientasi pelaku terhadap situasi dilatarbelakangi oleh motivasi mewujudkan ekuilibrium; (2) harapan timbal balik yang ajek di antara pelaku; (3) membagi dan sama-sama merasakan makna tentang apa yang sedang terjadi.

Tidak jauh berbeda, Ritzer (1992) juga mengungkapkan tujuh ciri sistem, yaitu: (1) sistem mempunyai *property of order*, dan bagian-bagian saling tergantung; (2) sistem cenderung mengarah *self-maintaining order*, atau keseimbangan; (3) sistem menjadi statis; (4) ciri satu bagian sistem mempunyai dampak pada bagian-bagian lainnya; (6) alokasi dan integrasi dua proses fundamental adalah *given-state* dari sistem keseimbangan; (7) sistem cenderung memelihara diri dan cenderung mengubah sistem dari dalam.

Sesuai dengan uraian di atas, ada seperangkat asumsi untuk mengatur suatu sistem sosial, yaitu: (1) sistem mempunyai properti aturan dan saling ketergantungan antarbagian-bagian; (2) sistem cenderung ke arah tata tertib pemeliharaan diri atau keseimbangan, (3) sistem mungkin statis, (4) sifat dari satu bagian sistem mempunyai dampak pada bentuk bagian lainnya, (5) sistem-sistem memelihara batasan-batasan dengan lingkungannya, (6) alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental, (7) sistem cenderung pemeliharaan diri meliputi pemeliharaan batasan-batasan dan hubungan bagian-bagian keseluruhan, pengawasan variasi-variasi lingkungan dan pengawasan tersebut untuk membuat analisis aturan struktur dari sistem (Ritzer, 1988).

Prasyarat fungsional sistem sosial yaitu; (1) sistem sosial mesti disusun dan dioperasikan dengan tepat dengan sistem-sistem lainnya; (2) agar tetap hidup, sistem sosial mesti mempunyai dukungan dari sistem-sistem lainnya; (3) sistem mesti menemui proposisi yang signifikan



dengan kebutuhan aktor-aktornya; (4) sistem membutuhkan partisipasi anggota-anggotanya; (5) pada akhirnya mempunyai kontrol minimum secara potensial terhadap gangguan tingkah laku; dan (6) konflik yang mengganggu mesti dikontrol.

## G. KELEMAHAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki, teori fungsionalisme tidak luput dari kelemahan. Kelemahan teori ini bersumber pada anggapan dasarnya. *Pertama*, anggapan dasar teori struktural fungsional terlalu menekankan pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses perorangan yang diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial (Sutaryo, 1992).

Bagi Lockwood, apa yang disebutnya dengan "*substratum*" (yaitu disposisi-disposisi) yang mengakibatkan tumbuhnya perbedaan "*life chance*" dan kepentingan yang tidak bersifat normatif tidak memperoleh tempat yang wajar di dalam pemikiran para penganut teori struktural fungsional.

*Kedua*, anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau ekuilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Hal ini mengakibatkan para penganut struktural fungsional kemudian menganggap bahwa: disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Semua itu pada dasarnya merupakan akibat dari pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar (*extra systemic change*).

Berkaitan dengan itu, menurut Pierre L. Van den Berghe, anggapan dasar tersebut membuktikan bahwa teori struktural fungsional mengabaikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Setiap struktural sosial, di dalam dirinya sendiri, mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal yang pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan sosial.



2. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar (*extra systematic change*) tidak selalu bersifat *adjustive*.
3. Suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat *visious circle*.
4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner (Nasikun, 1995).

Senada dengan pendapat di atas, Nasikun juga mengemukakan kelemahan pendekatan ini. Anggapan pendekatan ini mengabaikan kenyataan sebagai berikut: (1) setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri, mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan sosial; (2) reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*) tidak selalu bersifat *adjustive*; (3) suatu sistem sosial, di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat *visious circle*; (4) perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.

Oleh karena mengabaikan kenyataan tersebut, maka pendekatan fungsionalisme struktural dipandang sebagai pendekatan yang bersifat reaksioner, dan oleh karenanya dianggap kurang mampu menganalisis masalah-masalah perubahan kemasyarakatan. Sistem sosial tidak selalu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, namun sering kali mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mengalami disintegrasi. Sebaliknya, sistem sosial dapat juga menolak perubahan yang datang dari luar.

Begitu juga, teori struktural fungsionalisme hanya memerhatikan pada kelompok konkret, kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial, sehingga dapat dianggap mengabaikan peran individu. Teori ini juga menganggap masyarakat bersifat harmoni, stabil, dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dalam pandangan neofungsionalisme teori struktural fungsional harus mendapat autokritik dalam dunia observasi. Sekalipun demikian, teori struktural fungsional masih tetap didukung secara serius oleh kelompok minoritas yang signifikan secara sosiologis.



## H. RINGKASAN

Teori strukturalisme fungsional pada mulanya diilhami oleh para pemikir klasik, di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Durkheim. Para pemikir ini menganut konsep utilitarian yang menganggap individu sebagai aktor atomistik, terpisah, dan berdiri sendiri, yang berlaku rasional dengan memaksimalkan keuntungannya dalam berinteraksi sosial.

Socrates menganalogikan sistem sosial dengan tubuh manusia. Plato menyatakan bahwa di dalam sistem sosial terjadi pembagian tugas dan peran. Auguste Comte menggugat individualitas yang bebas dan rasional, dan menginginkan konsensus sosial serta masyarakat diibaratkan sebagai tubuh organik. Spencer menyatakan masyarakat mengalami proses evolusi melalui adaptasi, di mana individu tumbuh dan mencapai kematangan, yang kemudian melahirkan konsep struktur dan fungsi. Adapun Durkheim melihat kehidupan bermasyarakat sebagai konsensus sosial dan masyarakat diibaratkan sebagai tubuh organik. Ia memandang kehidupan masyarakat sebagai keadaan yang objektif. Individu adalah bagian dari kolektivitas dan berada dalam struktur. Di satu sisi struktur memberi tanggung jawab pada individu, di sisi lain individu harus melakukan peran-peran sosialnya. Bagi Durkheim, sistem yang fungsional akan mampu menciptakan harmoni dan stabilitas, hal ini dibuktikan melalui alasannya pada teori *"division of labour"*. Individu menjalankan peran sosial hingga melahirkan adanya *"common value"* (terwujudnya tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat atau struktur sosial dalam masyarakat itu).



# BAB 3

## PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL KONFLIK

---

### A. PENDAHULUAN

Teori ini dipaparkan dalam rangka memahami dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial (baca: masyarakat), terutama masyarakat yang kompleks dan heterogen. Tidak hanya itu, sumber daya yang langka (terutama sumber daya ekonomi) di dalam masyarakat akan membangkitkan kompetisi di antara pelaku ekonomi yang memperebutkannya dan bukan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut yang tidak pernah merata. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing. Kondisi semacam ini, dalam banyak kasus kerap menyebabkan terjadinya konflik terbuka, sebagaimana dinyatakan oleh Lockwood dalam Jonathan Turner (1978), bahwa kekuatan-kekuatan yang saling bersaing dalam mengejar kepentingannya masing-masing akan melahirkan mekanisme ketidakteraturan sosial (*social disorder*).

Ruth A. Wallace dan Alison Wolf sebagaimana dikutip oleh Sutaryo, 1992, dalam bukunya *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*, menyatakan bahwa:



*Conflict theory is major alternative to functionalism as an approach to analyzing the general structure of societies; and it is increasingly popular and important in modern sociology.” (Sutaryo, 1992)*

Dalam konteks ini, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyatakan dalam bukunya *Sociology*, bahwa para teoretisi konflik memandang suatu masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama oleh kekuatan-kekuatan kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Berbeda dengan anggapan para fungsionalis yang memandang nilai-nilai bersama atau konsensus anggota masyarakat menjadi suatu ikatan pemersatu, maka dalam pandangan teoretisi konflik, konsensus itu merupakan ciptaan dari kelompok atau kelas dominan untuk memaksakan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan (Horton & Chester L. Hunt, 1987).

Teori konflik merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta sosial. Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi. Teori ini mempunyai bermacam-macam landasan seperti teori Marxian dan Simmel. Kontribusi pokok dari teori konflik Marxian adalah memberi jalan keluar terjadinya konflik kelas pekerja. Adapun teori konflik Simmel berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas, atau pengaruh merupakan sifat dari kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, ketika orang frustrasi di kelas bawah atau kelas pekerja, mungkin bermusuhan dengan yang makmur. Begitu juga anggota-anggota kelompok minoritas akan bermusuhan dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan.

## **B. BEBERAPA PROPOSISI TEORI KONFLIK**

Penganut teori konflik menunjukkan persepsi yang sangat berbeda dengan kalangan fungsionalis dalam memahami masyarakat. Jika kalangan fungsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan di dalam masyarakat, maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan arena di mana satu kelompok dengan yang lain saling bertarung untuk memperebutkan “power” dan mengontrol, bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka.



Jika kalangan fungsionalis melihat hukum atau undang-undang sebagai sarana untuk meningkatkan integrasi sosial, maka para penganut teori konflik melihat undang-undang itu tidak lain merupakan cara yang digunakan untuk menegakkan dan memperkuat suatu ketentuan yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lainnya.

Menurut Alison dan Wallace, teori konflik memiliki tiga asumsi utama, di mana satu dengan yang lain saling berhubungan (Sutaryo, 1992). Asumsi utama teori konflik menegaskan, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu.

Asumsi kedua menunjukkan, “*power*” (kekuasaan) bukanlah sekadar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Asumsi kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik. “*Power*” dipandang sebagai “*core*” dari *social relationships*. Analisis ini pada gilirannya memusatkan perhatiannya pada masalah distribusi sumber-sumber. Sebagian orang memperoleh atau menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperolehnya sama sekali. Asumsi ketiga, ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Ideologi itu merupakan aspek dari *groups interest*.

Teori konflik banyak dikembangkan oleh para ahli, tetapi apabila dirunut secara historis, elemen-elemen dasarnya berakar pada pemikiran dua sosiolog besar, yaitu Karl Marx dan Max Weber. Keduanya memang menunjukkan perbedaan pendapat, bahkan tak jarang saling memperdebatkan pokok-pokok pikirannya, akan tetapi keduanya sama-sama menaruh perhatian terhadap dua hal utama, yaitu: (1) *the way social positions bestow more or less power on their incumbents*; dan (2) *the role of ideas in creating or undermining the legitimacy of social position* (Wallace and Alison Wolf, 1986: 64).

Berikut ini disajikan beberapa proposisi teori konflik sebagai berikut (lihat: Sutaryo, 1992: 31- 6):



## 1. Proposisi Pertama

*“The more unequal the distribution of scarce resource in a system, the greater will be the conflict of interest between dominant and subordinate segments in a system.”*

Artinya, semakin tidak merata distribusi sumber di dalam suatu sistem, akan semakin besar konflik kepentingan antara segmen dominan dan segmen lemah di dalam suatu sistem.

Dalam proposisi ini, Marx memandang bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi sumber, terutama kekuasaan, merupakan determinan konflik kepentingan objektif di antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Proposisi ini secara langsung mengikuti asumsi Marx bahwa, “Di dalam semua struktur sosial, distribusi kekuasaan yang tidak merata pasti akan menimbulkan konflik kepentingan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan” (Turner, 1978: 131).

Menurut Marx, kesadaran akan konflik kepentingan dapat menyebabkan mereka yang lemah mulai mempertanyakan keabsahan pola distribusi sumber yang ada sekarang. Kondisi-kondisi yang mengubah kesadaran untuk mempertanyakan masalah keabsahan distribusi sumber diintisarikan dalam proposisi-proposisi berikut.

## 2. Proposisi Kedua

*“The more subordinate segments become aware of their the collective interests, the more likely they are to question the legitimacy of the unequal distribution of scarce resources.”*

Proposisi ini dengan jelas menyatakan, apabila segmen yang lebih lemah (*subordinate*) semakin menyadari akan kepentingan kolektif mereka, maka akan semakin besar kemungkinannya mereka itu akan mempertanyakan keabsahan distribusi sumber yang tidak merata.

Proposisi tersebut masih diperinci lagi menjadi semakin spesifik sebagai berikut:

- a. *“The more social changes wrought by dominant segments disrupt*



*existing relations among subordinates, the more likely are the latter to become aware of their true collective interests.*” Pengertian-nya adalah apabila perubahan sosial yang diciptakan oleh segmen dominan semakin mengacaukan hubungan yang ada di antara segmen-segmen yang lebih lemah (*subordinates*), maka semakin besar kemungkinannya segmen yang lemah itu menjadi sadar akan kepentingan kolektif mereka.

- b. *“The more practices of dominant segments create alienation dispositions among subordinates, the more likely are the latter to become aware of their true collective interests.”* Artinya, apabila praktik-praktik dari segmen dominan semakin menimbulkan disposisi keterasingan di antara segmen yang lebih lemah tersebut menjadi sadar akan kepentingan kolektif mereka.
- c. *“The more members of subordinate segments can communicate their grievances to each other, the more likely they are to become aware of their true collective interests.”* Pengertiannya adalah apabila para anggota segmen yang lebih lemah semakin bisa melontarkan keluhan mereka satu sama lain, maka semakin besar kemungkinannya mereka menjadi sadar akan kepentingan kolektif mereka.
  1. *“The more spatial concentration of members of subordinate groups, the more likely are they to communicate their grievances.”* Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah semakin renggang konsentrasi para anggota kelompok yang lebih lemah, maka semakin besar kemungkinannya bahwa mereka akan melontarkan keluhan-keluhan mereka.
  2. *“The more subordinates have access to educational media, the more diverse the means of their communication, and the more likely are they to communicate their grievances.”* Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah apabila kalangan yang lebih lemah/*subordinates* semakin memiliki akses untuk menjangkau media pendidikan, maka semakin bermacam-macam sarana bagi komunikasi mereka. dan semakin besar pula kemungkinan mereka melontarkan keluhan-keluhan mereka.



d. *“The more subordinate segments can develop unifying systems of beliefs, the more likely they are to become aware of their true collective interests.”* Artinya, apabila segmen yang lebih lemah dapat mengembangkan kesatuan sistem-sistem keyakinan, maka semakin besar kemungkinannya mereka menjadi sadar terhadap kepentingan kolektif mereka.

1. *“The greater the capacity to recruit or generate ideological spokespersons, the more likely ideological unification.”* Artinya, semakin besar kemampuan untuk merekrut atau membangkitkan juru bicara ideologis, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyatuan ideologi mereka.
2. *“The less the ability of dominant groups to regulate the socialization processes and communication.”* Pengertiannya adalah semakin kecil kemampuan kelompok-kelompok dominan untuk mengatur proses-proses sosialisasi dan jaringan komunikasi di dalam suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyatuan ideologis di kalangan *subordinate groups*.

### 3. **Proposisi Ketiga**

*“The more subordinate segments of a system are aware of their collective interests, the greater their questioning of the legitimacy of the distribution of scarce resources, and the more likely they are to organize and initiate overt conflict against dominant segments of the system.”*

Artinya, apabila segmen yang lemah (*subordinate*) di dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan kelompok mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka mempermasalahkan keabsahan distribusi sumber-sumber, dan semakin besar pula kemungkinannya mereka mengorganisasi untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu sistem.

Proposisi ini dipecah menjadi tiga anak proposisi sebagai berikut:

1. *“The more the deprivations subordinates move from an absolute to relative basis, the more likely they are to organize and initiate*



*conflict.*” Artinya, semakin besar kesenjangan dari kalangan lemah (*subordinate*) bergeser dari dasar *absolute* ke dasar relatif, maka semakin besar kemungkinannya mereka mengorganisasi diri dan memulai konflik.

2. “*The less the ability of dominant groups to make manifest their collective interests, the more likely are subordinate groups to organize and initiate conflict.*” Artinya, apabila kelompok dominan semakin kehilangan kemampuannya untuk merumuskan kepentingan-kepentingan kolektif mereka, maka semakin besar kemungkinannya kelompok *subordinate* mengorganisasi dan mencetuskan konflik.
3. “*The greater the ability of subordinate groups to develop a leadership structure, the more likely they are to organize and initiate conflict.*” Artinya, semakin besar kemampuan kelompok-kelompok *subordinate* dalam mengembangkan struktur kepemimpinan, maka semakin besar kemungkinan mereka mengorganisasi diri dan memprakarsai konflik (lihat: Turner, 1978).

#### 4. **Proposisi Keempat**

*“The more subordinate segments are unified by a common belief and the more developed their political leadership structure, the more the dominant and subjugated segments of a system will become polarized.”*

Proposisi ini mengandung pengertian, apabila segmen-segmen *subordinate* semakin dipersatukan oleh keyakinan umum dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka, maka segmen dominan dan segmen yang dikuasai yang lebih lemah akan semakin terpolarisasi.

1. “*The more polarized the dominant and subjugated, the more violent will be the ensuing conflict.*” Proposisi ini mengisyaratkan bahwa, apabila antara segmen dominan dan segmen yang dikuasai yang lebih rendah itu semakin terpolarisasi, maka akan semakin keras konflik yang terjadi.
2. “*The more violent the conflict, the greater will be the structural change of the system and redistribution of scarce resources.*” Propo-



sisi ini mengandung pengertian, semakin keras suatu konflik, maka akan semakin besar perubahan struktural suatu sistem dan redistribusi sumber-sumber.

### C. KARL MARX: DASAR TEORI KONFLIK

Uraian berikut merupakan gambaran sebagian dari pokok-pokok pikiran Max Weber tentang masyarakat, khususnya yang menyangkut konflik sebagai suatu realitas kehidupan sosial.

Weber menempatkan konflik dalam posisi sentral dalam menganalisis tentang masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Weber menyatakan, “Pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia. Orang memang dapat mengubah sarananya, objeknya, arah dasar ataupun pendukungnya, akan tetapi orang tidak dapat membuang konflik itu sendiri” (Sutaryo, 1992: 36).

Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada di antara individu. Hakikat konflik antarkelas tergantung pada sumber pendapatan mereka. Kepentingan ekonomi mereka bertentangan karena kaum proletariat memperoleh upah dari kaum kapitalis hidup dari keuntungan, dan bukan karena yang pertama melarat yang terakhir kaya raya.

Marx menegaskan, fungsi negara tidak lebih dari penjagaan kepentingan-kepentingan kelas ekonomis yang berkuasa dengan jalan kekerasan. Pemerintah adalah sebuah manifestasi dan pertahanan dari kekuasaan ekonomi. Moralitas dan agama sebuah masyarakat adalah sarana bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya dengan mempunyai ideologinya sendiri yang diterima sebagai kepentingan semua kelas, sebuah fenomena yang dilukiskan Marx sebagai “kesadaran palsu” karena semua kelas secara keliru yakin akan objektivitas dan universalis peraturan-peraturan dan cita-cita yang sebenarnya hanyalah ungkapan kepentingan-kepentingan kelas. Demikian juga institusi-institusi legal sebuah masyarakat hanyalah instrumen sebuah negara. Tetapi, Aristoteles dan Smith melihat bahwa keadilan itu sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Marx



melihat masyarakat berproses dari primitif ke masyarakat perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan akhirnya komunisme.

Asumsi yang mendasari teori Marx antara lain: (1) manusia tidak memiliki kodrat yang persis dan tetap; (2) tindakan, sikap, dan kepercayaan individu tergantung pada hubungan sosialnya, dan hubungan sosialnya tergantung pada situasi kelasnya dan struktur ekonomis masyarakatnya; (3) manusia tidak mempunyai kodrat, lepas dari apa yang diberikan oleh posisi sosialnya; (4) Marx menyamakan basis sebab akibat dari masyarakat dengan kekuatan produksi, yaitu dengan apa yang dihasilkan dan bagaimana sesuatu dihasilkan. Kekuatan produksi (bahan mentah, hasil akhir, dan seluruh metode kerja yang dipakai dalam proses produksi, termasuk alat-alat dan keahlian mereka yang bekerja); (5) Marx membedakan jenis masyarakat atas dasar cara-cara produksi masyarakat dari primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme.

Fenomena sosial yang mendasari teori ini antara lain: (1) negara terlibat dalam konflik melalui paksaan dalam bidang hukum untuk memelihara sosial (integrasi); (2) kesenjangan sosial sumber utama konflik; (3) alienasi terjadi karena keterasingan dari sarana dasar produksi, sarana subsistem, dan pekerjaan; (4) kelas adalah motor dari segala perubahan dan kemajuan; dan (5) sejarah kehidupan manusia tidak lebih dari pertentangan antarkelas atau golongan.

Marx berpendapat, konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan produksi, apabila ada kontrol dari masyarakat konflik akan bisa dihapus. Artinya, bila kapitalisme digantikan dengan sosialisme, kelas-kelas akan terhapus dan pertentangan kelas akan berhenti.

Strategi konflik Marxian dengan strategi evolusioner Talcott Parsons ada afinitas (kesamaan), karena konflik dan pertentangan merupakan unsur penting yang sangat menentukan dalam kehidupan sosial manusia, dan berbagai gejala ini sangat berkaitan dengan proses perubahan evolusioner. Konflik dan pertentangan merupakan sebab akibat dari evolusi sosial. Antara strategi konflik dan evolusionis tidak identik, namun keduanya saling berkait pada banyak hal. Kedua





pendekatan ini lebih banyak mempunyai kecocokan satu dengan yang lainnya ketimbang kontradiksi.

Strategi konflik Marxian memandang masyarakat sebagai arena individu dan kelompok bertarung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Konflik dan pertentangan menimbulkan dominasi dan subordinasi, kelompok yang dominan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menentukan struktur masyarakat sehingga menguntungkan kelompok mereka sendiri. Pendekatan konflik Marxian dan Weberian banyak dianut oleh sosiologi modern, tetapi bukan berarti pendekatan ini mendapat dukungan universal. Namun, diakui gagasan konflik Marx dan Weber banyak kegunaannya.

Marx berpendapat, bahwa bentuk-bentuk konflik terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan produksi. Dengan demikian, masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan produksi menjadi kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial yang memiliki kekuatan produksi dapat menyubordinasikan kelas sosial yang lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dapat dipastikan hubungan yang terjadi adalah eksploitasi ekonomi. Secara alamiah yang tereksplotasi akan marah dan memberontak untuk menghapuskan hak-hak istimewa mereka. Untuk mengantisipasi kondisi ini, kelas dominan akan membentuk aparat politik yang kuat, negara yang mampu menekan pemberontakan dengan kekuatan. Akibatnya timbulah konflik, Marx menyebut dengan konflik “pertentangan kelas.”

Marx menjelaskan dalam tulisannya tentang kapitalisme, pemilikan, dan kontrol atas sarana-sarana produksi yang berada di tangan para individu yang sama. Kaum industrialis atau borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja atau proletar bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Akibatnya, timbullah konflik kelas, yaitu konflik antara kelas borjuis dengan kelas proletar.



#### D. TEORI KONFLIK PERSPEKTIF MAX WEBER

Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem “otoritas” atau sistem “kekuasaan. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu sebagai berikut. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimaskan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah berbeda jauh antara Parsons dan Weber yang melihat hal itu sebagai suatu keharusan. Keduanya setuju bahwa “fungsi” dari kekuasaan adalah untuk mengintegrasikan sebuah unit, mendorong pemenuhan yang gagal dilakukan oleh norma-norma dan nilai-nilai. Parson menekankan aspek integratif, yakni kekuasaan dan otoritas menemukan kebutuhan dari keseluruhan sistem. Menurut Weber, suatu “asosiasi yang harus dikoordinasi” adalah setiap organisasi di mana otoritas itu ada (yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi), dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik. Menyangkut hal itu Dahrendorf mengatakan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan, karena mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo*.

Menurut Weber, tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatakan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Diakui bahwa orang pertama-tama ingin mengamankan kehidupan materiellynya, akan tetapi ia juga memerlukan makna yang dapat diberikan kepada situasi hidupnya dan kepada pengalaman-pengalaman kehidupan yang konkret. Bagi siapa pun yang menderita, merasa perlu untuk memahami mengapa dirinya menderita, demikian pula bagi siapapun yang bahagia, merasakan perlunya memberikan dasar pembenar bagi kebahagiaannya itu. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah Weber melihat masyarakat sebagai kenyataan yang sangat kompleks. Weber memang tidak berusaha menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat masyarakat menjadi kompak, melainkan dia melihat dan menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah suatu waktu muncul kekompakan sosial dalam masyarakat, sesudahnya muncul



konflik dan perpecahan yang berkeping-keping, kemudian muncul perubahan sosial dalam suatu institusi sosial. Di dalam masyarakat memang ada saat di mana konflik muncul, ada saat di mana terjadi integrasi yang sangat baik. Sepanjang manusia itu adalah seorang individu yang dengan bebas memberikan arti dan interpretasi terhadap kenyataan yang ada di luarnya; dan sepanjang tatanan-tatanan yang ada dalam masyarakat itu menuntut penyesuaian dari individu, maka konflik akan selalu mungkin terjadi (lihat: Lawang, 1986: 33).

Pernyataan-pernyataan Weber itu tentu saja dapat mengingatkan bahwa konflik adalah suatu realitas sosial yang menyertai kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, haruslah senantiasa disadari agar kita tidak terbuai dalam mimpi yang membayangkan keadaan masyarakat tanpa ketegangan, tanpa percekocokan, ataupun tanpa perang. Konflik itu eksis dan hidup bersama kehidupan sosial masyarakat.

Asumsi yang mendasari teori konflik antara lain: (1) hubungan sosial memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, dan di dalam hubungan tersebut ada benih-benih konflik kepentingan; (2) fakta sosial merupakan suatu sistem yang memungkinkan menimbulkan konflik; (3) konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial; (4) konflik cenderung terwujud dalam bentuk bipolar; (5) konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas dan kekuasaan; dan (6) konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial.

Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis, bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Pada waktu ke depan, masyarakat kapitalis dan sosialis akan selalu bertarung memperebutkan berbagai macam sumber daya. Karena itu, konflik sosial merupakan ciri permanen dari semua masyarakat yang semakin kompleks, tetapi bentuk tingkatan kekerasan yang diambil secara substansial sangat bervariasi.

Weber mengatakan, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi dia berpendapat banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Weber menekankan dua tipe. Dia menganggap konflik dalam arena politik sebagai sesuatu



yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain, dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebaliknya, dia melihat bahwa pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas pada organisasi-organisasi politik formal, tetapi juga terjadi pada setiap tipe kelompok, seperti organisasi keagamaan dan pendidikan. Tipe konflik kedua yang sering sekali ditekankan oleh Weber adalah konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Dia berpendapat, orang sering tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, ataupun konsepsi tentang bentuk gaya hidup kultural yang terbaik. Lebih dari itu, gagasan dan cita-cita tersebut bukan saja hanya dipertentangkan, melainkan dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya, misalnya pertentangan politik. Jadi, orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan, dan pada saat yang sama berusaha saling meyakinkan satu sama lain bahwa bukan kekuasaan itu yang mereka tuju, melainkan kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis benar. Jadi, Weber berpendapat bahwa gagasan bukan semata hasil dari kondisi-kondisi material yang ada, melainkan keduanya memiliki signifikansi kausalnya sendiri-sendiri.

Teori konflik melihat kapan dan bagaimana mereka menciptakan solidaritas, kapan mereka mendominasi dengan cara memberikan undang-undang, dan kapan semua proses itu disusun hingga melahirkan suatu perlawanan. Weber menganalisis dominasi dalam perkumpulan buruh hingga proses pengontrolan perjuangan yang tersembunyi. Analisis itu dilanjutkan oleh Dahrendorf tahun 1950-an dengan berusaha menggeneralisasikan pada model konflik organisasi.

Proposisi-proposisi yang menyangkut tentang konflik menurut Weber antara lain:

1. Semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan bawah.



2. Semakin karismatik pimpinan kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan.

Semakin besar sistem perundang-undangan dan administrasi pemerintahan mendorong dan menciptakan kondisi terjadinya hubungan antara kelompok-kelompok sosial, kesenjangan hierarki sosial, rendahnya mobilitas vertikal, semakin cepat proses kemerosotan legitimasi politik penguasa, dan semakin besar kecenderungan terjadinya konflik antara kelas atas dan kelas bawah (Zamroni, 1992: 31).

## **E. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA MARX DAN WEBER**

Teori konflik modern terpecah menjadi dua tipe pokok, yaitu teori konflik neo-Marxian dan teori konflik neo-Weberian.

Marx dan Weber, sama-sama menolak gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada beberapa konsensus dasar atau harmoni, di mana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan setiap orang. Namun, antara Marx dan Weber memiliki perbedaan cara pandang di dalam memandang konflik. Teori konflik Marxian adalah teori materialis dan lebih menekankan sifat multidimensional dari konflik dan dominasi. Marx juga berpendapat, bahwa konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan produksi, sekali kekuatan itu dikembalikan kepada kontrol seluruh masyarakat maka konflik dasar tersebut akan dapat dihapuskan. Jadi, sekali kapitalisme digantikan dengan sosialisme, kelas-kelas akan terhapuskan dan pertentangan kelas berhenti.

Weber memiliki pandangan yang lebih pesimistis. Pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik kapitalis, sosialis, maupun tipe lainnya, orang-orang akan tetap selalu bertarung memperebutkan berbagai sumber daya. Karena itu,



Weber menduga bahwa pembagian atau pembelahan sosial adalah ciri permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk dan juga tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervariasi.

Pendekatan konflik Marxian dan Weberian banyak dianut oleh sosiologi modern, tetapi bukan berarti pendekatan ini mendapat dukungan universal. Dipahami bahwa gagasan konflik Marx dan Weber banyak kegunaannya. Strategi konflik Marxian memandang masyarakat sebagai kebutuhan dan keinginannya. Konflik dan pertentangan menimbulkan dominasi dan subordinasi. Kelompok yang dominan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menentukan struktur masyarakat, sehingga menguntungkan bagi kelompok mereka sendiri.

## **F. MASYARAKAT DALAM PANDANGAN DAHRENDORF DAN COHEN**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana citra masyarakat dalam wawasan teori konflik, Sutaryo menyajikan gambaran ini dalam bentuk bagan. Bagan ini memuat perbandingan antara model integrasi yang sering disebut dengan model konsensus atau model fungsional dengan model konflik. Dari penyajian bagan inilah diharapkan dapat dipahami di mana letak perbedaan kedua pendekatan tersebut. Halaman berikut inilah bagan yang dimaksud (Lawang, 1986: 53-55).

Dalam bagan berikut, terlihat bahwa kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan (baik yang manifes maupun laten), maka sudah barang tentu akan terjadi konflik. Kepentingan buruh tani dan pekerja pabrik misalnya, tuntutan kenaikan upah agar dapat mempertahankan hidupnya. Adapun kepentingan majikan/pemilik modal berusaha meningkatkan kekayaannya dengan berbagai macam cara. Mudah diduga bahwa potensi konflik telah terkandung di dalamnya, yang pada gilirannya, jika prasyarat-prasyarat memungkinkan maka akan menjadi konflik terbuka.



**MODEL MASYARAKAT  
P.S. COHEN**

MODEL KONSENSUS (INTEGRASI/FUNGSIONAL)	MODEL KONFLIK (COERCION)
1. Norma dan nilai merupakan elemen-elemen dasar dalam kehidupan sosial.	1. Kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial.
2. Konsekuensi kehidupan sosial adalah komitmen.	2. Konsekuensi kehidupan sosial adalah paksaan.
3. Masyarakat pasti kompak.	3. Kehidupan sosial pasti terpecah belah.
4. Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas.	4. Kehidupan sosial menghasilkan oposisi, perpecahan, dan permusuhan.
5. Kehidupan sosial didasarkan pada kerja sama dan saling memerhatikan dan saling membutuhkan.	5. Kehidupan sosial menghasilkan konflik yang berstruktur.
6. Sistem sosial tergantung pada konsensus.	6. Kehidupan sosial menghasilkan kepentingan yang sudah dikotak-kotakkan.
7. Masyarakat mengakui adanya otoritas yang absah.	7. Diferensiasi sosial menghasilkan kekuasaan.
8. Sistem sosial bersifat integratif.	8. Sistem sosial merusakkan integrasi dan dapat kontradiksi.
9. Sistem sosial cenderung bertahan.	9. Sistem sosial cenderung berubah.

Dengan menggunakan cara yang sama, yaitu melakukan perbandingan antara model integrasi dan model konflik, berikut ini disajikan bagan bagaimana Ralf Dahrendorf memahami masyarakat.

**MODEL  
DAHRENDORF**

MODEL INTEGRASI	MODEL KONFLIK
1. Setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng.	1. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana.
2. Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik.	2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik sosial ada di mana-mana.
3. Setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki satu fungsi, yaitu menyumbang pada bertahanannya sistem itu.	3. Setiap elemen dalam masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan.
4. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggotanya.	4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan atas beberapa anggotanya oleh orang lain.



Terdapat sejumlah syarat agar “*latent conflict*” dapat berubah menjadi “*manifest conflict*”. Menurut Ralf Dahrendorf, syarat itu dapat di klasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) kondisi teknis, (2) kondisi politik, dan (3) kondisi sosial (Johnson, D., 1986: 186).

Kondisi teknis berupa munculnya pemimpin kelompok dan tindakan kolektif. Tidak ada tindakan kelompok yang diorganisasi dapat terjadi tanpa suatu tipe kepemimpinan dan suatu ideologi (kepercayaan yang membenarkan).

Kondisi politik berupa tingkat kebebasan yang ada untuk membentuk kelompok dan tindakan kelompok. Kondisi sosial meliputi tingkat komunikasi antar-anggota dari suatu kelompok semu (*quasi group*). Kelompok-kelompok konflik pasti tidak akan muncul di antara orang-orang yang terpencil satu sama lain, yang secara ekologis sangat terpecah-pecah atau yang tidak mampu atau tidak bersedia karena alasan apa pun untuk membentuk ikatan sosial.

Kondisi adanya pemimpin, ideologi, kebebasan politik, dan komunikasi internal merupakan prasyarat dasar pembentukan kelompok-kelompok konflik. Dengan demikian, berarti apabila salah satu dari elemen-elemen tersebut tidak ada di antara para anggota suatu kelompok semu, maka suatu kelompok konflik tidak akan terbentuk. Kondisi-kondisi ini juga harus dilihat sebagai variabel-variabel yang berbeda.

Meskipun demikian, Dahrendorf mengingatkan, “kondisi-kondisi tersebut tidaklah menjamin suatu kelompok konflik akan terbentuk.” Masih ada persyaratan sosial psikologis yang diperlukan, yaitu perubahan kepentingan yang laten menjadi manifes. Dengan kata lain, konflik yang masih bersifat laten akan dapat berubah menjadi manifes apabila mereka (masing-masing) sadar akan kepentingannya, dan secara kolektif berusaha memperjuangkan kepentingannya itu lewat suatu organisasi.

Bagan tersebut juga dengan jelas menunjukkan, bahwa jika dalam model konsensus komitmen merupakan konsekuensi dari kehidupan sosial, maka menurut model konflik paksaan merupakan konsekuensi kehidupan sosial. Hal itu terjadi karena sumber ekonomi, sumber





kehormatan, dan sumber kekuasaan bersifat langka dan terbatas. Oleh karena itu, orang yang berkuasa, baik yang berhubungan dengan tenaga fisik atau peralatan fisik cenderung menggunakan paksaan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan-kepentingannya itu. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam kehidupan sosial.

Dalam model konflik Cohen disebut, bahwa kehidupan sosial menghasilkan konflik yang berstruktur (*social life generates structured conflict*). Ini sangat erat hubungannya dengan pendapat Dahrendorf yang menyatakan bahwa, “Konflik selalu terjadi dalam suatu struktur atau sistem tertentu yang secara umum dapat dilihat pada lapisan atas dengan lapisan bawah.” Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda. Maka mudah dipahami, jika dalam model Dahrendorf dinyatakan bahwa konflik itu selalu ada di dalam masyarakat antara lapisan atas dan lapisan bawah.

## G. TEORI KONFLIK PERSPEKTIF MIKRO; RENDHAL COLLINS

Collins mengatakan bahwa perselisihan relatif jarang terjadi, apalagi kerusakan fisik. Kondisi yang terjadi hanya manuver untuk memisahkan hubungan organisasi. Teori konflik sama sekali tidak meninggalkan teori solidaritas sosial, cita-cita sosial, sentimen sosial, dan perasaan. Mengacu pada Simmel, Collins berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas atau pengaruh merupakan sifat dari suatu proses interaksional, bukan merupakan sifat dari kepribadian individu.

Poin yang terpenting adalah teori konflik menurut Collins tidak menganalisis cita-cita dan moral sebagai kesucian selama memberikan hasil dari analisis sosiologi. Adapun ahli teori konflik seperti Marx dan Engels, melihat kondisi di mana ide-ide dan cita-cita dinyatakan, bagaimana dan kapan mereka menciptakan solidaritas, kapan mereka bermaksud mendominasi dengan memberikannya aturan-aturan atau undang-undang, dan kapan semua proses ini disusun. Selama membuat perlawanan atau konflik memberi jalan untuk jenis analisis ini dengan konsep dari sarana produksi material dan intelektual. Hal ini telah diperluas bukan hanya sebagai sebuah analisis dari semua kondisi organisasi yang menciptakan ide-ide, melainkan juga sampai



pada sebuah analisis dari apa yang disebut sarana produksi emosional.

Teori konflik dikembangkan dengan menteorikan dan menyusun prinsip-prinsip secara implisit yang telah meningkat pada penelitian observasi. Versi klasik teori konflik sebenarnya sejarah makro Marx, Weber, Pareto, dan yang lainnya, yang merefleksikan pada pola sejarah dalam skala besar, telah diarahkan pada fokus menurut perubahan bentuk stratifikasi, golongan politik dan konflik-konflik, pandangan-pandangan ideologi seperti periode dominasi doktrin dan moral.

Teori konflik Collins lebih sintetis dan integratif, karena arus orientasinya cenderung ke mikro. Meskipun kecenderungannya pada mikro, namun Collins mulai dengan teori besar dari Marx dan Weber sebagai pedoman untuk analisisnya. Dia mulai dari prinsip Marxian, alasannya ia ingin mencoba “memodifikasi kasus” sebagai dasar untuk pengembangan sebuah teori konfliknya.

Kritik Tumen (1973) dan Hazelrig (1972) terhadap Dahrendorf yaitu: *pertama*, model teori konflik yang dikembangkan Dahrendorf tidak jelas untuk merefleksikan ide Marxian. *Kedua*, konflik teori lebih dari *common sense* sebagaimana teori Marxian. *Ketiga*, teori konflik tampaknya digunakan untuk memecahkan problem konseptual yang ada pada tataran ide. *Keempat*, seperti struktur fungsional, teori konflik lebih bersifat makro dan hasil analisisnya tidak mampu digunakan mengetahui individu (Ritzer, 2001: 262).

Untuk mengatasi kelemahan Dahrendorf maupun Coser, maka Rendhall Collins melakukan pendekatan konflik pada aras mikro. Pendekatan ini dinilai lebih integratif. Ia melihat stratifikasi sosial dan organisasi merupakan dua hal yang sering berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, seperti kekayaan, politik, karier, keluarga, kelompok, masyarakat, dan gaya hidup. Collins menyandarkan teorinya pada fenomenologi dan etnometodologi. Namun demikian, “*starting point*” teorinya berasal dari teori Marxian dan Weberian. Ia memodifikasi argumentasi Marx (Ritzer, 2001: 263).

Kontribusi Collins (1973) adalah untuk menambah teori tingkat mikro. Collins berusaha memperlihatkan bahwa stratifikasi organisasi didasarkan pada interaksi-interaksi dari kehidupan setiap hari.



Dua fenomena paling penting dalam kerangka konflik adalah pola perlawanan dan dominasi (Ritzer, 2001: 33-68).

Pendekatan konflik oleh Collins dibagi menjadi tiga prinsip dasar. *Pertama*, Collins percaya bahwa penduduk tinggal pada dunia subjektif yang dikonstruksi sendiri. *Kedua*, orang lain mempunyai kekuatan untuk mengontrol pengalaman subjektif seseorang. *Ketiga*, orang lain secara terus-menerus mengontrol seseorang yang melawan mereka.

Collins mengembangkan lima prinsip analisis konflik. *Pertama*, Collins percaya bahwa teori konflik harus memfokuskan pada kehidupan nyata daripada kehidupan abstrak. Kemampuan ini kelihatannya untuk menghindari gaya analisis Marxian yang mengkhayal.

*Kedua*, Collins percaya bahwa teori konflik dari stratifikasi harus menentukan faktor yang memengaruhi interaksi.

*Ketiga*, Collins menjelaskan bahwa dalam sebuah grup yang mempunyai banyak sumber akan memeras grup lain bersumber sedikit. Variabel pokok penyebab konflik adalah perbedaan sumber material yang dimiliki oleh para pelaku. Para pelaku dengan sumber material yang dimiliki berusaha menguasai pelaku lain yang bersumber material lebih lemah.

*Keempat*, Collins melihat bahwa semua grup dengan sumber dan tenaganya bisa memaksakan sistem ide mereka kepada seluruh masyarakat.

*Kelima*, Collins menyarankan agar: (1) para ahli sosiologi semestinya tidak berteori secara sederhana tentang *stratification*, tetapi mesti mempelajari itu secara keseluruhan, jika mungkin dengan metode dan lapangan studi yang berbeda; (2) percobaan mesti dirumuskan dan diuji melalui studi yang berbeda; (3) para ahli sosiologi mesti mencari penyebab dari fenomena sosial, khususnya penyebab dari bermacam-macam bentuk perilaku sosial.

Collins menjelaskan terjadinya hubungan konflik dalam kehidupan sosial, terutama pada hubungan jenis kelamin dan hubungan antar-kelompok umur. Dia mengambil contoh pada lingkup keluarga. Keluarga adalah arena konflik seksual di mana laki-laki menjadi pemenang dan wanita didominasi oleh laki-laki. Hubungan antara kelompok



umur secara khusus antara yang muda dengan yang tua juga sebagai penyebab konflik. Collins memandang penyebab konflik itu adalah perbedaan sumber yang dimiliki berbagai kelompok umur. Orang dewasa mempunyai bermacam sumber termasuk pengalaman, kekuatan, dan kemampuan memuaskan kebutuhan fisik dari yang muda. Secara berlawanan, salah satu sumber dari orang muda yang dimiliki adalah daya tarik secara fisik. Dengan demikian, karena kelompok umur yang lebih tua mempunyai sumber yang lebih banyak daripada kelompok muda, berarti anak muda didominasi oleh orang dewasa.

Collins sadar bahwa sosiologi tidak berhasil pada tingkat mikro, karena teori konflik tidak bisa dilakukan tanpa analisis pada tingkat masyarakat. Kontribusi Collins datang bersama berkembangnya kontribusi empiris dari Garfinkel, Scales, dan Schegloff. Teori-teori itu sebenarnya terpusat pada tingkat makro.

Collins melihat teori Marxian sebagai inti permulaan teori konflik, tetapi dia melihat sebagai struktur fungsional sebagai ide secara mendalam, ini sebuah ciri dia ingin menghindarinya. Teori konflik Collins sedikit dipengaruhi oleh Marx, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh Weber, Durkheim.

Teori Marxian dan teori struktur fungsional ditempatkan Collins dalam memilih dan memutuskan bahwa pada tingkat status sosial merupakan sebuah institusional yang menyentuh banyak sifat-sifat kehidupan, termasuk kekayaan, politik, karier, keluarga, klub, kelompok, gaya hidup. Collins memandang bahwa teori yang baik dalam tingkat strata adalah kegagalan, tetapi dikritik oleh teori Marxian.

Dalam sosiologi, ilmu pengetahuan berparadigma ganda dinyatakan bahwa teori konflik dibangun atas dasar paradigma yang sama dengan teori struktural fungsional, yaitu paradigma fakta sosial. Meskipun demikian, teori konflik ini dibangun dalam rangka menentang secara langsung teori-teori struktural fungsional sehingga pola pikir dalam berbagai proposisi yang ditawarkan oleh keduanya saling bertentangan. Untuk lebih jelas mengenai beberapa perseberangan antara kedua teori ini antara lain:

*Pertama*, menurut teori fungsional, struktural masyarakat berada



dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, sedangkan dalam teori konflik justru sebaliknya, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya.

*Kedua*, dalam teori fungsional, struktural setiap elemen atau setiap institusi dianggap memberikan dukungan terhadap stabilitas, sedangkan teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

*Ketiga*, teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum. Adapun teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tekanan atau paksaan dari golongan yang berkuasa.

Konsep sentral teori ini adalah kekuasaan dan wewenang. Menurut teori ini kekuasaan dan wewenang menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Menurut Ritzer, inti teori konflik adalah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial yang sistematis.

Perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik harus diperhatikan dalam peranan sosial. Tugas utama untuk menganalisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam berbagai pembahasan di dalam teori konflik, konsep-konsep kepentingan laten, kepentingan manifes, kelompok semu, kelompok kepentingan, posisi, dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Di samping itu, konflik juga dapat mendorong perubahan dan pembangunan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa dalam situasi konflik golongan yang terlibat khususnya golongan yang dikuasai melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan perubahan dalam struktur sosial. Apabila konflik terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat



radikal. Demikian pula apabila konflik disertai dengan kekerasan maka perubahan kekerasan akan semakin cepat.

Fungsi konflik ada tiga, yaitu: (1) sebagai alat untuk memelihara solidaritas; (2) membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; dan (3) mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Konflik akan terjadi bilamana kedua keadaan terjadi bersamaan, yaitu: (1) keadaan di mana suatu kelompok mengalami pengakuan status yang rendah dan tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan sosial yang penting; (2) keadaan di mana suatu kelompok mempunyai lapangan sumber institusional yang besar jika dibandingkan dengan kelompok lain, meskipun berada dalam masyarakat yang mempunyai tingkatan sistem yang sama; (3) intensitas konflik, semakin intens suatu konflik terjadi akan semakin cepat pembentukan kelompok yang lebih kuat dari masing-masing kelompok konflik (semakin terdiferensiasi pembagian pekerjaan semakin terpusat usaha pengambilan keputusan), sebab di dalam konflik yang intens dengan diferensiasi yang tidak kompleks akan semakin sukar solidaritas internal diciptakan. Semakin intens suatu konflik dan semakin mudah perubahan struktur terjadi, semakin tinggi pula derajat solidaritas konfliknya.

## H. TEORI KONFLIK PERSPEKTIF GEORGE SIMMEL

Simmel melihat dalam kehidupan sosial, bahwa individu tidak hanya mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi bersemangat untuk berkonflik. Kalau isu-isu yang penting tidak ada, orang mau berkonflik karena isu yang kecil atau sepele. Simmel membedakan antara konflik orang per orang secara langsung dan persaingan. Persaingan tidak perlu kontak antarpribadi secara langsung, sebaliknya mereka yang bersaing berjuang sendiri-sendiri untuk tujuan bersama dengan antagonisme yang muncul dari kenyataan bahwa keuntungan seseorang merupakan kerugian bagi pihak lain. Simmel mengatakan, kalau hubungan intim mungkin cukup kuat untuk memungkinkan perkecokan atau malah untuk hidup bersama, maka tidak mengherankan bahwa intensitas



konflik sering berbanding langsung dengan tingkat solidaritas atau persamaan dalam hubungan itu.

Perspektif Simmel mengenai konflik dan persatuan sebagai alternatif, kecuali sama pentingnya merupakan suatu alternatif yang menjembatani Marx yang memusatkan pada konflik sosial dengan Durkheim yang memberikan tekanan pada integrasi dan solidaritas sosial.

Simmel mengatakan bahwa ungkapan permusuhan di dalam konflik membantu fungsi-fungsi positif, sepanjang konflik itu dapat mempertahankan perpecahan kelompok dengan cara menarik orang-orang yang sedang konflik. Jadi, konflik itu dipahami sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menjaga kelompok sepanjang dapat mengatur sistem-sistem hubungan.

## I. TEORI KONFLIK PERSPEKTIF LEWIS COSER

Teori konflik yang dikembangkan oleh Coser merupakan refleksi pemikiran Simmel. Teori konflik yang dikonsepkan Coser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Bagi Lewis A. Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Oleh karena itu, konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperti juga halnya dengan George Simmel, yang berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dasar, dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam pelbagai cara yang tak terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks (Sutaryo, 1992: 42).

Terdapat perbedaan antara Coser dan Simmel. Coser tidak terlalu banyak menaruh perhatian pada hubungan timbal balik yang kompleks dan tidak kentara antara bentuk-bentuk konflik dan interaksi lainnya pada tingkat antarpribadi, tetapi lebih menyoroti pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul bagi sistem sosial yang lebih besar di mana konflik tersebut terjadi. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat “disfungsional” bagi sistem yang



bersangkutan. Konflik bisa juga menimbulkan konsekuensi positif. Dengan demikian, konflik bisa bersifat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan.

Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Lebih lanjut Coser menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan (*collectivities*), atau antara individu dan kumpulan. Bagaimanapun, konflik antarkelompok maupun yang intra kelompok senantiasa ada di tempat orang hidup bersama. Coser juga menyatakan, konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya. Seperti menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka sendiri (Sutaryo, 1992: 39).

## J. FUNGSI POSITIF KONFLIK MENURUT LEWIS COSER

Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah hal-hal yang menyangkut dinamika hubungan antara “*in-group*” (kelompok dalam) dengan “*out-group*” (kelompok luar). Berikut ini adalah sejumlah proposisi yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser:

1. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (*in group*) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
2. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khusus-





- nya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.
3. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas.
  4. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi; kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka mungkin diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
  5. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Umumnya, individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya (Sutaryo, 1992: 44).

Pemikiran Lewis Coser mengenai hubungan antara kelompok dalam dan kelompok luar ini memang ada kemiripannya dengan George Simmel. Salah satu dari proposisi Simmel yang menggambarkan tentang fungsi positif konflik eksternal bagi kelompok internal adalah: *“Conflict with other groups contributes to establishment and reaffirmation of the identity of the group and maintains its boundaries against the surrounding social world”* (Coser, 1964: 38).

Lebih lanjut Coser menyatakan, fungsi konflik eksternal untuk memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok sedemikian pentingnya, sehingga kelompok-kelompok (atau pemimpin-pemimpin kelompok) dapat memancing antagonisme dengan kelompok luar, atau menciptakan musuh dengan orang luar agar mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Realitas ini tidak perlu harus merupakan suatu proses yang disadari. Apa pun sumbernya, persepsi terhadap ancaman dari luar membantu meningkatkan atau mempertahankan solidaritas internal, apakah itu realistis ataupun tidak. Malah tidak sekadar itu, walaupun ancaman mu-



suh yang potensial itu hanya khayalan belaka, musuh itu masih dapat berfungsi bagi kelompok itu sebagai kambing hitam.

Sesungguhnya ketegangan dalam suatu kelompok dapat dihindarkan agar tidak merusakkan kelompok itu, kalau ketegangan itu dapat diproyeksikan ke suatu sumber yang ada di luar. Hasilnya adalah bahwa para anggota kelompok memperlakukan musuh luar karena kesulitan-kesulitan internalnya daripada membiarkan kesulitan-kesulitan ini menghasilkan perpecahan atau konflik dalam kelompok itu sendiri (Sutaryo, 1992: 44).

Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam setiap masyarakat sering kali dikembangkan suatu mekanisme untuk meredakan ketegangan yang muncul, sehingga struktur sebagai keseluruhan tidak terancam keutuhannya. Mekanisme ini oleh Coser dinamakan *safety valve* (katup pengaman).

Coser memang mengakui bahwa konflik itu dapat membahayakan persatuan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan cara agar bahaya tersebut dapat dikurangi atau bahkan dapat diredam. Baginya, katup pengaman ini sebagai institusi (*safety valve institution*). Sehubungan dengan hal ini, berarti dia telah mengisyaratkan bahwa semua elemen yang terdapat dalam institusi sosial harus terdapat pula di dalam katup pengaman ini. Sesuatu yang sangat bernilai dalam konteks ini adalah kesatuan masyarakat. Tetapi bagaimana seandainya ada orang atau kelompok yang merasa tidak puas dengan sistem yang berlaku? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapatlah diambil contoh sebagai katup pengaman untuk menertibkan dan menyalurkan semua aspirasi, termasuk perasaan kurang puas terhadap sistem politik yang ada atau sedang berlaku. Dengan cara demikian, dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusakkan solidaritas dan kesatuan masyarakat. Menurut Coser, katup pengaman ini di samping dapat berbentuk institusi sosial dapat juga berbentuk tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan, karena konflik tidak dapat tersalurkan. Lelucon yang diselipkan dalam situasi tegang dapat juga mengurangi atau menghilangkan ketegangan yang terjadi, sekalipun



sebenarnya lelucon itu sendiri boleh jadi tetap mengandung nilai-nilai kritik (Sutaryo, 1992: 196).

Coser menyatakan bahwa faktor-faktor struktural tidak langsung bergerak di atas perilaku sosial, tetapi dijembatani oleh proses interaksi sosial di mana konflik sosial adalah yang utama, walau sama sekali bukan merupakan satu-satunya. Walaupun beberapa ahli sosiologi menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda, teori fungsionalis struktural vs. teori konflik. Namun, Coser pada komitmennya ada kemungkinan menyatukan kedua pendekatan tersebut, karena Coser berpendapat bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena. Karya Coser tidak ingin mengkonstruksi teori umum, tetapi karyanya berusaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial serta mengonsolidasikan skema konsep itu sesuai dengan data yang berlangsung dalam konflik sosial tersebut.

Coser mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, suatu proses yang ditonjolkan oleh kaum fungsionalis struktural, tetapi ia juga menunjuk pada proses lain, yaitu konflik sosial. Menurut Coser, bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Perhatian Coser cenderung melihat dari sisi fungsi bukan dari sisi disfungsinya. Karena Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisasi atau dilangsungkan, atau dieliminasi saingan-saingannya. Jadi, hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. Dengan demikian, dinyatakan bahwa konsekuensi konflik sosial akan mengarah pada peningkatan dan bukan kemerosotan, adaptasi atau penyesuaian baik hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan.

Coser dengan konflik fungsionalnya menyatakan, bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi, sedangkan ungkapan perasaan permusuhan tidaklah demikian. Coser merumuskan fungsionalisme ketika membicarakan tentang konflik disfungsional bagi struktur



sosial ketika terdapat toleransi atau tidak terdapat konflik. Intensitas konflik itu lantas mengancam adanya suatu perpecahan yang akan menyerang basis konsensus sistem sosial berhubungan dengan kekakuan suatu struktur. Apa yang mengancam kondisi pecah belah bukanlah konflik melainkan kekacauan struktur itu sendiri, yang mendorong adanya permusuhan yang terakumulasi dan tertuju pada suatu garis pokok perpecahan yang dapat meledakkan konflik.

Coser mencampurbaurkan pengertian fungsionalisme dengan penjelasannya yang ternyata lepas dari fungsionalisme. Tetapi, fungsionalisme sering kali muncul kembali dan disimpulkannya lebih banyak dipaksakan, yakni tatkala menjelaskan bahwa ia telah menguji kondisi di bawah suatu konflik sosial dan proses adaptasi hubungan-hubungan sosial serta struktur-strukturnya.

## K. TEORI KONFLIK DALAM PANDANGAN DAHRENDORF

Asumsi yang mendasari teori sosial non-Marxian Dahrendorf antara lain: (1) manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; (2) masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat terintegrasi atas dasar dominasi (borjuasi) menguasai proletar. Konflik kelas ini disebabkan tidak adanya pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi.

Dahrendorf mengkritik teori Marx dengan alasan: (1) lemah secara konseptual dengan mencampuradukkan konflik kelas sebagai penyebab perubahan sosial (bersifat sosiologis, empiris dapat diuji) dengan masyarakat kapitalis (bersifat filosofis tidak dapat diverifikasi); (2) pendapat Marx tentang pemilikan sarana produksi (pengertian hak milik dalam arti sempit); (3) kapitalisme yang digambarkan Marx telah mengalami transformasi (tidak melalui revolusi); (4) kapitalisme hanya salah satu subtype masyarakat industri pasca-industri; dan (5) pertentangan kelas semakin ruwet karena melibatkan faktor ekonomi dan politik.

Fenomena sosial yang dijelaskan meliputi: (1) konflik atau dominasi dalam hal ekonomi dan politik; (2) konflik tidak bisa dihilangkan



atau diselesaikan, tetapi hanya bisa diatur; dan (3) proses konflik dapat dilihat dari intensitas dan sarana (*violence/kekerasan*).

Fungsi konflik menurut Dahrendorf sebagai berikut: (1) membantu membersihkan suasana yang sedang kacau; (2) katub penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan; (3) energi-energi agresif dalam konflik realitas (berasal dari kekecewaan) dan konflik tidak realitas (berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan), mungkin terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan; (4) konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; (5) konflik dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; dan (6) konflik dengan berbagai *outgroup* dapat memperkuat kohesi internal suatu kelompok.

Dahrendorf adalah tokoh utama teori konflik. “Wewenang” dan “posisi” sebagai konsep sentral teorinya. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Dahrendorf menganalisis konflik dengan mengidentifikasi berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat. Dahrendorf mengatakan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan, karena mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo*. Dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang bertentangan, yaitu antara penguasa dan yang dikuasai. Pertentangan terjadi karena golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo*, sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan selalu ada di setiap waktu dan dalam setiap struktur.

Dahrendorf melihat yang terlibat konflik adalah kelompok semu (*quasi group*), yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Adapun kelompok kedua adalah kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan, serta anggota



yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Ketika mengulas tentang Ralf Dahrendorf, George Ritzer dalam bukunya yang berjudul *Sociology A Multiple Paradigm Science* mengatakan, “*Dahrendorf is the major exponent of the position that society has two faces (conflict and consensus) and, therefore, sociological theory should be divided into corresponding camps of conflict and integration theory*” (Sutaryo, 1992: 4).

Seperti halnya konsensus, konflik adalah juga sebuah realitas sosial. Itulah sebabnya maka Ralf Dahrendorf menegaskan bahwa, *u while society is seen as having two faces, one of consensus, the other of conflict* (Turner, 1978: 143).

Teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Karena dalam situasi konflik golongan yang terlibat konflik melakukan tindakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konfliknya hebat, maka yang terjadi adalah perubahan secara radikal. Bila konfliknya disertai kekerasan, maka perubahan struktur akan efektif. Dahrendorf melihat masyarakat selalu dalam kondisi konflik dengan mengabaikan norma-norma dan nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

Dahrendorf melihat bahwa “kepentingan” yang dikaitkan dengan peran-peran didefinisikan sebagai peran-peran yang diharapkan. Hal itu bukanlah kepentingan “material”. Peran yang dimaksud Dahrendorf berbeda dengan pengertian peran Lockwood dan pengertian Marx. Jadi, setiap peran memiliki harapan yang bertentangan yang dikaitkan dengannya. Suatu peran yang mengandung kekuasaan membawa harapan bahwa kesesuaian itu dilaksanakan untuk keuntungan organisasi sebagai suatu keseluruhan dan dalam kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Dahrendorf menjelaskan, apa yang terjadi sangat tergantung pada pilihan orang yang melakukan peran. Penjelasan Dahrendorf sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Weingart, yaitu tentang “voluntarisme”, suatu ide bahwa keteraturan sosial, peraturan-peraturan dalam kehidupan sosial tergantung pada pilihan individu.



Dahrendorf melihat masyarakat berdimensi ganda, memiliki sisi konflik dan sekaligus sisi kerja sama, sehingga segala sesuatunya dapat dianalisis dengan fungsionalisme struktural dan dapat pula dengan konflik. Harapannya bersama Coser, agar perspektif konflik dapat digunakan dalam rangka memahami dengan lebih baik fenomena sosial. Sebaliknya, Durkheim cenderung melihat konflik yang berlebihan sebagai sesuatu yang tidak normal dalam integrasi masyarakat. Simmel juga berasumsi bahwa konflik dan ketegangan adalah sesuatu yang “abnormal” atau keduanya merusak persatuan kelompok, merupakan suatu perspektif yang penuh bias yang tidak didukung oleh kenyataan.

Dahrendorf, dalam menjelaskan konflik berpindah dari struktur peran kepada tingkah laku peran. Tetapi, keduanya tidak bisa berjalan bersama-sama dalam bentuk hubungan sebab akibat, karena keduanya tidak dipisahkan secara jelas sebagai fenomena yang berbeda. Masing-masing tergantung pada yang lain tanpa melakukan penjelasan satu sama lain.

## **L. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN TEORI KONFLIK**

Kedua teori sosial yang berada dalam lingkup paradigma fakta sosial ini (teori struktural fungsional dan teori struktural konflik), sebenarnya memiliki sejumlah persamaan sekaligus pula perbedaan. Menurut Hotman Siahaan (2001), persamaan kedua teori ini terletak pada objek atau sasaran studinya. Dalam hal ini, baik teori struktural fungsional maupun teori struktural konflik sama-sama mengkaji struktur sosial dan pranata sosial dalam masyarakat. Perbedaan kedua teori ini terletak pada asumsi teoretis yang digunakan oleh masing-masing teori, sebagaimana telah dijelaskan di muka.

1. Asumsi teoretis struktural fungsional:
  - a) Masyarakat terbentuk atas dasar konsensus warga masyarakat.
  - b) Anggota masyarakat memiliki komitmen bersama tentang *value*, *norms*, dan kebudayaan yang harus ditaati dan dipelihara bersama.
  - c) Hubungan antar-anggota masyarakat bersifat kohesif.



- d) Lebih mengutamakan solidaritas antarwarga masyarakat.
  - e) Memelihara hubungan resiprositas antarwarga masyarakat.
  - f) Otoritas pemimpin didasarkan pada legitimasi warga masyarakat.
  - g) Masyarakat menjaga ketertiban sosial (*social order*) dalam hidup bersama.
2. Asumsi teoretis struktural konflik:
- a) Masyarakat terbentuk atas dasar konflik kepentingan.
  - b) Dorongan anggota-anggota masyarakat menghasilkan perubahan.
  - c) Hubungan antarwarga masyarakat bersifat *devisive*.
  - d) Ciri oposisi lebih menonjol dalam hubungan sosial.
  - e) Konflik struktural menjadi bagian dari perubahan sosial dalam masyarakat.
  - f) Masyarakat juga ditandai oleh diferensiasi sosial yang semakin berkembang.
  - g) *Social disorder* menyebabkan masyarakat menjadi dinamis.

## M. RINGKASAN

Setelah memahami uraian di atas, secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, konflik, sebagaimana konsensus merupakan realitas sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Oleh karena itu, pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan manusia. Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Teori konflik merupakan alternatif utama dari fungsionalisme untuk menganalisis struktur sosial. Konflik dapat bersifat individual, kelompok, ataupun kombinasi dari keduanya. Tetapi yang pasti, baik yang bersifat intra maupun antarkelompok senantiasa ada di tempat orang hidup bersama.

*Kedua*, pihak-pihak yang berselisih sering tidak hanya bermaksud untuk memperoleh “sesuatu” yang diinginkan, melainkan juga





memojokkan, merugikan, atau bahkan saling menghancurkan. Teori konflik memiliki tiga asumsi utama yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu: (a) manusia memiliki sejumlah kepentingan-kepentingan asasi, dan mereka senantiasa berusaha untuk mewujudkannya; (b) *power* (kekuasaan) di samping merupakan barang langka, juga terbagi secara tidak merata sehingga merupakan sumber konflik dan memiliki sifat memaksa; (c) ideologi dan nilai-nilai merupakan senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

*Ketiga*, jika kalangan fungsionalis beranggapan bahwa setiap elemen sistem sosial itu memiliki fungsi, dan fungsinya itu merupakan kontribusi positif dalam menciptakan ekuilibrium, maka tidak demikian bagi kalangan konflik. Kalangan teoretisi konflik beranggapan bahwa setiap elemen sistem sosial itu mempunyai kontribusi dalam menciptakan konflik di dalam masyarakat. Jika kalangan fungsionalis menganggap bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu sistem itu berasal dari luar (*extra systemic change*), maka kalangan konflik dapat membuktikan bahwa faktor-faktor internal pun dapat berfungsi sebagai pencipta konflik dan pada gilirannya menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Jika kalangan fungsionalis menganggap norma dan nilai sebagai elemen-elemen dasar dalam kehidupan sosial, maka bagi kalangan konflik, elemen kehidupan sosial adalah kepentingan. Jika kalangan fungsionalis menganggap masyarakat senantiasa terintegrasi atas dasar konsensus pada anggotanya tanpa paksaan, maka sebaliknya bagi kalangan konflik, paksaan merupakan elemen penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat oleh kelompok atau kelas dominan.

*Keempat*, teori konflik memerhatikan dimensi substratum yang dapat menyebabkan perbedaan *life chance* maupun *interest* yang tidak normatif sifatnya. Itulah sebabnya kalangan teori konflik tidak berprasangka bahwa gejala instabilitas, *disorder*, maupun konflik sebagai suatu fenomena yang bersifat patologis.

*Kelima*, bagi penganut teori konflik, masyarakat merupakan “arena” dari berbagai kalangan atau kelompok untuk bertarung memperebutkan “kekuasaan” yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengontrol,



bahkan untuk melakukan penekanan terhadap rival-rival mereka. *Latent conflict* akan dapat berubah menjadi *manifest conflict* apabila kondisi teknis, kondisi politis, dan kondisi sosial memenuhi syarat.

*Keenam*, teori konflik menganggap bahwa kehidupan sosial itu menghasilkan konflik terstruktur, yaitu konflik kepentingan antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Teori konflik beranggapan, bahwa apabila segmen yang lebih lemah (*subordinate segments*) semakin menyadari kepentingan kolektif mereka, maka besar kemungkinannya mereka mempertanyakan keabsahan distribusi sumber-sumber yang tidak merata. Ada juga yang beranggapan bahwa apabila para anggota *subordinate segments* dapat saling menyampaikan keluhan-keluhannya, maka besar kemungkinan mereka akan menyadari kepentingan-kepentingan kolektif mereka. Bahkan ada juga yang beranggapan apabila *subordinate segment* dapat mengembangkan kesatuan sistem-sistem keyakinan, semakin besar kemungkinannya mereka menyadari kepentingan kolektif mereka. Anggapan lain yang berkembang dalam tataran teori konflik adalah semakin kecil kemampuan kelompok-kelompok dominan untuk mengatur proses-proses sosialisasi dan jaringan komunikasi di dalam suatu sistem, semakin besar kemungkinan terjadinya penyatuan ideologis di kalangan *subordinate groups*. Teori konflik juga percaya, bahwa semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan kelas bawah. Di antara teori konflik ada yang beranggapan bahwa apabila antara segmen dominan dan *subordinate segments* semakin terpolarisasi, maka konflik yang mungkin terjadi akan keras sekali. Apabila demikian halnya, akan semakin besar perubahan struktural suatu sistem dan redistribusi sumber-sumber.

*Terakhir*, teori konflik berpendapat, bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif, misalnya meningkatkan solidaritas dan integrasi suatu kelompok atau sistem. Kalangan konflik teori mengakui bahwa kesatuan masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya meredam konflik. Katup peredam



ini dapat bersifat kelembagaan maupun berwujud tindakan-tindakan/kebiasaan-kebiasaan (lihat: Sutaryo, 1992: 47–51).



## BAGIAN 2

### PARADIGMA DEFINISI SOSIAL

#### PENJELASAN RINGKAS

Berbeda dengan Paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial tidak berangkat dari sudut pandang fakta sosial yang objektif, seperti struktur-struktur makro dan pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Paradigma definisi sosial justru bertolak dari proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu. Dalam merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial, individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Artinya, di dalam bertindak atau berinteraksi itu, seseorang tetap di bawah pengaruh bayang-bayang struktur sosial dan pranata-pranata dalam masyarakat, tetapi fokus perhatian paradigma ini tetap pada individu dengan tindakannya itu (Veeger, 1993: 24).

Menurut paradigma ini, proses-proses aksi dan interaksi yang bersumber pada kemauan individu itulah yang menjadi pokok persoalan dari paradigma ini. Paradigma ini memandang, bahwa hakikat dari realitas sosial itu (dalam banyak hal) lebih bersifat subjektif dibandingkan objektif menyangkut keinginan dan tindakan individual. Dengan kata lain, realitas sosial itu, lebih didasarkan kepada definisi subjektif dari pelaku-pelaku individual. Jadi, menurut paradigma ini tindakan sosial tidak pertama-tama menunjuk kepada struktur-struktur sosial, tetapi sebaliknya, bahwa struktur sosial itu merujuk pada agregat definisi (makna tindakan) yang telah dilakukan oleh individu-individu anggota masyarakat itu (Veeger, 1993: 24-5).

### **TEORI SOSIAL DALAM LINGKUP PARADIGMA DEFINISI SOSIAL**

Teori-teori yang berada dalam lingkup paradigma definisi sosial antara lain: 1) teori analisis tindakan sosial yang lebih dikenal dengan teori *social action* oleh Max Weber; 2) teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann; 3) teori Interaksionisme Simbolis George Herbert Mead dan Herbert Blumer; 4) teori Fenomenologi Edmund Husserl; 5) teori Etnometodologi; dan 6) Teori eksistensialisme.



# BAB 4

## MENGENAL TOKOH PARADIGMA DEFINISI SOSIAL

---

### A. PENDAHULUAN

Salah satu tokoh yang sangat populer dalam paradigma definisi sosial adalah Max Weber. Dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*), Weber memperkenalkan konsep tentang makna suatu tindakan. Inti tesisnya adalah bahwa suatu “tindakan manusia itu penuh dengan arti.” Oleh karena itu, Weber diklasifikasikan sebagai salah satu tokoh yang menghasilkan teori yang dapat dikategorikan ke dalam paradigma definisi sosial.

Selain Weber, tokoh yang hendak dijelaskan dalam paradigma definisi sosial ini adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dan Herbert Blumer, teori etnometodologi (Ritzer, 2008: A14). Teori Giddens tentang strukturalisasi oleh Waters dikelompokkan dalam kategori agensi. Teori fenomenologi buah karya sosiolog Jerman Edmund Husserl juga masuk dalam paradigma definisi sosial ini. Meskipun masih banyak tokoh-tokoh lain yang bisa dikelompokkan dalam paradigma definisi sosial ini, akan tetapi dalam paparan kali ini baru sempat dibahas empat tokoh yang sudah sering kita dengar, yaitu Max Weber, Peter L. Berger dan Thomas Luckman, George H. Mead dan Herbert Blumer, serta Anthony Giddens.

## B. MAX WEBER

### 1. Konteks Sosial dan Politik yang Melatarbelakangi Teori

Latar belakang politik yang berkembang di Jerman pada waktu Weber menjadi seorang pemikir sangatlah tegang dan penuh kontradiksi. Meskipun Jerman mengalami masa damai selama 43 tahun, namun setelah pecah Perang Dunia II, dan pemerintahan Bismarck berakhir terlihat sekali pada kebijakan luar negeri Jerman yang sangat buruk karena condong ke kebijakan kolonial dan ekspansi militer. Hal ini sebagai akibat emosi Jerman untuk menyaingi Inggris yang telah menjadi negara industri dan bersifat ekspansionis. Di bidang ekonomi, terlihat Jerman Barat telah menjadi industri dan borjuasi yang sangat kuat, meskipun di Jerman Timur masih dikuasai oleh aristokrasi dengan pola hidup feodal, sehingga terjadi ketimpangan sosial sementara ada yang telah menjadi kelas borjuis yang berhasil meskipun mereka tetap menginginkan hidup aristokrasi.

Dari berbagai kontradiksi tersebut, Weber memiliki pendirian yang moderat, terlihat dalam tulisan-tulisannya. Meskipun pada akhirnya juga harus terlibat dalam urusan politik, terutama pada akhir hidupnya, yakni terlibat di dalam Partai Demokrat Jerman, yaitu Partai Kaum Borjuis Liberal. Hal ini bukan berarti Weber tidak simpati terhadap kaum pekerja. Ia tetap simpati dengan kaum pekerja, karena ia tidak yakin kalau partainya berjuang untuk kaum proletar.

### 2. Realitas Sosial yang Mendasari Teori

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya, tiadakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.



### 3. Aliran Pemikiran yang Memengaruhi Teori

Fakta yang dianut oleh Weber tampak ada suatu kesamaan dengan paradigma yang dianut oleh Emile Durkheim tentang paradigma fakta sosial, di mana studi historis dan studi komparatif yang dilakukan Weber terhadap pengaruh agama dalam kehidupan ekonomi yang telah menjadi model atau metode dalam mempelajari fakta sosial.

### 4. Latar Belakang Sosial Sang Pencetus Teori

Sosiolog ini dilahirkan di Jerman, tepatnya di Kota Erfurt, pada tanggal 21 April 1864. Max Weber telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sosial modern, seperti: (1) teori tindakan sosial (*social action*); (2) teori interaksi; (3) teori konflik neo-Weberian; dan (4) teori etika Protestan.

Orangtua Weber berasal dari kalangan menengah. Ayahnya bekerja sebagai birokrat dan ibunya sebagai penganut Calvinisme yang setia. Meskipun pada awalnya ia dekat dengan ayahnya tetapi akhirnya ia lebih dekat dengan ibunya, dan hal ini membawa pengaruh pada keyakinan agama sebagaimana yang diyakini ibunya. Pada umur belasan tahun ia sudah masuk Universitas Heidelberg hingga menjadi ahli hukum seperti ayahnya. Pada tahun 1884, seusaia wajib militer ia kembali ke Berlin dan kuliah di Universitas Berlin selama delapan tahun hingga meraih gelar doktor. Meskipun ia seorang ahli hukum, tetapi Weber masih juga tertarik pada sosiologi, ekonomi, dan sejarah.

Jalan ibunya yang asketik: memiliki kedisiplinan, kerja keras, menabung. Pada tahun 1896, ia memperoleh profesor di bidang ekonomi di Universitas Heidelberg, meskipun setahun kemudian prestasi akademiknya sangat merosot, akibat kematian ayahnya, padahal ia belum selesai berdebat dengan ayahnya. Akibatnya, ia mengalami sulit tidur dalam waktu yang sangat lama (selama enam hingga tujuh tahun). Banyak orang kemudian mengatakan bahwa ia mengalami *breakdown*. Pada tahun 1903 barulah ia menyadari bahwa kehidupannya adalah sebagai seorang akademisi, kemudian ia dikirim ke Amerika Serikat selama enam setengah tahun dan menerbitkan buku yang berjudul "*The Protestant Ethic and The Spirit of Capital*" sebagai karya yang diilhami





oleh sikap ibunya yang sangat asketik. Sejak saat itulah Weber tertarik kepada studi-studi agama yang dihubungkan dengan aspek kehidupan sosial dan kesejarahan.

## 5. Fenomena Sosial yang Dipertanyakan

Fenomena sosial yang dipertanyakan oleh Weber menyangkut apakah yang dimaksud dengan aksi sosial itu? Apa dan bagaimanakah konsep tindakan sosial itu? Faktor-faktor sosial apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan sosial? Bagaimanakah caranya membedakan antara tindakan sosial dan yang bukan tindakan sosial? Hal-hal itulah yang oleh Weber dirumuskan sebagai pijakan pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Weber dan Durkheim merupakan tokoh yang hidup sezaman. Keduanya jelas mempunyai kaitan langsung dengan proses perkembangan sosiologi di Eropa, khususnya Jerman dan Perancis. Keduanya sangat tertarik dengan pemikiran Simmel, meskipun pengaruh Simmel lebih dominan tampak pada Weber. Keduanya dimasukkan ke dalam pendekatan teoretisi *agency* yang sangat menekankan arena subjektivitas manusia, di mana keterlibatan kesadaran ketika individu mengambil tindakan di dalam dunia sosial sangat kuat terlihat.

Di dalam pemetaan teori sosial, *agency* ini melibatkan Simmel dan Weber yang mengedepankan konstruksionisme, yaitu teori sosiologi yang berkembang di Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka menyatakan bahwa perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku objek natural. Manusia selalu menjadi agen di dalam konstruksi aktif dari realitas sosial, di mana mereka bertindak tergantung kepada pemahaman atau pemberian makna pada perilaku mereka. Jika Simmel kemudian sangat berpengaruh pada aliran pemikiran sosiologis Amerika lewat Herbert Mead, maka Weber lebih berpengaruh terhadap sosiologi Eropa terutama pada karya Alfred Schutz yang dikaitkan dengan tradisi filsafat Eropa, Bergson dan Edmund Husserl yang kemudian memantapkan lahirnya sosiologi fenomenologi.



Empat tipologi tindakan sosial yang dikaji oleh Weber antara lain: (1) *Zweckrationalitat* (rasionalitas instrumental), yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi. (2) *Wetrationalitat* (rasionalitas tujuan), yaitu tindakan yang melihat alat-alat hanya sekadar pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sebab tujuan yang terkait dengan nilai-nilai sudah ditentukan. (3) Tindakan tradisional ialah tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan, tanpa refleksi yang sadar. (4) Tindakan efektif, yaitu tindakan yang dilakukan dan didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.

## 6. Jenis Penjelasan yang Diberikan

Weber sangat tertarik dengan fenomena sosial, ekonomi, sejarah, dan agama. Karyanya yang sangat menonjol, yaitu *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* yang mencoba menjelaskan asosiasi antara Protestanisme dan kapitalisme. Weber tidak menggunakan konsep sebab akibat dalam hubungan antara keduanya, akan tetapi menggunakan konsep *elective affinity* (afinitas elektif), yaitu konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik. Di dalam Protestan terdapat elemen yang memberikan motivasi dan dukungan psikologis yang dapat merangsang jenis perilaku yang dibutuhkan atas lahirnya kapitalisme borjuis.

Agama Protestan atau calvinis memiliki teologi yang memiliki pengaruh bagi pemeluknya. Tuhan memiliki kekuasaan penuh dan mahatahu, sehingga menentukan siapa yang perlu diselamatkan dan siapa yang tidak. Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi besok. Kemudian, karena Tuhan diyakini sebagai maha pencipta, maka Tuhan menghargai pekerja dan yang mengusahakan untuk kebesaran-Nya. Hal ini menurut Weber mempunyai konsekuensi motivasi, sehingga pemeluk calvinis lebih mengarahkan kehidupannya pada dunia ketimbang mistisisme. Inilah yang oleh Weber disebut dengan "*Protestan ethic*".



Cara mengkajinya, mula-mula Weber melakukan pengamatan di lapangan terhadap statistik dari negeri-negeri yang agamanya bercampuran. Di sana terlihat bahwa golongan Protestan secara persentase menduduki tempat teratas. Di antara mereka banyak yang menjadi pemimpin niaga dan para pemilik modal. Jika menjadi karyawan, kebanyakan dari mereka itu menduduki posisi karyawan tingkat tertentu. Tuhan juga memberikan keselamatan, tetapi tidak ada jaminan apakah seseorang terpilih atau tidak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia untuk menjadi yang terpilih. Motivasi inilah yang mendorong mereka bekerja untuk bisa terpilih. Pertanda seseorang terpilih ialah jika ia dapat memperoleh rahmat atau kehidupan sejahtera di dunia. Panggilan semacam ini disebut dengan *beruf calling*, yaitu konsepsi agama tentang tugas yang ditentukan oleh Tuhan. Sikap seperti ini oleh Weber dianggap sebagai akses duniawi, yaitu intensifikasi pengabdian terhadap agama yang dijalankan dalam kegairahan kerja. Melalui pemahaman seperti ini, Weber berkesimpulan bahwa *wordly asceticism* yang terdapat di kalangan penganut Protestan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kapitalis.

Perhatian Weber juga tertuju pada otoritas di dalam kekuasaan, yang disebut dengan teori otoritatif. Menurut Weber, kekuasaan terbagi menjadi dua, yaitu: (1) koersif dan (2) dominatif. Dominatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu: (1) dominasi legitimasi dan (2) dominasi melalui monopoli. Dominasi legitimasi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu: (1) otoritas karismatik, yaitu wewenang yang pengabsahannya berasal dari kelebihan kualitas pribadi yang diakui bersumber dari sesuatu yang di luar manusia; (2) otoritas tradisional ialah wewenang yang pengabsahannya berasal dari stratifikasi status yang diperoleh karena faktor keturunan; dan (3) otoritas legal rasional ialah wewenang yang pengabsahannya didasarkan atas aturan hukum yang jelas dan memiliki kewenangan yang efektif dan efisien.

Tahapan ketiga inilah yang dijadikan Weber sebagai birokrasi rasional yang bercirikan: (a) aktivitasnya diarahkan melalui aturan; (b) memiliki ruang spesifik yang kompeten; (c) terorganisasi secara hierarki; (d) anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian



spesifik dalam bekerja; (e) pekerjaanya tidak memiliki alat-alat produksi, (f) mereka tidak memiliki kekayaan sendiri tetapi digaji dari situ dan segala tindakannya dicatat.

Kajian Weber yang lain yaitu gender, yaitu ketika ia membicarakan tentang *patriarchalism*, yang dimaknai sebagai sebuah sistem dominasi organisasi dibanding sebagai struktur general dari kekuasaan. Oleh karena itu, Weber senang menggunakan konsep *patriarchalism* dibanding dengan *patriarchy*. *Patriarchalism* merupakan situasi dalam kelompok rumah tangga yang selalu diorganisasi atas dua hal, yaitu atas dasar ekonomi dan kekeluargaan. Sebagian diarahkan oleh individu yang didesain oleh aturan yang berasal dari warisan, orangtua laki-laki.

## 7. Posisi Teori dalam Perdebatan Body dan Mind

Weber lebih tertuju pada *mind* atau ide. Hal ini tampak ketika Max Weber dipengaruhi oleh neo-Kantian. Menurut Weber idelah yang menentukan tindakan individu, meskipun ide itu merupakan sesuatu yang empiris simbolis, karena ide memiliki wujud nyata dalam simbol-simbol yang berupa tindakan.

## 8. Posisi Teori dalam Paradigma Ilmu Sosial

Basis teori Weber mengenai teori sosial ialah tindakan sosial, yaitu tindakan yang terkait dan ditujukan kepada orang lain. Dalam contoh yang sederhana dijelaskan, bahwa jika seseorang melempar batu ke sungai dengan tujuan untuk mengagetkan orang di dekatnya, maka ini disebut sebagai tindakan sosial. Akan tetapi, jika tidak dimaksudkan seperti itu, maka aktivitas itu tidak disebut sebagai tindakan sosial. Inilah yang kemudian dimaksud sebagai “tindakan penuh arti dari individu.”

Berdasarkan fenomena yang dikaji, maka dapat dinyatakan bahwa penjelasan yang diinginkan ialah interpretatif atau makna. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi sosiologi yang dikemukakan Weber, maka ilmu ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami (*interpretif understanding*) tindakan sosial serta antarmubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Dengan demikian, yang menjadi sasaran kajian sosiologi antara lain: (1) tindakan manusia yang menurut si aktor



mengandung makna yang subjektif; (2) tindakan nyata dan tindakan yang bersifat ‘membatin’ sepenuhnya bersifat subjektif; (3) tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi tindakan yang disengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam; (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu; dan (5) tindakan itu memerhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang tertentu.

Metode penelitian yang digunakan ialah *post-positivistik*. Weber menolak metode penelitian *positivistik* yang sangat dipengaruhi oleh metode penelitian ilmu-ilmu alam dan menempatkan ilmu sosial hanya sebagai kelanjutan. Oleh karena itu, ia menawarkan konsep *verstehen* atau analisis pemahaman yang diperoleh melalui *negotiated meaning* (pemaknaan bersama) atau intersubjektivitas. Hal ini disadari, karena yang dikajinya itu ialah fenomena ideal atau spiritual (sesuatu di balik tindakan), sehingga tidak ada pemilahan subjek-subjek. Namun satu hal yang disadari adalah bahwa metode ini tidak membawa intuisi sebagai alat pemahaman.

## 9. Posisi Teori dalam Spektrum Individualisme vs. Strukturalisme

Dalam paradigma ilmu sosial, teori Weber termasuk dalam paradigma realitas subjektif (simbolik), yaitu realitas yang berada di dalam subjek individu atau dari subjek ke subjek. Realitas subjektif mengandaikan bahwa tindakan selalu bermakna subjektif bagi individu yang bersangkutan.

## 10. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Dibandingkan dengan Durkheim, Weber sangat berbeda dalam melihat sosiologi. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretatif mengenai arah dan akibat-akibat dari suatu tindakan. Adapun Durkheim mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial yang bersifat eksternal dan memiliki sifat memaksa kepada individu warga masyarakat, dan hal ini harus dijelaskan oleh fakta sosial lainnya.



Dalam konteks ini, Weber melihat kenyataan sosial sebagai suatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan sosial. Sosiologi bagi Weber merupakan ilmu yang empiris yang berusaha memahami perilaku manusia dari perspektif pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, Weber memperkenalkan metode untuk mempelajari sosiologi dengan istilah *Verstehen*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memahami tindakan manusia melalui pemahaman subjektif individu. Metode tersebut terangkum dalam tulisannya tentang *The Methodology of Social Sciences*. Tulisan-tulisan Weber dan teori yang dihasilkannya dapat dimasukkan ke dalam kategori definisi sosial. Hal ini dapat dilihat dari teori *social action*. Metode yang digunakan sebagaimana terlihat dalam salah satu esainya, yakni Roscher dan Knies yang mengutarakan pemikiran yang bersifat kontemporer mengenai pemahaman dan interpretasi. Secara pragmatis Weber menggunakan metodologi yang interpretatif.

Dari tulisan-tulisan Weber tentang metodologi, ia berasumsi bahwa makna tindakan seseorang yang dirasakan akan selalu problematik dan cenderung berbeda dengan apa yang dilakukan pelakunya. Jadi, Weber menyatakan adanya aturan yang melandasi suatu tindakan sosial, berarti ia menyadari bahwa proses menginterpretasikan makna tindakan bisa saja membingungkan karena adanya intervensi dari intensi subjektif.

## 11. Bias yang Terkandung dalam Teori Weber

Salah satu bias yang menonjol ialah mengenai tindakan instrumental, di mana manusia hanya akan mengejar tindakan efektif dan efisien tanpa menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan rasional instrumental akhirnya mengajarkan kepada manusia mengenai kapitalisme yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai akumulasi modal. Rasio instrumental yang disadari sejak awal dianggapnya sebagai ciri rasionalitas modern berubah menjadi idiologi yang menjajah orang atau kelompok lain, sehingga ada tuduhan bahwa melalui imperialisme yang mendunia dalam bentuk penguasaan sumber-sumber kehidupan akan memperoleh pembenaran.



### C. PETER L. BERGER DAN THOMAS LUCKMAN

Sosiolog yang memiliki nama lengkap Peter Ludwig Berger ini lahir di Italia pada tanggal 17 Maret 1929, dan tumbuh dewasa di Wina. Setelah Perang Dunia II berakhir, Peter Berger bermigrasi ke Amerika Serikat dan akhirnya dikenal sebagai ahli sosiologi pengetahuan. Sekitar tahun 1962, hasil kerja sama dengan Thomas Luckman, Peter Berger berhasil menulis sebuah buku berjudul *Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociology of Knowledge*, yang banyak diinspirasi oleh filsafat dan biologi. Di dalam buku tersebut, Berger dan Luckman dengan jelas menunjukkan peran sentral sosiologi pengetahuan sebagai instrumen penting dalam membangun teori sosiologi ke depan.

Pusat perhatian Berger terhadap hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di mana pemikiran itu muncul, bertolak dan berkembang dari hasil kajiannya tentang persoalan agama. Di dalam bukunya *The Precarious Vision* yang terbit pada tahun 1961 dan *The Noise of Solemn Assemblies* (1961), Peter Berger mengulas panjang lebar tentang fungsi dan posisi kritis sosiologi agama berhadapan dengan perkembangan refleksi teologis masyarakat Barat terutama di kalangan umat Kristen (Sriningsih, dalam Suyanto, dan Khusna Amal (eds.), 2010: 143).

Peter Berger dan Thomas Luckman melihat masyarakat sebagai sebuah proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis sekaligus, yaitu proses yang mereka sebut eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi, terkait dengan persoalan legitimasi yang berdimensi kognitif dan normatif. Inilah yang kemudian mereka sebut dengan realitas sosial (lihat: Sriningsih, 2010: 143).

Berger menyatakan bahwa proses seperti itu merupakan suatu konstruksi sosial masyarakat dalam sejarah perjalanan panjang di masa silam hingga masa kini, dan masa yang akan datang. Berger juga berupaya untuk memadukan banyak perspektif dari berbagai mazhab dan teori sosiologi, dengan lebih memusatkan pada satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, sehingga menjadi satu konstruksi teoretis yang memadai. Penjelasan yang dihasilkan ternyata mampu



menunjukkan hakikat masyarakat yang bercorak pluralis, dinamis, dan kompleks (Sriningsih, 2010: 143).

Dari pemikiran Peter Berger dan Thomas Luckman inilah peranan sosiologi pengetahuan yang sebelumnya dipandang sebagai sejarah pemikiran intelektual memperoleh posisinya yang baru, dan tampil sebagai instrumen penting dalam menemukan hakikat masyarakat ke depan secara lebih jelas.







# BAB 5

## TEORI INTERAKSI SIMBOLIK

---

### A. PENDAHULUAN

Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G.H. Mead.

Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar-individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar-individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”.

Teori interaksi simbolik termasuk “baru” dalam khazanah ilmu sosiologi, sehingga wajar bila ia disebut sebagai teori sosiologi kontemporer. Jika dibandingkan dengan teori sosiologi kontemporer lainnya, teori ini mempunyai keunikan tersendiri sebagaimana yang dikatakan oleh George Ritzer (1992: 59), bahwa teori interaksi simbolik adalah

teori yang paling sulit disimpulkan. Teori ini memiliki banyak sumber, namun tak satu pun yang mampu memberi penjelasan memuaskan mengenai inti dari teori ini. Jelasnya, ide dasar teori ini bersifat menentang behaviorisme radikal yang dipelopori oleh J.B. Watson.

Teori interaksi simbolik sering disebut juga sebagai teori sosiologi interpretatif. Selain itu, teori ini ternyata sangat dipengaruhi oleh ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial. Teori ini juga didasarkan pada persoalan konsep diri.

## B. INTERAKSI SIMBOLIK DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi (*action theory*), yang dipelopori dan dikembangkan oleh Max Weber. Sebagai teori yang baru muncul setelah teori aksi, maka pendekatan yang digunakan juga mengikuti pendekatan Weber yang digunakan dalam teori aksi.

Teori interaksi simbolik berkembang pertama kali di Universitas Chicago, dan dikenal dengan mazhab Chicago. Tokoh utama dari teori ini berasal dari berbagai universitas di luar Chicago, di antaranya John Dewey dan C.H. Cooley, filsuf yang semula mengembangkan teori interaksi simbolik di Universitas Michigan—kemudian pindah ke Chicago dan banyak memberi pengaruh kepada W.I. Thomas dan G.H. Mead.

George Herbert Mead lahir tahun 1863 di Massachussets. Umur sebelas tahun ia sekolah di Kolese Oberlin. Setelah lulus, ia mengajar sebentar di sekolah dasar. Pekerjaan itu hanya berlangsung empat bulan karena ia dipecat gara-gara terlalu sering mengusir keluar anak-anak yang suka ribut di sekolah.

Pada tahun 1887, George Herbert Mead masuk Universitas Harvard mengambil filsafat dan psikologi. Lewat gurunya, Josiah Royce, ia menaruh minat besar pada filsafat Hegel. Pada masa-masa itu, Mead bertemu dengan sejumlah orang yang berpengaruh ataupun yang bersumber dari karya mereka yang terkenal saat itu, misalnya Willian James, Helen Castle (wanita yang kelak disuntingnya di Berlin), Wilhelm Wundt—dengan konsep gerak isyaratnya—dan juga G.



Stanley Hall, psikolog sosial Amerika. Menjelang akhir hayatnya, Mead sempat bertemu dengan John Dewey dan Charles Horton Cooley untuk suatu alasan akademis.

Mead sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, yang pada intinya menyatakan bahwa organisme hidup secara berkelanjutan terlibat dalam usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya, sehingga organisme itu mengalami perubahan yang terus-menerus. Dari dasar pemikiran semacam ini Mead melihat pikiran manusia, sebagai sesuatu yang muncul dalam proses evolusi alamiah. Pemunculannya itu memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif dengan lingkungan alam di mana ia hidup.

Pengaruh Hegel tampak dalam pemikiran Mead lewat tiga perspektif filsufis yang ia ajukan. Salah satu di antaranya idealisme dialektis Jerman. Perspektif ini sifatnya melengkapi apa yang dikemukakan oleh Watson, yaitu adaptasi individu terhadap dunia luar dihubungkan melalui proses komunikasi.

Bentuk paling sederhana dan paling pokok dalam komunikasi dilakukan melalui isyarat. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakannya sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Lebih khusus lagi, komunikasi simbolis manusia itu tidak terbatas pada isyarat-isyarat fisik. Sebaliknya, ia menggunakan kata-kata, yakni simbol suara yang mengandung arti dan dipahami bersama dan bersifat standar.

Penggunaan simbol ini juga ditemui dalam hal proses berpikir subjektif atau reflektif. Hubungan antara komunikasi dengan kesadaran subjektif sedemikian dekat, sehingga proses itu dapat dilihat sebagai sisi yang tidak kelihatan dari komunikasi. Proses penggunaan simbol secara tidak kelihatan (*covert*) menginspirasi pikiran atau kesadaran. Suatu segi yang penting di sini adalah bahwa inteligensi manusia mencakup kesadaran tentang diri (*self consciousness*).

Secara bertahap, individu memperoleh konsep diri dalam interaksinya dengan orang-orang lain sebagai bagian dari proses yang sama dengan proses pemunculan pikiran. Jika proses berpikir itu terdiri dari suatu percakapan internal, maka konsep diri itu didasarkan pada



individu yang secara tidak kasatmata (kelihatan) menunjuk pada identitas dirinya yang dinyatakan oleh orang lain.

Konsep diri itu merupakan susunan kesadaran individu mengenai keterlibatan khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi.

Robert Park sebagai murid George Simmel ternyata membawa pengaruh ke dalam sosiologi Amerika yang dikembangkan di Chicago. George Simmel sebenarnya adalah tokoh dalam interaksi sosial. Simmel terkenal sebagai tokoh sosiologi formal, karena Simmel lebih banyak mengkaji interaksi sosial dari segi bentuknya dan bukan dari segi isinya (substansinya). Menurut Simmel, masyarakat dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang terpola seperti halnya jaring laba-laba. Simmel lebih banyak mengkaji pola-pola sosial (*sociation*) sebagai proses di mana masyarakat itu terjadi.

Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial itu menurut Simmel, seperti: dominasi, subordinasi, kompetisi, imitasi, pembagian pekerjaan, pembentukan kelompok, kesatuan agama, kesatuan keluarga, dan kesatuan pandangan. Pandangan Simmel yang dibawa Robert Park ke Chicago akhirnya banyak memengaruhi interpretasi G.H. Mead dalam mengembangkan teori interaksi simbolik. Suatu konsep yang memandang masyarakat dibentuk oleh suatu pertukaran gerak tubuh dan bahasa (simbol) yang mewakili proses mental. Simbol atau tanda yang diberikan oleh manusia dalam melakukan interaksi mempunyai makna-makna tertentu, sehingga akan dapat menimbulkan komunikasi. Menurut Mead, komunikasi secara murni baru terjadi bila masing-masing pihak tidak saja memberikan makna terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi memahami atau berusaha memahami makna yang diberikan pihak lain.

Dalam hubungan ini, Habermas mengemukakan dua kecenderungan fungsional dalam argumen bahasa dan komunikasi serta hubungan dengan perkembangan manusia. *Pertama*, bahwa manusia dapat mengarahkan orientasi perilaku mereka pada konsekuensi-konsekuensi yang paling positif. *Kedua*, sebagai kenyataan bahwa manusia terlibat dalam interaksi makna yang kompleks dengan orang lain, dapat memaksa



mereka untuk cepat beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh orang lain.

Seseorang yang mengikuti pemikiran Herbert Blumer, ketika hendak menggunakan pendekatan interaksi simbolis maka ia akan menggunakan sejumlah asumsi-asumsi yang diperkenalkan Blumer, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar makna-makna yang dimiliki benda itu bagi mereka; (2) makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia; (3) makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya.

Keragaman bentuk teori ini terlihat pada penekanan yang berbeda dari bagian-bagian teori. Chicago School yang memfokuskan diri pada interaksi dan proses-proses penafsiran, melihat cara-cara berkembang dan berubahnya makna tersebut. Sementara IOWA School, tokohnya Manfred Kuhn, mencoba mengubah pandangan-pandangan ini ke dalam variabel yang dapat diukur.

Ide-ide Mead bukanlah merupakan teori penjelasan mengenai apa yang diamati, melainkan lebih merupakan deskripsi sederhana mengenai apa yang diamati. Ralph Turner menambahkan variasi lain yang biasanya disebut teori peran (*role theory*) yang melihat cara konversasi/percakapan internal dari *self* menjembatani presentasi dari *self* menuju struktur-struktur peran.

Jika melihat beragamnya bentuk dari teori interaksi simbolis itu sendiri, pastilah ada alasan mengapa hal itu harus terjadi, apakah satu penjelasan saja belum cukup? Memang sulit untuk menggeneralisasi satu penjelasan untuk setiap keadaan, sebagaimana yang diutarakan kaum interaksionis bahwa satu penjelasan yang tepat hanya sesuai dengan situasi tertentu yang dijelaskan, kita tidak bisa membuat generalisasi mengenai kehidupan sosial. Masyarakat yang dilihat sebagai suatu kumpulan simbol mengalami perubahan dengan kadar perubahan yang tetap, dan tidak bisa dipaksakan ke dalam abstraksi-abstraksi yang digeneralisasi.



Bagaimanapun juga, teori interaksi simbolik ini bukanlah sesuatu yang sempurna, terlebih lagi jika dilihat dari pertumbuhannya. Sehingga, wajar bila kemudian muncul kritik yang mengatakan bahwa teori ini mengabaikan ciri-ciri yang lebih luas dari struktur sosial, dan karena itu akan mudah sekali berbicara mengenai kekuasaan, konflik, dan perubahan meskipun perumusan teorinya masih samar-samar.

Argumen yang menyatakan bahwa konsep-konsepnya tidak jelas memang perlu diajukan, karena sebenarnya hal ini merupakan sebuah aspek penting dari setiap pendekatan sosiologi distingtif. Sebenarnya, jika tujuannya adalah mengungkapkan logika “okasional” dari tindakan manusia dengan menganggap interaksi sosial sebagai perubahan yang terus-menerus, maka justru titik tolak teori harus fleksibel atau memiliki “kepekaan” (yakni, samar-samar). Sebab, jika tidak maka kita akan kehilangan aspek-aspek vital dari apa yang sedang kita pelajari.

### C. LINGKUP PEMBAHASAN INTERAKSI SIMBOLIK

Pada awal perkembangannya, interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan kelompok atau masyarakat. Proporsi paling mendasar dari interaksi simbolik adalah perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibedakan, karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Mencari makna di balik yang sensual menjadi penting di dalam interaksi simbolis.

Secara umum, ada enam proporsi yang dipakai dalam konsep interaksi simbolik, yaitu: (1) perilaku manusia mempunyai makna di balik yang menggejala; (2) pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumber pada interaksi sosial manusia; (3) masyarakat merupakan proses yang berkembang holistik, tak terpisah, tidak linier, dan tidak terduga; (4) perilaku manusia itu berlaku berdasar penafsiran fenomenologik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis; (5) konsep mental manusia itu berkembang dialektik; dan (6) perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif.

Prinsip metodologi interaksi simbolik ini sebagai berikut: (1)



Simbol dan interaksi itu menyatu. Tak cukup bila kita hanya merekam fakta. Kita juga harus mencari yang lebih jauh dari itu, yakni mencari konteks sehingga dapat ditangkap simbol dan makna sebenarnya. (2) Karena simbol dan makna itu tak lepas dari sikap pribadi, maka jati diri subjek perlu “ditangkap.” Pemahaman mengenai konsep jati diri subjek yang demikian itu adalah penting. (3) Peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dan jati diri dengan lingkungan yang menjadi hubungan sosialnya. Konsep jati diri terkait dengan konsep sosiologis tentang struktur sosial, dan lainnya. (4) Hendaknya direkam situasi yang menggambarkan simbol dan maknanya, bukan hanya merekam fakta sensual. (5) Metode-metode yang digunakan hendaknya mampu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya. (6) Metode yang dipakai hendaknya mampu menangkap makna di balik interaksi. (7) *Sensitizing*, yaitu sekadar mengarahkan pemikiran, itu yang cocok dengan interaksionisme simbolik, dan ketika mulai memasuki lapangan perlu dirumuskan menjadi yang lebih operasional, menjadi *scientific concepts*.

Selanjutnya, perlu dibedakan antara: (1) terjemah atau *translation*, (2) tafsir atau interpretasi; (3) ekstrapolasi; dan (4) pemaknaan atau *meaning*. Membuat terjemahan merupakan upaya untuk mengemukakan materi atau substansi yang sama dengan media yang berbeda; media tersebut mungkin berupa bahasa satu ke bahasa lain, dari verbal ke gambar, dan sebagainya.

Ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal di balik yang tersajikan (yang tampak). Materi yang disajikan dilihat tidak lebih dari tanda-tanda atau indikator bagi sesuatu yang lebih jauh lagi. Memberikan makna merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran, dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif manusia; indrawi, daya pikir, dan akal budi. Materi yang tersajikan, seperti juga ekstrapolasi dilihat tidak lebih dari tanda-tanda atau indikator bagi sesuatu yang lebih jauh.

Menurut Blumer, pokok pikiran interaksi simbolik ada tiga: (1) bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*); (2) makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang





dengan sesamanya; (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Intinya, Blumer hendak mengatakan bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang, kecuali setelah individu itu menafsirkannya terlebih dahulu.

Seseorang tidak serta-merta memberikan reaksi manakala ia mendapat rangsangan dari luar. Seseorang itu semestinya melakukan penilaian dan pertimbangan terlebih dahulu; rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang ia sebut dengan definisi atau penafsiran situasi. Definisi situasi ada dua macam, yaitu: (1) definisi situasi yang dibuat secara spontan oleh individu; dan (2) definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat.

Definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat merupakan aturan yang mengatur interaksi antarmanusia. Ada tiga jenis aturan yang mengatur perilaku manusia ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, yang disebutkan oleh David A. Karp dan W. C. Yoels dalam bukunya *Symbols, Selves, and Society: Understanding Interaction* (1979), yaitu: (1) aturan mengenai ruang; (2) aturan mengenai waktu; (3) aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Hall dan Hall (1971) mengemukakan, bahwa komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh, yang menurutnya ada sebelum bahasa lisan, merupakan bentuk komunikasi pertama yang dipelajari manusia.

Karp dan Yoels menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi, yaitu: (1) ciri yang dibawa sejak lahir, misalnya jenis kelamin, usia, dan ras; (2) penampilan; (3) bentuk tubuh yang dipengaruhi oleh pakaian; dan (4) apa yang diucapkan oleh aktor (pelaku).

Erving Goffman melanjutkan pernyataan yang terakhir mengenai faktor-faktor yang memengaruhi interaksi di atas. Goffman inilah yang telah berjasa memperkenalkan konsep dramaturgi, yaitu (definisi oleh Margaret Poloma) pendekatan yang menggunakan bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari suatu interaksi sosial.



Dalam suatu perjumpaan masing-masing pihak, secara sengaja maupun tidak, salah satu pihak membuat pernyataan atau ekspresi (*expression*) dan pihak lainnya memperoleh kesan (*impression*) tertentu dari perjumpaan itu. Goffman membedakan dua macam pernyataan: (1) pernyataan yang diberikan (*expression given*), yaitu pernyataan yang dimaksudkan untuk memberi informasi sesuai dengan apa yang lazimnya berlaku; (2) pernyataan yang terlepas atau dilepaskan (*expression given off*) mengandung informasi yang menurut orang lain memperlihatkan ciri si pembuat pernyataan. Sebagai pembatas dari dua bentuk pernyataan itu, Karp dan Yoels membuat perincian proses perenggangan hubungan. Menurutny, proses perenggangan hubungan itu tersusun atas tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) membedakan (*differentiating*); (2) membatasi (*circumscribing*); (3) memecahkan (*stagnating*); (4) menghindari (*avoiding*); dan (5) memutuskan (*terminating*).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa teori interaksi simbolik ini masih “sangat membuka diri untuk menerima kritik.” Ian Craib menyebut bahwa teori ini masih samar-samar, maksudnya konsep yang digunakan belum jelas. Selain itu, dia juga mengatakan teori ini hanya menilai manusia semata-mata dari sudut kognitif. Apa yang kita pikirkan seakan orang lain sudah tahu, padahal setiap manusia memiliki emosi yang berbeda-beda, bahkan adakalanya terpendam.

Sementara Paul Johnson memandang teori ini lebih pada sisi proses komunikasi. Dalam komunikasi itu ada dua hal yang penting, yaitu isyarat dan simbol, kemudian diperlukan proses pemikiran dalam menggunakan dan menerjemahkan simbol-simbol tersebut.

Interaksi simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai salah satu simbol yang terpenting dan isyarat (*decoding*). Akan tetapi, simbol bukan merupakan faktor-faktor yang telah terjadi (*given*), melainkan merupakan suatu proses yang berlanjut. Maksudnya, ia merupakan suatu proses penyampaian “makna.” Penyampaian makna dan simbol inilah yang menjadi *subject matter* dalam teori interaksi simbolik.



Asumsi-asumsi interaksi simbolik dari Herbert Blumer meliputi: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar atas makna yang dimiliki benda itu bagi mereka yang tengah berinteraksi; (2) makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia; (3) makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya.

“Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar makna yang dimiliki benda itu (bagi mereka), di mana makna dari simbol-simbol itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat itu.” Hal ini mengandung maksud bahwa interaksi antarmanusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran, dan kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dengan demikian, tindakan mereka bukan hanya saling bereaksi terhadap setiap tindakan menurut pola stimulus-respons, melainkan juga diyakini oleh kaum behaviorisme.

Di antara stimulus dan respons ada “penyisipan” proses penafsiran. Penafsiran inilah yang menentukan respons terhadap stimulus, yaitu respons untuk bertindak berdasarkan simbol-simbol yang diinterpretasikan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri merupakan interaksi simbolik. Kemudian, perbedaan kaum interaksi simbolik dengan kaum fungsionalis strukturalis ditegaskan oleh Blumer dalam hal: (1) organisasi masyarakat menurut kaum interaksi simbolik merupakan suatu “kerangka” di mana tindakan sosial berlangsung dan bukan merupakan “penentu” tindakan itu; (2) organisasi dan perubahan yang terjadi di dalamnya adalah hasil kegiatan unit-unit yang bertindak dalam organisasi tersebut, dan bukan oleh kekuatan yang membuat unit-unit itu berada di luar konteks organisasi atau lembaga tersebut.

Paloma (1979) meringkaskan ide-ide dasar (*root images*) interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Blumer sebagai berikut: (1) masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi melalui tindakan bersama dan membentuk organisasi (struktur sosial); (2) interaksi terdiri atas berbagai tindakan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi simbolik mencakup “penafsiran



tindakan,” sedangkan interaksi nonsimbolik hanya mencakup stimulus-respons yang sifatnya sederhana; (3) objek-objek tidak memiliki makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolik; (4) manusia tidak hanya mengenal objek eksternal (di luar dirinya), tetapi bisa juga melihat dirinya sendiri sebagai objek; (5) tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia sendiri; (6) Tindakan itu saling terkait dan disesuaikan oleh para anggota kelompok. Tindakan ini disebut tindakan bersama yang dibatasi sebagai “organisasi sosial dan perilaku tindakan berbagai manusia.”

Pada prinsipnya, interaksi simbolik berlangsung di antara berbagai pemikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat. Dalam interaksi simbolik kedirian individual (*one self*) dan masyarakat sama-sama merupakan aktor. Individu dan masyarakat merupakan satu unit yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling menentukan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tindakan seseorang adalah hasil dari “stimulasi internal dan eksternal” atau dari “bentuk sosial diri dan masyarakat.” Inilah asumsi dasar dari teori interaksi simbolik.

Karakteristik dari teori interaksi simbolik ini ditandai oleh hubungan yang terjadi antar-individu dalam masyarakat. Dengan demikian, individu yang satu berinteraksi dengan yang lain melalui komunikasi. Individu adalah simbol-simbol yang berkembang melalui interaksi simbol yang mereka ciptakan. Masyarakat merupakan rekapitulasi individu secara terus-menerus.

Realitas sosial adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat. Individu pada dasarnya merupakan sifat dari produk sosial, walaupun mereka banyak merefleksikan penilaian dalam interaksi antarsubjek yang merespons dirinya sebagai objek. Pikiran-pikiran yang dituangkan dalam percakapan internal menggunakan simbol yang berkembang dalam proses sosial. Namun demikian, dalam realitas sosial itu banyak persoalan, evaluasi, dan rasa individualistik. Oleh karena itu, memilih merupakan suatu realitas subjektif dan usaha yang dikembangkan melalui proses sosial.

Manusia dapat dipandang sebagai dua sisi, yakni kolektif dan individual. Interaksi yang terbentuk melalui pemberian maupun penyam-



paian simbol-simbol terhadap orang lain. Interaksi simbolik terbentuk melalui karakter tertentu, yaitu melalui bingkai kerja. Bingkai kerja ditandai dengan adanya teori elaborasi yang spesifik yang diperkenalkan oleh teori sosiologi. Namun demikian, interaksi simbolik dari Blumer diperkenalkan sebagai pengetahuan sosiologi dari tingkat mikro menuju ke sebagian tingkat makro, sedangkan Styler mengarahkan interaksi simbolik itu dalam lingkup psikologi sosial.

Interaksi simbolis bisa juga didefinisikan secara implisit melalui gerakan tubuh. Dalam gerakan tubuh, interaksi simbolik akan terimplikasi ataupun terlihat seperti suara atau vokal, gerakan fisik, dan sebagainya. Seluruhnya mengandung makna. Suatu ide atau hubungan antara beberapa ide dapat disimbolkan oleh manusia sebagai objek. Objek berarti realitas sosial yang dapat berbentuk institusi interaksi sosial. Para partisipan dapat merencanakan aksi dan mengorganisasi tingkah laku melalui makna-makna dari simbol yang dimiliki.

Definisi situasi merupakan produk dari proses simbolisasi. Definisi situasi fokusnya ada pada hubungan saat interaksi berlangsung antarpartisipan. Selain itu, masalah peran juga penting dalam interaksi simbolik. Ketika interaksi simbolik berlangsung, tiap partisipan mengambil peranannya sendiri-sendiri yang bersifat khusus. Namun demikian, adakalanya para partisipan dalam memaknai perannya tidak konsisten. Oleh karena itu, banyak para aktor memodifikasi perannya untuk menghubungkan peran yang satu dengan peran yang lainnya.

Dalam perkembangan teori interaksi simbolik ini, pada hakikatnya tidak ada versi tunggal mengenai teori ini. Maksudnya, interaksi simbolis tidak mengenal kata sepakat yang memuaskan semua pihak tentang dasar pemikiran yang tampak dan mudah dipahami. Demikian juga dari segi analisis metodologinya, interaksi simbolik belum dapat diterapkan dengan tepat.

#### **D. SUBSTANSI DAN PERBINCANGAN INTERAKSI SIMBOLIK**

Mead bermaksud membedakan antara teori yang diperkenalkannya dengan teori behaviorisme. Teori behaviorisme mempunyai pandangan bahwa perilaku individu adalah sesuatu yang dapat diamati, artinya



mempelajari tingkah laku manusia secara objektif dari luar. Interaksionisme simbolik menurut Mead mempelajari tindakan sosial dengan menggunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. Jadi, interaksi simbolik memandang manusia bertindak bukan semata-mata karena stimulus-respons, melainkan juga didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan tersebut.

Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang mencoba terlebih dahulu berbagai alternatif tindakan itu melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu, dalam proses tindakan manusia terdapat suatu proses mental yang tertutup yang mendahului proses tindakan yang sebenarnya.

Berpikir menurut Mead adalah suatu proses individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya akan ditanggapinya. Dengan demikian, individu tidak secara langsung menanggapi stimulus, tetapi terlebih dahulu memilih dan kemudian memutuskan stimulus yang akan ditanggapinya.

Perspektif tentang masyarakat yang menekankan pada pentingnya bahasa dalam upaya saling memahami telah diungkapkan oleh Mead. Selanjutnya, Blumer memperkenalkannya sebagai premis interaksionisme simbolik, sebagai berikut:

1. Manusia melakukan tindakan terhadap “sesuatu” berdasarkan makna yang dimiliki “sesuatu” tersebut untuk mereka.
2. Makna dari “sesuatu” tersebut berasal dari atau muncul dari interaksi sosial yang dialami seseorang dengan sesamanya.
3. Makna-makna yang ditangani dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif yang digunakan orang dalam berhubungan dengan “sesuatu” yang ditemui.



Herbert Blumer, seorang tokoh modern teori interaksionisme simbolik, menjelaskan perbedaan antara teori ini dengan teori behaviorisme sebagai berikut. Menurut Blumer, konsep interaksionisme simbolis menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, dan bukan hanya sekadar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain tersebut. Interaksi antar-individu dihubungkan oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau saling berusaha memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi, proses interaksi manusia itu bukan suatu proses di mana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respons. Tetapi, antara stimulus yang diterima dan respons yang terjadi sesudahnya terdapat proses interpretasi antar-aktor. Jadi, proses interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus-respons menempati posisi kunci dalam teori interaksionisme simbolik. Konsep inilah yang membedakan mereka dengan penganut teori behaviorisme.

Dalam hubungan dengan konsep struktural fungsional, Blumer memandang tindakan manusia sebagai suatu proses konstruksi di mana individu berefleksi pada stimuli lingkungan, dan mempertimbangkan apakah harus melakukan tindakan berdasarkan konsekuensi yang mungkin terjadi serta hubungannya dengan berbagai objek yang mungkin. Individu dipandang sebagai subjek yang membuat atau menciptakan peran yang mereka mainkan sebagai konsekuensi dari proses interpretasi.

Pendekatan Kuhn dalam aliran behaviorisme, berpendapat bahwa stimuli tidak diinterpretasikan dan diperhitungkan. Stimuli hanya berlaku sebagai pemicu perilaku dari struktur psikologi. Individu tidak menciptakan peran, tetapi hanya memainkannya berdasarkan harapan yang diserap dari struktur sosial.

Dalam perbincangan ini, Meltzer mengungkapkan bahwa perilaku manusia dalam masyarakat yang terbentuk dari stimuli selalu berada



dalam konteks makna simbolis. Makna ini timbul dari interaksi bersama individu dalam masyarakat. Masyarakat itu sendiri dibangun dari perilaku manusia, yang secara aktif memainkan peran dalam mengembangkan pola-pola dalam hubungan sosial.

## E. INTERAKSI SIMBOLIK DALAM REALITAS SOSIAL

Manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi simbol-simbol. Kemampuan itu diperlukan untuk komunikasi antarpribadi dan pikiran subjektif. George Herbert Mead (1863-1931) menyatakan, bahwa pikiran atau kesadaran manusia sejalan dengan kerangka evolusi Darwinis. Berpikir, bagi Mead, sama artinya setara dengan melakukan perjalanan panjang yang berlangsung dalam masa antargenerasi manusia yang bersifat *subhuman*. Dalam “perjalanan” itu ia terus-menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk atau karakteristiknya.

Guna memandang proses dan relativitas bentuk-bentuk yang ada, maka Mead selanjutnya menggunakan tiga perspektif yang berbeda: evolusionisme Darwin, idealisme dialektis Jerman, dan pragmatisme Amerika, meskipun Mead “menolak” dikatakan hanya menyintesis ketiga perspektif itu.

Mead sendiri memandang perspektifnya sebagai perspektif behaviorisme sosial. Lewat perspektif ini dia ingin melengkapi perspektif Watson. Kelompok idealis dan behavioris dinilai Mead mengabaikan dimensi sosial, sebab mereka memisahkan antara proses komunikasi dan interaksi antar-individu di satu kutub dengan tidak berpikir di kutub lainnya. Padahal, dua hal itu ibaratnya seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Maka menurut Mead, pikiran atau kesadaran itu harus muncul dalam proses tindakan. Hal ini terjadi apabila adaptasi individu terhadap dunia luar dihubungkan melalui proses komunikasi, bukan sekadar bentuk kegiatan yang merupakan respons reflektif terhadap rangsangan dunia luar.

Komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk yang paling sederhana dan yang paling pokok dalam berkomunikasi, tetapi





manusia tidak terbatas pada bentuk komunikasi ini. Bentuk yang lain adalah komunikasi simbol. Karakteristik khusus dari komunikasi simbol manusia adalah tidak terbatas pada isyarat-isyarat fisik. Sebaliknya, menggunakan kata-kata dan simbol-simbol suara yang mengandung arti yang dipahami bersama dan bersifat standar. Kemampuan manusia menggunakan simbol suara yang dimengerti bersama memungkinkan perluasan dan penyempurnaan komunikasi jauh melebihi apa yang mungkin melalui isyarat fisik saja.

Simbol juga digunakan dalam (proses) berpikir subjektif, terutama simbol-simbol bahasa. Hanya saja, simbol-simbol itu tidak dipakai secara nyata (*covert*), yaitu melalui percakapan internal. Serupa dengan itu, secara tidak kelihatan individu itu menunjuk pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas yang terkandung dalam reaksi-reaksi orang lain terhadap perilakunya. Maka, kondisi yang dihasilkan adalah konsep diri yang mencakup kesadaran diri yang dipusatkan pada diri sebagai objeknya.

Bagian penting dari pembahasan Mead adalah hubungan timbal balik antara diri sebagai objek dan diri sebagai subjek. Diri sebagai objek ditunjukkan oleh Mead melalui konsep “*me*”, sementara ketika sebagai subjek yang bertindak ditunjuknya dengan konsep “*I*”.

Analisis Mead mengenai “*I*” membuka peluang besar bagi kebebasan dan spontanitas. Ketika “*I*” memengaruhi “*me*”, maka timbullah modifikasi konsep diri secara bertahap. Ciri utama pembeda antara manusia dan hewan adalah bahasa atau “simbol signifikan.” Simbol signifikan haruslah merupakan suatu makna yang dimengerti bersama. ia terdiri dari dua fase, “*me*” dan “*I*”. Dalam konteks ini “*me*” adalah sosok diri *saya* sebagaimana dilihat oleh orang lain, sedangkan “*I*” yaitu bagian yang memerhatikan diri *saya* sendiri. Dua hal itu menurut Mead menjadi sumber orisinalitas, kreativitas, dan spontanitas. Percakapan internal memberikan saluran melalui semua percakapan eksternal.

Tanpa bahasa, pemikiran tidak akan dapat digambarkan. “*I*” merupakan proses pemikiran dan proses tindakan yang aktual, sedangkan “*me*” adalah proses reflektif. Jika “*me*” merupakan suatu sikap



orang lain yang sudah diorganisasikan, maka “*I*” merespons pada “*me*” dan “*me*” merefleksikan “*I*” dalam suatu proses dialektika secara terus-menerus. Terlebih lagi, “*I*” itu berasal dari organisme. Karakter “*I*” yang lain merupakan ketidakmenentuan yang relatif dan tidak dapat diramalkan. “*I*” merupakan langkah aktual yang diambil oleh seseorang dengan ketidakmenentuan di masa mendatang, sehingga nantinya “*I*” tidak dapat dihitung secara keseluruhan dan ia selalu terkait dengan spontanitas, perubahan, kebebasan, dan inisiatif.

Mead memandang diri itu adalah individu yang menjadi objek sosial bagi dirinya. Menjadi objek sosial bagi dirinya berarti individu itu memperoleh makna-makna yang diartikan oleh orang lain di sekelilingnya. Setelah diri berkembang dengan sempurna, maka diri itu tidak akan statis. Ia senantiasa akan berubah sesuai perubahan yang dialami oleh kelompok itu. Hal ini bukanlah satu-satunya dasar dari perubahan diri. Seperti yang dijelaskan Mead dalam uraiannya mengenai perbedaan antara “*me*” dan “*I*” sebagai dua fase diri. “*Me*” itu merupakan organisasi diri yang biasa dan menurut adat. Ia mengandung sikap orang lain yang dikelola sebagai panduan bagi tingkah laku orang itu. Oleh karena kita memasukkan sikap orang lain untuk membentuk kesadaran diri kita sendiri, maka “*me*” itu menjadi diri sebagai objek yang kita sadari semasa kita mengingat kembali tingkah laku kita.

Andai diri itu hanya mengandung “*me*”, maka diri itu hanya menjadi agen masyarakat. Fungsi kita hanyalah memenuhi perkiraan dan harapan orang lain. Menurut Mead, diri juga mengandung “*I*” yang merujuk pada aspek diri yang aktif dan mengikuti gerak hati. Apa yang kita lakukan semasa merespons citra diri (*me*) itu tidak pernah sama dengan citra diri itu. Ada perkara baru yang diciptakan antara refleksi dan tindakan, dan perkara baru dalam tindakan itulah yang dinamakan “*I*”. Jadi, “*I*” itu merupakan aspek diri yang kreatif dan inovatif, yang memungkinkan bentuk-bentuk baru tingkah laku terwujud dalam tindakan seseorang itu.

Mead menyebutkan, bahwa seseorang itu dalam membentuk konsep dirinya dengan jalan mengambil perspektif orang lain dan melihat dirinya sendiri sebagai objek. Untuk itu, ia melewati tiga ta-



hap. *Pertama*, fase bermain di mana si individu itu “memainkan” peran sosial dari orang lain. Tahap ini menyumbang perkembangan kemampuan untuk merangsang perilaku individu itu sendiri menurut perspektif orang lain dalam suatu peran yang berhubungan dengan itu. *Kedua*, fase pertandingan yang terjadi setelah pengalaman sosial individu tadi berkembang. Tahap pertandingan ini dapat dibedakan dari tahap bermain dengan adanya suatu tingkat organisasi yang lebih tinggi. Konsep diri individu terdiri dari kesadaran subjektif individu terhadap perannya yang khusus dalam kegiatan bersama itu, termasuk persepsi-persepsi tentang harapan dan respons dari yang lain. *Terakhir*, fase mengambil peran (*generalized other*), yaitu ketika individu mengontrol perilakunya sendiri menurut peran-peran umum yang bersifat impersonal. Fase ini terdiri atas harapan-harapan dan standar-standar umum yang berguna untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai garis tindakannya. Menurut Mead, *generalized other* itu bisa mengatasi suatu kelompok atau komunitas tertentu secara transenden atau juga mengatasi batas-batas kemasyarakatan.

Dalam pandangan Mead, organisasi definisi, sikap, konsep diri individu yang subjektif, dan organisasi kelompok, institusi sosial dan masyarakat itu sendiri yang bersifat eksternal, keduanya saling berhubungan dan saling tergantung, karena baik organisasi internal maupun yang eksternal muncul dari proses komunikasi simbolik. Dalam hal ini organisasi sosial memperlihatkan inteligensi manusia dan pilihannya. Dengan munculnya inteligensi, individu-individu dapat melampaui (*transced*) banyak batas yang muncul dari sifat biologisnya atau lingkungan fisik.

Interaksi simbolik menunjuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antarmanusia. Herbert Blumer menyatakan, aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain tersebut. Respons individu, baik langsung maupun tidak langsung, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Dengan demikian, interaksi antarmanusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain.



Blumer melanjutkan pernyataan tadi dengan mengatakan, bahwa manusia itu memiliki kedirian di mana ia membuat dirinya menjadi objek dari tindakannya sendiri, atau ia bertindak menuju pada tindakan orang lain. Kedirian itu dijembatani oleh bahasa yang mendorong manusia untuk mengabstraksikan sesuatu yang berasal dari lingkungannya.

Dari dua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang memiliki kedirian mereka sendiri; tindakan individu itu merupakan suatu konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, tindakan kolektif itu terdiri atas beberapa susunan tindakan sejumlah individu.

Manusia, kata Mead, menggunakan isyarat-isyarat dan simbol-simbol, seperti bahasa, untuk membentuk suatu pemikiran (*mind*). Hal itu mungkin terjadi, sebab isyarat membawa arti khusus yang muncul terhadap individu yang lain yang memiliki ide yang sama.

Konsep Mead tentang masyarakat juga menekankan pada khususnya model praksis manusia, di mana tanganlah yang menjembatani interaksi manusia dengan alam dan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, ia menekankan adanya keterkaitan antara pengalaman praktis yang dijembatani oleh tangan. Pembicaraan dan tangan secara bersama-sama berperan dalam pengembangan manusia sosial. Maksudnya, beberapa jenis aktivitas kerja sama telah menyebabkan adanya kedirian. Di sana ada “peleburan kelembagaan” di mana organisme itu bekerja sama. Dengan jenis kerja sama ini, isyarat individual akan menjadi stimulus bagi dirinya sendiri dengan bentuk yang sama sebagaimana bentuk stimulus yang lain, sehingga perbandingan isyarat dapat menghilangkan karakter individual. Kondisi semacam itu diduga berada dalam pengembangan kedirian (*self*).

Manusia menyatu dalam tindakan sosial. Tahapan tindakan itu dijelaskan Mead, meliputi: impulsif, persepsi, manipulasi, dan pemenuhan. Manusia dalam tindakan sosial melibatkan refleksi dan mengasumsikan adanya suatu kualitas yang baru; dorongan ini dipancarkan melalui alasan dan tindakan yang terjadi dalam dunia yang bermakna.



Menurut Mead, pemikiran dan refleksi adalah alat untuk memecahkan permasalahan. Fungsi pokoknya secara aktif memberikan sarana dan mengarahkan suatu tindakan. Pemikiran dan tindakan merupakan momen-momen dalam kesatuan proses dialektika. Hal ini sangat jelas, di saat tindakan itu dikontrol, di mana pemikiran refleksi ini lahir untuk memperkirakan cara-cara alternatif dalam mengabstraksikan tindakan tersebut.

Suatu tindakan menurut Mead memiliki empat fase. Keempat fase itu meliputi: fase gerak hati, pengamatan, manipulasi, dan memberikannya arah. Fase manipulasi merupakan pengalaman yang dibawa oleh suatu tindakan. Walaupun suatu tindakan dapat dianalisis sebagai satu unit tingkah laku individu, isi suatu tindakan manusia itu biasanya berisi aspek sosial. Kehadiran orang lain di sekeliling kita membuat tindakan kita bersifat sosial. Orang lain yang hadir itu datang dalam diri kita melalui perwakilan simbolik. Simbol signifikan yang memungkinkan kesadaran diri dan tindakan reflektif manusia juga membawa kombinasi bahasa bagi komunitas manusia. Melalui bahasa, kita sebagai manusia dapat mempunyai kecerdasan reflektif yang sempurna.

## F. MANUSIA DAN MAKNA DALAM PERSPEKTIF INTERAKSI SIMBOLIS

Mead memandang realitas sosial dengan kacamata psikologi sosial sebagai suatu proses yang dinamis, bukan statis. Manusia maupun aturan sosial berada dalam proses “akan jadi”, bukan sebagai fakta yang sudah lengkap dan terminasi. Mead meneliti bagaimana proses individu menjadi anggota organisasi (masyarakat).

Mead mengawalinya dari diri (*self*) yang menjalani internalisasi atau interpretasi subjektif atas realitas struktur yang lebih luas. “Diri” ini berkembang ketika orang belajar “mengambil peranan orang lain” atau masuk ke dalam pertandingan (*games*) ketimbang permainan (*play*).

Manusia di samping mampu memahami orang lain juga mampu memahami dirinya sendiri. Hal ini ditunjang oleh penguasaan bahasa sebagai simbol dan isyarat terpenting, karena dengan bahasa dan isyarat itu seseorang dapat melakukan interaksi simbolik dengan dirinya sendiri.



Bagi Blumer interaksionis simbolik bertumpu pada tiga premis, yaitu: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka; (2) makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain; (3) makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, sebagaimana dinyatakan oleh Blumer, “Bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu.”

Mengenai sebab tindakan, Blumer mengatakan bahwa tindakan manusia bukan disebabkan oleh sejumlah “kekuatan luar” ataupun “kekuatan dalam.” Gambaran yang benar mengenai hal itu adalah individu membentuk objek-objek, lalu merancang objek-objek yang berbeda, kemudian memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol.

Dengan demikian, manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahui melalui apa yang disebutnya sebagai proses *self-indication*, yaitu “proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu selalu menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.” Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba untuk “mengantisipasi” tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu.

Blumer (1969) menegaskan prioritas interaksi kepada struktur dengan menyatakan bahwa, “Proses sosial dalam kehidupan kelompok menciptakan dan menghancurkan aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok.” Karenanya, individu bertindak selaras demi menyangga norma-norma atau aturan-aturan perilaku. Masyarakat merupakan hasil interaksi simbolis, di sisi lain pendekatan kaum interaksionis simbolik melihat manusia saling membatasi tindakan-tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu menurut mode stimulus-respons.



Interaksionisme simbolis yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah ide dasar sebagai berikut: (1) Masyarakat terdiri atas manusia yang berinteraksi. Mereka bersama-sama membentuk organisasi atau struktur sosial. (2) Interaksi mencakup berbagai kegiatan manusia yang saling berhubungan. Interaksi-interaksi nonsymbolis mencakup stimulus-respons sederhana. Interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan. Bahasa merupakan simbol yang paling umum. (3) Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik; makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Ada tiga macam kategori objek yaitu: (a) objek fisik; (b) objek sosial, misalnya ibu, guru; (c) objek abstrak, seperti nilai-nilai, hak. (4) Selain mengenali objek eksternal, manusia juga mampu mengenali dirinya sendiri. Pandangan terhadap diri sendiri ini lahir di saat proses interaksi simbolik. (5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. (6) Tindakan itu saling dikaitkan dan disesuaikan oleh para anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama.

Blumer menegaskan bahwa metodologi interaksi simbolis merupakan pengkajian fenomena sosial secara langsung. Tujuannya memperoleh gambaran lebih jelas mengenai apa yang sedang terjadi dalam lapangan subjek penelitian, dengan sikap yang selalu waspada atas urgensi menguji dan memperbaiki observasi-observasi. Hasil observasi itu disebut Blumer sebagai tindakan “pemekaan konsep” (pen: menambah kepekaan konsep yang digunakan).

## G. INTERAKSI SIMBOLIS DALAM PARADIGMA DEFINISI SOSIAL

Ide dasar dari teori interaksi simbolis bersifat menentang behaviorisme radikal yang dipelopori oleh J.B. Watson. Hal ini tampak dari sikap Mead yang bermaksud membedakan interaksi simbolis dari teori behaviorisme radikal itu.

Behaviorisme mempelajari tingkah laku (*behavior*) manusia secara objektif dari luar. Adapun Mead mempelajari tindakan sosial dengan menggunakan introspeksi dari dalam. Penganut behaviorisme cenderung melihat perilaku manusia seperti perilaku binatang, dalam arti semata-mata hanya merupakan hasil rangsangan dari luar. Lagi-lagi



Mead, dengan teori interaksi simboliknya, melihat adanya perbedaan kualitatif antara keduanya.

Istilah interaksi simbolik, menurut Blumer, menunjuk sifat khas dari interaksi antarmanusia, yaitu manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan atas tindakan orang lain itu harus didasarkan atas makna. Interaksi antar-individu bukan sekadar merupakan proses respons dari stimulus sebelumnya, melainkan dijematani oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau upaya untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Kemampuan interpretasi dalam proses berpikir merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia.

Kemudian timbul pertanyaan mengenai proses terjadinya kehidupan bermasyarakat. Dapatkah teori interaksi simbolik mempertahankan argumennya mengenai kemampuan khas manusia, yang membedakannya dari hewan, dengan menjawab pertanyaan tersebut?

*Pertama*, fakta sosial harus dianggap bukan sebagai pengendali dan pemaksa tindakan manusia. Fakta sosial berada dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia, sehingga organisasi masyarakat merupakan kerangka yang mewadahi terjadinya tindakan-tindakan sosial, bukan merupakan faktor penentu dari tindakan sosial.

Individu-individu yang berada dalam unit tindakan saling menyesuaikan atau saling mencocokkan tindakan mereka dalam proses tindakan kolektif dari individu yang tergabung dalam kelompok itu. Bagi teori ini, individual, interaksi, dan interpretasi merupakan tiga terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial.

Selanjutnya, Arnold Rose mengemukakan serangkaian asumsi mengenai substansi dari teori interaksi simbolis, meliputi: (1) manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-simbol; (2) melalui simbol-simbol manusia berkemampuan menstimuli orang lain dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari stimuli yang diterimanya dari orang lain itu; (3) melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti dan nilai-nilai, sehingga dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain; (4) simbol, makna, serta nilai-nilai yang berhubungan dengan mereka





tidak hanya terpikirkan oleh mereka dalam bagian-bagian yang terpisah, tetapi selalu dalam bentuk kelompok.

Proposisi umum (deduksi) yang bisa diambil adalah individu menentukan sendiri segala sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Asumsi ini merupakan titik perbedaan paling kontras antara pandangan interaksi simbolik dengan pandangan behaviorisme yang mengabaikan penilaian individual.

Menurut Mead, manusia mempunyai sejumlah kemungkinan tindakan dalam pemikirannya sebelum ia memulai tindakan yang sebenarnya. Sebelum melakukan tindakan yang sebenarnya, seseorang akan melakukan olah pikir tentang segala kemungkinan alternatif tindakan itu secara mental melalui pertimbangan pemikirannya. Karena itu, dalam proses tindakan manusia itu terdapat suatu proses mental yang tertutup sebelum proses tindakan yang sebenarnya dalam bentuk tingkah laku yang sebenarnya atau kelihatan.



# BAB 6

## TEORI FENOMENOLOGI

---

### A. PENDAHULUAN<sup>1</sup>

Aliran fenomenologi lahir sebagai reaksi metodologi positivistik yang diperkenalkan Comte (Waters, 1994: 30). Pendekatan positivisme ini selalu mengandalkan seperangkat fakta sosial yang bersifat objektif, atas gejala yang tampak secara kasatmata. Dengan demikian, metodologi ini cenderung melihat fenomena hanya dari kulitnya, dan kurang mampu memahami makna di balik gejala yang tampak tersebut. Sedangkan fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu (Campbell, 1994: 233). Dalam konsep ini, Collins (1997: 103) menyebutnya sebagai proses penelitian yang menekankan “*meaningfulness*”. Begitu juga dalam memahami perlawanan warga desa terhadap kekuasaan kepala desa, tidak hanya hendak melihat apa yang tampak di permukaan, akan tetapi lebih pada pemahaman mengapa warga desa itu melakukan perlawanan.

Sebagai suatu istilah, fenomenologi sebenarnya sudah ada sejak Emmanuel Kant yang mencoba memikirkan dan memilah unsur mana yang berasal dari pengalaman dan unsur mana yang terdapat di dalam akal. Kemudian, lebih luas lagi ketika digunakan oleh Hegel

---

<sup>1</sup> Lihat Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Surabaya Insan Cendekia, 2002).

dalam memandang tentang tesis dan antitesis yang melahirkan sintesis (Hadiwiyono, 1985: 63-65). Fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus sebagai metode berpikir diperkenalkan oleh Edmund Husserl, yang beranjak dari kebenaran fenomena, seperti yang tampak apa adanya. Suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak itu adalah objek yang penuh dengan makna yang transendental (Hadiwiyono, 1985: 139-140). Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakikat kebenaran, maka harus mampu berpikir lebih dalam lagi melampaui fenomena yang tampak itu, hingga mendapatkan '*meaningfulness*' (Dilthey, dalam Collin, 1997: 104; Waters, 1994: 31).

## B. PROSES PEMAHAMAN TERHADAP TINDAKAN

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekadar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive* (Waters, 1994: 34-35).

Pemahaman makna tindakan dengan pendekatan *verstehen* mendapat koreksi dari Alfred Schutz. Menurut Schutz, tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Schutz, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya (Waters, 1994: 34-35).

Schutz (1967) beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang ditampakkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna atau *verstehen* tersebut (Collins, 1997: 110-114; Waters, 1994: 32-33; Campbell, 1994: 234).



Menurut Orleans (2000: 1458), fenomenologi digunakan dalam dua cara mendasar, yaitu: (1) untuk menteorikan masalah sosiologi yang substansial; dan (2) untuk meningkatkan kecukupan metode penelitian sosiologis. Lebih lanjut Orleans menjelaskan, bahwa fenomenologi berupaya menawarkan sebuah koreksi terhadap tekanan bidang tersebut pada konseptualisasi positivistis, dan metode-metode risetnya yang menganggap bahwa isu yang ditemukan oleh metode fenomenologi sebagai suatu hal yang menarik.

Menurut Collin (1997: 111), fenomenologi mampu mengungkap objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa objek kognitif maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental.

Orleans menyitir pendapat Darroch dan Silver (1982), mengatakan bahwa fenomenologi diterapkan agak berbeda dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sosial konvensional lainnya. Fenomenologi lebih banyak digunakan pada tingkat metasosiologis, dengan menunjukkan premis-premisnya melalui analisis deskriptif dari prosedur situasional dan bangunan sosialnya (Orleans, 2000: 1457). Fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai entitas—sesuatu yang ada dalam dunia (Collins, 1997: 115).

Orleans mengambil contoh dari Peele (1985) tentang fenomena “alkoholisme sebagai sebuah penyakit.” Fenomenologi tidak pernah berusaha mencari pendapat dari informan apakah hal ini benar atau salah, akan tetapi fenomenologi akan berusaha ‘mereduksi’ kesadaran informan dalam memahami fenomena itu.

Pada saat yang demikian itu, menurut Hitzler dan Keller (Orleans, 2000: 1458), fenomenologi menggunakan alat yang disebut dengan metode *verstehen*, untuk menggambarkan secara detail tentang bagaimana kesadaran itu berjalan dengan sendirinya. Dalam melakukan *verstehen* itu, menurut Trauzzi (Orleans, 2000: 1458) seorang peneliti harus masuk ke dalam pikiran informan. Oleh karena



itu, menurut Bogdan dan Taylor, (Orleans, 2000: 1459) fenomenologi harus menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara yang intensif (agar mampu menyelami orientasi subjek atau ‘dunia kehidupannya’), melakukan analisis dari kelompok kecil, dalam memahami keadaan sosial. Bahkan menurut Leiter, maupun menurut Mehan dan Wood, (Orleans, 2000: 1459) peneliti harus mampu membuka selubung praktik yang digunakan oleh orang yang melakukan kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar mengetahui bagaimana rutinitas itu berlangsung.

Menurut Schegloff dan Sacks (Orleans, 2000: 1460), dalam melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif ini peneliti merekam kondisi sosial sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang dilakukan oleh informan. Pada saat itu peneliti melakukan interpretasi terhadap makna perbuatan, dan pikiran mereka tentang struktur keadaan. Analisis terhadap tindakan informan merupakan sebuah teknik yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana manusia berpikir tentang dirinya sendiri melalui pembicaraan, dan bagaimana mereka berpikir tentang pembicaraan mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki (Collins, 1997: 116).

Fenomenologi menekankan bahwa keunikan spirit manusia membutuhkan beberapa metode yang khusus sehingga seseorang mampu memahaminya secara autentik. Menurut Weber, dalam memahami sosiobudaya maka diperlukan beberapa metode khusus dalam rangka memahami makna tindakan orang lain. Metode *verstehen* itu mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan, yang hendak dicapai atau yang disebut *in order to motive* (Waters, 1994: 34-35).

Menurut Weber untuk memahami motif dan makna tindakan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu, tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan (*in order to motive*) yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa hubungan tatap muka, atau *face to face relationship* antar person yang bersifat unik. Tindakan rasional semacam itu adalah suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat afektual, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan



intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri (Collins, 1997: 113).

Dunia sosial, bagi Weber merupakan dunia intersubjektif, sebagaimana dikatakan oleh golongan fenomenologis. Weber meyakini bahwa empati, simpati, intuisi, dan intensionalitas merupakan hal yang esensial untuk dipahami. Weber mengembangkan teknik intuitif yang melibatkan bentuk identifikasi terhadap aktor, dengan partisipasi yang simpatis terhadap emosi mereka. Dunia sosial merupakan suatu dunia arti yang intersubjektif, merupakan proses interaksi makna dan simbolik di antara manusia yang bertindak. Drama permainan hidup ini harus dipahami oleh partisipan, sehingga melampaui pandangan aktor.

Sebagian pandangan Weber memang diamini oleh Schutz, dengan menyatakan bahwa dunia sosial keseharian selalu merupakan sesuatu yang intersubjektif. Dunia selalu dibagi dengan yang lainnya, di mana ia menjalani dan menafsirkannya. Dunia tak pernah bersifat pribadi, bahkan dalam kesadaran seseorang terdapat kesadaran orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan berhadapan dengan realitas makna bersama. Pada puncaknya, seluruh pengalaman tersebut dapat dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk bahasa dan tindakan.

Tetapi, pendekatan *verstehen* mendapat koreksi dari Schutz, bahwa tindakan subjektif para aktor itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses panjang. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Schutz ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya (Waters, 1994: 34-35). Fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang diatributkan pada tindakan-tindakannya dan sebab-sebab objektif serta konsekuensi dari tindakannya itu.

### C. PENGALAMAN SEHARI-HARI DAN KESADARAN MELAKUKAN TINDAKAN

Pendekatan yang lebih komprehensif ditawarkan oleh Heidegger dengan sebutan “reduksi fenomenologis”. Tujuan Heidegger menawarkan pendekatan itu agar peneliti kembali pada realitas sesungguhnya, yakni “kembali kepada gejala pertama dan yang sebenarnya”, Heidegger menyebut metodenya itu sebagai fenomenologi hermeneutik, yakni



suatu metode yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengungkap makna yang tersembunyi.

Dalam tulisan Campbell (1994: 231-265) disebutkan, bahwa metode Husserl dimaksudkan untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalamannya mengenai fenomena atau penampilan sebagaimana terjadi dalam apa yang disebutnya sebagai “arus kesadaran”. Husserl bertolak dari pengandaian bahwa pengalaman tidak hanya diberikan pada individu, tetapi bersifat intensional. Jadi, semua kesadaran adalah kesadaran akan sebuah objek, dan karenanya sebagian merupakan konstruksi individu yang mengarahkan perhatiannya pada objek kesadarannya. Husserl berpikir bahwa kita dapat membersihkan diri dari prasangka-prasangka kita yang terkumpul mengenai dunia dan mereduksi pengalaman kita sampai unsur dasarnya pengalaman itu.

Beberapa kata kunci dari Husserl antara lain: (a) fenomena adalah realitas esensi atau dalam fenomena tercakup pula nomena; (b) pengamatan adalah aktivitas spiritual atau bersifat rohaniah; (c) kesadaran adalah sesuatu yang intensional (terbuka dan terarah pada objek); (d) substansi adalah konkret yang menggambarkan isi dan struktur kenyataan dan sekaligus bisa dijangkau (Campbell, 1994: 232).

Pengamatan Husserl mengenai struktur intensionalitas kesadaran, merumuskan adanya empat aktivitas yang inheren dalam kesadaran itu, yaitu: (1) objektifikasi, (2) identifikasi, (3) korelasi, dan (4) konstitusi (Abidin, 2000).

*Intensional objektifikasi* berarti mengarahkan data (yang merupakan bagian integral dari aliran kesadaran) kepada objek-objek intensional. Fungsi intensionalitas adalah menghubungkan data yang sudah didapat dalam aliran kesadaran. Husserl melihat dalam pengarahannya intensional ada struktur yang kompleks, dan dalam struktur tersebut data digunakan sebagai bahan mentah dan diintegrasikan dalam objek yang membentuk kutub objektifnya.

*Intensionalitas sebagai identifikasi*, yakni suatu intensi yang mengarahkan berbagai data dan peristiwa kemudian pada objek hasil objektifikasi. Identifikasi banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek



dari dalam, seperti motivasi, minat, keterlibatan emosional, maupun intelektual.

*Intensionalitas korelasi*, menghubungkan setiap aspek dari objek yang identik menunjuk pada aspek-aspek lain yang menjadi horizonnya. Bagian depan sebuah objek menunjuk pada bagian samping, muka, bawah, dan belakang. Aspek yang menjadi horizon dari objek memberi pengharapan pada subjek untuk mengalaminya kembali di kemudian hari. Aspek atau bagian-bagian ini selalu dibayangi oleh objek identik yang sudah tampak lebih awal.

*Intensionalitas konstitusi* melihat bahwa aktivitas-aktivitas intensional berfungsi mengkonstitusikan objek-objek intensional. Objek intensional tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah ada, tetapi diciptakan oleh aktivitas-aktivitas intensional itu sendiri. Objek intensional sebenarnya berasal dari endapan-endapan aktivitas intensional.

Dimiyati (2000: 67-90), dengan menyadur beberapa gagasan Husserl, menyatakan bahwa fenomenologi merupakan analisis deskriptif dan introspektif tentang kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman dan melakukan pengolahan-pengolahan pengertian.

Manusia adalah makhluk yang melakukan komunikasi, interaksi, partisipasi, dan penyebab yang bertujuan. Kekhususan manusia terletak pada intensionalitas psikisnya yang ia sadari, yang dikaitkan dengan dunia arti dan makna. Dunia makna manusia ini dapat diteliti dengan metode fenomenologi.

Menurut Orleans (dalam Dimiyati, 2000: 70), fenomenologi adalah instrumen untuk memahami lebih jauh hubungan antara kesadaran individu dan kehidupan sosialnya. Fenomenologi berupaya mengungkap bagaimana aksi sosial, situasi sosial, dan masyarakat sebagai produk kesadaran manusia. Fenomenologi beranggapan bahwa masyarakat adalah hasil konstruksi manusia. Teknik fenomenologi dalam sosiologi lebih dikenal dengan “pengurangan”. Pendekatan ini





melakukan serangkaian investigasi dari makna konteks dalam pandangan dunia umum, yang semuanya tergantung penafsiran. Reduksi dari pengurangan fenomena adalah teknik untuk mencapai teori yang bermakna dari elemen kesadaran. Analisis fenomenologi mempunyai prosedur yang bersifat individual.

Dunia kehidupan sosial ditetapkan oleh pengalaman berdasarkan kesadaran. Melalui kesadaran pelaku berusaha mencapai maksud-maksudnya. Jadi, kehidupan sehari-hari adalah orientasi pragmatis masa depan. Pengandaianya adalah bahwa manusia memiliki motif tertentu, dan mereka berusaha mengubah dunia yang mereka tangkap. Hakikat tujuan-tujuan tersebut juga dipengaruhi oleh persediaan pengetahuannya.

Persediaan pengetahuan yang diwariskan tersedia sebagai sekumpulan tipifikasi yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita mengenali suatu situasi dan mengetahui resep tertentu untuk menghadapinya secara tepat. Akhirnya kita dapat menyaksikan kehidupan sehari-hari menurut konfigurasi-konfigurasi bermakna dan bukan situasi yang kacau-balau. Apabila individu mampu mengantisipasi cara yang mungkin untuk menghadapi kehidupannya, maka oleh Schutz disebut telah melakukan kegiatan rasional. Kegiatan ini merupakan pengalaman yang dihayati, yang mencerminkan inti kesadaran subjektif.

Menurut Schutz, manusia adalah makhluk sosial. Akibatnya, kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan sebuah dunia intersubjektif dengan makna beragam. Kita dituntut untuk saling memahami satu sama yang lain dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Ada penerimaan timbal balik dan pemahaman atas dasar pengalaman yang bersamaan, dan tipifikasi bersama atas dunia bersama. Melalui proses tipifikasi diri, kita belajar menyesuaikan diri ke dalam dunia yang lebih luas, dengan melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal. Jumlah hubungan sosial tersebut membentuk totalitas masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dapat memakai simbol-simbol yang diwarisinya untuk memberi makna pada tingkah lakunya sendiri. Jadi, sebuah pandangan deskriptif atau interpretatif



tentang tindakan sosial dapat diterima hanya jika tampak masuk akal bagi pelaku sosial yang relevan.

Schutz meletakkan hakikat kondisi manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Schutz mengikuti Husserl dengan menyatakan bahwa proses pemahaman aktual kegiatan kita dan memberi makna padanya, dapat dihasilkan melalui refleksi atas tingkah laku. Selanjutnya, kita dapat menyeleksi unsur-unsur pengalaman kita yang memungkinkan kita untuk melihat tindakan kita sendiri sebagai sebuah tindakan yang bermakna.

Tujuan Schutz adalah untuk mengingatkan bahwa *verstehen* merupakan metode yang masuk akal dalam kehidupan keseharian yang mampu menghasilkan kebenaran umum, yang terkontrol, dan dapat dibuktikan. Schutz mengasumsikan bahwa dunia kehidupan dianggap tidak problematis.

#### D. APOCHE DALAM METODE FENOMENOLOGI

Metode Husserl adalah merefleksikan pengalaman sosial—kesadaran akan diri kita sendiri yang berinteraksi dengan orang lain atau intensi dengan kehidupan sosial. Untuk melakukan hal ini, kita mesti menangguk atau memberi “tanda kurung” (*apoche*) pada kepercayaan kita akan dunia di luar pengalaman kita, dan meninggalkan prasangka kita tentang seperti apa masyarakat itu.

Epistemologi Husserl mengajak kembali kepada persoalannya sendiri. Tercermin pada ajaran tentang metode berpikir dengan jalan membebaskan diri dari pengaruh tradisi ilmiah yang ada/idola yang ada/pikiran subjektif/prasangka. Untuk itu, objek yang ingin diketahui harus diamati secara rohani terus-menerus melalui reduksi. Hasil reduksi itu kemudian dibatin (*einkammerung*).

Penjelasan Husserl masuk dalam ranah fenomenologi idealis, karena kehidupan sosial ditempatkan dalam pengalaman-pengalaman individu yang dihayati, padahal dalam realitasnya pengalaman sosial berubah menjadi pengalaman komunal yang tidak dapat direduksikan (Campbell 1994: 236).



Menurut Zeitlin (1998: 207-278), filsafat fenomenologi Husserl adalah filsafat tanpa adanya praduga-praduga, yang hanya dapat dideteksi melalui metode “reduksi.” Metode reduksi berupaya memahami karakter dasar kesadaran yang berupa intensionalitas. Pada saat seseorang mulai merefleksikan dunia yang telah tereduksinya, maka seseorang akan segera menemukan bahwa dunia bukanlah bersifat pribadi melainkan sebuah dunia makna dan nilai yang telah diciptakan secara intersubjektivitas. Intersubjektivitas ada secara murni dalam ego yang merefleksi dan secara murni dibentuk dari sumber intensionalitas (Zeitlin 1998: 212).

Schutz menyarankan, agar dalam menerapkan pendekatan fenomenologis, peneliti hendaknya tidak memiliki kepentingan apa pun. Untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan, pengamat akan berperan sebagai partisipan dalam dunia sosial. Sikap netralitas ini tercermin dari kemampuan peneliti dalam melakukan refleksi posisi, situasi, dan pengalamannya dalam dunia sosial. Bahwa seorang peneliti juga dituntut untuk tidak bias pengalaman.

## **E. PROSES REDUKSI: UPAYA PENJERNIHAN FENOMENA**

Aliran fenomenologi lahir sebagai reaksi metodologi positivistik yang diperkenalkan Comte (Waters, 1994: 30). Husserl berpendapat bahwa ilmu positif memerlukan pendamping dari pendekatan filsafat fenomenologis. Pemahaman Husserl diawali dengan ajakan kembali pada sumber atau kembali kepada realitas yang sesungguhnya. Untuk itu, perlu langkah-langkah metodis yang disebut “reduksi”. Melalui reduksi, kita menunda upaya menyimpulkan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Langkah-langkah metodis yang dimaksud adalah reduksi eidetis, reduksi fenomenologi, dan reduksi transendental (Collin, 1997: 111; Abidin, 2000).

### **1. Reduksi Fenomenologi**

Reduksi fenomenologis merupakan langkah pemurnian fenomena yang harus dilakukan oleh peneliti. Dalam reduksi fenomenologi ini, semua pengalaman dalam bentuk kesadaran harus disaring atau



dikurung sementara (*bracketing*). Selama pengamatan berlangsung, peneliti harus mencari tahu “Ada apa di balik fenomena yang tampak itu?” dan menelusuri “Apa yang dialami subjek pada alam kesadaran?” Artinya, peneliti berupaya mendapatkan “hakikat” fenomena atau gejala sebenarnya. Collins (1997: 111) menyebutnya sebagai langkah “*bracketing*” atau “*epoche*”. Untuk melakukan “*epoche*” dalam rangka mendapatkan kemurnian fenomena, maka ketika peneliti memasuki lapangan, ia harus melepaskan segala atribut seperti adat istiadat, jabatan, agama, dan pandangan ilmu pengetahuannya (Dimiyati, 2000: 80).

Tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan berakar (Craib, 1986: 126). Di sini, fenomenologi merupakan bentuk idealisme yang tertarik pada struktur-struktur dan cara bekerjanya kesadaran manusia, yang secara implisit meyakini bahwa dunia yang kita huni diciptakan atas dasar kesadaran (Craib, 1986: 127). Dunia eksternal tidak ditolak keberadaannya, tetapi dunia luar hanya dapat dimengerti melalui kesadaran kita. Kita hanya tertarik dengan dunia sejauh dia memiliki makna, maka kita harus memahami dengan membuatnya menjadi bermakna. Cara memahaminya harus mengesampingkan apa yang sudah kita asumsikan “tahu,” lalu menelusuri proses untuk memahaminya. Pengesampingan hal seperti itu oleh Craib (yang dikutip dari pandangan Husserl) disebut *reduksi fenomenologis*. Tetapi, pengesampingan ini dipersoalkan oleh Schutz, karena meninggalkan kita sebagai insan yang memiliki arus pengalaman (*stream of experience*). Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna (Craib, 1986: 128).

## 2. Reduksi Eidetis

Reduksi eidetis merupakan tahapan reduksi kedua dalam penelitian berperspektif fenomenologi. Reduksi ini bertujuan memperoleh intisari dari hakikat yang telah ada. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menempuh langkah-langkah yang disarankan oleh Bertens (1987), yaitu:



*Pertama*, peneliti akan selalu mengabstraksikan (menggambarkan secara imajinatif) tentang peristiwa sosial yang hidup, yakni menggambarkan seolah-olah “proses penurunan kepala desa itu sedang berlangsung” (dalam contoh protes masyarakat terhadap kepala desanya).

*Kedua*, melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang bersifat tetap atau tidak menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi situasi dan kondisi. Melalui cara *interpretive understanding* ini, diharapkan dapat mempermudah bagi peneliti secara langsung membuat klasifikasi dan identifikasi perolehan data di lapangan. Dalam kegiatan ini pencatatan data dan informasi dengan menggunakan *field notes*, dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara naturalistik (*naturalistic interview*) berlangsung, misalnya di rumah informan. Selanjutnya, dari hasil observasi perilaku tindakan masyarakat dipilih-pilih untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sehingga diperoleh makna dan pemahaman. Proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap “jenuh” yaitu setelah tidak ada variasi jawaban baru lagi dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan-informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

### 3. Reduksi Transendental

Reduksi transendental berusaha memilah hakikat yang masih bersifat empiris menjadi hakikat yang murni. Hal yang empiris disaring, sehingga tinggal kesadaran aktivitas itu sendiri berupa kesadaran murni (transendental). Berikutnya mencapai fase *erlabnisse* (kesadaran murni) tempat untuk mengkonstitusikan atau menyusun objek yang dijadikan sasaran. Dalam fase ini subjek mengalami dirinya sendiri dan kebenaran yang dicapai adalah kesesuaian antara apa yang dilihat, dipikir dan dialami dengan makna yang diketemukan. Inilah yang disebut substansi. Pemakaian kata transendental karena dalam proses tersebut ego mampu menemukan dirinya sendiri, juga mampu menemukan objek untuk dirinya sendiri yang memiliki arti dan keberadaan.



Reduksi transendental ini bertujuan untuk memperoleh subjek secara murni (Collins, 1997: 111). Untuk mendapatkan kemurnian dan kejernihan data, peneliti melakukan klarifikasi data terhadap data yang terkumpul. Proses klarifikasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber dan teknik yang disebut dengan *data triangulation* tupun *investigator triangulation* (Denzin, 1994: 214-215).

Melalui reduksi transendental, Husserl menemukan adanya esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Setiap aktivitas intensional (*neotic*) adalah aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan kutub objektifnya, yakni objek yang disadari (Collins, 1997: 111; Abidin, 2000). Proses reduksi berupaya menemukan adanya dunia yang dihayati oleh subjek atau kesadaran. Dunia yang dihayati dan struktur-strukturnya hanya dapat diamati dengan cara melepaskan diri kita dari prasangka-prasangka teoretis yang berasal dari ilmu yang telah kita miliki sebelumnya (Collins, 1997: 112).

Menurut Husserl, setiap subjek transendental mengkonstitusikan dunianya sendiri, atas dasar perspektifnya sendiri yang unik dan khas. Dunia tidak dipahami sebagai dunia objektif dalam pengertian fisik material, tetapi dunia sebagaimana dihayati oleh subjek sebagai pribadi. Dunia merupakan dunia subjektif dan bersifat relatif. Dalam konteks ini, fenomenologi dapat menjadi dasar dan pendamping ilmu positivistik. Tugas fenomenologis adalah menggali dunia yang dihayati dan hasilnya dapat dijadikan sebagai asumsi ilmu pengetahuan (Collins, 1997: 113).

## F. TESIS, ANTITESIS, DAN SINTESIS DALAM FENOMENOLOGI

Kemampuan berpikir dialektis (tesis, antitesis, sintesis) merupakan persyaratan ilmiah awal yang perlu dimiliki oleh seorang ahli sosiologi, sehingga dia mampu menyintesis gejala-gejala sosial yang kelihatan kontradiktif dan paradoksal ke dalam suatu sistem penafsiran yang sistematis, ilmiah, dan meyakinkan.

Ciri paradoksal dari hakikat manusia itu tercermin dalam dunia intersubjektif. Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda daripada kenyataan tunggal. Kenyataan kehidupan sehari-hari memiliki dimensi objektif dan subjektif. Manusia adalah pencipta



kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi. Sebagai suatu kenyataan objektif, maka ia kembali memengaruhi manusia lewat proses internalisasi yang mencerminkan kenyataan subjektif.

Proses objektifikasi, internalisasi, dan eksternalisasi dalam fenomenologi merupakan hasil pengembangan dari Peter Ludwig Berger (1987: 21-76). Berger dalam mengembangkan fenomenologi, secara eksplisit bermaksud menggabungkan analisis-analisis yang bersifat holistik dan individualistik. Berger tertarik untuk melihat makna-makna yang berkembang di luar makna umum, karena ia berpendapat bahwa manusia memiliki naluri yang stabil dan bersifat khusus.

Konsep objektifikasi, internalisasi, dan eksternalisasi pada dasarnya merupakan koreksi Berger terhadap fenomenologi Schutz. Berger melihat bahwa Schutz terlalu memaksakan sektor kehidupan keseharian yang bersifat rutinitas dalam kajian terbatas dan tidak bersifat problematik. Ia menganggap bahwa orang awam itu pada dasarnya tidak kritis. Mereka hidup dan bekerja dalam pola kehidupan yang tidak problematik. Makna dan validitas yang ditangkapnya sebagai sesuatu yang sudah ada (pen: *given*). Oleh karena itu, jika metode itu dengan begitu saja diterapkan, maka peneliti hanya akan menangkap makna tindakan orang awam apa adanya (sebagai orang itu sendiri) memahami makna tindakan tersebut. Dengan demikian hasil kajiannya akan memberikan gambaran makna yang sangat dangkal, karena akal sehat kehidupan keseharian merupakan pengetahuan yang dianggap telah memadai dan valid tanpa harus dibahas lebih lanjut secara problematik (Berger, 1994: 151).

Menurut Peter L. Berger, untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menempatkan tujuan pragmatis pada posisi problematik. Artinya, individu bertindak secara praktis atas dasar pilihan rasional, seperti yang dimaksudkan oleh Weber, bahwa pemahaman terhadap tindakan seseorang itu tidak hanya berasal dari pengaruh dalam dirinya sendiri, akan tetapi juga merupakan produk dari kesadarannya terhadap orang lain. Berbeda dengan Weber, Peter L. Berger melihat tindakan manusia sebagai produk dari proses objektifikasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Artinya, setiap tindakan



manusia dilakukan secara dialektis antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga “momen” yang simultan, yaitu: (1) eksternalisasi, penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia; (2) objektifikasi, interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi; dan (3) proses internalisasi, yakni individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial di mana ia menjadi bagian atau anggota di dalamnya (Berger, 1994: 210).

Pembahasan Berger tentang fenomenologi ditekankan pada interaksi antar-individu. Sesuatu yang ingin diketahui Berger adalah pengetahuan umum tentang kehidupan sehari-hari, cara masyarakat mengorganisasi pengalamannya, dan secara khusus tentang dunia sosialnya. Berger menekankan, bahwa aktor memiliki makna subjektif, rasional, dan bebas, dalam arti tidak ditentukan secara mekanik. Aktivitas manusia harus dipahami sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas individu harus diinterpretasikan (Berger, 1987: 71).

Menurut Schutz, cara kita mengkonstruksikan makna di luar arus utama pengalaman ialah melalui proses tipifikasi. Hubungan-hubungan makna diorganisasi secara bersama, juga melalui proses tipifikasi, atau disebut *stock of knowledge*. Kumpulan pengetahuan memiliki kegunaan praktis dari dunia itu sendiri, bukan sekadar pengetahuan tentang dunia.

Craib (1986: 129) memandang masyarakat sebagai suatu konspirasi, karena itu fenomenologi melihat bahwa dunia merupakan ciptaan individu. Craib mengungkapkan bahwa kita sama-sama mempunyai pikiran yang mendasari aktivitas-aktivitas sosial. Tipifikasi dari pikiran sehat kita mampu mengatur dunia sosial dengan cara rasional.

Schutz memberikan suatu program bahwa untuk memahami tindakan sosial dapat dilakukan melalui penafsiran. Proses penafsiran tersebut dapat digunakan untuk memperjelas dan memeriksa makna yang sesungguhnya. Secara umum, karya Schutz telah dapat digunakan untuk memberikan konsep kepekaan yang sering bersifat implisit.





Dari hasil perbincangan tersebut, terdapat dua varian tentang fenomenologi, yaitu: (1) fenomenologi hermeneutik; dan (2) fenomenologi eksistensial (Berger, 1987: 71). Fenomenologi hermeneutik terfokus pada aspek kolektif dari budaya, yang *concern* dengan bahasa. Teks dapat dianalisis secara objektif, dalam arti mengeksplorasi dan menentukan kealamiahannya dari struktur komunikasi. Sementara itu, fenomenologi eksistensial berorientasi pada level individu dari budaya, ini meliputi internalisasi kesadaran subjektif dari individu. Setiap fenomena dapat dideskripsikan sebagai sesuatu yang empiris, terkait dengan kehidupan sehari-hari.

## G. KRITIK TERHADAP FENOMENOLOGI

Sebagai teori, fenomenologi selain mempunyai kelebihan juga tidak lepas dari kelemahan. Kelebihan fenomenologi untuk memahami perlawanan masyarakat desa (seperti contoh di atas) dibandingkan pendekatan lain, antara lain: (1) Mampu menggali *because motive* dan *in order to motive* perlawanan dengan lebih detail. (2) Lebih cermat dalam menyimpulkan sesuatu. Kesimpulan dilakukan setelah melalui proses “reduksi.” Melalui reduksi, ada upaya menunda proses penyimpulan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. (3) Mampu menggali dunia subjektif yang unik, aktif, dan khas secara interpretatif (*interpretive understanding*). (4) Mampu menyajikan makna-makna yang berkembang di luar makna umum. (5) Mampu membangun dialektika antara individu dan lingkungan hingga mencapai keseimbangan dalam memahami fenomena sosial. (6) Mampu memahami aktivitas manusia sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat. Dengan kata lain, fenomenologi mampu masuk pada dunia makna yang terkonsep dalam diri individu.

Konsep fenomenologi juga masih perlu dikembangkan lebih lanjut berkaitan dengan proses sosial. Fenomenologi harus dipandang bukan sebagai sesuatu yang kaku, sebab dalam setiap proses sosial, akan selalu muncul berbagai fenomena baru yang benar-benar berbeda dengan fenomena sebelumnya.



Kelemahan fenomenologi versi Alfred Schutz menurut Craib (1986: 130) belum cukup kritis, karena ia bekerja dalam ritme kehidupan yang tidak problematik. Metodologi Schutz hanya akan menangkap makna tindakan orang awam sebagaimana orang awam sendiri memahami makna tersebut. Jadi, gambaran yang diberikan Schutz tentang fenomena masih bersifat dangkal.

Kritik senada juga datang dari Berger (1994: 151), dengan mengatakan bahwa Schutz terlalu memaksakan sektor kehidupan keseharian yang bersifat rutinitas dalam kajian terbatas dan tidak bersifat problematik. Hasil kajian Schutz akan memberikan gambaran makna yang sangat dangkal, karena akal sehat kehidupan keseharian merupakan pengetahuan yang dianggap telah memadai dan valid tanpa harus dibahas lebih lanjut secara problematik.

Kelemahan analisis fenomenologi yang lain, yaitu terlalu mende-wakan individu, dari proses pengambilan data, pemaknaan, pemahaman subjektif, sehingga hasil analisisnya bukan sebagai kajian yang bersifat *general universal*.

## H. FENOMENOLOGI KONTEMPORER

Mengingat versi fenomenologi Edmund Husserl dan Schutz, selain lebih menjelaskan tentang *because motive* dari suatu tindakan, juga lebih ke arah filsafati sehingga teori ini belum begitu aplikatif. Begitu pula konsep *verstehen* dari Weber, lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai (*in order to motive*), maka tampaknya fenomenologi yang mutakhir yang bisa digunakan dalam penelitian lebih condong pada fenomenologi versi Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman. Namun demikian, fenomenologi versi Berger dan Luckman juga masih perlu dikembangkan lagi oleh setiap peneliti, sehingga menghasilkan fenomenologi yang lebih aplikatif sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Bagi Berger, analisis fenomenologi merupakan: (1) metode deskriptif dan bersifat empiris, dan beroperasi dengan asumsi kausalitas yang universal; (2) mendeskripsikan secara sistematis tentang dunia kehidupan sehari-hari (Berger, 1987: 71). Pandangan Berger tentang ob-



jektif tidak harus positivistik. Objektif adalah orientasi sekitar interaksi antarnilai dan investigasi ilmu, dan *grounded*, yang selanjutnya disebut reduksi fenomenologis. Aspek orientasi nilai dalam fenomenologi versi Berger terkait dengan budaya. Berger mendefinisikan budaya sebagai totalitas produk manusia. Pendefinisian seperti ini tidak hanya memandang budaya sebagai artefak materi dan sosiokultural nonmateri yang membimbing tingkah laku manusia, tetapi juga refleksi atas dunianya yang didasari oleh kesadaran manusia. Produk manifes yang berupa makna subjektif dan intensionalitas, turut memproduksi kultur. Kultur akan eksis bila masyarakat memiliki kesadaran terhadapnya (Berger, 1987: 72).

Apa yang ditawarkan Berger bukanlah teori formal, melainkan suatu orientasi atau pandangan baru dalam perspektif sosiologis. Hal ini terlihat ketika ia menjelaskan untuk pemahaman bermacam-macam dimensi kebudayaan, hasilnya adalah cara yang unik dalam melihat data kehidupan sehari-hari (Berger, 1987: 73). Berger menyoroti banyaknya kasus yang terjadi, di mana ilmu fenomenologi justru menghindari realitas empiris (Berger, 1987: 73). Berger berupaya mengubah orientasi fenomenologi idealis menjadi fenomenologi empiris. Secara empiris ia membahas tentang kemasukakalan, yang selalu dikaitkan dengan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini berupaya menggambarkan pengalaman manusia sebagai sesuatu yang hidup dan bukan seperti yang ditekankan. Artinya, dalam memandang realitas sosial hanya didasarkan pada pelaku-pelaku yang terlibat. Menurut Berger, kesadaran sebagai jaringan tentang pemahaman ialah sebuah fenomena subjektif seseorang. Unsur-unsur penting dalam kehidupan sosial merupakan hasil pembagian (antarsubjek) yang terus-menerus dengan yang lainnya.

Bagi Berger, fenomenologi bersifat empiris karena didasarkan pada pengalaman. Dalam proses sosial akan terjadi interaksi individu dengan dunianya. Tugas fenomenologi adalah menganalisis kenyataan-kenyataan sosial. Analisis terhadap realitas sosial akan memasukkan konsep interpretasi pada praktik kehidupan sehari-hari.



Jadi, prinsip fenomenologi yang bisa digunakan oleh para peneliti kontemporer (saat ini) antara lain: (1) peneliti menempatkan subjek yang diteliti sebagai subjek yang kritis dan problematik; (2) individu bertindak secara praktis atas dasar pilihan rasional; (3) menempatkan pemahaman seseorang tidak hanya berasal dari pengaruh dalam dirinya, tetapi juga merupakan produk dari kesadaran terhadap orang lain. Dengan kata lain, tindakan manusia sebagai proses internalisasi dan eksternalisasi.

Inti fenomenologi kontemporer yaitu: (1) Menekankan pada interaksi antar-individu tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perlawanan. (2) Berusaha mendeskripsikan fenomena sebagai sesuatu yang empiris. (3) Berusaha menggambarkan pengalaman manusia sebagai sesuatu yang hidup, bukan seperti yang dirumuskan dalam teori. Dengan kata lain, berupaya menganalisis kenyataan-kenyataan sosial yang benar-benar terjadi. (4) Melihat kesadaran pada aras makna. (5) Memerhatikan teks termasuk bahasa secara objektif.

Banyak peneliti yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam melakukan penelitian, seperti Rosenhan (1992) melihat kehidupan sehari-hari di rumah sakit jiwa. Rosenhan bermaksud menjawab adakah perbedaan perilaku antara orang waras dan yang tidak waras. Ia menggunakan *co-researcher* tiga orang perempuan dan lima orang laki-laki. Kedelapan orang itu menyamar sebagai orang yang tidak waras. Mereka melakukan pengamatan dan wawancara secara partisipasi untuk mengetahui pengalaman informan mengenai kehidupan sehari-hari (Bogdan dan Taylor, 1992: 213). Peneliti lain adalah Howard Griffin, meneliti “fenomenologi perjalanan.” Pada saat penelitian, ia menggunakan sejenis obat guna mengubah warna kulit untuk sementara waktu, dan memotong rambutnya sehingga ia tampak seperti orang negro dan setengah baya. Griffin melakukan perjalanan secara *hitch hike*, bepergian dengan menggunakan kendaraan umum tanpa membayar menuju ke pedalaman Mississippi, Alabama, Georgia. Laporan penelitian fenomenologi perjalanannya diterbitkan dalam buku *Black Like Me* (Bogdan dan Taylor, 1992: 216).



Bogdan dan Taylor juga mencantumkan contoh penelitian secara fenomenologi tentang penelitian di bangsal yang diperuntukkan penderita lemah mental yang parah sekali. Laporan ini memuat situasi dan kondisi sehari-hari terutama tentang kejadian yang terpilih, termasuk kebrutalan penghuni, joroknya tempat tidur, corat-coret di dinding, mandi bersama, proses belajar mengajar, proses membersihkan ruang tamu dari kotoran para penghuni yang hidup sembarangan.



# BAB 7

## TEORI ETNOMETODOLOGI

---

### A. PENDAHULUAN

Etnometodologi dikenal sebagai salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang berbagai upaya, langkah, dan penerapan pengetahuan umum pada kelompok komunitas, untuk menghasilkan dan mengenali subjek, realitas, dan alur tindakan yang bisa dipahami bersama-sama (Kuper, 2000).

Etnometodologi dikembangkan oleh Harold Garfinkel (1967),<sup>1</sup> yang selama 20 tahun melaksanakan penelitian di Harvard di bawah arahan Talcott Parsons.<sup>2</sup> Talcott Parsons memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan sosiologi di Amerika, bahkan dunia dalam beberapa dekade. Sebagian besar teorinya dihasilkan melalui penelitian empiris di University of California, Los Angeles.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Harold Garfinkel dapat dikatakan sebagai tokoh hasil pendidikan sosiologi tradisi Amerika.

---

<sup>1</sup> Harold Garfinkel menyelesaikan studinya di Princeton dan menghabiskan karier akademiknya di University of California at Los Angeles. Meskipun ia tidak banyak menulis, akan tetapi ia ditahbiskan sebagai peletak dasar dari etnometodologi. Baca lebih lanjut Malcom Waters, *Modern Sociological Theory*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 37.

<sup>2</sup> Pada tahun 1946 dan 1952, Garfinkel mengikuti pendidikan dan latihan di bidang sosiologi yang diadakano oleh Talcott Parsons.

<sup>3</sup> Pada tahun 1946, Parson mendirikan *Social Relation* di Universitas Harvard dan dia sekaligus menjadi pimpinan departemen itu. Sebagai pimpinan, Parson mempunyai kepentingan untuk memajukan teori sosial yang sistematis, yang kemudian menghasilkan karya *The Structure of Social Action* dengan teori dasarnya yang disebut *Voluntary Theory of Action*. Lebih lanjut dapat diperiksa di Anthony Gidden dan Jonathan Turner, *Social Theory Today*, (California: Stanford University, 1987), hlm 226.

Bidang ini muncul pada akhir 1960-an sebagai reaksi terhadap perspektif sosiologi sebelumnya, terutama fungsionalisme struktural, yang menganggap bahwa segala realitas merupakan akibat yang telah ditentukan oleh faktor struktur sosial. Sebaliknya, etnometodologi menekankan bahwa realitas sosial dan organisasi sosial merupakan hasil dari agen-agen yang telah ada sebelumnya, yang mengarahkan tindakan mereka dengan menggunakan alasan-alasan pengetahuan umum yang ada.

Etnometodologi merupakan rumpun penelitian kualitatif yang beranjak dari paradigma fenomenologi. Dengan kata lain, etnometodologi pada dasarnya adalah ‘anak’ dari fenomenologi Schutzian (Santoso, 2001: 122). Ciri utama etnometodologi adalah ciri reflektifnya, yang berarti bahwa cara orang bertindak dan mengatur struktur sosialnya adalah sama dengan prosedur memberikan nilai terhadap struktur tersebut. Memberikan penilaian adalah merefleksikan pada perilaku dan berusaha membuatnya menjadi terpahami, atau bermakna bagi seseorang dan orang lain. Manusia dianggap melakukan hal ini secara terus-menerus, serta secara praktis manusia menciptakan dan membuat ulang dunia sosial. Dalam memberikan penilaian dan menciptakan dunia, manusia dianggap sangat kompeten dan terampil dalam menjelaskan *setting* pengalaman sosial setiap hari (Santoso, 2001: 122-123).

Etnometodologi memusatkan perhatian pada sifat-sifat pengetahuan umum, dan memunculkan suatu alur yang disebut dengan revolusi kognitif dalam ilmu-ilmu sosial. Namun demikian, etnometodologi berkaitan dengan sifat-sifat yang berkenaan dengan publik dan masyarakat ketimbang aspek psikologis proses kognitif.

Garfinkel berpendapat, bahwa untuk mencapai suatu tujuan memerlukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada pengetahuan atas realitas yang nyata. Garfinkel menyadari bahwa realitas terbagi dan berubah-ubah secara dinamis. Oleh karena itu, ia mengkritik pandangan Parsons berkaitan dengan *framework* tentang teori pengetahuan yang mendasari teori-teori Parsons. Menurut Garfinkel, Parsons mengasumsikan bahwa pengetahuan yang akurat adalah dunia eksternal



yang didapatkan melalui penerapan aturan-aturan logika empiris.<sup>4</sup> Sebaliknya, Garfinkel dalam melakukan pemikiran mendasarkan diri pada sosiologi fenomenologinya Alfred Schutz, yang mengamati bahwa setiap aktor melakukan pendekatan atas dunia sosial dengan setumpuk ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, yang terdiri atas konstruksi dan kategori-kategori pengetahuan umum yang berasal dari masyarakat.

Pemikiran Schutz yang diapresiasi oleh Garfinkel adalah pemikiran yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi dunia sosial berdasarkan kekuatannya untuk melakukan interpretasi. Dalam hal ini, aktor sosial menginterpretasikan situasi dan tindakannya, jangkauan tujuan dan motivasi-motivasi lainnya, untuk memperoleh pemahaman intersubjektif dan mengordinasikan tindakan-tindakannya, dan secara umum mengarahkan dunia sosialnya (Heritage, 1987).

Dengan memunculkan masalah pada situasi sosial, Garfinkel mampu menunjukkan sentralitas pemahaman dasar dan ilmu pengetahuan kontekstual yang dianggap wajar pada pemahaman seseorang atas realitas sosial dan pada pengelolaan tindakan sosial yang terkoordinasi.

Garfinkel menyimpulkan bahwa pemahaman atas tindakan-tindakan dan realitas tersebut mencakup pula suatu proses pengajuan alasan yang saling berkaitan, baik sebagian maupun keseluruhan. Menurut Mannheim (1952), ia mengistilahkan proses ini sebagai metode penafsiran dokumenter. Dalam proses ini, asumsi dasar dan prosedur inferensial digunakan untuk menyusun keterkaitan antara seorang aktor atau suatu realitas dengan aspek-aspek konteks normatif maupun konteks dalam kehidupan nyata.

Garfinkel menunjukkan bahwa deskripsi atau pengkodean tindakan atas realitas merupakan suatu hal yang pada dasarnya hanya dapat dikira-kira. Kekhususan berbagai objek dan realitas tertentu tidak memiliki keterkaitan “satu sama lain.” Dengan demikian, proses penyesuaian ini memerlukan serangkaian tindakan penilaian yang

<sup>4</sup> Pemikiran seperti ini dipengaruhi oleh Durkheim, yang membicarakan tentang fakta sosial yang bersifat eksternal tetapi memiliki kekuatan penekan bagi kelakuan manusia.





diistilahkan dengan “praktik-praktik *ad hoc*”. Penemuan ini merupakan kebalikan dari pengamatan yang terkenal dengan deskripsi tindakan. Suatu akibat dari pengamatan ini adalah pemahaman bersama dari pengamatan-pengamatan tersebut tidak dapat disebabkan oleh suatu budaya bersama melalui suatu penyesuaian sederhana dari konsep-konsep dan kata-kata yang dipahami bersama, tetapi dari suatu proses sosial yang dinamis (Garfinkel, 1967: 24-31).

Etnometodologi beranggapan bahwa suatu aspek dari pemahaman bersama atas dunia sosial tergantung pada berbagai metode alasan yang terselubung. Metode-metode ini bersifat prosedural, secara sosial dimiliki bersama dan tidak pernah berhenti digunakan di setiap realitas yang terjadi.

Etnometodologi, di samping sebagai suatu dasar untuk memahami tindakan, prosedur, juga berfungsi sebagai sumber yang menghasilkan tindakan. Etnometodologi bercirikan: mengamati kegiatan di mana pada anggota kelompok tertentu menghasilkan dan mengelola latar kejadian sehari-hari yang terorganisasi; identik dengan prosedur yang ditempuh oleh para anggota itu dalam membuat latar-latar tersebut dapat dipertimbangkan.

Garfinkel menunjukkan bahwa pengajuan alasan merupakan hal penting bagi produksi dan pemahaman tindakan sosial. Bagi Garfinkel, prosedur tersebut merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan sosial yang tertata dan menunjukkan suatu ancaman primordial bagi kemungkinan realitas sosial itu sendiri.

## B. INTI ETNOMETODOLOGI

Etnometodologi beranggapan bahwa pranata-pranata sosial dipertahankan sebagai entitas nyata melalui suatu kerangka perhitungan terhadap realitas sosial yang dipahami dan diterapkan.

Etnometodologi merupakan suatu studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Etnometodologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari.



Garfinkel mengemukakan tiga hal kunci dasar etnometodologi, yaitu: (1) ada perbedaan antara ungkapan yang objektif dan yang diindikasikan; (2) refleksitas berbagai tindakan praktis; dan (3) kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Garfinkel menegaskan bahwa pada saat menganalisis tindakan, para sosiolog harus menyadari bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks yang lebih luas. Setiap tindakan memiliki historis yang dapat ditelusuri pada konteks lain. Pada konteks sosial tidak ada keteraturan atau keajegan. Jadi yang ajek adalah ketidakajekan itu sendiri.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982: 37), pengertian etnometodologi tidaklah selalu mengacu pada suatu model atau metode pengumpulan data pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan, akan tetapi lebih merupakan arah ke mana problematika penelitian itu tertuju. Dengan demikian, etnometodologi mengacu pada suatu studi mengenai bagaimana seorang individu dalam suatu komunitas bertindak dan bertingkah laku serta berusaha memahami kehidupan sehari-hari aktor yang diteliti.

Hal ini sejalan dengan ide Garfinkel—pencetus etnometodologi—yang mengatakan bahwa: *“I use term ‘ethnomethodology’ to refer to the investigation of the rational properties of indexical expressions and other practical actions as contingent on going accomplishments of organized artful practices of everyday live”* (Garfinkel, 1967: 11; Dyson, 2001: 118). Dengan demikian etnometodologi mengisyaratkan upaya mendeskripsikan dan memahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagaimana pola interaksi, cara berpikir, perasaan mereka, dan cara bicara mereka.

Dalam etnometodologi mengenai istilah *everyday life, common-sense understanding, practical accomplishments*, dan *routing grounds for social actions* (Bogdan dan Biklen, 1982: 37; Dyson, 2001: 120).

Teori etnometodologi pernah dilakukan oleh Cicourel (1968), mengenai kebijakan yang berkenaan dengan perilaku menyimpang ‘kejahatan yang dilakukan anak-anak.’ Studi ini menunjukkan bahwa



kejahatan yang dilakukan anak-anak berhubungan erat dengan latar belakang keluarga pelaku kejahatan tersebut. Mereka yang melakukan kejahatan biasanya berasal dari *broken home*. Anak-anak dari keluarga yang selalu ribut mempunyai kecenderungan yang lebih besar.

Metode etnometodologi juga pernah digunakan oleh Atkinson (1978), mengenai bunuh diri. Dengan mengamati kejadian sehari-hari yang tercatat di kantor polisi. Catatan-catatan resmi yang terakumulasi dalam angka-angka statistik resmi.

Kritik terhadap etnometodologi yang gencar diperdebatkan adalah: bahwa penggunaan catatan-catatan resmi dari organisasi tertentu memiliki sifat membangun sekaligus menghancurkan. Langkah itu sebagai langkah yang menghancurkan, karena telah menentang perlakuan sosiologi tradisional. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat menghancurkan karena statistik resmi bisa jadi sangat bersifat tempelan belaka dan tidak ada maknanya sama sekali.

### C. PERBEDAAN FENOMENOLOGI DAN ETNOMETODOLOGI

Etnometodologi mengambil fenomenologi dan menggabungkannya dengan sosiologi tradisional untuk menghasilkan suatu perspektif unik yang menekankan pada penelitian empiris. Ahli etnometodologi cenderung memfokuskan pada tindakan dan interaksi, sedang ahli fenomenologi pada kesadaran dan budaya. Para etnometodologis cenderung menekankan keabsahan para aktor, sedangkan fenomenologis meragukannya.

Sosiologi etnometodologi dan fenomenologis merupakan teori yang terpisah tetapi berkaitan. Keduanya mempunyai dasar intelektual bersama, pada karya Husserl dan Schutz, dan keduanya memfokuskan pada pikiran dan tindakan individual.

Pembahasan mengenai fenomenologi, menurut Edmund Husserl, dimulai dengan pengertian sikap wajar (*natural attitude*), penggolongan (*bracketing*), suatu ilmu tentang kesadaran (*consciousness*), dan kesengajaan (*intentionality*). Hal ini diperjelas dan dibahas oleh Alfred Schultz lewat teorinya mengenai pembedaan dunia sehari-hari dengan ilmu. Maka, dia membagi dasar dunia sosial ke dalam empat wilayah,



yaitu masa depan (*folgewelt*), masa lalu (*forwelt*), dunia sekitar (*umwelt*), dan dunia serta (*mitwelt*) (Ritzer, 1983).

Sementara itu, etnometodologi merupakan metodologi yang dipakai dalam membuat laporan etnografik, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa kultural, menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi dengan landasan filsafat fenomenologi. Mishler mengemukakan bahwa etnografi menggunakan metode kualitatif dan analisis holistik. Adapun Goetz dan LeCompte mengatakan, bahwa model ini menggunakan data empiris atau teori yang dikonstruksi di lapangan.

Penelitian kualitatif lain yang berlandaskan fenomenologi adalah model *grounded research* (Glasser & Strauss), model paradigma naturalistik (Guba & Lincoln), dan model interaksi simbolik (Blumer dan Kuhn). Ketiganya merupakan sampel utama perkembangan metodologi bersama etnografik-etnometodologi.

Studi etnografi menetapkan sampel atas prinsip pragmatik dan teoretis agar hasil penelitian memiliki komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan transabilitas (dapat diterjemahkan) pada kasus-kasus hasil penelitian lainnya.

Peneliti etnografi dituntut untuk meninggalkan prakonsep atau praduga teori yang dimilikinya. Sebaliknya, dia harus memahami secara mendalam konteks yang diteliti. Tidak lagi menggunakan kerangka teori Barat, tetapi mengangkat dari *grass root* sebagaimana masyarakat itu sendiri menjelaskan. Sehingga, studi etnometodologi berkembang pada lingkungan masyarakat lebih luas dan menjadi tumpang-tindih dengan studi sosiologi dan antropologi.

Sejak 1960-an, telah tumbuh gerakan yang hendak mempertahankan kemapanan dengan berupaya meninggalkan teori-teori substantif serta mengembangkan interpretasi dan diskursus tentang realitas sosial itu sendiri. Mereka melakukan penentangan pada *grand theories* dan metodologi fungsional yang tampil objektif. *Critical Ethnography* oleh Lather (1986) menjelaskan, kejadian dan mencari pemahaman lewat pemaknaan realitas sosial sesuai dengan *experience near* daripada penelitian makna itu sendiri.



#### D. ETNOMETODOLOGI GARFINKEL

Etnometodologi pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel (1967). Etnometodologi merupakan suatu studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Etnometodologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari.

Etnometodologi telah menyebabkan suatu dampak yang berkelanjutan terhadap kepekaan terhadap suatu ranah sosial. Etnometodologi menghasilkan dampak luas atas spektrum ranah yang saling bersinggungan, seperti ranah linguistik (Levinson, 1983), ranah kecerdasan buatan (Suchman, 1987) yang berkaitan dengan komunikasi, tindakan, dan pengajuan alasan praktis.

Penganut teori kritis dalam etnografi mencermati bahwa studi etnografi sudah terlalu bersifat teoretis dan bersikap netral pada struktur sosial yang ada.

*Critical Ethnography* mencermati struktur sosial, seperti sistem kelas, patriakat, dan rasisme bertentangan dengan humanisme (Muhadjir, 2000).

Nilai eksperimen, baik bagi peneliti maupun bagi pihak yang diteliti dapat sekali dipertanyakan. Garfinkel mengakui ada beberapa orang yang diteliti itu menemukan pengalaman mereka yang tidak menyenangkan dan “jarang sekali bersifat informatif.”

Untuk maksud ini, Garfinkel bersama dengan kelompoknya telah bergabung selama beberapa tahun dalam suatu penelitian dengan tradisi fenomenologis. Upaya pokok Garfinkel difokuskan pada studi empiris terhadap keseharian, aktivitas dan fenomena yang umum. Dia mencoba menjelaskan lewat tulisannya *Studies in Ethnomethodology* bahwa: (1) perbincangan keseharian secara umum memaparkan sesuatu yang lebih memiliki makna daripada kata-kata itu sendiri; (2) perbincangan itu merupakan praduga konteks makna yang umum; (3) pemahaman dari perbincangan tersebut mengandung suatu proses penafsiran terus-menerus secara intersubjektif; dan (4) dengan kejadian keseharian itu seseorang akan mendapatkan suatu pengertian atau



makna ucapan dari orang lain melalui pemahaman aturan itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya, karena pertukaran dan kejadian sehari-hari itu memiliki metodologi, terencana, dan rasional.

Garfinkel juga berusaha menggambarkan “secara empiris sampai sejauh mana model sosiologis terhadap manusia dalam masyarakat yang telah memotret individu itu sebagai boneka yang telah diputuskan.” Sebab, para sosiolog telah menggambarkan manusia itu dengan cara yang tidak memadai, yakni tipe mereka itu sama dengan harapan-harapan yang sudah dibakukan. Hal ini mengakibatkan kerancuan yang sering menghasilkan kesalahpahaman tentang karakter atau kondisi tindakan manusia yang stabil. Manusia secara sosiologis dianggap sebagai boneka sosiologis karena individu itu secara tak terelakkan akan tunduk pada pola-pola budaya resmi dan yang sudah dilegitimasi, dia tidak memiliki pilihan lain dan tidak memiliki akal sehat keseharian. Eksperimen Garfinkel mengkritik pendapat ini dan menunjukkan dengan jelas bahwa dalam suatu area tertentu dari kehidupan masyarakat terdapat perbedaan antara “boneka” dengan manusia riil dalam masyarakat.

Inti dari penelitian ini adalah menentukan berbagai konsekuensi pertentangan dengan aturan, yang menurut Parsons merupakan hal yang esensial bagi adanya kontrak kelembagaan. Penelitian ini memiliki implikasi yang lebih jauh dari sekadar diungkapkan; penelitian ini memiliki implikasi kritis dan revolusioner dalam menjalankan adanya potensi fleksibilitas, kemungkinan, dan perubahan-perubahan kelembagaan. Adapun prinsip-prinsip yang digambarkan menunjukkan perlunya kelembagaan itu hanya jika kepentingan kelembagaan itu sudah tidak perlu diuji lagi.

Implikasi yang lain berupa kritik pada konsep Schultz mengenai pengetahuan akal sehat pragmatis (keseharian) orang awam. Memang tidak diragukan bahwa pengetahuan semacam itu memadai bagi tujuan-tujuan yang praktis, tetapi secara lebih jauh tidak melibatkan adanya tingkat kepatuhan, kepasifan terhadap pranata sosial, sehingga melahirkan ketakutan dan kecemasan individu untuk menguji dan menentang struktur tersebut.



Penemuan ini juga menyatakan bahwa Schutz telah gagal dalam menjelaskan permasalahan sosiologis secara perinci. Sementara itu, ahli sosiologi dapat mempelajari dan mendapatkan sesuatu dari subjek yang dipelajarinya sekaligus mengajari mereka (Zeitlin, 1988).

Etnometodologi Garfinkel dengan tradisi humanistisnya menegaskan bahwa *subject-matter* sosiologi jauh berbeda dengan ilmu alam, dan mempertanyakan setiap pemunculan yang dianggap sosiolog sebagai realitas. Seseorang yang secara objektif mempelajari dunia sosial juga harus menyangsikan realitas dunia itu.

Sebagaimana kita lihat, etnometodologi tak hanya sekadar teori perilaku yang abstrak. Ia merupakan studi empiris bagaimana orang menangkap pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Secara empiris etnometodologi mempelajari konstruksi realitas yang dibuat seseorang di saat interaksi sehari-hari berlangsung.

Garfinkel mulai memperkenalkan pendekatan ini lewat doktrin yang dikuliahkannya di West Coast UCLA. Sebelumnya, Garfinkel telah menerima Parsonians dari Harvard University dan fenomenologi dari Alfred Schutz di New School for Social Research. Menurut Schutz, dunia intersubjektif terdiri atas realitas-realitas yang sangat berganda, dengan realitas sehari-hari sebagai pemeran utamanya. Schutz memerhatikannya kepada dunia sehari-hari yang merupakan *common-sense* atau diambil begitu saja.

Realitas *common-sense* dan eksistensi sehari-hari itu dapat disebut sebagai kepentingan praktis kita dalam dunia sosial. Kepentingan praktis ini dilawankan dengan kepentingan ilmiah. Pembahasan realitas *common-sense* oleh Schutz ini memberi Garfinkel suatu perspektif untuk melaksanakan studi etnometodologinya, dan menyediakan dasar teoritis bagi risalah-risalah etnometodologi yang lain. Etnometodologi secara empiris telah mencoba menunjukkan observasi filsufis sebagai mana yang dilakukan Schutz.

Etnometodologi menyangkut studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari khususnya aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja. Garfinkel membatasi etnometodologi sebagai “penyelidikan atas ungkapan indeksikal dan tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan



penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang terorganisasi.” Termasuk di dalamnya antara lain: (1) perbedaan antara ungkapan yang objektif dan indeksikal; (2) reflektivitas berbagai tindakan praktis; dan (3) kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam konteks sehari-hari.

Menurut Garfinkel, ungkapan objektif sulit diterapkan dalam percakapan informal, namun esensial bagi ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu, sosiologi mencoba memakai ungkapan objektif, tetapi ia menindih penggunaan ungkapan indeksikal sehari-hari dari subjek yang dipelajari. Hal ini sering terjadi, misalnya saja alat-alat penelitian sosiologi yang standar mencoba ketepatan ilmiah, tetapi mereka mempelajari manusia yang terlibat dalam realitas praktis yang sedang terbentuk. Fenomena seperti pembuatan keputusan, sikap-sikap sosial, sumber pengaruh, dan proses-proses lain yang berhubungan dengan sosiolog tidak disesuaikan dengan model ilmiah tetapi dengan model praktis.

Sementara itu, penjelasan “tindakan praktis” belum dianggap penting oleh para sosiolog. Maksudnya, mereka terlalu banyak mengambil begitu saja perilaku manusia dalam penyelidikan ilmiahnya. Padahal, “tindakan praktis” ini terdiri antara lain: “sejumlah besar masalah yang dari segi organisasi serius dan penting, berbagai sumber, tujuan, alasan, kesempatan, tugas, dan tentu saja dasar-dasar untuk membantah atau meramalkan berbagai prosedur dan penemuan yang dihasilkan.” Selanjutnya Garfinkel menganjurkan studi tindakan praktis yang demikian untuk menentukan apa sebenarnya yang sedang terjadi.

*Ketiga*, di saat menganalisis tindakan, para sosiolog harus sadar bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks yang lebih luas. Setiap tindakan punya sejarah yang dapat ditelusuri pada konteks lain. Hal ini berlaku bagi tindakan yang berulang maupun yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kehidupan sehari-hari yang tidak memiliki kelangsungan sejarah bukan problema khusus. Pengulangan peristiwa sehari-hari melahirkan terjadinya penggelapan keragu-raguan terhadap realitasnya.

Etnometodologi Garfinkel menantang konsep dasar sosiologis mengenai keteraturan. Tampaknya dia setuju bahwa dalam peristiwa





sosial hanya sedikit peristiwa yang teratur. Keteraturan yang telah ditetapkan itu dibuat sesuai dengan norma-norma yang membimbing bagaimana manusia menanggapi dunia sosial ini. Proses memahami keteraturan dunia sosial itu akan menjadi jelas hanya di saat realitas tadi dipertanyakan. Ilustrasi proses ini dapat dilihat dari analisis percakapan informal yang menunjukkan bagaimana menanggapi pengertian dari apa yang sebenarnya sedang dikatakan (Poloma, 2000).

Peristiwa sosial sehari-hari harus bersifat sederhana dengan maksud dapat ditemui di mana saja, kapan saja. Bersifat kompleks, maksudnya peristiwa itu merupakan sejenis jaringan interaksi antarmanusia pada berbagai tingkat interaksi. Selanjutnya, kompleksitas peristiwa sosial yang terwujud dalam interaksi tersebut melibatkan dimensi kemanusiaan yang banyak segi.

Penelitian kualitatif selain memikirkan objek penelitian, yaitu realitas sosial, juga sadar akan pengalaman dirinya sehingga selalu berusaha untuk berpikir reflektif, historis, dan biografis. Ia terus-menerus mencari strategi penelitian empiris yang bisa membuat dirinya berhubungan dengan pengalaman hidup, masyarakat, dan struktural kebudayaan. Tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana manusia membentuk dan memberi arti pada tindakan-tindakan di dalam situasi sosial nyata. Dengan demikian, maka penelitian melakukan praktik interpretasi konstitusi-konstitusi sosial, di mana hal ini termasuk pendekatan interaksionisme. Ada dua macam pendekatan interaksionisme, yaitu interaksionisme simbolis dan etnometodologi.

Etnometodologi dari Garfinkel berusaha memperbaiki kelemahan para ahli sosiologi sebelumnya yang “cenderung naturalistik”. Ia adalah seorang pengikut aliran humanistik dalam memandang tindakan sosial, dengan menegaskan bahwa materi keilmuan sosiologi berbeda dengan ilmu alam. Etnometodologi mempelajari kegiatan manusia sehari-hari untuk menjelaskan: (i) perbedaan antara ungkapan yang objektif dan indeksikal; (ii) reflektivitas berbagai tindakan praktis; (iii) kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Untuk melaksanakan hal itu etnometodologi memegang prinsip, yaitu: (i) Memusatkan perhatian pada masalah keteraturan dengan menggabungkan “kepekaan fenomenologis” dengan perhatian utama pada praktik konstitusi sosial. (ii) Melukiskan aktor sosial sebagai “*judgemental dopes*” (pengambil keputusan “berpengaruh”) yang merespons kekuatan-kekuatan sosial eksternal, dan dimotivasi oleh arahan-arahan internal yang bersifat imperatif. (iii) Memusatkan perhatian pada terteliti dan melakukan penalaran umum, dengan tidak menghilangkan pepatah “*don’t argue with the members.*” (iv) Meneliti bermacam-macam aspek sosial. (v) Suatu aturan digunakan untuk membuat keputusan, memberi pertimbangan atas dasar rasionalitas menurut hukum sebagai hal yang benar, sebab hal itu dilakukan “sesuai dengan aturan.” (vi) Menekankan pada produksi praktis berkenaan dengan perasaan tentang realitas. (vii) Jika suatu realitas sosial dihasilkan “dari alam” dengan cara interpretatif anggota masyarakat, keadaan sosial anggota masyarakat adalah terwariskan sendiri. (viii) menyatakan realitas objektif sebagai pencapaian interaksi sosial. (ix) unsur-unsur dasar percakapan dapat dikemukakan dalam tiga premis. *Pertama*, interaksi terorganisasi secara struktural, dan hal ini dapat diobservasi di dalam keteraturan percakapan biasa. *Kedua*, semua interaksi secara kontekstual berorientasi pada percakapan produktif dan reflektif. *Ketiga*, kedua sifat tersebut merupakan ciri dari semua interaksi. (x) Perhatian pada waktu yang riil, urutan perinci percakapan sehari-hari mempersyaratkan metode yang naturalistik pada penelitian. (xi) Mengelaborasi “*post-analytic*” etnometodologi dengan memusatkan perhatian pada kompetensi lokal yang membentuk macam-macam domain “kerja” demi menentukan intisari atau “kebenaran keapaan” (atau hakikat) praktik-praktik sosial dalam keadaan yang sukar, domain-domain pengetahuan, dan tindakan-tindakan yang khusus (Dimiyati, 2000).

Nama interaksionisme simbolis dimaksudkan untuk menangkap keyakinan Mead bahwa interaksi sosial mencakup pemahaman timbal balik dan penafsiran isyarat-isyarat dan percakapan. Hal ini merupakan kunci bagi masyarakat manusia. Mead berpendapat, bahwa struktur



sosial peran dan institusi memengaruhi tingkah laku individu hanya melalui makna-makna bersama yang terungkap dalam simbol-simbol kelompok dan cara-cara simbol ini ditafsirkan dalam pertukaran di antara para individu. Para etnometodolog bergerak lebih jauh daripada interaksionisme simbolik dengan menyangkal adanya seperangkat kepercayaan dan nilai-nilai tertentu yang mendasari pada kohesi sosial. Walaupun para pemikir interaksionisme simbolik tidak mengandaikan bahwa ada sebuah kenyataan sosial yang baku dan disetujui secara seia sekata. Mereka menekankan bahwa dunia disusun dari “kenyataan majemuk”, bahkan untuk masing-masing individu-individu, mereka cenderung menghargai makna-makna interaksi sosial yang mereka paparkan. Para etnometodolog yang lebih radikal berpendapat bahwa ada sedikit makna silang—situasi dalam arti bagaimana sebuah situasi tampak pada satu partisipan atau sederetan partisipan tidak bisa disamakan dengan makna yang dimiliki orang lain dalam situasi-situasi yang tampaknya sama. Oleh karena itu, mereka berusaha mendukung makna situasi sosial yang jelas-jelas diterima dengan sengaja untuk pemahaman-pemahaman.

Garfinkel memerinci lima ‘kebijakan’ yang harus diikuti etnometodologi, yaitu:

- Setiap dan semua “*setting*” sosial, baik yang sepele maupun yang penting, selalu terbuka bagi investigasi karena masing-masing merupakan pencapaian praktis dari para anggotanya. Hubungan sosial apa pun tidak memiliki “*factity*” yang lebih besar daripada suatu pertemuan di ujung jalan yang biasa terjadi.
- Presentasi argumen, demonstrasi, statistik, dan lain-lain merupakan bentuk pencapaian yang bergantung pada susunan sosial yang menjadi tempat produksinya.
- Rasionalitas, objektivitas, efektivitas, konsistensi, dan lain-lain dari suatu aktivitas tidak dapat dinilai berdasarkan standar yang diimpor dari situasi lain (misalnya ilmu, sosiologi, dan logika formal), tetapi sebagai kesatuan akan situasi tempat terjadinya aktivitas tersebut.



- Suatu situasi dikatakan tertib sejauh partisipannya mampu saling memberikan penilaian yang dapat dipahami.
- Semua bentuk penyelidikan terdiri atas praktik-praktik yang rinci dan teratur, sehingga tidak ada perbedaan mendasar antara penilaian sosiologis dan penilaian setiap hari (Waters, 1994: 38-39; Santoso, 1998).

Kadang-kadang etnometodologi muncul untuk meruntuhkan semua bentuk karya sosiologis yang telah ada, dan secara tidak langsung menantang integritas para ahli sosiologi yang telah mapan. Seperti halnya fenomenologi, etnometodologi melihat organisasi sosial sebagai sesuatu yang harus dibangun di luar pengalaman yang berbeda dari individu-individu yang berbeda. Namun demikian, kalau Schutz berpendapat bahwa keteraturan merupakan hasil dari pengetahuan *common sense* yang dimiliki bersama, etnometodologi berpendapat bahwa pengetahuan seperti itu pada dasarnya tidak stabil.

Etnometodologi membutuhkan sekumpulan asumsi metafisik alternatif tentang sifat dunia sosial, yang meliputi:

1. dalam segala situasi interaksi manusia berupaya membentuk munculnya konsensus tentang *featur, setting* interaksi;
2. *featur* terdiri atas sikap, pendapat, kepercayaan, dan kognisi lain tentang sifat lingkungan sosial;
3. manusia terlibat dalam praktik dan metode antarpribadi secara eksplisit dan implisit.
4. praktik dan metode dibutuhkan dalam memasang dan membongkar “kumpulan persepsi manusia yang berinteraksi.”
5. Konsensus muncul sebagai refleksi atas aturan dan prosedur.
6. Dalam setiap situasi interaksi, aturan itu tidak bisa digeneralisasikan pada lingkungan lain.
7. Dengan mengganti aturan, para anggota dalam suatu lingkungan bisa saling menawarkan munculnya sebuah dunia “di luar sana” yang teratur dan “memaksa.”

Para sosiolog sering kali menyajikan kontra-argumen bahwa metode-metode mereka terdistorsi pada orang awam. Padahal, sosiolog



dan orang awam adalah sama, karena masing-masing menggunakan serangkaian metode untuk mendukung suatu praduga bahwa ada suatu tatanan sosial yang bisa diterima. Semua manusia berusaha membuat tatanan sosial yang alami yang bisa dipahami satu sama lain. Karena itu, pada tingkat paling abstrak, metode-metode yang dipakai oleh para sosiolog dan orang awam akan tampak sama (Jonathan H. Turner, 1974).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tulisan senada dapat dilihat pada Basrowi, Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Surabaya Insan Cendekia).



## BAGIAN 3

### PARADIGMA PERILAKU SOSIAL

#### PENJELASAN RINGKAS

Berbeda dengan paradigma definisi sosial yang sudah dijelaskan di muka, maka di dalam paradigma perilaku sosial ini sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Meskipun sama-sama berangkat dari pusat perhatian yang sama, yakni “interaksi antarmanusia,” tetapi paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang “perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari.” Jadi, dalam paradigma ini perilaku sosial itulah yang menjadi persoalan utama, karena dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Sementara apa yang ada di balik perilaku itu (misalnya saja: maksud dari perilaku tertentu, motivasi di balik perilaku itu, kebebasan, tanggung jawab) berada di luar sudut pandang paradigma perilaku sosial ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh George Ritzer (1980) dan dalam Ritzer dan Douglas J. Goodman, (2008), bahwa sosiologi menerima paradigma ini karena paradigma perilaku sosial memusatkan perhatian pada persoalan tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Dalam paradigma ini, perilaku manusia dalam interaksi sosial itu dilihat sebagai respons atau tanggapan (reaksi mekanis yang bersifat otomatis) dari sejumlah stimulus atau rangsangan yang muncul dalam interaksi tersebut. Reaksi mekanis dan otomatis seperti itu kerap terjadi dalam interaksi antar-individu tertentu (Veeger, 1993: 26). Dalam dunia politik, pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu sebagai contoh, kerap kali menaruh perhatian besar pada teknik-teknik

yang memastikan perilaku rakyat—memilih figur yang diinginkan. Di negara-negara totaliter umumnya mendukung paradigma ini, karena manusia dipandang sebagai individu yang perilakunya bersifat deterministik, sehingga mudah dimanipulasi baik melalui indoktrinasi, *brain-washing*, maupun dalam bentuk aksi-aksi propaganda sepihak. Adakalanya perilaku manusia tidak berbeda jauh dengan perilaku binatang, meskipun kita tahu manusia mampu berpikir dalam bertindak, tetapi pikirannya itu kerap mengikuti pola tertentu yang kurang lebih sama (Veeger, 1993: 27).

Tokoh utama yang bernaung di balik paradigma perilaku sosial ini dapatlah disebutkan nama George C. Homans, yang telah memperkenalkan teori pertukaran sosial (*Exchange theory*). Manusia digambarkan sebagai individu yang bertindak selalu atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, dan oleh karenanya masalah utama sosiologi (menurut paradigma ini) adalah mencari dan menelaah kepentingan-kepentingan itu. Sebaliknya, untuk mengetahui cita-cita, keyakinan, dan kebebasan individu, di balik perilakunya (dalam paradigma ini) hanya dipandang sebagai mitos atau *day dreaming* yang sulit dibuktikan secara empiris (lihat: Veeger, 1993: 27).

Ketiga paradigma yang baru saja dijelaskan di muka semuanya masuk akal, dan demikian pula dengan teori-teori yang dibangun di atasnya. Masing-masing mengungkapkan sebagian kebenaran, dengan asumsi-asumsi teoretis dan sudut pandang tertentu dalam memahami dunia sosial yang kompleks dan luas itu. Sudah barang tentu bangunan-bangunan teori dari masing-masing paradigma itu dengan sendirinya memiliki sejumlah kelebihan dan sekaligus pula sejumlah kelemahan menurut sudut pandang tertentu, apalagi sudut pandang itu memang berbeda. Para sosiolog besar seperti Emile Durkheim, Max Weber, atau Talcott Parsons pun tidak pernah menyatakan bahwa paradigma yang mereka bangun adalah paradigma yang absolut benar dalam sosiologi.



# BAB 8

## TEORI PERTUKARAN SOSIAL

---

### A. PENGENALAN KONSEP

Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar-individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antar-individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif (Saifuddin N., 2001: 4).

Teori *exchange* yang dibangun George Homans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial, terutama ide yang dikemukakan oleh Durkheim. Reaksi Homans terhadap Durkheim terbagi dalam tiga hal. *Pertama*, pandangan tentang *emergence*. Homans mengakui dan menerima sebagian konsep yang menyatakan selama berlangsungnya proses interaksi, timbul suatu fenomena baru. Namun, Homans mempersoalkan cara menerangkan fenomena yang timbul dari proses interaksi tersebut. Menurut Homans, untuk menjelaskan sifat fenomena baru yang muncul akibat interaksi tersebut tidak perlu dibuat preposisi baru, karena akan melebihi dari yang diperlukan dalam melihat tingkah laku yang sederhana.



*Kedua*, pandangan tentang psikologi. Teori yang disusun Durkheim pada akhir abad ke-19, dihadapkan dengan konsep psikologi yang sangat primitif. Psikologi saat itu berasumsi bahwa sifat manusia sama secara universal, dan menfokuskan pada bentuk-bentuk tingkah laku yang bersifat instingtif. Namun, sosiologi saat ini sungguh berbeda dengan sosiologi zamannya Durkheim. Sosiologi saat ini sudah berdiri sendiri dan bukan lagi anak angkat psikologi seperti Durkheim pada zamannya.

*Ketiga*, metode penjelasan. Durkheim mengatakan bahwa objek studi sosiologi adalah barang sesuatu dan sesuatu yang dianggap sebagai barang sesuatu. Barang sesuatu ini dapat dijelaskan bila ditemukan faktor penyebabnya, atau fakta sosial dapat dijelaskan bila ditemukan fakta sosial lain yang menjadi penyebabnya. Homans sependapat jika fakta sosial selalu menjadi penyebab dari fakta sosial lain. Namun, penemuan penyebab belum merupakan suatu penjelasan. Homans berpendapat, bahwa yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari hubungannya itu. Dalam menjelaskan mengapa suatu fakta sosial menjadi penyebab dari fakta sosial yang lain, memang perlu menggunakan pendekatan perilaku (psikologi). Homans mengatakan variabel psikologi (perilaku) selalu menjadi variabel perantara (*intervening variables*) di antara dua fakta sosial.

Homans mengakui bahwa fakta sosial mempunyai pengaruh yang menentukan dalam perubahan tingkah laku (yang bersifat psikologi), yang menyebabkan munculnya fakta sosial baru berikutnya. Homans mengakui bahwa sebenarnya faktor utamanya adalah variabel yang bersifat psikologi.

Reaksi langsung George Homans terhadap fakta sosial adalah dengan memfokuskan pada penjelasan tentang pranata, yang didefinisikan sebagai pola tingkah laku sosial yang relatif tetap dengan tujuan untuk memelihara tingkah laku yang disepakati bersama.

## **B. "PERTUKARAN" SEBAGAI TEORI KLASIK**

Ide tentang pertukaran dalam ilmu sosial telah berlangsung sejak abad ke-18. Adam Smith misalnya, mengemukakan ide memberi dan menerima antarbangsa, dalam karyanya *An Inquiry into the Nature*



*and Cause of the Wealth of Nations* (Irwin, 1963). Pada pertengahan abad ke-18 ini para pemikir sosial dengan serius berupaya menemukan bagaimana caranya memperhitungkan tatanan sosial di sekeliling mereka. Upaya itu menghasilkan teori yang memuaskan tetapi banyak pula yang kurang puas.

Thomas Hobbes, Jean-Jaques Rousseau, dan John Locke mengemukakan bahwa, para individu dalam suatu masyarakat mempunyai susunan kolektif dengan kekuatan penguasa (George G. Sabine, 1973). Kekuatan penguasa memiliki otoritas tak terbatas begitu ia menduduki kekuasaannya. Proposisi ini menurut Homans mengandung kelemahan. Karena tidak benar, setiap orang dalam suatu masyarakat mempunyai tatanan dengan penguasaannya. Rakyat atau para petani di bawah kekuasaan raja yang terkenal sering kali bahkan tidak tahu akan identitas kerajaannya, dan mereka mempunyai kontrak dengan raja sebagai penguasa. Bagaimanakah pembenaran dari kontrak politik itu dapat diperluas pada tatanan sosial nyata yang ditemukan. Demikian pula aktivitas-aktivitas manusia, tidak lagi terikat pada kontrak yang abstrak antara satu orang dengan orang lain.

Ide tentang pasar ekonomi dianalogikan dengan tatanan sosial secara umum. Dalam tatanan sosial itu, keputusan individu untuk membeli, menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikannya sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Keputusan melakukan suatu tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami seperti dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan demikian, konsep-konsep teori ekonomi dapat digunakan pada semua transaksi sosial.

### C. TEORI PERTUKARAN SOSIAL MODERN

Teori pertukaran modern sangat dipengaruhi oleh psikologi eksperimental. Hal ini berarti mengandung kesamaan dengan teori sosial mikro. Tinjauan mikro ini menekankan pada pertimbangan motivasi. Dalam kaitannya dengan itu, motif pribadi kadang kala dimanipulasikan secara eksperimental. Misalnya, bagaimana orang melakukan aktivitas berdasar pada hakikat individualistik mereka. Psikologi eksperimental adalah bidang *learning theory*, yang secara umum mengemukakan



tindakan-tindakan manusia itu dapat dipertajam, dikontrol, dan diprediksikan oleh perubahan lingkungan (Skidmore, 1975: 77).

Dalam eksperimen memungkinkan untuk mengontrol kualitas ganjaran (*reward*) dan hukuman dengan tepat di dalam kehidupan nyata dengan menggunakan prinsip-prinsip penjelasan seperti di laboratorium. Tradisi psikologi eksperimental itu mengandung kesamaan dengan gerakan filosofis kuno, hedonisma.

Hedonisma sebagai filsafat, mampu memilahkan antara kesenangan dengan kesakitan. Manusia secara alamiah akan selalu mencoba untuk menghindari kesakitan serta memperoleh kesenangan. Hedonisma sebagai filsafat sebagian besar digunakan untuk mencari solusi bagaimana mengorganisasikan dunia, sehingga semua orang dapat memperoleh pengalaman menyenangkan dan mengecilkan kesakitan, serta kesenangan atau kebahagiaan seseorang tidak menyakitkan orang lain. Karena itu, dikatakan bahwa “*pleasure-and-pain principle was a basic of human affairs ...*” (Skidmore, 1975: 78).

Psikologi eksperimental membuat asumsi dengan postulat bahwa kita selalu dapat mengharapkan orang membedakan antara stimulan dan tindakan atas dasar ganjaran yang diperoleh. Tujuan teori pertukaran dalam sosiologi ialah mendapatkan suatu perangkat prinsip dasar yang bisa ditarik dari alur pemikiran yang konsisten dan saling melengkapi antara individualisme, ekonomi, psikologi eksperimental, dan filsafat hedonisma. Selain itu, tujuan teori pertukaran adalah membina suatu penjelasan umum yang koheren tentang tatanan sosial.

#### **D. PRINSIP-PRINSIP TEORI PERTUKARAN**

Prinsip teori pertukaran merupakan suatu deskripsi umum tentang unsur-unsur teori ini, yaitu satuan analisis, motif, keuntungan, dan persetujuan sosial.

##### **1. Satuan Analisis**

Satuan analisis dalam tatanan sosial adalah sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu. Teori ini meskipun tidak dimulai dari



bertanya, intuisi, atau opini umum, akan tetapi pada akhirnya akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan institusi, kelompok, dan sentimen mereka. Teori pertukaran juga tidak hanya terpusat pada individu, akan tetapi lebih mengarah pada tatanan dan perubahan.

## 2. Motif Pertukaran

Motif dalam teori pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang itu akan memerlukan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas.

Teori pertukaran memandang bahwa motivasi sebagai suatu hal yang pribadi dan individual. Walaupun demikian, motivasi nantinya akan mengacu pada budaya pribadinya. Motivasi itu mengacu pada saat memperoleh barang yang diinginkan, kesenangan, kepuasan, dan hal lainnya yang bersifat emosional. Misalnya, penderma yang memberikan barang atau sejumlah uang dan menolong nyawa orang yang tenggelam dalam air, tindakan-tindakan seperti itu dapat dijelaskan menurut teori pertukaran, yaitu untuk memperoleh kepuasan emosional.

## 3. Faedah atau Keuntungan

Orang yang paling egois pun tidak berada dalam kehampaan hidup, karena ia memberikan sesuatu kepada orang dan memperoleh kesenangan dari emosinya. Biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu “hadiah” (*reward*), terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Karena itu, suatu “*cost*” dapat didefinisikan sebagai upaya yang diperlukan guna memperoleh suatu kepuasan, ditambah dengan *reward* yang potensial yang akan diperoleh apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau *reward* yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan.

## 4. Pengesahan Sosial

Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya makna



ganjaran tidaklah mudah untuk diberi batasan, karena sifatnya yang individual dan emosional sesuai dengan keanekaragaman orang. Walaupun demikian, menurut teori pertukaran, *reward* ialah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (*social approval*). Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang disenangi akan dicari dalam relasi-relasi sosial mereka. Orang akan lebih menyenangi atau cocok dengan orang lain yang mengesahkan dirinya.

## E. TATANAN SOSIAL MENURUT TEORI PERTUKARAN

Sebagaimana diketahui, teori sosial bertujuan untuk mencapai kesimpulan tentang hakikat manusia. Pengamatan yang ditujukan pada individu-individu yang saling melakukan pertukaran belum tentu menggambarkan tindakan kelompok. Karena tindakan kelompok sangat berkaitan dengan: siapa yang berhubungan secara tetap, siapa yang memperoleh ganjaran, siapa yang perlu ganjaran, bagaimana mereka melakukan interaksi, dan bagaimana membina derajat pertukaran dalam interaksi itu.

Dalam suatu kelompok yang memiliki hierarki, urutan tatanan ditandai dengan kepatuhan pada siapa, siapa yang duduk “di meja utama,” dan indikasi-indikasi lainnya. Runtutan posisi dalam kelompok adalah unsur-unsur tatanan sosial umum yang ada dalam kelompok. Untuk menjelaskan runtutan atau rangking menurut teori pertukaran, digunakanlah ide-ide tentang nilai dan kelangkaan. “Nilai” di sini mengandung pengertian langka dan berharga.

## F. TEORI PERTUKARAN DEDUKTIF: PROPOSISI GEORGE C. HOMANS

George C. Homans mengenalkan teori pertukaran deduktif tentang tatanan sosial (*social order*). Menurut Homans, kita hanya dapat menjelaskan tentang aspek-aspek tatanan dan perubahannya dengan mengacu pada beberapa jumlah kecil proposisi umum yang bisa dijelaskan. Hal itu merupakan bentuk spesifik dan runtut terhadap ide-ide dalam suatu teori deduktif.

Karya Homans cukup banyak, antara lain: *The Human Group* (NY: Harcourt Brace Jonanovich, 1950), dan *Social Behavior: Its Elementary*



*Form* (NY: Harcourt Brace and World, 1951; rew.ed,1974). Buku yang pertama sebagian besar berisikan suatu bahasan tentang penelitian dalam relasi-relasi sosial, sedangkan buku kedua berisikan lebih banyak teori dan kurang deskripsi. Dengan demikian, buku pertama—*The Human Group*—merupakan bahan dasar untuk penarikan atau proses induktif, sedangkan buku kedua—*Social Behavior*—berkaitan dengan deduksi.

Untuk memperjelas teorinya, Homans membuat proposisi sebagai berikut: *“If in the past the occurrence of a particular stimulus, or set of stimuli, has been the occasion on which a person’s action has been rewarded, then the more similar the present stimuli are to the past ones, the more likely the person is to perform the action, or some similar action, now”* (Social Behavior, 1974: 22-23).

Sebagaimana dikemukakan dalam psikologi tentang *“learning theory,”* masa lalu seseorang penting bagi tingkah lakunya sekarang. Sehubungan dengan proposisi itu, masa lalu dibentuk oleh situasi di mana orang itu memperoleh ganjaran ataupun hukuman. Beberapa aspek masa lalu telah menghasilkan kemungkinan tingkah laku serupa dengan sekarang, artinya sejarah berulang kembali. Tekanan proposisi Homans tersebut adalah pada respons individu untuk menyenangkan keadaan dan kehendak untuk berkelakuan seperti itu lagi.

*“For all actions taken by persons, the more often a particular action of a person is rewarded, the more likely the person is to perform the action”* (Social Behavior, 1974:16). Proposisi ini mengemukakan bahwa terdapat suatu hubungan langsung antara frekuensi tingkah laku ber-reward dengan frekuensi respons terhadap reward.

*“The more valuable to a person the result of his action, the more likely he is to perform the action”* (Social Behavior, 1974: 25). Proposisi ini menjelaskan hubungan antara nilai dengan aktivitas. Para individu mempunyai ide-idenya sendiri tentang apa yang bernilai, dan nilai tersebut tidaklah sama bagi semua individu. Proposisi ini juga meramalkan suatu hubungan langsung antara frekuensi aktivitas menerima reward yang bernilai dengan derajat nilai yang terkandung dalam reward.



*“The more often in the recent past a person has received a particular reward, the less valuable any further unit of what reward becomes for him”* (Social Behavior, 1974: 28-29). Homans dalam proposisi ini membatasi dengan memberikan suatu pernyataan umum tentang jumlah ekstra-aktivitas yang pernah diharapkan dalam pertukaran *reward* yang berkembang.

*“The more to a man’s disadvantage the rule of distributive justice fail of realization, the more likely he is to display the emotional behavior we call anger”* (Social Behavior, 1974: 75). Homans menyanggah derajat pertukaran itu dibina antara tingkah laku dengan sentimen yang saling tukar. Pada umumnya, investasi yang dibuat seseorang dalam suatu pertukaran diperhitungkan menurut kesepakatan.

Salah satu hal yang menarik dalam perkembangan teori pertukaran ialah introduksi tentang ide “keadilan yang terbagi.” Misalnya tiga anggota keluarga dari tiga generasi berkumpul, yang tertua dipersilakan makan terlebih dahulu. Dari tinjauan teori pertukaran dapat dijelaskan bahwa si tua telah membuat investasi yang berat dalam runtutan pertukaran yang panjang dengan para anggota keluarga, dan sekarang ia berada pada posisi yang mengharapakan keadilan yang terbagi itu berlaku, sebagai *reward* bagi dirinya.

Proposisi Homans pertama sampai keempat merupakan ide-ide dasar teoretisnya: satuan aktivitas, frekuensi aktivitas, *reward* bagi aktivitas dan nilai aktivitas. Adapun proposisi kelima mengenalkan tentang keadilan yang terbagi (*distributive justice*) yang tampak lebih rumit dari proposisi lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Social Behavior* yang sudah direvisi disebutkan sebagai proposisi, dikemukakan sebagai berikut:

1. *“When a person’s action does not receive the reward he expected, or received punishment he did not expect, he will be angry; he becomes more likely to perform aggressive behavior, and the results of such behavior become more valuable to him”* (Social Behavior, 1974: 37).
2. *“When a person’s action receives reward he expected, especially a greater reward than he expected, or does not receive punishment he*



*expected, he will be pleased; he will become more likely to perform approving behavior and the results of such behavior become more valuable to him” (Social Behavior, 1974: 39).*

## 1. Deduksi dalam Teori Pertukaran

Homans mengemukakan tentang proposisi dan format teori yang deduktif. Adapun format deduksi itu menghasilkan kesimpulan logis dari hal-hal yang bersifat abstraksi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, proposisi Homans yang kedua, yaitu proposisi keberhasilan, mengemukakan bahwa kita seharusnya mengharapkan suatu relasi antara aktivitas yang diberi *reward*, dari aktivitas tersebut. Semakin sedikit aktivitas yang diberi *reward*, maka akan semakin sedikit pula frekuensi yang diharapkan dari aktivitas tersebut.

Dengan menggabungkan proposisi kedua, proposisi keberhasilan, dengan proposisi ketiga, atau proposisi nilai, maka individu yang tidak beruntung digambarkan membuat suatu tawaran mengurangi beban dengan orang lain, karena memang demikian minatnya menghindari ketidaksukaan.

Proposisi ketiga menunjukkan bahwa semakin berprestasi dengan aktivitas itu maka ia semakin termotivasi untuk mengakhiri relasi tersebut, karena memang dia tidak menyukai. Tetapi ia tahu dengan tepat tentang hal ini, karena itu dalam kenyataannya ia memaksa melakukannya pada beberapa tahap partisipasi relasi, sehingga ia akan mampu menghilangkan hal yang buruk.

## 2. Institusi dan Sub-Institusi dalam Teori Homans

Dengan memberikan tekanan pada individu dan konsep-konsep *reward*, beban atau biaya (*cost*), dan aktivitas (*activity*) Homans tetap mengacu langsung tentang individu atau kelompok dua orang. Sifat hipotesisnya mengenai seseorang dan orang lain (*person and other*) serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lainnya sangat diperhitungkan dalam teori pertukaran, terutama dalam bahasan tahap kehidupan institusional dan sub-institusional.





Homans mengemukakan bahwa institusi memiliki prinsip jaringan pertukaran yang kompleks. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan spesialisasi aktivitas dan relasi-relasi pertukaran tak langsung. Adapun yang dimaksudkan dengan spesialisasi dapat dicontohkan: serangkaian tugas yang pada suatu waktu dilakukan oleh seseorang, maka sekarang unsur-unsur itu dilakukan oleh banyak orang yang berbeda. Sebagai hasilnya ialah kemanfaatan yang dilakukan akan tergantung pada beberapa orang. Tatanan institusional membuat mapannya pertukaran yang kompleks di antara banyak orang dalam dikaitkannya dengan partisipasi mereka dalam pembagian tugas atau kerja.

Dasar aktivitas institusi harus memenuhi beberapa “kebutuhan” (*needs*) atau keinginan yang biasa atau umum bagi semuanya (Homan, 1974: 381). Dari sinilah Homans menekankan akan makna *reward* berkaitan dengan orang yang diberi *reward*. Mengenai institusi, ia mengemukakan bahwa haruslah ada *repertory of human nature* yang mendasar dan umum. Kebutuhan yang fundamental dari hakikat manusia dikategorikan Homans sebagai “*primary reward*,” yang tidak dapat diperhitungkan bagi pertumbuhan institusi itu sendiri. Penyebabnya menurut Homans adalah karena tidak semua orang melakukan respons terhadap kecenderungan yang fundamental tersebut. Selain *reward* utama, orang kadang kala mengajukan *reward* kedua yang menyebabkan ketidaksetujuan. *Reward* utama tidak dipikirkan lagi, tetapi *reward* yang kedua seperti pengesahan sosial dan uang menjadi tuntutan. Dengan demikian, *reward* kedua lebih memaksa daripada *reward* utama, karena *reward* pertama itu sendiri belum mampu memuaskan.

### 3. Kesepakatan Kolektif Terhadap Norma-norma Institusional

Contoh yang menggambarkan pendekatan Homans tentang institusi adalah ungkapan kesedihan atau dukacita (*expressing*) (Homans, 1974: 381). Mereka yang merasakan sungguh-sungguh dan benar-benar berdukacita tentang peristiwa tertentu melakukannya demikian. Mereka melakukan hal itu bukanlah hanya karena ada dorongan dari luar, melainkan benar-benar alamiah dari dalam diri mereka.



Bagi orang yang berekspresi dukacita dengan tidak disertai dimotivasi perasaan dukacita, tetapi lebih dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh pemanfaatan dari penyesuaian diri (*conformity*), maka tidak bisa dikategorikan pada kelompok pertama.

Rasa sedih adalah suatu dasar sentimen. Namun demikian, rasa sedih bisa hanya berupa kehendak untuk melebihkan tindakan sesuai dengan norma-norma yang mengatur ekspresi dukacita itu.

Institusi bisa menderita karena kompleksitas pertukaran yang dilembagakan dan nilai-nilai yang diserahkan. Kompleksitas diartikan suatu rangkaian pertukaran yang tidak mudah berubah. Keputusan untuk mengubah perilaku dengan mengacu kepada salah satu peranan terlembaga dapat membawa tingkah serupa dalam relasi. Misalnya, apabila seseorang mendapat gaji dalam suatu perusahaan maka ia harus memelihara relasinya dengan ajakan, supervisor dan kelompok kerja, karena ia merupakan bagian dari adanya serikat kerja atau dengan perusahaan keseluruhan ataupun dengan industri.

## **G. PERTUKARAN DAN PSIKOLOGI SOSIAL KELOMPOK: THIBAUT DAN KELLEY**

Thibaut dan Kelley (*The Social Psychology of Group*, 1959) tidak banyak membahas tentang individu dan relasi. Mereka lebih banyak menjelaskan relasi sebagai suatu perangkat hasil yang dapat diperkirakan atau perhatian utamanya pada “*dyad*”, kelompok dua orang. Homans mengemukakan bahwa, *Exchange analysis of the dyad is the proper theoretical stand point from which to understand the larger group.*” Jadi, analisis pertukaran dari kelompok dua orang itu merupakan titik awal bagi pemahaman tentang kelompok yang lebih besar.

Thibaut dan Kelley (1959: 10) menggunakan ide tentang suatu matriks perilaku sebagai alat analisisnya dalam menjelaskan ide pertukaran. Pada matriks itu, suatu ruang dimensional ganda mengemukakan perilaku dua orang. Dengan melakukan tabulasi silang kedua dimensi tersebut, maka beberapa sel terbentuk. Pada setiap sel memungkinkan untuk membayangkan keinginan-keinginan berperilaku dari setiap pasangan interaksi. Langkah ini dapat dilakukan



dengan memeriksa hasil-hasilnya yang tercantum pada sel itu. Interaksi lanjutan untuk mencapai standar dapat diterima kedua individu berdasarkan pengalaman mereka dengan relasi lain.

Diharapkan bahwa sel yang mewakili keinginan maksimal bagi kedua pelaku itu adalah sesuatu yang diperkirakan dari setiap tipe perilaku. Dengan demikian, diperkirakan ada tipe relasi di mana kedua orang itu terikat. Dalam memutuskan hasil keinginan seseorang diperlukan ide-idenya sendiri tentang *reward* dan biaya. Variabel determinan tersebut merupakan faktor “*exogenous* dan *endogenous*”. Faktor *exogenous* ialah faktor yang dibawa pada relasi oleh pelaku dalam bentuk nilai-nilai, kebutuhan, keterampilan, atau kualitas lainnya. Faktor *endogenous* dari *reward* dan beban ialah faktor yang hakiki (*intrinsic*) terhadap relasi itu sendiri.

Thibaut dan Kelley telah menyumbangkan pemikiran terhadap teori pertukaran, yang berbeda dengan Homans, dan memiliki konsep-konsep yang lebih kaya dibandingkan dengan deduksi formal yang eksplisit. Mereka memberikan suatu prinsip umum, sedangkan proposisi Homans memerlukan perimbangan manipulasi guna menerima lingkaran keterkaitan antara proposisi dan hipotesis. Demikian sumbangan Thibaut dan Kelley cukup berharga, karena mereka membangun suatu pondasi teori yang kuat, sentuhan lanjutannya diserahkan kepada pengguna teori itu apabila diperlukan.

## H. KEKUASAAN DAN PERTUKARAN MENURUT PETER BLAU

Peter Blau menulis buku berjudul *Exchange and Power in Social* (Nx: Wily, 1964), dianggap penting karena perhatiannya akan menambahkan lebih banyak prinsip teori ekonomi pada pandangan pertukaran sosial. Karya-karya Homans, Thibaut, dan Kelley, terutama mengemukakan penjelasan tentang *dyad*, walaupun upaya penjelasan tentang kelompok-kelompok yang lebih besar dilakukan.

Konsentrasi karya Blau berkisar tentang struktur sosial yang tumbuh di luar pertukaran dengan memperhitungkan tatanan (*order*), legitimasi, oposisi, dan kuasa. Blau juga serupa dengan Homans, Thibaut dan Kelly, bahwa hal yang tepat untuk melakukan pendekatan struktur



sosial adalah dari pandangan individualistik. Tidaklah perlu asumsi apa pun tentang kelompok itu agar dapat membentuk suatu teori tentang tindakan kelompok. Dengan penjelasan tersebut dapat berlangsung secara halus ke atas, dari satuan analisis yang terkecil menuju yang terbesar, dengan tepat memberikan sifat posisi pertukaran mengenai struktur nilai.

Secara umum, Peter Blau mengamati jenis serupa dari interaksi pertukaran perkara, terutama dengan memberikan tekanan bahwa tipe *reward* dan beban atau ongkos termasuk di dalamnya. Ia memperkirakan bahwa orang yang melakukan pertukaran itu ingin memperoleh *reward* maksimal dan beban maksimal. Bagi orang yang kurang beruntung, beban yang dikeluarkannya akan mendatangkan hasil kesenangan bagi orang lain yang mungkin tidak diganti, hal ini adalah tidak seimbang. Hakikat ketidakseimbangan Blau merupakan ide kunci dalam memahami timbulnya struktur kelompok dan sosial. Blau tampaknya mencoba untuk memerinci bagaimanakah struktur sosial itu membuat mapan pertukaran, dan selain itu juga mengemukakan cara-cara stabilisasi menimbulkan kekuatan-kekuatan oposisi yang bahkan cenderung mengubah pertukaran yang telah mapan itu.

### 1. Pertukaran Tidak Seimbang dan Konsekuensinya

Ketidakseimbangan dalam suatu pertukaran dapat terjadi manakala ia memberi *reward* lebih kepada yang lain, dan sebaliknya yang menerima *reward* membalasnya. Tentulah menghadapi keadaan itu akan terdapat alternatif asosiasi dan relasi yang terputus, namun tidak semua relasi ini putus. Blau dalam kenyataannya mengemukakan bahwa hakikat biasa dari pertukaran sosial adalah ketidakseimbangan. Pihak terkecil dalam pertukaran yang tidak seimbang itu dapat memperoleh kompensasi dengan atau jenis penguatan umum yang disebut oleh Homans *social approval*, atau menurut Blau lebih suka menyebutnya sebagai kerelaan (*compliance* atau *subordination*) (Blau, 1964: 170).

Kerelaan dalam pertukaran tidak seimbang adalah suatu kredit kepada pihak yang superior, kredit dalam arti bahwa posisinya itu menjadi terkenal terutama karena pertukaran tersebut bagi umum, kehendaknya



akan datang untuk mendominasi sehingga memungkinkan dengan suatu asensi memerintah orang lain, yang orang biasa tidak dapat memperolehnya.

Analisis struktural dalam sosiologi adalah pengamatan susunan bagi upaya yang dikoordinasikan menuju tujuan-tujuan kolektif. Legitimasi struktur sosial ialah sesuatu yang diterima secara umum oleh para pelaku. Manakala legitimasi itu diperoleh, struktur sosial mungkin dikolaborasikan. Sejauh struktur sosial tidak gagal, maka para pelaku tidak akan menarik pandangannya bahwa struktur tersebut sah. Dengan demikian, pembentukan struktur tetap akan bertahan.

Pertukaran itu baik yang langsung maupun tidak langsung menyangkut jumlah orang yang akan dilihat secara berlainan. Legitimasi dan perubahan sosial itu bukanlah kondisi mutlak, melainkan lebih merupakan suatu kecenderungan, karena pasti akan ada kekuatan-kekuatan yang berlaku bersamaan. Beberapa kekuatan mendukung dan melindungi struktur sosial, sedangkan kekuatan lainnya berlangsung dari arah yang berlawanan.

Adapun tema karya Blau adalah untuk menemukan suatu situasi yang digambarkan sebagai hasil-hasil tertentu yang baik pada satu sisi, tetapi tidak pada sisi lainnya. Dalam situasi semacam itu, maka tidaklah mungkin memaksimalkan kepuasan. Menurut Blau, jika orang menghadapi hal demikian maka lebih baik ia berada di tengah antara kedua sisi itu, sehingga akan mampu memperbaiki sisi yang kurang baik. Hal inilah yang tidak dilihat oleh Homans, Thibaut, dan Kelley. Dengan demikian, bagi Blau hal tersebut merupakan kunci pembeda yang cukup penting dalam teori pertukaran.

## 2. Mikrostruktur dan Makrostruktur

Blau menunjukkan bahwa proses relasi tatap muka merupakan tipe *microstructure* (Blau, 1964: *Exchange and Power in Social Life*, hlm. 234-53). Adapun relasi adalah struktur dalam pengertian aturan-aturan, pemuas, kontrol legitimasi, dan pembagian tugas. Mikro dalam interaksi seperti itu berada pada tahapan dari orang ke orang. Kemudian akan meluas, dan jumlah yang diakomodasikan akan bertambah sehingga



menjadi bermakna. Kolektivitas yang lebih besar itu dengan sendirinya terbentuk oleh makrostruktur. Karena itu pula, anggapan Blau tentang keseluruhan organisasi sosial dalam suatu masyarakat adalah salah satu kaitan internal antarmakrostruktur.

### 3. Nilai dan Struktur Sosial

Dalam studi pertukaran telah memperlihatkan bahwa *reward* bagi kepentingannya sendiri akan mendorong seseorang bergabung dalam kelompok-kelompok. Walaupun demikian, nilai-nilai yang berlawanan akan ditolak. Konsekuensi bagi solidaritas sosial, menurut Blau ialah “... *Sharing group values will have two kinds of consequences, ...*” (Blau, 1964: 233-34), Lebih lanjut Blau membuat perincian sebagai berikut: (1) kebersamaan merupakan suatu tanda solidaritas bagi mereka yang bersama; (2) kebersamaan yang serupa yang menuju integrasi dan kesepakatan bagi kelompoknya akan menjadi suatu tanda ketidaksamaan bagi kelompok-kelompok lain.

Dengan demikian, apabila berpegang pada nilai-nilai yang berbeda, maka antarkelompok akan dicirikan oleh ketidaksamaan satu sama lainnya, dan hal itu dapat menuju kepada permusuhan dan perpecahan antarkelompok.

## I. PENELITIAN TERKAIT TEORI PERTUKARAN

Kajian yang mengandung relasi antara teori pertukaran murni dan kajian dasar kiranya perlu dibicarakan, oleh karena kajian semacam itu memperlihatkan kejujuran tuntutan bahwa kegiatan itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran suatu teori.

Richard Longabaugh dalam tulisanya “*A Category System for Leading Interpersonal Behavior as Social Exchange*” dalam *Sociometry*, Vol. XXVI, No. 3 (1963: 319-344), mencoba membuat suatu perangkat kategori standar sebagai panduan untuk melakukan observasi tentang pertukaran. Sebagaimana diketahui, teori pertukaran itu kadang kala terlalu spesifik tentang asumsi motivasi individual dan sering kali menekankan individu, sehingga menyebabkan kesukaran tersendiri.



Ia mengemukakan bahwa sesuatu *reward* itu begitu sempit, misalnya “senyum ibunya,” dan bisa begitu luas seperti “informasi,” *reward* harus ditarik dari yang benar-benar bernilai. Memang benar, tidak ada cara sistematis untuk melakukan hal itu. Tidak ada kategorisasi standar tentang nilai, karena itu observasi yang distandarkan guna memungkinkan perbandingan antara tahapan pertukaran akan sukar dilakukan.

Pertukaran itu bukanlah apa yang diobservasi harus mengandung *reward*. Kita tidak dapat mengetahui sesuatu pun tentang aspek situasi yang mana memperoleh *reward*, sebagian juga tidak mudah mengetahui mengapa hal itu mendapatkan *reward*.

Biasanya sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada tindakan-tindakan yang nyata dan dapat diukur, sehingga kerap kurang memperhatikan apa yang berada di balik tindakan itu. Nilai-nilai yang dianut para individu memang memiliki pencurahan dan makna, mulai dari yang sempit sampai ke hal yang lebih luas, bergantung pada berbagai faktor internal individu tersebut. Antropologi memandang bahwa nilai-nilai itu adalah anggapan dan pandangan tentang baik-buruk, indah atau jelek, susah atau senang, yang penilaiannya tergantung pada si individu tersebut, bukan pada diri peneliti. Pengalaman hidup seseorang, termasuk pengalaman bersama kelompok dan masyarakat, memang memberikan warna tertentu terhadap pandangan dunianya. Sejauh ini, antropologi yang terbina oleh pendekatan kualitatif itu, memiliki metodologi yang cukup rumit juga dalam observasi tentang nilai-nilai terutama nilai-nilai budaya (*cultural values*). Mungkin nilai-nilai budaya inilah yang lebih bersifat individual dibandingkan dengan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, antropologi lebih memerhatikan orientasi nilai-nilai budaya, dan bukan kategori dalam jenis nilainya melainkan lebih membahas kutub-kutub yang menjadi lingkup nilai-nilai tersebut.

Dalam hal ini tampaknya sosiologi tidak selalu berhasil dalam mengungkapkan konsep nilai-nilai tersebut, karena masih kuatnya melakukan kategorisasi nilai-nilai atau generalisasi yang dianggap sebagai makna tindakan sosial.



Selanjutnya, bagaimana pertukaran itu berlangsung. Langabaugh berhasil mengemukakan suatu perangkat kategori atau “*modalities*” yang bertumpu pada pengertian umum (*common sense*), yaitu *seeking*, *offering*, *accepting*, *can not accepting*. Mengapa perangkatnya begitu, alasannya ialah proses pertukaran dapat dianggap sebagai suatu tuntutan dari keputusan dua pilihan, suatu waktu orang mencari maka orang lain yang mengabaikan atau membuang apa yang dicari itu. Di lain waktu, pencari makna dapat menerima makna itu.

Para peneliti sosiologi sering kali dihadapkan kepada masalah aplikasi empiris yang dilakukan paralel dengan masalah-masalah teoritik pertukaran. Manakala konsep *reward* telah dibenarkan secara teoretis serta ditarik dari prinsip-prinsip umum, masalah yang dipertukarkan haruslah dihadapi secara empiris. Demikian pula sebaliknya, apabila diskusi teoretis beralih pada bagaimana suatu pertukaran itu akan dilaksanakan, maka aplikasi empiris dari teori pertukaran harus digunakan untuk mengukur tipe-tipe tindakan sosial yang ada.

Salah satu masalah umum dalam sosiologi ialah memahami pekerjaan-pekerjaan bagi para individu, khususnya mengapa orang puas dan tertarik kepada pekerjaan mereka, dan mengapa pula mereka tidak puas. Orang tidak tertarik dengan pekerjaan mungkin disebabkan karena pekerjaan yang dikerjakan sukar, kurang menyenangkan, atau berbagai faktor seperti *reward*. Studi sosiologi misalnya, tertarik kepada kepuasan kerja yang mungkin sedikit kaitannya dengan kesukaran kerja itu.

Ephraim Yuchtman mempelajari para pengurus dan pekerja di suatu Ribuz Israel (*Reward Distribution and Work-role Attractiveness in the Ribbutz Reflections on Equity Theory*). Dalam *American Sociological Review*, XXVII, 3 (Oktober 1972), hlm. 581-595. Temuan penelitian dari kedua kelompok itu ialah pengalaman para pengurus mendapat *reward* lebih besar secara intrinsik dan ekstrinsik, sedangkan para pekerja memperoleh *reward* lebih kecil dibandingkan mereka. Penjelasan hasil penelitian itu, dengan menggunakan teori pertukaran menunjukkan bahwa pengalaman *reward* para pengurus berkaitan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Hal ini secara kasar merupakan prediksi





yang dapat ditarik dari teori pertukaran, terutama dari teori tentang distribusi ide keadilan atau proposisi *aggression approval*. Demikian pula dapat dikaitkan dengan perlakuan Blau tentang relasi antara *reward*, pertukaran tidak seimbang, dan *compliance*.



# BAB 9

## PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI PILIHAN RASIONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Tulisan ini diawali dengan mencoba menelusuri sejarah lahirnya teori pilihan rasional dan perkembangannya secara garis besar, kemudian dirangkai dengan beberapa pendapat para teoretisi yang telah menulis mengenai perspektif teori pilihan rasional ini dalam suatu format ringkasan.

Banyak perbincangan mengenai teori sosiologi yang tumbuh berdasarkan kekecewaan (Alexander, 1998). Munculnya suatu harapan bahwa perkembangan teoretis akan terbukti sekarang ini dianggap oleh sebagian teoretisi sebagai khayalan belaka, karena hal ini hanya tumbuh secara parsial dan terkotak-kotak. Seseorang yang kompeten pada suatu bidang, sering kali kurang memahami dengan baik pada bidang yang lain. Fragmentasi teoretis dan spesialisasi mikro membagi bidang-bidang ilmu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik telah tampak sebagai sebuah perkembangan. Perkembangan sosiologis semacam ini mencerminkan tren perkembangan yang lebih luas. Sebagai contoh, sebuah simposium yang diselenggarakan oleh para sejarawan mengenai berbagai pandangan masalah Revolusi Perancis, akhirnya berkesimpulan bahwa, tidak ada yang dapat dipelajari dari ahli yang satu untuk ahli lainnya.

Fragmentasi intelektual terhadap spesialisasi mikro digabungkan oleh sebuah garis kesalahan. C.P. Snow pada tahun 1950, menggambarkan kemunculan dua budaya: sains dan humaniora, yang sangat berbeda dalam bahasa dan pandangan dunia sehingga keduanya kehilangan komunikasi satu sama lain. Pembagian ini berkaitan dengan satu garis kesalahan besar dalam sosiologi. Seperti yang ditulis oleh Alexander (1998: 26), kedua hal tersebut sedang ditarik kedua arah yang berlawanan; antara mereka yang memandang sosiologi sebagai wacana sastra dan humaniora vs. mereka yang memandangnya sebagai sains. Oleh karena itu, desakan-desakan sentripetal akan muncul untuk membangun prospek bangunan teori.

Munculnya teori pilihan rasional merupakan satu perkecualian mengenai tren meningkatnya fragmentasi tersebut. Pilihan rasional selalu dikaitkan dengan kekuatan yang mendominasi bidang ekonomi, namun kenyataannya para ekonom menggunakan perspektif ini untuk menganalisis subjek di luar domain tradisionalnya itu, seperti terlihat pada tulisan tentang: keluarga (Becker, 1981), revolusi (Kuran, 1995), dan emosi (Frank, 1988). Selama dua dekade terakhir, pilihan rasional telah muncul sebagai perspektif dominan dalam ilmu politik, dan sekarang telah pula memasuki area disiplin ilmu tersebut, seperti studi tentang area kekuasaan yang pada awalnya menolak teori pilihan rasional ini (Johnson and Keehn, 1994). Teori pilihan rasional tetap merupakan dasar bagi kebanyakan “psikologi sosial eksperimental” dan karya-karya terkini yang memfokuskan pada teori-teori perkembangan yang relevan pada tingkatan sosial makro (Lawler *et al.*, 1993). Pertumbuhan sosiologi pilihan rasional tercermin di dalam perkembangan institusional, seperti penerbitan jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989 dan pembentukan bagian pilihan rasional dalam *Asosiasi Sosiologi Amerika* pada tahun 1994. Teori pilihan rasional juga mendapat dukungan dalam antropologi (lihat: Hopcroft, 1999), meskipun hal ini lebih terkait dengan sosiologi pilihan rasional. Karena perannya dalam integrasi teoretis berbagai disiplin ilmu sosial itulah, maka teori pilihan rasional ini telah digambarkan sebagai “*interlingua of social science*.”



Di samping perannya sebagai perekat (kohesi) teoretis dalam ilmu-ilmu sosial, teori pilihan rasional juga meluas pada bidang humaniora, dan memberikan dasar bagi banyak karya terkini tentang filsafat, etnik, dan juga hukum (Frey dan Morris, 1994). Oleh karena itu, menurut C.P. Snow (1950), pilihan rasional telah mengintegrasikan kembali dunia humaniora dengan dunia sains.

## B. APAKAH PILIHAN RASIONAL ITU ?

Terlepas dari pandangan bahwa pilihan rasional sebagai sebuah pergerakan intelektual dan munculnya serangkaian institusi dan publikasi, di sisi lain tidak ada batas yang jelas yang membedakan teori pilihan rasional ini dari perspektif teoretis lain. Memang tidak ada konsensus mengenai apakah hal ini dapat dimengerti dengan baik sebagai teori—yang dapat diuji dan potensial untuk “*difalsifikasi*”—ataukah dimengerti sebagai perspektif teoretis di mana teori-teori substantif itu dihasilkan. Menurut pandangan Douglas D. Heckathorn (2001: 273), ia lebih senang mengadopsi interpretasi yang kedua.

Dari beberapa sumber acuan yang dicoba untuk ditelaah pada kesempatan ini tampak jelas, bahwa definisi pilihan rasional ternyata sangatlah beragam. Beberapa ahli memberikan penekanan sebagai hal yang menyangkut sebagian besar penelitian sosiologi, yakni menyelaraskannya dengan analisis yang memandang perilaku atau tindakan seseorang sebagai sesuatu yang *purposive* (Huber, 1997). Sebaliknya, para ahli lain memberikan arti dengan sangat ketat, sehingga tidak mengikutsertakan semua pilihan rasional yang bersifat sosiologis dengan membatasi bahwa para pelaku harus dipandang sebagai seseorang yang termotivasi oleh kepentingan diri (untuk diskusi terhadap posisi yang kedua, lihat: Mansbridge, 1990). Bagian awal ini akan memusatkan pada perkembangan intelektual yang melibatkan karya para ahli yang diidentifikasi sebagai pandangan yang mengandung pendekatan pilihan rasional.



## C. KONTINUITAS ANTARA PILIHAN RASIONAL DAN TEORI SOSIOLOGI TRADISIONAL

Teori pilihan rasional sering kali dianggap berbeda dengan pendekatan-pendekatan teoretis lainnya di dalam sosiologi. Hal ini tampak dalam dua hal, yaitu: *pertama*, sebuah komitmen terhadap metodologi individual; dan *kedua*, sebagai pandangan terhadap pilihan prospek optimisasi. Bagaimanapun juga, tidak ada alasan untuk membedakan pilihan rasional dari karya lain dalam ilmu sosial termasuk sosiologi.

### 1. Metodologi Individualisme

Metodologi individual secara tradisional diserang dalam sosiologi, karena hal ini memotong area penyelidikan ilmu tersebut dan terancam larut dalam kajian psikologis. Sebuah komitmen dalam metodologi individual sebaliknya sering dilihat sebagai sebuah karakteristik pilihan rasional (lihat: Coleman, 1990: 5). Isu mengenai metodologi individual memang kompleks oleh karena itu dalam mencermati isu ini diperlukan klarifikasi terhadap istilah-istilah yang digunakan. Joseph Schumpeter menggabungkan istilah metodologi individualis tahun 1908, meskipun hal ini telah diantisipasi dalam karya-karya Jeremy Betham dan John Stuart Mill (Hodgson, 1986). Pernyataan klasik terhadap metodologi individualis ditujukan kepada Ludwig von Mises (1949). Ia berpendapat bahwa, fenomena sosial, ekonomi, dan tingkatan sosial lain dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan individu. Oleh karena itu, fenomena tingkatan sosial dapat dijelaskan melalui tindakan level mikro. Dalam hal ini lahirlah kemudian bentuk penjelasan yang berbeda, di mana kegiatan pada level makro yang memengaruhi individu diabaikan. Sebagai hasilnya, dalam pandangan von Mises, sebab akibat terletak pada tataran mikro, dan tataran makro hanya merupakan epifenomena. Pernyataan ini kemudian disebut dengan metodologi individualisme ketat (*strict methodological individualism*). Metodologi individualisme sering kali *overlap* dengan apa yang disebut oleh Lukas (1968) sebagai “*atomisme sosial*” yang kebenarannya tidak dapat disangkal.



Menurut Lukas, proposisi ini dianggap memiliki kebenaran, di mana tidak ada orang yang berbeda pendapat ketika orang menyatakan bahwa “masyarakat terdiri dari individu-individu,” atau tentang lembaga yang dimaknai sebagai badan yang terdiri dari orang-orang ditambah dengan peraturan dan peran. Bahkan, penganut paham metodologi individualisme tidak mengklaim bahwa institusi sosial sebagai bagian terpisah dari konstituen individu. Leviathan hanyalah merupakan *methalbr*. Sebagai contoh, dengan memandang orang-orang sebagai ‘kapal kosong’ yang akan diisi secara sosial, maka mereka akan menyadari bahwa tindakan sosial dan institusional sebenarnya juga merupakan tindakan individu. Namun, ada juga beberapa kondisi tengah-tengah antara metodologi individual ketat dengan atomisme sosial yang kebenarannya tidak dapat disangkal.

Para pemikir dalam sosiologi pilihan rasional kontemporer tidak menganut bentuk yang kaku dari metodologi individual. Sebagai contoh, James Coleman (1995: 5) menggambarkan dirinya terikat pada “suatu varian khusus” metodologi individual. Satu pengujian terhadap analisisnya menunjukkan, bahwa varian ini lebih dekat dengan atomisme sosial yang kebenarannya tidak dapat disangkal daripada dengan posisi metodologi individual yang kaku. Dalam hal ini kembali Coleman memberikan contoh, bahwa kegiatan-kegiatan pada tataran makro tidak dapat dijelaskan melalui tindakan-tindakan pada tataran makro lainnya, sebuah posisi yang konsisten dengan metodologi individualisme.

Namun, ketika Coleman menggambarkan bentuk ideal dari penjelasan kegiatan pada tataran makro, ia berargumen bahwa penjelasan semacam itu harus menggabungkan tiga tipe proposisi. *Pertama*, proposisi makro ke mikro yang menggambarkan efek faktor sosial terhadap individu. *Kedua*, proposisi mikro ke mikro yang menggambarkan proses-proses pada level mikro. *Ketiga*, proposisi mikro ke makro, yang menunjukkan bagaimana agen-agen individu bergabung untuk menghasilkan perubahan sosial. Oleh karena itu, bagi Coleman, proses-proses pada tataran mikro sering kali dipandang bertindak sebagai jalan tengah, di mana kegiatan pada tataran makro dihubungkan secara kausalitas tetapi bertentangan dengan metodologi individualisme kaku,



yang analisisnya juga meliputi proposisi makro-mikro.

Untuk mendapatkan metodologi individualisme, seseorang harus melihat pula aspek ekonomi, dan di sini posisi tersebut juga sering kali terabaikan (lihat Arrow, 1994). Bahwa ada indikasi dalam konteks ini, bahkan von Mises juga telah mengabaikan metodologi individualisme kaku, yang telah ia pilih untuk menganalisis masalah-masalah sosiologi dibandingkan dengan permasalahan ekonomi. Sebagai contoh, von Mises (1994: 41-42) juga mengatakan bahwa, dalam tindakan manusia, nilai sosial memiliki keberadaan yang nyata. Tidak ada yang menyangkal bahwa bangsa, negara, partai, komunitas agama merupakan faktor-faktor nyata dalam menentukan perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, paling tidak di dalam sosiologi, atomisme sosial yang kebenarannya tidak dapat disangkal itu merupakan posisi konsensus yang juga dimiliki oleh para teoretisi tradisional dan *rational choice*.

## 2. Proses Optimalisasi

Bentuk kedua dari pilihan rasional yang sering dipandang berbeda dari teori sosiologi tradisional adalah pandangan bahwa pilihan merupakan sebuah proses optimalisasi. Ini adalah pemikiran di mana pilihan dianggap sebagai sesuatu yang rasional. Sangat penting untuk dicatat bahwa, tidak seperti mikro ekonomi klasik, sosiologi pilihan rasional kontemporer tidak berasumsi bahwa penghasilan (*income*) atau keuntungan adalah dimaksimalkan. Oleh karena itu, para teoretisi pilihan rasional telah bergerak jauh dari asumsi mikro ekonomi klasik yang menyatakan bahwa individu berusaha memaksimalkan penghasilan, untuk pengenalan terhadap kompleksitas *egoistic* dan tujuan-tujuan yang dapat mengarahkan tingkah laku. Ini merupakan bentuk analisis yang oleh Jane Mansbridge (1990: 20-1) disebut sebagai model “inklusif”, dan hanya ada ketika pengambil keputusan bertindak maksimal dan konsisten. Ini adalah kategori yang mengikutsertakan diri yang bersangkutan. Kategori ini juga mengikutkan para pemikir kontemporer dalam bidang sosiologi pilihan rasional. Lebih jauh lagi, para pemikir ini semuanya memandang “rasional” sebagai sesuatu yang “dibatasi”, dalam arti bahwa para pembuat keputusan memiliki



informasi terbatas tentang validitas tak pasti dan kemampuan terbatas untuk mendapatkan dan memproses informasi. Oleh karena itu, mereka juga telah bergerak jauh dari asumsi mikro ekonomi klasik.

Dengan adanya pengenalan bahwa pemilihan tidak perlu mengabaikan motivasi-motivasi *altruistic* dan informasi tidak harus lengkap, maka pertanyaan yang muncul akan tetap, yaitu apakah mengonsepsikan pilihan sebagai proses optimalisasi tetap menunjukkan suatu perbedaan penting antara pilihan rasional dan teori tradisional. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dibutuhkan evaluasi terhadap konsep tindakan purposif yang dimiliki oleh kedua pendekatan tadi. Pengatributan tujuan untuk menjelaskan tindakan, membutuhkan suatu bentuk teleologi. Menurut Elster (1990), ada dua bentuk penjelasan teleologi yang dapat dibedakan. *Pertama, teleologi objektif*, yang merujuk pada proses seperti teori evolusi Charles Darwin di mana kemunculan tujuan akan menyebabkan hilangnya pelaku intensional. Sebagai contoh: sayap berevolusi, seolah-olah tujuannya memang untuk terbang. Ini adalah penjelasan yang bersifat fungsionalis.

Kedua, *teleologi subjektif*, merujuk pada tindakan-tindakan yang diatur oleh sistem nilai, tujuan, dan tindakan yang sifatnya purposif. Hubungan antara tujuan dan teleologi sangatlah signifikan, karena menurut para filsuf atau ilmuwan, segala macam teleologi mengimplikasikan beberapa bentuk yang ekstrem (Nagel, 1953). Ini adalah proses maksimalisasi (contohnya: berusaha untuk mencapai tujuan)—atau minimalisasi (sebagai contoh: berusaha untuk menghindari tujuan yang tidak wajar). Oleh karena itu, tindakan purposif memerlukan maksimalisasi. Implikasinya adalah bahwa prinsip-prinsip maksimalisasi tidak hanya digunakan oleh para teoretisi pilihan rasional, tetapi prinsip tersebut juga digunakan secara implisit oleh orang lain yang memandang bahwa tingkah laku itu sebagai hal yang purposif.

Dari sudut pandang matematika, bahwa visualisasi mengenai tindakan purposif memerlukan maksimalisasi—bukanlah merupakan sesuatu yang mengejutkan. Oleh karena itu, penggunaan prinsip maksimalisasi tidaklah menimbulkan hambatan yang signifikan bagi para analis. Hal ini semata-mata menuntut agar dinamika sistem dapat





digambarkan dengan baik. Penggunaan prinsip maksimalisasi oleh karenanya tidak menimbulkan poin penting dalam perbedaan antara teori tradisional di satu sisi, dengan teori pilihan rasional di sisi lain.

### 3. Keunikan dari Analisis Pilihan Rasional

Dengan adanya pemenuhan substantif dalam asumsi inti yang berkaitan dengan pelaku dan hubungan mereka dengan struktur pilihan rasional, dan teori sosiologi tradisional, maka perbedaan yang semula ada tampak menjadi tidak penting. Seperti yang diungkapkan oleh Hechter dan Kanazawa (1997: 192), bahwa banyak sosiolog seperti tokoh dalam karya *Moire Bourgeois Gentilhomme*, yang tidak berpegang pada mekanisme pilihan rasional dalam penelitian mereka. Walaupun membesar-besarkan ketidakcocokan antara kedua perspektif merupakan sebuah kesalahan, namun akan salah pula apabila gagal mengapresiasi perbedaan pilihan rasional.

Hal yang membuat pilihan rasional menjadi berbeda adalah karena konsepsi pilihan (sebagai sebuah proses optimalisasi) dibuat eksplisit. Tampaknya membuat konsepsi pilihan menjadi eksplisit hanyalah merupakan persoalan kecil. Bagaimanapun juga hal ini memiliki implikasi penting, karena telah menghasilkan suatu struktur umum dalam model pilihan rasional. Masing-masing harus menspesifikasikan serangkaian istilah teoretis, termasuk: (1) sejumlah pelaku yang berfungsi sebagai pemain dalam sistem; (2) alternatif pilihan bagi tiap pelaku; (3) serangkaian hasil (*outcome*) dalam sistem dari setiap alternatif oleh pelaku; (4) preferensi dari tiap pelaku terhadap hasil yang mungkin diperoleh; dan (5) harapan pelaku terhadap parameter dari sistem tersebut. Model-model pilihan dapat beragam dalam berbagai dimensi.

Model-model tersebut dapat digambarkan secara matematik atau berkesinambungan, dan mereka dapat berhubungan pada permainan yang disebut "*one-shot game*" di mana pelaku hanya dapat membuat satu pilihan atau model, di mana pilihan para pelaku memengaruhi kondisi ketika ia dan orang lain akan membuat pilihan kedua. Model tersebut dapat pula diasumsikan secara material berdasarkan kecenderungan instrumental atau termasuk kecenderungan bagi kesepakatan sosial,



altruisme, dan keadilan; mereka juga dapat mengasumsikan informasi yang lengkap (yaitu mengetahui struktur permainan, termasuk preferensi orang lain), sempurna (mengetahui strategi orang lain), atau informasi dapat pula tidak lengkap dan merefleksikan risiko masing-masing (yaitu mengetahui probabilitas kemunculan dari kejadian yang tidak tentu) atau ketidakpastian (yaitu tidak mengetahui probabilitas-probabilitas tersebut). Model-model tersebut meliputi pelaku individu, pelaku kelompok, ataupun gabungan dari kedua tipe pelaku tersebut.

Terlepas dari segala bentuk variasi, sesuai dengan struktur umum teori pilihan rasional, masing-masing model memiliki kosakata teoretis yang umum. Kosakata teoretis yang umum inilah yang memungkinkan pilihan rasional berfungsi sebagai “*interlingua*” bagi ilmu sosial, dan meyakinkan bahwa perkembangan teoretis pada satu area substantif akan memiliki implikasi terhadap area-area substantif lainnya.

Berkenaan dengan struktur umum teori pilihan rasional, analisis akan berada di sekitar rangkaian isu yang terbatas. Satu isu sentral berkenaan dengan hubungan antarpreferensi. Jika preferensi individu adalah “*konvergen*”, maka sistem akan dituntun ke arah optimalitas oleh “*invisible hand*”, sehingga tindakan rasional secara individu akan mengacu kepada hasil kolektif rasional yang sama. Bagaimanapun juga, situasi semacam itu secara empiris sangat jarang terjadi. Setiap orang yang berperilaku secara rasional dapat mengarah pada hasil yang secara kolektif menjadi irasional. Situasi semacam ini, di mana suatu konflik potensial terdapat antara individu dan rasionalitas kolektif, disebut dilema sosial. Satu bagian substansial dari teori pilihan rasional terkait dengan bagaimana pelaku menyelesaikan—atau gagal dalam menyelesaikan dilema-dilema tersebut.

#### 4. Dilema-dilema Sosial

Tiga dilema sosial sudah banyak menjadi perhatian dalam berbagai wacana (untuk memahami tipologinya, lihat: Heckathorn, 1996). Dilema sosial tersebut terpusat pada isu-isu kepercayaan, persaingan, dan koordinasi. Dilema yang paling dikenal adalah “dilema tahanan” (*prisoner's dilemma*)/PD). Hal ini terjadi ketika dua tersangka tindak



kriminal ditanyai secara terpisah mengenai suatu tindakan kejahatan. Kepentingan mereka berasal dari urutan preferensi “*pay off*” permainan inti. Hasil yang paling diinginkan adalah “*unilateral defection*” (*temptation/T*), di mana seseorang mendapat keuntungan dengan memberikan pengakuan saat tersangka lainnya tetap diam, tidak mengakui. Kemudian ada “*universal cooperation*” (*reward/R*), yaitu jika keduanya diam, tidak mengakui dan hasilnya mereka menerima hukuman ringan. Lalu ada “*universal defectum*” (*punishment/P*), di mana kedua tersangka saling mengaku dan dihukum berat; dan yang paling parah adalah “*universal cooperation*” (*sucker/S*), yaitu hanya satu tersangka yang mengaku dan hukumannya sangat berat.

Persyaratan kedua adalah bahwa penghargaan dari kerja sama universal lebih disukai (dipilih) dibandingkan dengan *unilateral cooperation* dan *unilateral defection*. (contoh persamaannya =  $R > (T + S)/2$ ). Salah satu masalah yang penting dalam hal ini adalah kepercayaan. Jika para tersangka dapat saling memercayai dan sama-sama diam, maka mereka akan dapat meloloskan diri atau mendapatkan hukuman ringan. Salah satu indikator dari dilema ini adalah potensi hipokrisi. Kapan pun individu melakukan sesuatu yang mereka pikir orang lain tidak akan melakukannya, maka di situ akan mungkin terjadi dilema tahanan (*prisoner's dilemma*). Permainan ini telah menjadi paradigma untuk kasus-kasus di mana tindakan rasional individu mengarah pada hasil irasional kolektif.

*Prisoner's Dilemma* (PD) dapat memengaruhi kelompok yang lebih besar. Sebuah versi kelompok tumbuh ketika sebuah kelompok berusaha mendapatkan “*barang publik*.” Barang publik di sini diartikan dalam dua karakteristik. *Pertama*, tidak melibatkan atau mengeluarkan seseorang dari keuntungan yang akan diperoleh adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya seperti perlindungan polisi dan pertahanan nasional. *Kedua*, barang publik dimaknai sebagai gabungan pasokan, misalnya: biaya pertahanan nasional tidak meningkat sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk. Karena dua atribut tersebut, maka kondisi barang publik akan menghadapi masalah ‘penunggang bebas’ atau ‘*free rider*’. Artinya, mereka yang tidak memiliki andil dalam



proses produksi, tetapi bisa ikut menikmati keuntungannya. Sebagai contoh, bahkan mereka yang mengelak dari tagihan pajak telah ikut pula menikmati keuntungan dari perlindungan polisi dan tentara dalam konteks pertahanan nasional tadi.

Wacana ini difokuskan pada dua cara penyelesaian. *Pertama*, dorongan untuk menghargai atau memberikan “*reward*” bagi mereka yang bekerja sama dan menghukum mereka yang melanggar atau “penunggang bebas” dalam kasus di atas. Contoh yang kedua adalah bagi pencuri. Balasan yang dimaksud di sini adalah sistem dorongan, di mana tingkah laku kepercayaan dan perilaku ketidakpercayaan saling berbalas satu sama lain. *Kedua*, sistem reputasi menyediakan informasi siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat dipercaya dalam konteks ini, dan oleh karenanya memberikan sarana di mana orang yang bekerja sama dapat menempatkan diri dan berinteraksi satu sama lain secara normatif.

Dilema sosial kedua, yang dapat digambarkan dalam istilah teori permainan adalah apa yang disebut “*Chicken Game*”. *Chicken Game* ini terkait dengan soal persaingan di dalam memperebutkan sumber daya yang langka. Dalam permainan ini aturan yang berlaku adalah  $T > R > S > P$ . Preferensi terbalik ini timbul karena kurang sarana dari kerja sama universal, guna menghasilkan “*outcome*” yang optimal dari kerja sama tersebut. Permainan ini disebut demikian atas dasar suatu kontes, di mana para pengemudi menguji keberanian mereka dengan mengendarai mobil saling berhadap-hadapan. Di sini, setiap pemain memilih antara dua strategi: *chicken* (membelok untuk menghindari tabrakan) ataukah *daredevil* (tidak berbelok) yang berarti kemungkinan bertabrakan.

Oleh karena itu, aturan preferensinya adalah *temptation*, yakni salah satu berbelok; kemudian *reward*, keduanya berbelok; lalu *sucker*, ego berbelok, dan yang paling parah adalah *punishment*, yaitu tabrakan. Persoalan yang penting di dalam *Chicken Game* ini adalah alokasi ke-longgaran (*allocation of concession*). Para pemain menggabungkan kepentingan bersama (*common interest*) guna menghindari konflik, yakni dengan mempersaingkan kepentingan di dalam hal persetujuan, seperti: alokasi keberanian, kehormatan, atau keuntungan.



Dilema sosial yang ketiga menunjuk pada tipe suatu permainan yang digambarkan seperti “permainan jaminan” (*assurance game*) yang muncul saat koordinasi diperlukan untuk suatu usaha gabungan. Efek dari permainan ini adalah untuk membuat “*universal cooperation*,” lebih disukai dibandingkan dengan “*unilateral defection*,” yang oleh karenanya berlawanan dengan dua hasil paling berharga dari posisi mereka pada “*Prisoner Dilemma*”. Aturan barunya adalah  $R > T > P > S$ . Permainan ini disebut demikian karena faktanya bahwa, setiap pemain dapat dimotivasi untuk bekerja sama dengan jaminan bahwa orang lain akan melakukan tindakan yang sama. Sistem tindakan kolektif sesuai dalam hal ini jika partisipasi dengan orang lain dinilai, partisipasi bisa dalam berbagai bentuk, dan oleh karena itu koordinasi yang berkaitan dengan bentuk partisipasi sangat diperlukan. Sebagai contoh, jika dua orang ingin bertemu di sebuah restoran untuk makan siang, maka mereka harus mencocokkan pilihan restoran mana yang akan didatangi. Meskipun “resolusi” dari permasalahan koordinasi ini tampak sepele, tetapi hal ini sangat menantang bagi para teoretisi pilihan rasional.

## 5. Bentuk-bentuk Institusi (Lembaga)

Model-model *rational choice* dapat dibedakan menurut bentuk institusi (lembaga). Ada empat bentuk lembaga dasar, dan tiga di antaranya dapat dijelaskan di sini berdasarkan pada apakah pilihan-pilihan yang diambil itu merupakan produk dari pelaku tunggal ataukah pelaku kelompok—dan juga berdasar apakah target akibat (*target of impact*) dari tindakan tersebut adalah pelaku tunggal ataukah berupa pelaku kelompok.

Norma (*norms*) sudah sejak lama menjadi fokus penting dalam penelitian sosiologi. Sementara pandangan yang menyatakan bahwa para pelaku sosial merupakan pengikut suatu hukum atau aturan adalah bagian dari pandangan tradisional dalam teori sosiologi. *Rational choice theory* lebih memfokuskan pada pemunculan dan penerapan norma-norma. Struktur interaksi di mana norma-norma didasarkan adalah ketika aktor kelompok memiliki kontrol atas seorang pelaku tunggal. Sebagaimana ketika suatu pelanggaran norma dapat memicu



ketidaksetujuan kolektif. Dalam sistem normatif, hubungan kekuasaan ada di setiap tempat (*everywhere*) dan di lain tempat (*elsewhere*). Bahkan, seorang individu yang *powerful* sekalipun dikontrol oleh tindakan-tindakan orang lain. Jadi, dari sudut pandang individu, kekuasaan ada di lain tempat, yaitu ada pada kelompok lain.

Satu model norma tertentu sesuai untuk satu di antara tiga model dilema sosial. *Pertama*, norma dilema tahanan, seperti namanya adalah sarana untuk memecahkan permasalahan dilema tersebut. Norma-norma ini meliputi pemberian hukuman bagi para pelanggar, dan sebaliknya pemberian ganjaran (*reward*) bagi mereka yang menaati norma tersebut. Pelanggaran atas norma-norma ini menunjukkan adanya kemunafikan (*hypocrisy*). Contoh umumnya, para pembunuh tidak akan pernah menginginkan rumah mereka dirampok orang, dan pembohong juga tidak ingin dibohongi. Setiap komunitas memiliki berbagai aturan emas (*golden rules*) yang menyusun norma-norma tersebut.

*Kedua*, Ullmann-Margalit (1977) menjelaskan apa yang dia sebut sebagai norma-norma pemelihara ketidaksamaan. Norma-norma alokasi ini melegitimasi distribusi sumber daya yang langka, termasuk kepemilikan, kekuasaan, dan prestise, dan dari hal ini kemudian mereka mendefinisikan suatu sistem hak-hak kepemilikan. Sistem yang di dalamnya tidak ada hak kepemilikan, maka berbagai sumber daya tersebut akan direlokasikan berdasarkan pada kekuatan fisik yang relatif, seperti: kemampuan mengancam dan kekuatan-kekuatan lain untuk memaksa. Sebaliknya, di dalam suatu sistem yang di dalamnya terdapat hak-hak kepemilikan, hanya sedikit transfer legitimasi yang diperlukan sebelum terjadi negosiasi. Efeknya adalah menurunkan tingkat penawaran dengan cara mengeluarkan transfer sumber daya yang tidak *legitimate* tadi.

*Ketiga*, ia mendefinisikan norma-norma koordinasi sebagai norma-norma untuk memecahkan permasalahan koordinasi. Norma-norma ini meliputi norma-norma yang menspesifikasi arti dari simbol-simbol, seperti arti dari kata-kata. Maka di sini, bahasa dapat dilihat sebagai suatu sistem norma koordinasi yang besar. Norma-norma koordinasi mengatur tentang pergantian dalam pembicaraan, bahasa tubuh, mode



pakaian, aturan-aturan lain yang setiap orang tahu harus berupaya untuk mengerjakan aturan-aturan tersebut kepada anak-anaknya.

Pemunculan dan penerapan norma-norma menghasilkan suatu bentuk tindakan kolektif disebabkan oleh saling *inherennya* regulasi normatif tersebut. Banyak karya mengenai tindakan kolektif yang telah dihasilkan. Karya-karya ini memfokuskan pada pemunculan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, termasuk pemecahan permasalahan “penunggang bebas” (*free rider*) yang muncul karena norma-norma tersebut memiliki suatu barang publik, atau suatu keuntungan yang dapat dinikmati oleh mereka yang tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk mendapatkan barang tersebut. Permasalahan ‘penunggang bebas’ (*free rider*) dapat terjadi di berbagai tingkatan. Permasalahan ini dapat terjadi pada level utama (misalnya, mencuri) atau pada level kedua (misalnya, ketidakberhasilan dalam menerapkan norma-norma untuk mencegah terjadinya pencurian). Suatu penarikan (*regress*) dapat terjadi karena permasalahan pada level kedua harus dipecahkan secara normatif. Sebagai contoh, suatu norma yang menekankan pada keikutsertaan di dalam penegakan norma di mana hal itu akan menghasilkan suatu permasalahan, yakni munculnya para ‘penunggang bebas’ level ketiga dan seterusnya. Sejumlah solusi dari permasalahan ini telah pula diberikan. Misalnya, Taylor (1982) berargumentasi bahwa permasalahan ‘penunggang bebas’ level kedua bukanlah sesuatu yang benar-benar dilema, karena biaya di dalam berpartisipasi untuk penegakan norma tadi relatif sedikit, atau sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Misalnya, gosip adalah sebuah mekanisme penting dari penegakan norma, tetapi gosip juga merupakan bentuk hiburan. Implikasinya adalah tindakan kolektif level kedua seperti itu bukanlah merupakan sebuah dilema.

Pasar adalah bentuk lembaga (institusi) dasar kedua. Pasar didasarkan pada kumpulan pertukaran di antara para pelaku tunggal, di mana pertukaran-pertukaran ini meliputi para individu, misalnya pasar petani, pelaku kelompok, seperti dalam pasar modal, atau bentuk campuran antara pelaku tunggal dan pelaku kelompok; seperti ketika pelaku tunggal melakukan pembelian pada perusahaan. Pasar



meliputi tidak hanya sistem transaksi keuangan (seperti yang biasa difokuskan oleh para ekonom), tetapi di sini juga dapat meliputi fenomena-fenomena sosiologis tradisional. Misalnya, pilihan-pilihan pernikahan yang membentuk suatu pasar perkawinan (Coleman, 1990), di mana nilai pasar dari seorang individu tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis pekerjaan, keadaan fisik, dan kepribadian. Suatu fokus penting dari sosialisasi adalah usaha untuk meningkatkan nilai seseorang dalam pasar perkawinan. Hal yang sama dapat terjadi pada pilihan pertemanan, di mana seseorang yang berasal dari status sosial tinggi akan dipandang memiliki nilai tinggi di dalam pasar pertemanan tersebut (Coleman, 1990).

Hubungan antara kepentingan kolektif dan individu di dalam pasar sangat bervariasi. Di dalam keberuntungan dan kemiripan yang sempurna tidak akan ada dilema sosial yang terjadi, dan hasilnya adalah “*tangan yang tidak terlihat*” atau disebut “*invisible hand*” suatu non-dilema. Sebaliknya, ketika kemiripan itu tidak sempurna, maka satu atau lebih di antara ketiga dilema tersebut akan terjadi. Problem kepercayaan manandai adanya dilema tahanan (PD). Sebagai contoh: orang yang mata duitan akan menikahi seseorang hanya karena (atas dasar) kekayaan dan bukan atas dasar cinta kasih yang tulus. Penawaran manandai adanya dilema sosial lainnya. Misalnya, di dalam pemberian hadiah; jumlah hadiah yang akan diberikan biasanya ditawarkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.

Studi tentang pasar non-ekonomi ini mendukung konsep sosiologi *rational choice* sebagai imperialisme ekonomi, di mana sosiologi *rational choice* diturunkan sampai pada aplikasi terhadap fenomena sosiologis dari teori ekonomi. Akan tetapi, penekanan terhadap imperialisme ekonomi tidaklah valid karena dua alasan. *Pertama*, teori ekonomi neoklasik sangat kuat ketika diaplikasikan pada pasar sempurna atau hampir sempurna, di mana di dalam pasar seperti ini dilema-dilema sosial di atas dipecahkan melalui “*invisible hand*” pasar. Banyak studi yang dilakukan untuk menganalisis dilema sosial ini, dan hanya sedikit saja yang didasarkan pada analisis ekonomi neo klasik. *Kedua*, sebagian besar fenomena sosiologi tradisional tidak bisa dikonseptualisasikan





sebagai pasar, tetapi merujuk kepada bentuk-bentuk institusi lainnya.

Konsisten dengan fokus sosiologi tradisional terhadap norma-norma tadi, maka fokus khusus sosiologi *rational choice* adalah pada keterikatan norma-norma pada pasar. Pasar dalam konteks ini bukanlah merupakan suatu entitas yang bisa dipenuhi sendiri seperti anggapan dalam ekonomi klasik dan neoklasik. Pasar dalam hal ini tergantung pada norma-norma setempat, termasuk sistem hak kepemilikan di mana transaksi itu memperoleh dasarnya, dan norma-norma yang menyusun transaksi tersebut. Ketergantungan pasar terhadap suatu sistem norma adalah tema penting dalam analisis pasar menurut Emile Durkheim (1893). Dalam analisis modal sosial, Coleman (1990) menekankan pentingnya norma-norma untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini meliputi norma-norma yang menganjurkan pemenuhan berbagai kewajiban, dan bahkan norma-norma yang dapat menjamin keamanan ketika seseorang berjalan kaki di jalanan pada malam hari.

Berikutnya adalah tentang hierarki. Hierarki adalah suatu bentuk lembaga atau institusi di mana teori-teori *rational choice* dikembangkan. Di sini, prinsip fundamental organisasi bagi pelaku tunggal adalah memunculkan kekuasaan atau pengaruh terhadap seperangkat pelaku subordinat. Di dalam struktur yang paling sederhana, para subordinat di dalam suatu hubungan bisa berfungsi sebagai superordinat di dalam satu bentuk hubungan yang lain, dan ini akan membentuk suatu struktur yang bersifat piramidal. Teori *agency* (Eisenhardt, 1985; Jensen and Meckling, 1976; White, 1985) adalah satu di antara berbagai teori *rational choice* yang digunakan untuk menganalisis hubungan hierarki. Teori tersebut memfokuskan pada ketidaksimetrisan informasi antara para individu yang mendapatkan layanan (*principals*) dan individu yang mempekerjakan mereka (*agents*). Misalnya, di dalam hubungan antara pasien (*principals*) dan dokter (*agents*), di sini pengaruh dan juga pengetahuan *agent* tentang ilmu kedokteran yang luas dan besar memungkinkan ia untuk mengontrol atau mengatur si pasien melalui tindakan-tindakan yang “menipu” (Waitzkin, 1991). Secara umum, birokrasi dapat dilihat sebagai suatu rantai hubungan “*agent-*



*principals*” yang menghubungkan *principal* (superordinat) dengan *agent* (subordinat), dengan tanggung jawab masing-masing. Walaupun demikian, kontrol informasi yang dimiliki oleh subordinat sering kali memberi kemungkinan mereka untuk memanipulasi para subordinat mereka. Jadi, semua hubungan hierarki dapat meliputi beberapa lingkup negosiasi.

Menurut teori Agency, dua permasalahan dasar dapat terjadi ketika kepentingan *agent* di satu pihak tidak berkesesuaian dengan kepentingan *principal* di pihak lain. Permasalahan pertama terjadi secara *ex ante*, sebelum pelayanan (*service*) dari agen dipertahankan. Hal ini disebut dengan seleksi buruk (*adverse selection*), karena *agent* yang sebenarnya memiliki insentif dan kesempatan terbesar untuk memberikan pelayanan kepada para *principal* cenderung menjadi pihak yang paling tidak termotivasi atau pihak yang sangat tidak *qualified*. Misalnya, ketika iklan sebuah lowongan pekerjaan dipasang, para pelamar yang merespons iklan tersebut sebagian terbesar bukanlah mereka yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang diminta; karena sebagian besar orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti yang diminta itu pasti sudah cukup puas dengan gaji dan pekerjaan mereka sekarang. Tetapi, mereka yang melamar biasanya dari orang-orang yang belum pernah bekerja, atau mereka yang hampir kehilangan pekerjaannya. Kelompok semacam ini jelas memiliki permasalahan dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, untuk menentukan kandidat pekerja yang tepat sering kali merupakan pilihan yang sulit. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan pelamar yang pas-pasan, bisa saja menutup-nutupi kekurangan yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, dalam hal ini permasalahan koordinasi diperburuk oleh masalah kepercayaan.

Model permasalahan *agent* yang kedua terjadi secara *ex post*, setelah *service* dari *agent* dipertahankan. Jika seorang *principal* tidak memiliki sarana untuk memonitor kinerja agen, para agen mungkin akan bertindak dengan cara mereka sendiri guna memenuhi kepentingannya, tentunya dengan biaya dari *principal*. Jadi, di sinilah permasalahan kepercayaan kedua akan muncul. Sering kali hal ini



disebut dengan kekacauan moral (*moral hazard*), walaupun ini tidak mesti menunjukkan adanya perilaku yang tidak bermoral atau ilegal. Permasalahan “*moral hazard*” dapat muncul pada beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Bisnis lebih banyak mengalami kerugian karena penggelapan; dibandingkan dengan sebab-sebab perampokan, karena tidaklah mungkin dapat mengawasi seluruh karyawan setiap saat, khususnya para karyawan pada posisi yang membutuhkan kepercayaan.

Insentif yang terstruktur secara tepat dapat memecahkan permasalahan *agency*; yang menciptakan hierarki yang ekuivalen dari suatu pasar sempurna yang memecahkan semua dilema sosial. Akan tetapi, pasar sempurna jarang sekali ada di dalam dunia realitas, begitu juga suatu sistem insentif yang sempurna hanya merupakan khayalan. Menurut Holstrom (1982), suatu sistem insentif yang ideal mestinya memiliki tiga karakteristik, yakni: (1) bekerja secara efektif seharusnya juga bersifat rasional secara individu; (2) hasil dari pekerjaan haruslah rasional secara kolektif; dan (3) biaya yang dikeluarkan tidak boleh melebihi anggaran perusahaan.

Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa ketiga kondisi tersebut sulit menjadi kenyataan. Hal ini karena untuk meyakinkan bahwa seorang pekerja akan bekerja secara efektif membutuhkan insentif yang sama dengan produk marginal seseorang, yaitu perbedaan antara produk yang dihasilkan dengan atau tanpa keterlibatan (upaya) orang tersebut. Walaupun demikian, ketika level interdependensinya tinggi, dan begitu juga usaha-usaha dari semua individu diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka setiap individu harus dibayar sesuai dengan produk total. Dengan batasan ini, maka tidak ada satu pun sistem insentif yang sempurna yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan kepercayaan. Oleh karena itu, ukuran-ukuran lembaga (institusi) yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kepercayaan, untuk membatasi pengaruh-pengaruh destruktif kompetisi dan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka, serta untuk memecahkan permasalahan kerja sama (*corporation problem*) akan tetap menjadi gambaran penting yang memengaruhi pelaksanaan (pembentukan) hierarki.



Hierarki seperti halnya pasar, dapat dikombinasikan dengan bentuk-bentuk institusi lainnya. Misalnya, banyak perusahaan memiliki “*pasar karyawan internal*,” di mana para individu saling berkompetisi untuk mendapatkan promosi. Oleh karena itu, suatu pasar dapat dikaitkan atau dikombinasikan dengan suatu hierarki (Miller, 1992). Akan tetapi, banyak pula pasar yang memiliki elemen-elemen hierarki seperti dalam sistem “*price leader*,” bahwa suatu perusahaan dapat menentukan kapan harus menaikkan harga dan sebagainya, di dalam suatu jalur industri, dan hierarki semacam ini dapat dikombinasikan dengan pasar.

Bahwa keterkaitan norma di dalam hierarki dianggap sebagai fokus yang penting dalam kajian-kajian sosiologi *rational choice*. Sudah sejak lama diketahui, bahwa hal yang tampak selalu sejalan dengan struktur formal organisasi adalah struktur normatif informal. Nee dan Ingram (1998) memperkenalkan istilah “*new institutionalism*” di dalam sosiologi, di mana institusi di sini didefinisikan sebagai jaringan norma-norma formal dan informal. Mereka menolak “paradigma keterikatan struktural” yang menunjukkan keterikatan para individu ke dalam struktur-struktur yang tidak fleksibel dan mengesampingkan pilihan yang lebih bermakna. Argumentasi penting mereka adalah bahwa norma-norma itu akan memberikan “*missink link*” yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menghubungkan suatu pilihan di dalam perspektif batasan-batasan institusional dengan pendekatan keterikatan jaringan.

Pemilihan (*election*) adalah bentuk institusi keempat, di mana para aktor kelompok (para *voter*) melakukan tindakan yang dapat memengaruhi kolektivitas. Ketiga bentuk dilema tadi bisa terjadi di dalam sistem ini. Problem dilema tahanan dapat muncul ketika para kandidat menggunakan taktik kampanye yang kotor, dan ketika para pemilih menggunakan kriteria yang sederhana untuk menentukan pilihan dari sekian banyak kandidat, dan ini merefleksikan adanya permasalahan koordinasi. Bentuk institusi ini telah lama menjadi fokus tradisional dalam analisis *rational choice* di dunia politik.



#### D. INTI STRUKTUR DALAM ANALISIS PILIHAN RASIONAL

Secara tradisional, para ekonom mempelajari pasar, dan para ilmuwan politik mempelajari pemilihan umum dan hierarki pemerintahan; sementara para sosiolog mempelajari norma-norma dan hierarki, termasuk sistem perbedaan dan organisasi.

Perkembangan teori di dalam *rational choice* menunjukkan suatu struktur inti perifer. Struktur inti berdasarkan batang tubuh teori dan dihubungkan dengan kosakata teoretis pada umumnya, misalnya teori-teori umum yang berkaitan dengan dilema sosial dan model pemecahannya.

Adapun struktur periferalnya berisi aplikasi-aplikasi substantif *rational choice theory* terhadap bentuk-bentuk institusi tertentu, termasuk tes-tes teori sebelumnya—serta analisis-analisis fenomena tertentu. Dalam sistem ini, struktur inti dan struktur perifer menunjukkan sifat saling ketergantungan, karena aplikasi-aplikasi substantif *rational choice theory* menghasilkan perkembangan teori baru yang sering kali berasal dari riset dalam area-area substantif. Selanjutnya, karena sebagian besar ilmuwan RTC dilibatkan dalam perkembangan dan elaborasi teori-teori inti dan juga dalam aplikasi-aplikasi substantif, maka tidak ada pembagian buruh yang jelas secara teoretis maupun secara empiris di dalam dunia kerja nyata.

Akan tetapi, perbedaan konseptual antara struktur perifer substantif dan struktur inti teoretis juga diperlukan, hal ini karena suatu kontribusi teoretis yang dihasilkan dari analisis substantif memberikan radiasi ke belakang, yang memengaruhi batang tubuh teori ini, dan hal ini pada gilirannya memberikan implikasi radiasi keluar dari susunan area-area substantif lainnya di mana analisis RTC dihasilkan. Misalnya, studi tentang *social cooperation* yang menggunakan teori permainan atau “*game theory*” (lihat: Axelrod, 1984) telah memengaruhi bidang-bidang disiplin mulai dari psikologi evolusi dan pergerakan-pergerakan sosial hingga ke filsafat etika. Oleh karena itu, kontribusi teoretis yang muncul dalam suatu area yang substantif memiliki implikasi di banyak area substantif lainnya. Proses ini memberikan integrasi teoretis dan



koherensi terhadap teori pilihan rasional sebagai suatu pergerakan intelektual yang melebihi disiplin yang lain.

## E. THE INVASION OF ECONOMIC MEN (RATIONAL CHOICE THEORY PATRICK BAERT)

Pembahasan dalam subbab ini berhubungan dengan pendekatan ekonomi (*economic approach*) dan penggunaannya di dalam menjelaskan fenomena non-ekonomi. Dalam bagian pertama, akan didiskusikan asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan ekonomi. Diskusi ini mengenai pendekatan umum apa yang dimaksud dengan rasionalitas dan perilaku rasional yang ada dalam pendekatan ekonomi. Dalam bagian kedua dan ketiga, akan didiskusikan tentang beberapa contoh aplikasi pilihan rasional di dalam ilmu sosial dan politik. Dalam hal ini, Baert telah mencoba mengelaborasi karya dari Downs, Olson, Becker, dan Coleman. Dan di bagian keempat, akan didiskusikan tentang batasan-batasan utama dalam pendekatan ekonomi.

Patrick Baert menggunakan istilah “*rational choice theory*” (RCT) seperti pada umumnya, yaitu sebagai suatu teori sosial yang mencoba untuk menjelaskan perilaku politik dan sosial dengan mengasumsikan bahwa orang-orang bertindak secara rasional (*act rationally*). Walaupun demikian, ada beberapa konsekuensi dari definisi ini. *Pertama*, Baert memandang perspektif pilihan rasional sebagai suatu teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena sosial dan politik, bukan perilaku ekonomi. *Kedua*, RCT harus dibedakan dengan refleksi-refleksi filosofis yang berkaitan dengan rasionalitas dan pilihan rasional. *Ketiga*, RCT adalah berbeda dengan teori keputusan (*decision theory*). *Keempat*, para teoretis RCT mengembangkan teori-teori sosiologi, dan tujuan mereka adalah untuk menjelaskan dan memprediksi bentuk-bentuk perilaku kelompok. RCT sebaiknya tidak dipandang sebagai suatu teori yang menjelaskan atau memprediksikan perilaku individu. Dalam hal ini misalnya, beberapa teoris pilihan rasional berusaha untuk menjelaskan dan memprediksikan bentuk-bentuk *voting* dan bukan *vote* (pilihan) setiap individu.



## 1. Penjelasan Pilihan Rasional

Walaupun ada banyak versi RCT, tetapi sebagian besar penganut teori ini selalu mendasar bahasannya pada kata-kata kunci berikut ini: asumsi intensionalitas (maksud); asumsi rasionalitas; perbedaan antara informasi yang “sempurna” dan “tidak sempurna”, antara “resiko” dan “ketidakpastian”; dan perbedaan antara tindakan “strategis” dan “saling ketergantungan” (interdependen).

*Pertama*, para teoretis pilihan rasional mengasumsikan intensionalitas. *Rational choice explanations* (penjelasan pilihan rasional) merupakan bagian dari apa yang disebut dengan “*intentional explanations* (penjelasan maksud/intensional).” *Intentional explanations* tidak hanya menyatakan bahwa setiap individu bertindak secara intensional (dengan maksud tertentu); akan tetapi dengan *intentional explanations* juga mempertimbangkan tentang praktik-praktik sosial seperti keyakinan/kepercayaan masyarakat serta keinginan-keinginan dari para individu yang terlibat. *Intentional explanations* sering kali disertai dengan suatu pencarian terhadap akibat-akibat yang tidak dimaksudkan (efek agregat) dari tindakan purposif para pelaku. Para teoris RCT secara khusus memerhatikan dua bentuk negatif atau “kontradiksi sosial” yaitu *counterfinality* dan *suboptimality*. *Counterfinality* merujuk pada adanya kesalahan komposisi (*fallacy of composition*) yang terjadi ketika seseorang bertindak menurut “asumsi salah” yang menyatakan bahwa apa yang bermanfaat untuk seorang individu dalam lingkungan tertentu, maka secara otomatis akan bermanfaat pula bagi semua individu dalam lingkungan tersebut. Ambil contoh “penggundulan hutan” yang diberikan oleh Sartre, “Setiap petani berkeinginan untuk memilih tanah yang lebih luas dengan cara menebangi pohon, tetapi hal ini tanpa disadari akan mengakibatkan penggundulan hutan dan erosi, sehingga pada akhirnya para petani hanya akan memiliki sedikit saja tanah yang subur dan dapat ditanami dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya penebangan pohon.” Adapun *suboptimality* terjadi ketika para individu yang dihadapkan dengan berbagai pilihan, memilih strategi tertentu di mana dia menyadari bahwa para individu lain juga akan menggunakan/memilih strategi yang sama, dan akan menyadari



bahwa setiap individu akan mendapatkan keuntungan minimal ketika memilih strategi yang lain. Ambil contoh lagi “petani” Sartre. *Suboptimality* terjadi ketika seorang petani menyadari kemungkinan adanya hasil agregat, tetapi dia juga menyadari bahwa apa pun yang diputuskan oleh individu atau orang lain, maka hal itu juga merupakan keuntungan bagi dirinya untuk menebang pohon. “Dilema tahanan” seperti yang didiskusikan belakangan adalah contoh yang baik dan jelas bagi *suboptimality*.

*Kedua*, di samping intensionalitas, RCT mengasumsikan rasionalitas. *Rational choice explanations* adalah bagian dari *intentional explanations*, dan RCT tersebut mengatribusikan rasionalitas pada tindakan sosial. Rasionalitas di sini diartikan bahwa ketika bertindak dan beraksi, seorang individu memiliki rencana yang koheren, dan mencoba untuk memaksimalkan kepuasan dirinya sesuai dengan preferensi yang dia miliki, serta sedapat mungkin meminimalkan biaya yang dibutuhkan. Rasionalitas mengimplikasikan “asumsi keterkaitan,” yang menyatakan bahwa individu memiliki suatu “urutan preferensi” dari berbagai macam opsi yang ada. Dari urutan pilihan tersebut, para ilmuwan sosial menyimpulkan adanya suatu “fungsi nilai (*utility function*)” yang mengatribusikan satu nomor pada setiap opsi menurut tingkatan di dalam urutan preferensi. Untuk bisa dikatakan rasional, urutan preferensi seseorang haruslah memenuhi kriteria tertentu. Prinsip transitivitas merupakan salah satu contoh dari kriteria tersebut: preferensi X atas Y dan Y atas Z seharusnya mengimplikasikan adanya preferensi X atas Z.

*Rational choice explanations* memerhatikan perilaku individu dengan merujuk pada keyakinan dan preferensi subjektif seorang individu, bukan pada kondisi objektif yang dihadapi oleh individu tersebut. Maka adalah sesuatu yang mungkin terjadi, bahwa seseorang bertindak secara rasional sementara ia bertumpu pada keyakinan yang salah. Hal ini dikarenakan adanya pencarian atas alat/sarana terbaik untuk mencapai tujuan atau keinginannya. Walaupun demikian, untuk bisa dikatakan rasional seseorang diharapkan bisa mengumpulkan informasi untuk membuktikan keyakinannya. Akan tetapi, pengumpulan informasi





terus-menerus tiada akhir juga merupakan tanda ketidakrasionalan, khususnya ketika situasi tersebut memiliki urgensi tertentu. Misalnya ketika ada serangan militer besar-besaran, maka pencarian yang lama terhadap strategi untuk menghadapi serangan tersebut akan mengakibatkan konsekuensi yang buruk.

*Ketiga*, ada perbedaan antara ketidakpastian dan risiko. Saya telah mengasumsikan bahwa orang-orang telah mengetahui dengan pasti konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka. Beberapa teoritis bahkan menyatakan bahwa tidak ada *setting* kehidupan nyata (*real-life*) di mana orang-orang mendapatkan informasi yang sempurna, karena seperti yang dikatakan Burke dua abad yang lalu, “Anda tidak akan dapat merencanakan masa depan Anda dengan melihat pada masa lalu.” Ada perbedaan di dalam “informasi yang sempurna” antara “ketidakpastian” dan “risiko”—suatu perbedaan yang pertama kali dikenalkan oleh J.M. Keynes dan F. Knight—dan RCT cenderung memandang pilihan dalam ketidakpastian sebagaimana pilihan dalam risiko. Ketika dihadapkan dengan risiko, orang-orang dapat mengatribusikan berbagai probabilitas ke berbagai hasil (*outcome*), sementara ketika dihadapkan dengan ketidakpastian, mereka tidak dapat melakukan hal seperti ini. Para teoritis pilihan rasional cenderung memfokuskan pilihan pada risiko dengan dua alasan: mereka berargumentasi bahwa situasi-situasi ketidakpastian tidak pernah eksis, atau jika memang eksis, RCT tidak dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan orang-orang. Ketika dihadapkan dengan risiko, RCT mengasumsikan bahwa orang-orang mampu mengalkulasikan “nilai yang diharapkan” untuk setiap tindakan. Untuk mendapatkan arti dari konsep “nilai yang diharapkan,” maka untuk setiap hasil,  $X_i$ , kita perlu untuk mengalikan nilai hasil (*outcomes*),  $U_i$ , tersebut dengan probabilitas,  $P_i$ . Maka nilai yang diharapkan dapat ditemukan dengan jumlah perkalian ini:  $U_1.P_1 + U_2.P_2 + \dots + U_i.P_i + \dots + U_n.P_n$  ( $n$  merepresentasikan jumlah hasil).

*Keempat*, ada perbedaan antara pilihan-pilihan strategis dan parametrik. Di sini saya menekankan pada “pilihan parametrik.” Istilah ini merujuk pada pilihan-pilihan yang dihadapi oleh para individu yang dihadapkan dengan suatu lingkungan pilihan yang independen.



*Suboptimality* dan *counterfinality* adalah contoh dari pilihan strategis, di mana seseorang sebelum menentukan pilihan harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain. Sebagai bagian dari RCT, *game theory* (teori permainan) berkaitan dengan formalisasi pilihan-pilihan strategis atau independen.

## 2. Teori Permainan

Suatu permainan setidaknya terdiri dari dua pemain yang mengembangkan strategi untuk mendapatkan hasil tertentu atau penghargaan (*reward*). Permainan yang terdiri dari dua pemain disebut “permainan dua orang (*two person games*); sedangkan permainan yang dimainkan lebih dari dua orang disebut dengan ” permainan n-orang (*n-person games*). Penghargaan yang diberikan pada setiap pemain bukan hanya tergantung pada strategi dia sendiri. Dalam hal ini, strategi setiap pemain tergantung pada strategi pemain lain. Dengan preferensi setiap pemain atas hasil atau penghargaan yang diinginkan, teori permainan mencoba untuk memprediksi strategi-strategi pemain di mana mereka bertindak secara rasional atas dasar informasi yang ada. Jelasnya, ada kemungkinan akan adanya ketidaksesuaian antara antisipasi teoretis permainan dengan pilihan-pilihan aktual orang-orang di kehidupan nyata. Ada dua model teori permainan: “teori permainan kooperatif” dan “teori permainan nonkooperatif.” Teori permainan nonkooperatif adalah yang paling sering digunakan dalam teori permainan.

Diasumsikan bahwa orang-orang cenderung bertindak demi kepentingan mereka sendiri, dan mereka akan bekerja sama dengan orang lain hanya jika hal tersebut dapat menyokong kepentingannya. Di dalam permainan kooperatif setiap individu mencari hasil terbaik untuk kelompok mereka. Karena RCT cenderung berkaitan dengan asumsi bahwa orang-orang cenderung untuk memaksimalkan kepentingan individu mereka, maka dalam hal ini fokus bahasan akan diberikan pada teori permainan nonkooperatif.

Di dalam beberapa kasus, khususnya permainan “variabel-*sum* atau *non-zero-sum*,” penghargaan terhadap semua pemain tergantung



pada strategi setiap pemainnya. Hal ini berbeda dengan permainan “*constant-sum* atau *zero-sum*,” di sini *gain* (pemerolehan) seseorang berarti *loss* (kerugian) bagi orang yang lain. *Constant game* meliputi konflik murni dan cenderung jarang terjadi dalam kehidupan nyata, sedang variabel-*sum games* meliputi kolaborasi murni atau suatu kombinasi konflik dan kolaborasi. Variabel-*sum games* yang hanya meliputi kolaborasi disebut dengan permainan koordinasi (*co-ordination games*), sementara kombinasi antara konflik dan kolaborasi diconthokkan dalam dilema tahanan: *the battle of the sexes*, *the chicken game*, dan *assurance game*.

Dalam teori permainan nonkooperatif, dua bentuk permainan dapat dibedakan menjadi: permainan “bentuk strategis” dan permainan “bentuk ekstensif.” Di dalam permainan bentuk strategis (kadang disebut dengan permainan bentuk normal), para pemain dapat memilih strategi simultan. Adapun permainan bentuk ekstensif mempertimbangkan sederet pilihan dan informasi yang dikumpulkan oleh para pemain untuk setiap permainan. Maka, dalam hal ini analisis sinkronis sesuai untuk permainan bentuk strategis, sedangkan untuk permainan bentuk ekstensif analisis diakronis sesuai untuk diterapkan. Secara teknis ada kemungkinan untuk mengubah permainan bentuk ekstensif menjadi permainan bentuk strategis. Dan sebaliknya (tetapi lebih rumit), permainan bentuk strategis diubah menjadi permainan bentuk ekstensif, tetapi untuk maksud kejelasan, Baert hanya berfokus pada permainan bentuk strategis.

Mungkin penjelasan di atas sedikit membingungkan, tetapi beberapa contoh di bawah ini akan dapat mendemonstrasikan kesederhanaan dari asumsi teori permainan. Baert memulai penjelasannya dari dilema tahanan, suatu contoh dari *variable-sum game* dengan kombinasi antara konflik dan kolaborasi. Mungkin permainan ini adalah yang paling terkenal, bukan hanya karena relevansinya dengan kehidupan politik dan sosial, melainkan juga karena implikasi *counterintuitive*-nya.

Bayangkan misalnya Anda bersama dengan orang lain telah melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, dan karena itu pulalah



Anda berdua kemudian ditahan, tetapi polisi tidak menemukan bukti yang memuaskan atas Anda berdua. Maka, Anda kemudian ditempatkan di dalam sel yang terpisah dengan teman Anda. Dalam hal ini polisi memberi Anda dua pilihan: *mengakui* atau *menolak mengakui* keterlibatan Anda dalam kejahatan tersebut. Jika Anda mengakui sedangkan teman Anda tidak mengakui, Anda akan bebas dan teman Anda akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Jika Anda mengakui dan teman Anda juga mengakui, maka Anda, dan teman Anda akan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Jika Anda berdua menolak mengakui keterlibatan Anda maka Anda berdua akan mendapat hukuman lima tahun penjara. Dalam situasi seperti ini, teman Anda memiliki pilihan yang sama dengan Anda.

Untuk mengklarifikasi argumen ini, bayangkan bahwa Anda lebih memikirkan tentang panjang hukuman yang akan Anda terima dibandingkan dengan memikirkan hukuman yang mungkin diterima oleh teman Anda; asumsikan pula bahwa hubungan Anda dengan teman Anda benar-benar murni hubungan profesional.

Dengan mengasumsikan bahwa Anda lebih memerhatikan tentang hukuman yang akan Anda terima dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima oleh teman Anda, maka pilihan Anda akan jelas terlihat. Setelah melalui refleksi rasional, maka Anda akan memutuskan untuk mengakui keterlibatan Anda, hal ini dikarenakan pilihan tersebut paling menguntungkan bagi Anda, tidak peduli apa pun pilihan yang mungkin diambil oleh teman Anda. Hal ini mudah untuk dibuktikan. Teman Anda juga memiliki dua kemungkinan, mengakui atau menolak untuk mengakui. Ambil misalnya jika teman Anda menolak untuk mengakui keterlibatannya, maka dalam hal ini Anda akan bebas, sementara jika Anda menolak untuk mengakui, maka Anda akan mendapatkan hukuman lima tahun penjara. Hal yang sama jika teman Anda memutuskan untuk mengakui keterlibatannya, maka dalam hal ini Anda dan teman Anda akan sama-sama mendapatkan hukuman dua puluh tahun penjara, sementara jika Anda menolak untuk mengakui, maka Anda akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Maka apa pun keputusan yang diambil oleh teman Anda, maka jalan terbaik



dan paling menguntungkan bagi Anda adalah mengakui keterlibatan Anda. Tetapi, perlu juga diingat bahwa teman Anda juga diberitahu hal yang serupa, dan mengasumsikan bahwa dia juga memutuskan atas dasar rasionalitas dan panjang hukuman merupakan prioritas baginya, maka keputusan yang dia ambil akan sama dengan keputusan Anda, mengakui. Maka, akibatnya adalah Anda berdua akan dihukum dua puluh tahun penjara. Tetapi ingat, bahwa akan lebih baik bagi Anda berdua jika Anda berdua sama-sama menolak untuk mengakui, karena Anda berdua hanya akan mendapatkan hukuman lima tahun. Dilema tahanan menunjukkan bahwa keputusan rasional individu dapat mengakibatkan hasil-hasil yang tidak dimaksudkan dan suboptimal. Perhatikan pula bahwa kesadaran Anda (dan teman Anda) terhadap paradoks ini tidak dapat membantu mengatasi permasalahan ini, maka bagaimanapun mengakui keterlibatan Anda, apa pun keputusan yang diambil oleh teman Anda, dan sebaliknya. Dengan kata lain hasil suboptimal, walaupun tidak dimaksudkan, masih dapat diprediksi.

Ada beberapa istilah teknis yang berkaitan dengan teori permainan: *pay-off*, strategi dominan, dan *nash-equilibrium*. Dalam Tabel 9.1 pasangan dalam setiap kotak merujuk pada *pay-off* bagi Anda dan teman Anda, tergantung pada keputusan Anda berdua. *Pay-off* adalah indikasi nomer tentang seberapa jauh hasil tertentu diinginkan oleh setiap pemain. Nomer pertama untuk setiap pasangan merujuk pada *pay-off* pemain “baris” (dalam hal ini Anda), nomor kedua mengindikasikan *pay-off* dari pemain “kolom” (dalam hal ini teman Anda). Katakanlah, misalnya *pay-off* Anda adalah 1 (yang berarti hukuman seumur hidup), 2 (dua puluh tahun), 3 (lima tahun), 4 (bebas).

Tabel 9.1 Dilema Tahanan.

	Teman Anda Menolak Mengakui.	
Menolak Anda	3,3	1,4
Mengakui	4,1	2,2

Maka, dalam hal *pay-off* gambaran berikut ini muncul: jika teman Anda mengakui keterlibatannya, maka Anda akan memberikan skor 2 bila mengakui dan 1 bila menolak; jika teman Anda menolak mengakui



keterlibatannya, maka Anda akan memberi skor 4 bila mengakui dan 3 bila menolak. Argumen yang sama ada pada teman Anda. Maka, dalam hal ini mengakui adalah “strategi dominan” Anda; hal itu juga merupakan yang terbaik pula bagi teman Anda. Strategi dominan adalah strategi yang paling menguntungkan bagi Anda apa pun keputusan yang diambil oleh pemain lain. Beberapa permainan tidak memberikan kemungkinan adanya strategi dominan, tetapi setidaknya *nash-equilibrium* (biasa disebut ekuilibrium) adalah sepasang strategi di mana setiap pasangan merepresentasikan strategi terbaik. Dalam dilema tahanan *nash-equilibrium* adalah pasangan (mengakui, mengakui)—strategi dominan bagi Anda dan juga teman Anda. Walaupun demikian, ekuilibrium beberapa permainan tidak beranggotakan strategi dominan. Dalam contoh tersebut hanya ada satu *nash-equilibrium*, tetapi dalam permainan-permainan tertentu ada banyak ekuilibrium.

Model dilema kedua terdapat pada permainan koordinasi—suatu *variable-sum game* dengan kolaborasi murni. Permainan ini berbeda dengan permainan sebelumnya, di mana dalam hal ini berkoordinasi adalah keinginan para pemain. Misalnya, Anda dan seorang lain memasuki sebuah lift. Dalam sebuah lift tersebut memang ada ruang yang cukup bagi Anda berdua, tetapi masalahnya adalah Anda tidak dapat secara bersamaan dengan teman Anda memasuki lift tersebut, salah satu di antara Anda berdua harus memasuki terlebih dahulu. Anda tidak sedang terburu-buru, dan Anda adalah orang yang cukup baik, yang oleh karenanya Anda mempersilakan orang tersebut untuk masuk terlebih dahulu. Tetapi, permasalahannya adalah Anda berdua sama-sama menghindari untuk masuk terlebih dahulu. Kita asumsikan bahwa permainan ini sekali lagi bersifat simetris, bahwa seseorang yang datang dari arah yang berlawanan memiliki preferensi yang sama dengan Anda. Tabel 9.2 menyajikan permainan koordinasi semacam itu. Dalam hal ini terdapat dua ekuilibrium (menunggu, masuk) dan (masuk, menunggu). Kombinasi lain kurang disukai.



**Tabel 9.2 Permainan Koordinasi (*Co-ordination Game*).**

	Orang lain Menunggu Masuk dulu
Menunggu Anda	0,0
Masuk terlebih dahulu	1,1 1,1 0,0

Karena ada dua ekuilibrium, maka tidaklah jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemain. Tetapi, di dalam realitas permainan koordinasi cenderung untuk diulang-ulang. Bayangkan, misalnya Anda menghadapi situasi yang sama dengan orang yang sama pula. Mungkin pada pertemuan yang pertama Anda akan merasa kikuk, tetapi sepertinya ketika kejadian tersebut terjadi berulang-ulang maka akan terjadi *rule* (hukum) tertentu. Anda mungkin kemarin, misalnya memutuskan untuk masuk terlebih dahulu, maka hari ini giliran orang tersebut yang seharusnya masuk lift terlebih dahulu. Atau Anda akan mengikuti aturan bahwa yang lebih tua seharusnya masuk terlebih dahulu. Hukum konvensi semacam ini menghasilkan prediktif relatif kehidupan sosial, dan ini adalah tugas Anda untuk mematuhi.

**Tabel 9.3 Pertarungan Jenis Kelamin (*Battle of Sexes*).**

	Woman	
	Makan malam	Bioskop
Makan malam Anda	4,3	2,2
Bioskop	1,1	3,4

Seperti dilema tahanan, pertarungan jenis kelamin (*the battle of sexes*) adalah contoh dari *variable-sum game* dengan kombinasi antara kolaborasi dan konflik. Dalam hal ini, sekali lagi adalah keinginan para pemain untuk melakukan koordinasi. Permainan ini dicontohkan dengan dilema umum yang sering kali dihadapi oleh sepasang suami istri. Bayangkan misalnya sepasang suami istri sedang merencanakan aktivitas pada malam tertentu. Mereka memiliki keinginan yang berbeda, tetapi mereka lebih suka jika mereka dapat sama-sama pada malam tersebut dan tidak melakukan aktivitas yang dipilih. Sang suami lebih senang pergi makan malam dibandingkan dengan pergi nonton, tetapi walaupun demikian yang lebih penting bagi dia adalah dia bisa



bersama-sama dengan istrinya pada malam tersebut. Demikian pula dengan sang istri, dia sebenarnya lebih suka pergi nonton dibandingkan jika pergi makan malam, tetapi yang terpenting bagi dia adalah bahwa dia bisa bersama-sama dengan suaminya pada malam tersebut dibandingkan jika dia harus pergi nonton sendirian. Maka, dalam hal ini dua macam ekuilibrium muncul (makan malam, makan malam) dan (nonton, nonton). Kombinasi lain tidak diinginkan, karena yang terpenting bagi mereka berdua adalah menghindari untuk pergi sendiri.

Teori permainan relevan untuk pemahaman sejumlah fenomena sosiologi. Dalam realitas, para pemain tidak melulu para individu; mereka bisa jadi merupakan badan pengambil keputusan semisal perusahaan atau pemerintah. Di sini dua model aplikasi empiris dapat dibedakan. *Pertama*, ada kasus-kasus langsung di mana permainan tersebut hanya terdiri dari dua pemain. *Kedua*, ada kasus lanjutan di mana lebih dari dua pemain terlibat dalam permainan tersebut. Contoh bentuk pertama adalah perlombaan senjata antara dua *superpower* yang sering kali menyerupai dilema tahanan; walaupun idealnya keduanya haruslah bersama-sama mengurangi persenjataannya, tetapi keputusan terbaik bagi masing-masing pihak adalah menambah atau melengkapi persenjataannya, apa pun keputusan yang diambil oleh orang lain. Maka, dalam hal ini terjadi hasil suboptimal.

### 3. Contoh Aplikasi Pilihan Rasional

Buku *An Economic Theory of Democracy* karya Anthony Downs adalah buku pertama yang mengeksplorasi aplikasi-aplikasi RCT pada fenomena politik. Asumsinya adalah para politikus dan *voter* bertindak secara rasional. Motivasi yang mendasari para politikus berkaitan dengan keinginan-keinginan pribadi semisal penghasilan, prestise, dan kekuasaan. Karena atribut-atribut ini tidak dapat diperoleh kecuali jika diangkat, maka politikus bertujuan untuk memaksimalkan dukungan politik mereka, dan kebijakan-kebijakan mereka dalam hal ini hanyalah merupakan sarana untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut.

Kedua, buku *Logic of Collective Action* karya Olson. Olson mengeksplorasi aplikasi RCT pada teori organisasi. Dalam hal ini, menurut





Olsen anggota suatu organisasi/perusahaan memiliki kepentingan-kepentingan umum semisal kondisi kerja yang lebih bagus atau gaji yang lebih tinggi. Dia memfokuskan pada “barang-barang publik”, yaitu barang-barang yang disediakan untuk satu atau beberapa orang dalam suatu kelompok. Beberapa permasalahan kemudian muncul. Asumsikan bahwa merupakan kepentingan semua anggota dari sebuah kelompok besar untuk mendapatkan barang publik tersebut. Walaupun demikian, mendapatkan barang publik tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, maka adalah kepentingan dari setiap anggota untuk tidak berusaha mendapatkannya/melakukannya, dan setiap anggota cenderung mengharapkan anggota lain yang melakukannya. Hal ini dikarenakan ketika barang publik tersebut telah didapatkan, maka barang tersebut juga dapat dinikmati oleh semua anggota. Lebih lanjut, di dalam suatu kelompok besar, fenomena ini sering terjadi. Akan tetapi, permasalahannya jika setiap orang enggan atau tidak mau mendapatkan barang publik tersebut, maka tidak satu pun anggota kelompok tersebut yang akan mendapatkannya. Maka, walaupun ini merupakan kepentingan dari setiap anggota/orang untuk mendapatkan barang tersebut, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa kelompok tersebut akan secara otomatis mendapatkan barang publik itu. Itulah mengapa beberapa perusahaan cenderung memberikan *incentive* atau bahkan sanksi untuk membuat anggotanya agar mau mendapatkan barang tersebut.

Ketiga, *The Economic Approach to Social Behavior* karya Becker adalah artikel dengan suatu pendahuluan yang proaktif. Penekanan dalam karya ini terletak dalam keyakinan bahwa yang membedakan ekonomi dari disiplin-disiplin ilmu lain yang terkait adalah bukan subjek permasalahannya akan tetapi pendekatannya. Tujuan dari Becker adalah menunjukkan bahwa apa yang ia sebut dengan “pendekatan ekonomi” merupakan suatu pendekatan yang kuat, karena ia dapat diaplikasikan ke berbagai macam fenomena. Dalam hal ini Becker merupakan eksponen “imperialis ekonomi,” karena dia dalam hal ini mengatakan bahwa pendekatan ekonomi “menyediakan suatu kerangka tunggal yang berharga untuk memahami semua perilaku manusia.”



Keempat, *Foundations of Social Theory* karya Coleman. Seperti halnya *Social System*-nya. Parson, *Social Theory and Social Structure*-nya Merton dan *Constitution of Society*-nya Giddens, buku Coleman ini dimaksudkan untuk mengembangkan suatu diskursus di dalam teori sosial umum. Poin terpenting dalam karya Coleman ini adalah konsep “tindakan rasional dan purposifnya.” Dalam pandangan ini, orang-orang tidak hanya bertindak secara intensional (dengan maksud tertentu), tetapi mereka juga memilih barang-barang atau tindakan-tindakan yang mungkin dapat memaksimalkan nilai. Dia memberikan dua alasan dalam asumsi ini. *Pertama*, teori-teori yang mengasumsikan bahwa orang-orang cenderung memaksimalkan nilai memiliki kekuatan prediksi yang lebih besar dibandingkan dengan teori-teori yang hanya mempostulatkan intensionalitas. *Kedua*, mengasumsikan bahwa orang-orang cenderung memaksimalkan nilai menunjukkan adanya kesederhanaan dari teori tersebut. Dan yang juga tak kalah pentingnya adalah konsep Coleman bahwa tindakan purposif dapat memengaruhi tatanan makro. Dia memberikan perhatian khusus terhadap efek-efek yang tidak dimaksudkan (*unintended effect*). Orang-orang bertindak dengan maksud tertentu, tetapi tindakan mereka juga mungkin akan menghasilkan suatu hasil yang tidak dimaksudkan atau yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.

#### 4. Permasalahan Berkaitan dengan RCT

Tak begitu sulit melihat daya tarik dari RCT. Pertama, berlainan dengan kompleksitas deskripsi filosofis rasionalitas, *rational choice explanations* dalam ilmu sosial dan politik terlihat lebih sederhana. Inti dari deskripsi Becker dan Coleman bisa dirangkum hanya dengan beberapa baris kalimat. *Kedua*, beberapa presuposisi *rational choice explanations* sangatlah umum dan jarang dipertentangkan. Tidak ada yang mempermasalahkan presuposisi yang menyatakan bahwa setiap orang bertindak secara sadar, walaupun kadang menghasilkan efek atau hasil yang tidak diantisipasi sebelumnya. *Ketiga*, beberapa akibat dari *rational choice explanations* bersifat *counter-intuitive*. Misalnya, pandangan bahwa apa yang menurut tiap individu bersifat rasional,



maka tidak secara otomatis secara simultan bersifat rasional bagi semua orang. *Keempat*, RCT mendorong harapan bahwa suatu ilmu sosial yang terintegrasi sangatlah mungkin didapatkan. Selama dua abad para sosiolog dan ekonom berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda. RCT memungkinkan pembaruan komunikasi di luar disiplin tersebut.

Walaupun ada banyak daya tarik dari RCT, akan tetapi RCT juga memiliki banyak permasalahan, karena ia dipandang sebagai alternatif dari pemikiran “sosiolog”. Di sini diilustrasikan empat macam permasalahan utama; tendensi para teoritis pilihan rasional untuk mengembangkan *post hoc explanations*; kesalahan asumsi mereka terhadap konsep rasionalitas bebas budayanya; kesalahan konsep teoritis pilihan rasional “internalis;” dan kesalahan konsep “eksternalisme.”

Pertama, yang berkaitan dengan argumentasi *post hoc*. Para teoritis RCT cenderung mengartikan praktik-praktik sosial dengan cara mengatribusikan rasionalitas pada praktik-praktik tersebut secara *ex post facto*. Mereka sering kali menyatakan bahwa praktik-praktik sosial yang merupakan *prima facie* dan bersifat tidak rasional adalah sebenarnya rasional. Semakin besar derajat ketidakrasionalan praktik-praktik tersebut, semakin besar pula usaha para teoritis RCT untuk menunjukkan bahwa praktik tersebut sebenarnya rasional. Misalnya Brown, seorang psikolog, dengan menggunakan teori permainan menunjukkan bahwa perilaku panik, yang sepintas bersifat irasional adalah sebenarnya bersifat rasional. Tetapi, usaha ini tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa argumentasi mereka secara empiris bisa dikatakan valid.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan teorisasi *post hoc* ada dua hal. *Pertama*, pada asumsi *post hoc* yang secara empiris tidak valid (misal asumsi bahwa orang terlalu *overestimate* akibat dari tindakan-tindakan mereka). *Kedua*, teori tersebut mengakomodasi pengamatan yang bersifat saling eksklusif (misalnya, perilaku yang umum dan yang tidak umum; tindakan kooperatif dan ketidaksempurnaan; *non-voting* dan *voting*), yang akibatnya teori tersebut tidak bisa difalsifikasi. Karena para teoritis RCT cenderung untuk menempatkan diri mereka dalam suatu tradisi falsifikasi, maka mereka tidak dapat mengetahui bahwa rekonstruksi *post hoc* tidak dapat digunakan sebagai validasi teori tersebut.



Permasalahan kedua adalah bahwa sebagian besar teoritis pilihan rasional cenderung untuk mengabaikan perbedaan kultural (budaya). *Pertama*, mereka mengklaim bahwa preferensi bersifat stabil dalam berbagai budaya. *Kedua*, ada presuposisi yang lebih luas dalam RCT yang menyatakan bahwa ada suatu tindakan rasional tunggal yang bebas dari budaya. Misalnya, para teoritis RCT memperkenalkan konsep “keyakinan rasional” masyarakat, tanpa sepenuhnya memerhatikan bahwa konteks budaya dapat membedakan tindakan mana yang dibuat secara rasional dan mana yang dibuat secara tidak rasional. Permasalahan yang ada pada RCT adalah berkaitan dengan adanya keyakinan bahwa terdapat hubungan antara tindakan dan hasil yang secara otomatis berhubungan dengan konsep budaya, misalnya yang berkaitan dengan sebab akibat.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan perbedaan antara bertindak seakan-akan rasional pada satu sisi, dengan bertindak yang benar-benar rasional pada sisi yang lain. Para teoritis RCT sering kali membela teori mereka dengan menunjukkan bahwa mereka didukung dengan temuan-temuan empiris. Untuk menjustifikasi kerangka pemikiran mereka, mereka biasanya merujuk pada kenyataan bahwa model yang diambil dari kerangka pemikiran tersebut, memungkinkan adanya prediksi yang akurat terhadap tindakan seseorang serta terhadap akibat dari tindakan tersebut. Maka di sini, ada asumsi epistemologis yang menyatakan bahwa validasi suatu teori tergantung pada kekuatan prediksi teori tersebut.

Akan tetapi, kesamaan antara model dan realitas sering kali tidak mencukupi untuk mendukung RCT yang membentuk dasar model tersebut. *Pertama*, karena perkembangan terkini di dalam filsafat ilmu pengetahuan menentang konsep yang menyatakan bahwa kekuatan teori tergantung pada kekuatan prediksi teori tersebut. *Kedua*, karena ada perbedaan antara bertindak seakan-akan rasional dengan bertindak yang benar-benar rasional. Memang berdasarkan observasi tentang kemiripan antara model dengan kenyataan, bisa dikatakan bahwa pada umumnya orang bertindak sesuai dengan prinsip dasar rasionalitas. Tetapi adalah salah bila menyatakan bahwa kemiripan tersebut bisa



dijadikan bukti empiris bahwa orang-orang biasanya bertindak secara rasional. Karena para individu yang bertindak seakan-akan rasional tidak membutuhkan proses keputusan rasional.

Permasalahan keempat berkaitan dengan konsep eksternalis. Mereka cenderung beranggapan bahwa diri mereka adalah para eksternalis. Berbeda dengan internalis, eksternalis cenderung mengabaikan intensionalitas. Tetapi, posisi eksternalis sangatlah lemah terutama berkaitan dengan *adequacy of meaning* (suatu penjelasan yang bisa dipenuhi jika penjelasan tersebut dapat menjelaskan regularitas). Hal ini dikarenakan eksternalis cenderung mengabaikan konsep seperti “tujuan,” atau “keputusan”. Dan, jika mereka memasukkan konsep tersebut maka mereka akan masuk pada daerah internalis.

#### **F. RASIONALITAS: PEMAKSIMALAN KEPENTINGAN INDIVIDU (MALCOLM WATERS)**

Di dalam ideologi sayap kanan yang telah muncul dalam demokrasi pasar pada abad ke-20, perilaku manusia dipahami sebagai yang dimotivasi oleh pemaksimalan kepentingan individu. Gagasan demikian sudah sangat umum. Ideologi ini (sering kali disebut rasionalisme ekonomi, ekonomi sisi penawaran, *new rightisme*, *Reaganomics*, *Rogemomics*, atau *Thatcherism*) didukung dengan teori bahwa manusia memiliki kepentingan material individual, bahwa kepentingan-kepentingan ini mengambil preseden atau komitmen terhadap nilai-nilai umum seperti keadilan atau kesejahteraan, dan bahwa kepentingan-kepentingan itu juga mengambil preseden/komitmen terhadap kepentingan nonmaterial seperti pengembangan pribadi, rangsangan intelektual, apresiasi estetika, dan pembangunan masyarakat. Karena ideologi di atas memang merupakan ideologi, dan bukan teori semata, maka ideologi itu juga mengevaluasi perilaku manusia seperti keseluruhan masyarakat dalam bentuk keberhasilan material mereka. Keberhasilan dicapai dengan memaksimalkan keuntungan materi atas kompetitor bukan saja dengan mencapai tingkat efisiensi tertinggi dalam produksi, melainkan juga mengeksploitasi orang lain sebanyak mungkin, sementara pada saat yang sama



menghindarkan diri sekuat mungkin untuk tidak dieksploitasi orang lain. Eksploitasi demikian dapat dilakukan baik di dalam hubungan pekerjaan atau di dalam hubungan tawar-menawar atau dagang (*bargaining or trading relationships*).

Dalam banyak cara hubungan dagang merupakan paradigma untuk teori sosiologi formal yang menekankan rasionalitas sebagai karakteristik utama masyarakat manusia. Menurut cara pandang demikian, anggota masyarakat sering dipahami sebagai orang yang memiliki barang berharga dengan tingkat kelangkaan bervariasi, yang mana mereka dapat melakukan barter dengan orang lain. Barang berharga ini meliputi barang-barang seperti properti, harta produksi dan harta untuk konsumsi, keterampilan dan kepercayaan, tetapi mencakup barang sosial lain seperti persetujuan, afeksi/kasih sayang, *prestige*, dukungan politik, tanggapan seksual, dan kekuatan tenaga kerja. Barang berharga itu mempunyai tingkat kelangkaan yang bervariasi. Barang berharga itu diberikan kepada orang lain hanya jika orang lain itu memberikan barang berharganya. Misalnya, seseorang dianggap sebagai orang yang menawarkan kenikmatan seksual kepada orang lain untuk ditukar dengan barang materi seperti uang. Masyarakat manusia dianggap muncul dari pertukaran tersebut, baik yang dipahami secara terang-terangan maupun secara samar/sembunyi.

Hubungan di antara teori-teori yang menekankan rasionalitas dan teori-teori yang menekankan agensi yang dibahas di bab sebelumnya sudah jelas. Memang, teori rasionalitas dianggap sebagai suatu subtype teori agensi. Layaknya teori agensi, teori rasionalitas lebih bersifat individualistik ketimbang holistik, yaitu teori rasionalitas memandang fenomena sosial makrostruktur sebagai yang muncul dari interaksi manusia—teori rasionalitas berpendapat bahwa fenomena berskala besar ini bukan *pregiven* atau sudah ada sebelumnya. Teori rasionalitas berasumsi bahwa manusia punya sifat ingin memperoleh sesuatu dan ingin sukses, dengan keinginan untuk mendapatkan hasil dengan segera. Ini juga berlaku ketika individu berkorban demi keinginan orang lain. Seorang prajurit yang mungkin berisiko mati untuk menyelamatkan



orang lain dapat dilihat sebagai kehidupan dagang dengan hasil berupa prestise dan persetujuan sosial, mantel heroisme.

Dalam menyusun asumsi ini, teori rasionalitas menyelesaikan masalah validasi makna yang berhubungan dengan *Verstehen*, setidaknya menurut ukuran mereka sendiri. *Erklarendes Verstehen* menurut Weber dapat dicapai bila tindakan yang dilakukan bersifat rasional, baik dalam bentuk instrumen maupun nilai-nilainya. Dalam suatu pengertian, definisi Weber tentang *subject matter* sosiologi masih sangat sempit, karena menurut pengakuan Weber, sebagian besar tindakan dalam kehidupan keseharian kita bersifat habitual atau kebiasaan. Demikian juga sosiologi fenomenologis dan etnometodologis, hanya berfokus pada perilaku yang memperoleh makna melalui penjelasan reflektif. Kita telah tahu, bahwa Giddens mencari solusi dengan cara membuat rasionalitas dan mempersiapkan diri untuk menguji konsekuensi tak sengaja (*unintended consequences*) dari tindakan manusia. Singkatnya, teori rasionalitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Manusia berusaha memaksimalkan kepuasan yang mereka terima dari dunia sosial. “Kepentingan” yang berhubungan dengan dunia sosial ini punya karakter objektif.
2. Setiap anggota masyarakat berkuasa mengontrol penawaran barang berharga sosialnya. Barang berharga (*valuables*) terdiri unsur-unsur/barang-barang dengan konsekuensi material dan psikologis. Kepuasan individu dimaksimalkan sampai pada tingkat penawaran barang berharga yang dikuasai oleh seorang individu termaksimalkan, dan kebutuhan atau permintaan akan barang berharga itu terminimalkan.
3. Interaksi dengan orang lain dalam dunia sosial dipahami sebagai serangkaian negosiasi dagang atau permainan yang sifatnya kompetitif. Tujuan dari partisipasi sosial adalah untuk meningkatkan penawaran (persediaan) barang berharga sosial (*social valuables*) melalui proses interaksi. Hal ini melibatkan pertukaran barang berharga dengan maksud memperoleh keuntungan atau mungkin melibatkan lebih banyak upaya untuk menggunakan penawaran agar bisa mengontrol, memaksa, dan/atau mengeksploitasi orang



lain. Dalam banyak teori rasionalitas, total biaya untuk memperoleh total keuntungan dipertahankan nol, yaitu, permainan ini adalah “*zero-sum*” *game*. Ini berarti keuntungan diri sendiri otomatis mengisyaratkan adanya kerugian pada pihak lain.

4. Perilaku manusia kemudian dilakukan secara rasional, karena mereka mempertimbangkan manfaat/hasil dan kerugian dari perilaku itu.
5. Karena keinginan dan kepuasan manusia relatif tidak berubah, maka muncul pola reaksi stabil yang menawarkan pertukaran reguler yang dipahami oleh partisipan bersifat normatif, yaitu benar secara moral. Pola pertukaran yang stabil ini merupakan fenomena berskala besar. Untuk membalik penalaran ini, fenomena makro-struktural selalu direduksi menjadi pertukaran yang rasional di antara para individu. Istilah teknis untuk menggambarkan posisi demikian adalah “*methodological individualism*”.
6. Akan tetapi, rencana/rancangan sosial struktural yang muncul bukanlah fokus utama kepentingan untuk teori rasionalitas. Sebaliknya, ada kecenderungan umum untuk meneliti dan menganalisis interaksi kelompok kecil, interaksi kelompok kecil hipotesis, dan kemudian memperluas hasil ke tingkat generalisasi empiris. Generalisasi empiris menjadi balok pembangun untuk teori.
7. Ada konvergensi umum (titik temu) antara teori rasionalitas sosiologis dan teori ekonomi dan teori permainan (*game theory*) karena masing-masing menekankan pemaksimalan keuntungan individu di dalam kalkulus tindakan rasional.

Karena konvergensi ini, kita menemukan banyak argumen tentang rasionalitas dalam teori ekonomi klasik. Mungkin argumen yang paling bisa diterima secara sosiologis adalah argumen karya Marshall, ekonom Cambridge abad ke-19; dan Pareto, ekonom politik Italia. Akan tetapi, pertukaran barang-barang bernilai ekonomi dan barang langka bukan satu-satunya fondasi untuk teori jenis ini. Suatu barang didefinisi sebagai barang berharga bukan saja karena barang itu langka, melainkan juga karena diinginkan. Psikologi perilaku milik Skinner menyediakan





fondasi untuk mewujudkan keinginan dengan saran pertukaran perilaku (*behavioral exchange*).

### 1. Games Marxist Play

Olsen mengajukan pertanyaan fundamental untuk teori pemertahan, demikian juga pernyataannya tentang ketidakmungkinan komitmen kolektif terhadap barang publik (*publik goods*) pemunculan masalah bagi Marxist. Menurut cara yang sama, ketika warga negara yang berupaya memaksimalkan kepentingan individualnya menjadi 'penunggang bebas' di atas punggung teman sesama warganya, maka semua anggota kelas pekerja rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan individualnya akan memberi kesempatan kelompok orang lain untuk memperjuangkan revolusi buat mereka: "seorang pekerja yang berpikir akan memperoleh keuntungan dari pemerintahan proletar" tidak akan menganggap rasional jika hidupnya berisiko terancam dan berusaha mengadakan revolusi melawan pemerintahan borjuis (Olsen, 1965: 106).

Selama ini, ketika Marx berusaha menjelaskan aksi kelas dalam bentuk pengejaran kepentingan material, teori Marx, menurut Olsen tidak konsisten karena kepentingan material selalu diekspresikan secara individual bukan secara kolektif. Olsen membahas bagaimana Lennin dan Trotsky mengantisipasi argumennya dengan mengusulkan Bolshevisme, suatu kebutuhan akan elite berdisiplin tinggi dan revolusioner untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan kelemahan struktur masyarakat kapitalis dan menanamkan sosialisme dari atas. Perkembangan demikian dapat dijelaskan di dalam teori pilihan publik dalam bentuk argumen Downs tentang perilaku pemaksimalan secara rasional para politisi. Lennin dan Trotsky termotivasi untuk mengejar *reward* pribadi berupa kekuasaan dan status yang akan diperolehnya jika mereka punya kedudukan tinggi.

Juga dinyatakan bahwa elemen penting dalam Olsen dan Downs adalah ketidakpastian (*uncertainty*). Semakin tinggi ketidakpastian tentang suatu hasil (*outcome*), semakin kecil kemungkinan rasionalitas untuk berkomitmen pada kolektivitas. Dalam skenario Marxist, tingkat



ketidakpastian dipertahankan sangat tinggi (*extreme*). Bukan saja peluang keberhasilan revolusi proletar terancam, melainkan masyarakat borjuis pun sedang dalam keadaan disintegrasi, tetapi pekerja tetap tidak pasti tentang apa yang menjadi kepentingan materialnya ada masalah berupa kesadaran yang keliru (*false consciousness*).

Cabang dari pemikiran Marxist yang berupaya mengatasi masalah ini dikenal sebagai *analitic Marxism* atau *game theoretic Marxism*. Arsitek terkenal adalah Elster dan Roemer, meskipun Elster belakangan pindah di luar teori Marxist untuk mengembangkan teori pilihan rasional. Roemer punya pengaruh besar pada teori Klass Wright, tetapi asumsi Marxisme analitis yang sangat individualistik dan rasionalistiknya ditolak oleh Marxist tradisional.

## 2. Dilema Tahanan

Marxisme analitis selalu berusaha menyampaikan masalahnya dalam bentuk skenario kasus terburuk yang di situ ketidakpastian dimaksimalkan. Skenario ini ditarik dari *theory of game*. Elemen dari *game theory*, adalah selalu ada dua atau lebih pemain, masing-masing pemain dapat memilih di antara dua atau lebih strategi, dan pilihan ini memunculkan *reward* yang berlainan. Elemen pentingnya adalah *reward* ini bervariasi sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh semua pemain, keputusan mereka bersifat *interdependent*, dan masing-masing pemain harus mengantisipasi gerak-gerik pemain lain (Elster 1989: 128). Masalah *game-theory* yang paling terkenal dan banyak diulas dikenal sebagai *prisoner's dilemma* (dilema tahanan). Masalah *prisoner's dilemma* dapat digambarkan sebagai berikut:

Dua orang tahanan yang diduga bekerja sama melakukan kejahatan ditempatkan dalam sel terpisah. Polisi berkata pada masing-masing tahanan kalau dia akan dibebaskan (4) jika dia melaporkan satu teman lainnya dan teman itu tidak melaporkan dia. Jika mereka saling melaporkan, keduanya akan dihukum tiga tahun (2). Jika dia tidak melaporkan temannya, tetapi temannya tadi melaporkan dia, dia akan dipenjara lima tahun (1). Jika keduanya tidak saling melaporkan, polisi punya bukti yang cukup untuk menghukum masing-masing tahanan



ini satu tahun (3). (Elster 1989a: 29n; angka di atas [1-4] menunjukkan urutan peringkat *pay-off*, 1= paling buruk).

Masing-masing tahanan menduga kalau salah satu tahanan ini mengaku dan melapor, maka strategi mereka adalah mengaku dan melapor. Maka, masing-masing dipenjara tiga tahun. Jika mereka diam saja, masing-masing dipenjara setahun. Situasi ini dibahas Olsen, dan penulis lain memperluas permainan dilema tahanan ini *multiple players*, yang oleh Parfit (1986) disebut dilema kontributor (di mana individu harus membuat keputusan tentang kontribusi pada produksi barang publik) dan dilema samaritan (di mana harus diputuskan apakah membantu orang lain atau tidak). Contoh ini menunjukkan bahwa pemaksimalan individu akan menghasilkan hasil individual yang lebih buruk.

Elster, yang menjadi *game-theoretic Marxist* terpenting, bersikukuh dengan pendapatnya bahwa para pelaku (*actors*) adalah pemaksimal yang rasional (*rational Maximizers*), dan juga ingin menemukan solusi bagi dilema kontributor dalam bentuk kelas kolektif. Dia mengingatkan kita agar tidak terjebak dengan pendapat bahwa bilamana para pemain dengan sengaja berbuat lebih buruk untuk mereka sendiri daripada yang bisa dilakukan, aksi mereka sebenarnya tidak rasional. Ini akan terjebak ke gagasan rasionalitas kolektif bila teori pilihan rasional didasarkan pada teori individual dan rasionalitas instrumental. Agar aksi bisa rasional, maka aksi itu harus punya karakteristik berikut: *pertama*, aksi harus menjadi alat terbaik untuk mewujudkan keinginan aktor/pelaku; *kedua*, keinginan harus optimal bagi kesejahteraan aktor sepanjang aktor bisa; dan *ketiga*, aktor harus mengumpulkan jumlah bukti yang optimal (keseimbangan antara biaya dan keuntungan) untuk mendukung pandangan ini.

## G. TALCOTT PARSONS "IMPERATIVISME FUNGSIONAL"

Pada tahun 1937, Talcott Parsons menerbitkan buku pertamanya *The Structure of Social Action*. Dengan pengetahuannya yang cermat dan mendetail yang jarang disamakan dengan karya-karya di bidang sosiologi, Parsons menggambarkan kelebihan dan kelemahan pemikir-pemikir terkemuka dalam tiga tradisi utama intelektual: utilitarianisme,



positivisme, dan idealisme. Dalam tinjauan ini, Parsons mengindikasikan bagaimana kunci asumsi dan konsep dari tiga tradisi ini dapat disintesis ke dalam konsep dasar yang lebih cocok untuk teori-teori sosiologi berikutnya. Muncul usaha ini tidak hanya merupakan suatu visi nyata dari fenomena sosial yang membuatnya menjadi hal kontroversial, tetapi juga merupakan strategi unik dalam membangun suatu teori sosiologi.

Dalam *me-review* kontribusi Parsons dalam teori sosiologi, perlu kiranya untuk tetap memfokuskan pada interaksi antara visi substantif awal Parsons tentang kehidupan sosial dan strategi yang dia anjurkan dalam mengonseptualisasi visi ini. Dari interaksi ini telah berkembang “teori umum tindakan” yang sebelumnya tidak pernah diasosiasikan secara konseptual dari dasar analitis yang pertama kali terdapat dalam buku *The Structure of Action*. Kontinuitas perkembangan dalam teori tindakan selama lebih dari beberapa dekade mungkin merupakan salah satu gambaran yang paling khas. Untuk menilai bagaimana tindakan intelektual seperti ini dimungkinkan, dibutuhkan pemahaman mengenai keyakinan Parsons atas suatu konsep unik tentang bagaimana membuat suatu teori sosiologi.

### 1. Strategi Parsons dalam Menyusun Teori Sosiologi

Pada *The Structure of Social Action*, Parsons menyarankan “realisme analitis (*analytical realism*)” dalam membangun suatu teori sosiologi. Teori dalam sosiologi harus dapat memanfaatkan konsep-konsep yang jumlahnya sangat terbatas, yang “secara memadai” mencakup aspek-aspek eksternal objektif. Konsep-konsep ini tidak merujuk pada fenomena konkret, tetapi pada elemen-elemen di dalamnya yang secara analitis terpisah dari elemen-elemen lainnya. Jadi, pertama-tama teori harus melibatkan perkembangan konsep yang bersifat abstrak yang terdapat dalam realitas empiris, di dalam segala perbedaannya serta keadaannya yang membingungkan. Dalam hal ini, konsep-konsep akan mengisolasi fenomena dari keterikatan mereka dari berbagai hubungan yang kompleks yang selanjutnya membentuk realitas sosial.

Ciri-ciri unik dari realisme analitis Parsons adalah pendiriannya



tentang bagaimana konsep-konsep abstrak ini dipakai dalam analisis sosiologi. Parsons tidak menganjurkan adanya pemasukan langsung beberapa konsep ini ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoretis, akan tetapi lebih pada pengembangan “sistem yang sederhana dari berbagai konsep.” Penggunaan konsep-konsep abstrak ini menyebabkan penyusunan konsep ke dalam bentuk yang menyeluruh dan merefleksikan gambaran penting dari “dunia nyata (*real world*)”. Apa yang dicari adalah penyusunan konsep ke dalam sistem analitis yang mencakup gambaran alam yang lengkap dan utama, tanpa terlalu dibanjiri dengan perincian-perincian empiris. Oleh karena itu, pada awalnya teori harus menyerupai suatu klasifikasi dan kategorisasi fenomena sosial yang terelaborasi dan yang merefleksikan gambaran penting dalam organisasi fenomena sosial ini.

Akan tetapi, Parsons memiliki lebih dari sekadar klasifikasi dalam pikirannya, karena dia lebih memprioritaskan pada sistem pengembangan konsep dibandingkan dengan sistem-sistem proposisi. Konsep-konsep dalam teori seharusnya tidak dimasukkan dalam proposisi secara prematur. Konsep-konsep tersebut seharusnya terlebih dahulu disusun ke dalam sistem analitis yang identik dengan koherensi universal realitas; kemudian apabila salah satunya dirasa terlalu tinggi, maka definisi operasionalnya dapat dikembangkan dan konsep-konsep tersebut dapat dimasukkan ke dalam *statement* teoretis yang benar.

Jadi, hanya setelah koherensi sistemik di antara konsep-konsep abstrak telah didapatkan, maka barulah dimulai pengkonstruksian teori “yang benar,” hal ini dikarenakan temuan-temuan proporsional atas suatu eksistensi, asosiasi, dan pernyataan sebab akibat tidak dapat diharapkan mendapat kenyataan (*realness*) dunia sosial sebelum klasifikasi konseptual sifat sistemik alam dapat ditampilkan. Jadi, posisi ini menganjurkan penggunaan suatu strategi untuk membangun suatu teori dalam sosiologi; dan hanya setelah strategi ini dipahami, maka karya substantif dan teoretis Parsons akan dapat memiliki makna, karena sepanjang karier intelektualnya *dari* semenjak *The Structure of Social Action* hingga sekarang—Parsons menggunakan strategi ini dalam pembuatan teori sosiologi.



## 2. Image Parsons dalam Organisasi Sosial

Strategi Parsons dalam pembuatan teori tetap mempertahankan posisi ontologis yang jelas, alam sosial menunjukkan gambaran yang lengkap yang hanya bisa didapatkan dengan penyusunan paralel konsep-konsep abstrak. Implikasi-implikasi substantif dari strategi ini, untuk memandang dunia sebagai suatu sistem yang tersusun terdapat dalam *The Structure of Social Action*. Hal lain yang lebih jelas adalah asumsi tentang sifat dasar dunia sosial yang *voluntaristic*.

“Teori tindakan *voluntaristic*” memberi petunjuk bagi Parsons atas suatu sintesis asumsi yang berguna serta konsep-konsep utilitarianisme, positivisme, dan idealisme. Dalam *me-review* pemikiran-pemikiran ahli ekonomi klasik, Parsons mencatat bahwa mereka memiliki terlalu banyak konseptualisasi utilitarian manusia yang atomistik dan tidak bernorma di dalam pasar bebas dan kompetitif, di mana mereka secara rasional memilih segala tindakan yang sekiranya akan dapat memaksimalkan keuntungan mereka dalam transaksi. Formulasi tatanan sosial tersebut menghadapkan Parsons pada masalah kritis: apakah manusia selalu bertindak rasional dan apakah mereka benar-benar bebas dan tidak terikat dengan hukum? Bagaimana suatu tatanan/aturan dapat ditetapkan dalam sistem yang kompetitif dan tidak terikat dengan hukum? Walaupun demikian, Parsons melihat masih ada beberapa manfaat dari pemikiran utilitarian, khususnya perhatian yang berhubungan dengan perilaku ketika mencari tujuan (atau keuntungan) dan penekanan pada kapasitas (kemampuan) pembuatan pilihan (*choice-making*) manusia, yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan.

Parsons merasa bahwa peninggalan utilitarian tersebut dapat menginformasikan tentang pembuatan teori sosiologi. Dalam sudut pandang kritisnya yang serupa, Parsons menolak formulasi ekstrem dari para positivis radikal, yang cenderung memandang dunia sosial dalam sudut pandang hubungan sebab akibat di antara fenomena fisik, dan sebagai akibatnya menghindari fungsi-fungsi simbolis yang kompleks dalam pemikiran manusia. Lebih jauh lagi, parsons melihat bahwa penekanan pada hubungan sebab akibat akan terlalu mudah



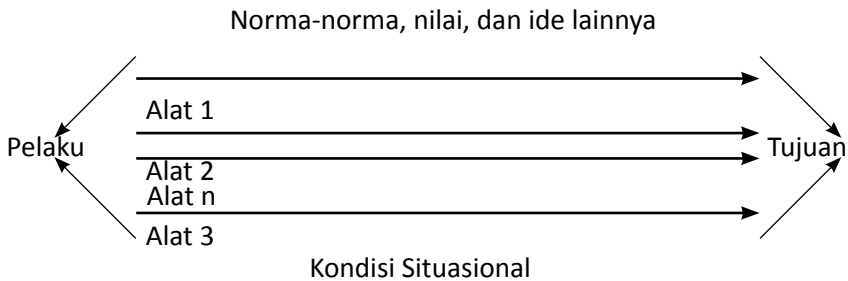
membangkitkan serangkaian reduksi yang tidak terbatas: kelompok dapat direduksi menjadi hubungan sebab akibat dari individu-individu anggotanya; individu-individu dapat direduksi ke dalam hubungan sebab akibat dalam proses fisiologis mereka; hal ini juga dapat direduksi lagi ke dalam hubungan fisiokimia dan sebagainya, yang pada akhirnya hal ini juga dapat direduksi lagi menjadi hubungan sebab akibat paling dasar di antara partikel-partikel fisik. Namun demikian, di samping ekstrem ini, positivisme juga menitikberatkan pada parameter fisik kehidupan sosial serta pada dampak parameter ini terhadap tentu saja tidak semua—organisasi sosial. Pada akhirnya dalam menilai idealisme Parsons melihatnya sebagaimana konsepsi kegunaan ide, juga membatasi kepemilikan individu dan sosial, meskipun terlalu sering “ide-ide” ini dilihat sebagai bagian yang terlepas dan kehidupan sosial di mana ide ini mestinya diatur.

Diketahui bahwa ada pergerakan konsep-konsep terpilih dari masing-masing tradisi ke dalam suatu “*voluntaristic theory of action*” (teori tindakan voluntaristik). Sesuai dengan strategi pembuatan teorinya, Parsons, pada titik awal ini mulai menyusun teori fungsional organisasi sosial. Pada formulasi awal ini, dia mengonseptualisasi “voluntarisme” sebagai proses *decision-making* (pembuatan keputusan) yang subjektif dari para aktor individual, tetapi dia memandang keputusan yang dihasilkan tersebut hanyalah sebagian hasil dari pembatas-pembatas tertentu, baik normatif maupun situasional. Tindakan voluntaristik melibatkan elemen-elemen dasar: (1) pelaku, yang dalam pemikiran Parsons adalah seorang individu; (2) pelaku dipandang sebagai *goal seeking* (pencarian tujuan); (3) pelaku memiliki alat-alat/sarana alternatif untuk mendapatkan tujuan; (4) pelaku dihadapkan pada kondisi situasional seperti keadaan dan hereditas biologi sebagaimana batasan-batasan ekologis eksternal yang memengaruhi penyeleksian tujuan dan alat-alat/saran; (5) pelaku diarahkan oleh nilai-nilai, norma-norma, dan ide-ide lain di mana ide-ide ini memengaruhi apa yang dianggap sebagai sebuah tujuan serta memengaruhi pula pemilihan alat-alat/sarana untuk mencapai tujuan; dan (6) tindakan meliputi pembuatan keputusan subjektif aktor mengenai alat-alat/sarana untuk mencapai tujuan, di



mana semuanya dibatasi oleh ide-ide dan kondisi-kondisi situasional. Konseptualisasi “voluntarisme” ini ditunjukkan dalam bentuk diagram pada Gambar 9-1.

Proses-proses yang digambarkan pada Gambar 9.1 sering disebut sebagai tindakan unit (*unit act*), dengan tindakan sosial yang meliputi serangkaian tindakan oleh satu pelaku atau lebih. Parsons tampaknya memilih untuk memfokuskan pada unit-unit dasar tindakan tersebut dengan dua alasan: (1) dia merasa perlu untuk menyintesiskan peninggalan sejarah pemikiran sosial—dari filsafat sosial dan ekonomi klasik sampai dengan teori sosiologi awal—berkaitan dengan proses sosial yang paling dasar terutama ketika dibagi ke dalam komponen-komponen paling elementer; (2) tentang teori yang seharusnya dipakai, maka tugas analitis pertamanya pada perkembangan teori sosiologi adalah mengisolasi secara konseptual berbagai gambaran umum unit paling dasar, yang darinya proses dan struktur yang lebih kompleks dibangun.



Gambar 9.1 Unit-unit Tindakan Voluntaristik.

Ketika tugas-tugas dasar ini diselesaikan, Parsons bertanya: Bagaimana tindakan-tindakan unit dihubungkan satu sama lain dan bagaimana hubungan ini secara konseptual ditunjukkan? Mendekati bagian akhir *The Structure of Social Action*, Parsons mengakui bahwa segala sistem atomistik yang hanya berkaitan dengan properti-properti yang dapat diidentifikasi dalam tindakan unit ... akan gagal memperlakukan secara memadai elemen-elemen yang disebut terakhir dan bersifat tidak pasti ketika diterapkan pada sistem-sistem yang kompleks.





Parsons menawarkan beberapa petunjuk tentang gambaran dari “sistem yang lebih kompleks” ini. Hal yang perlu dicatat, di akhir karya pertamanya dia menekankan bahwa “konsep tindakan merujuk pada properti organik sistem tindakan.” Ditunjang dengan ontologi strateginya pembuatan/pembangunan teori, yakni perkembangan sistem konsep yang mencerminkan kenyataan, jelas bahwa dia bermaksud untuk mengembangkan pola konseptual yang meliputi esensi umum dari realitas sosial.

Pada tahun 1945, delapan tahun setelah ia menerbitkan *The Structure of Social Action*, Parsons secara eksplisit mendiskusikan tentang bentuk yang seharusnya digunakan dalam analisis ini: “Struktur sistem sosial tidak dapat diperoleh secara langsung dari acuan situasi pelaku. Struktur ini membutuhkan analisis fungsional berbagai komplikasi yang diakibatkan oleh “interaksi suatu pluralitas aktor.” Hal yang lebih penting lagi, analisis fungsional ini seharusnya memungkinkan konsep “kebutuhan” dapat masuk: “kebutuhan fungsional akan integrasi sosial dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk pemfungsian suatu pluralitas pelaku sebagai suatu sistem “unit” seharusnya dapat diintegrasikan untuk eksis. Berawal dari asumsi-asumsi ini, yang mirip dengan milik Durkheim dan Radcliffe-Brown, Parsons mulai mengembangkan sebuah skema fungsional yang kompleks.

### 3. Sistem-sistem Tindakan Paling Awal

Transisi dari analisis tindakan unit yang terpisah ke sistem tindakan tampaknya terjadi dalam serangkaian elaborasi konseptual: (1) tindakan unit tidak dihasilkan dalam sebuah kevakuman sosial—sebagaimana jelas tersebut dalam *The Structure of Social action*; (2) akan tetapi, tindakan unit dihasilkan dalam sebuah konteks sosial, sebuah konteks di mana seorang pelaku menempati suatu status dan melakukan tindakannya secara normatif; (3) peran-peran sosial tidak saling terpisah, akan tetapi satu sama lain berhubungan di dalam berbagai model sistem. (4) kemudian tindakan unit harus dipandang sistem interaksi, di mana tindakan dilihat sebagai pola permainan peran oleh pelaku; (5) sistem interaksi ini yang terdiri dari suatu pluralitas pelaku



yang memiliki berbagai status dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dipandang sebagai susunan sistem sosial.

Akan tetapi, sebagaimana ada dalam *The Structure of Social Action*, struktur tindakan meliputi lebih dari sekadar perilaku normatif. *Pertama*, tindakan meliputi pembuatan keputusan individual dalam usaha pencapaian tujuan. *Kedua*, nilai-nilai dan pemikiran lain membatasi pembuatan keputusan pelaku dalam pencapaian tujuan. *Ketiga*, kondisi situasional, misalnya hereditas dan gambaran lingkungan fisik, lebih jauh lagi juga membatasi tindakan.

Komponen-komponen tindakan ini juga mulai dipandang dalam sebuah konteks ilmu yang membuat Parsons pada awalnya mempostulatkan satu sistem tambahan dari tindakan, personalitas (sifat), yang akan meliputi interelasi umum di antara kebutuhan-kebutuhan dan kapasitas pembuatan keputusan para pelaku yang memainkan peran mereka di dalam sistem sosial. Pada tingkatan awal ini dalam transisi dari analisis tindakan unit sampai sistem-sistem tindakan, baik budaya maupun gambaran organik maupun fisik tindakan tidak dipandang sebagai sistem. Akan tetapi, pola-pola kultural yang secara jelas digambarkan di dalam analisis di mana pola-pola tersebut dipandang sebagai struktur normatif sistem sosial dan disposisi kebutuhan dan proses pembuatan keputusan sistem personalitas yang utama. Tetapi, dengan mengedepankan komitmen Parsons untuk mengembangkan skema-skema analitis yang meliputi koherensi realitas dan dengan memberikan komitmen baru ini sampai analitis yang memisahkan komponen-komponen tindakan unit ke dalam sistem-sistem yang berbeda, dia mulai memvisualisasi budaya dalam istilah umum. Dan kemudian, nantinya gambaran fisik organisme seperti hereditas dan proses-proses biologis lainnya juga dilihat sebagai sistem tindakan yang dapat dipisah.

Sebagai seorang sosiolog, Parsons mengetahui bahwa perhatian teoretis utamanya meliputi analisis sistem sosial. Jadi, buku keduanya, 14 tahun setelah *The Structure of Social Action*, muncul dan diberi judul *The Social System*. Dalam buku inilah, perbedaan-perbedaan analitis di antara sistem-sistem sosial dan personalitas sebagaimana



juga bentuk-bentuk kultural, untuk pertama kalinya dianalisis secara mendetail. Karena banyak perkembangan “teori tindakan” merupakan suatu elaborasi dari analisis ini, mungkin lebih baik untuk menunda dan menjelaskan karya ini secara terperinci.

#### 4. The Social System Karya Parsons

Menganalisis sistem-sistem sosial meliputi pengembangan suatu sistem konsep, yang pertama-tama melihat gambaran umum masyarakat pada seluruh level yang beraneka ragam, dan yang kedua menunjuk pada *node* artikulasi di antara sistem-sistem sosial dan bentuk-bentuk kultural.

Untuk mendapatkan pemahaman secara konseptual gambaran umum budaya, masyarakat, dan personalitas, Parsons menghabiskan sedikit waktunya untuk mengenalkan pemikiran fungsional yang merupakan syarat untuk setiap komponen tindakan dasar ini. Syarat-syarat ini tidak hanya dalam hal problem internal komponen tindakan, tetapi juga artikulasi mereka dengan satu sama lain. Mengikuti Durkheim dan Radcliffe-Brown, dia memandang integrasi di dalam dan di antara dua sistem tindakan dan memandang pola-pola kultural sebagai syarat *survival* dasar. Karena sistem sosial merupakan topik utamanya, Parsons menekankan pada integrasi di dalam sistem sosial itu sendiri dan integrasi antara sistem sosial dengan sistem personalitas di sisi lain. Paling tidak dua syarat fungsional harus dipenuhi untuk perwujudan integrasi:

1. Sebuah sistem sosial harus dapat membuat pelaku komponennya termotivasi untuk bertindak sesuai dengan persyaratan sistem perannya.
2. Sistem-sistem sosial haruslah menghindari komitmen terhadap bentuk-bentuk kultural yang tidak dapat mendefinisikan batas minimal suatu tatanan, atau yang menempatkan tuntutan yang tidak masuk akal pada orang-orang, yang oleh karenanya hanya akan mengakibatkan penyimpangan dan konflik.

Dengan memperjelas hubungan syarat-syarat, yang lebih dikembangkan dan diperjelas lagi di dalam karyanya yang terbit kemudian, Par-



sons, kemudian berusaha mengembangkan sebuah pola konseptual yang merefleksikan adanya saling hubungan umum di antara sistem-sistem sosial, meskipun dia kemudian kembali lagi pada permasalahan integratif yang disebabkan oleh artikulasi budaya dan sistem personalitas dengan sistem sosial. Jadi, yang paling penting dari konseptualisasi sistem sosial adalah konsep institusionalisasi (pelembagaan) yang secara relatif merujuk pada pola-pola interaksi yang stabil di antara pelaku-pelaku dalam status. Pola-pola tersebut secara normatif diregulasi dan dimasukkan ke dalam pola-pola kultural. Pemasukan nilai-nilai dapat terjadi dengan dua cara. *Pertama*, norma-norma yang meregulasi perilaku peran dapat merefleksikan nilai-nilai umum dan keyakinan budaya. Kedua, nilai-nilai kultural dan pola-pola lain dapat terinternalisasi ke dalam sistem personalitas, dan oleh karenanya memengaruhi struktur sistem kebutuhan di mana pada gilirannya menentukan keinginan seorang pelaku untuk memainkan perannya dalam sistem sosial.

Parsons memandang institusionalisasi sebagai suatu proses dan suatu struktur. Penting sekali bahwa ia pada awalnya mendiskusikan proses institusionalisasi, dan hanya memandangnya sebagai suatu struktur—suatu fakta yang sering diabaikan oleh para kritikus yang menentang, yang menyatakan bahwa teori tindakan terstruktur secara berlebihan. Sebagai suatu proses, institusionalisasi dapat diklasifikasikan menjadi: (1) pelaku yang terorientasi secara bervariasi memasuki situasi di mana mereka harus berhubungan; (2) cara bagaimana para pelaku terorientasi merupakan suatu refleksi struktur kebutuhan mereka serta bagaimana struktur kebutuhan ini diubah oleh internalisasi pola-pola kultural; (3) Melalui proses interaksi yang spesifik—yang tidak secara jelas dispesifikkan, tetapi dengan implikasi yang melibatkan pengambilan peran, penawaran peran, dan pertukaran peran—norma-norma muncul ketika para pelaku menyesuaikan orientasi mereka dengan orientasi pelaku lain; (4) norma-norma seperti ini muncul sebagai sebuah cara penyesuaian orientasi pelaku dengan orientasi pelaku lain, tetapi pada waktu yang bersamaan mereka dibatasi oleh pola-pola kultural umum; (5) pada gilirannya, norma-norma ini meregulasi interaksi berikutnya,



memberinya stabilitas. Melalui proses-proses inilah pola-pola yang ter-institusionalisasi (terlembaga) diciptakan, dijaga, dan diubah.

Ketika interaksi menjadi terlembaga, suatu sistem sosial dapat dikatakan ada (eksis). Secara khusus, karena Parsons telah berfokus pada keseluruhan masyarakat, suatu sistem sosial bukan merupakan keseluruhan masyarakat, melainkan semua pola interaksi yang ter-organisasi, baik mikro maupun makro, disebut sebagai suatu sistem sosial”. Ketika terfokus pada keseluruhan masyarakat atau sebagian besar masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok peran yang terlembagakan yang saling berhubungan, Parsons sering merujuk pada sistem sosial konstituen sebagai subsistem.

Secara singkat, pelembagaan adalah proses yang melaluinya struktur sosial dibuat dan dijaga. Kelompok peran yang terlembaga—atau dengan istilah yang berbeda, pola-pola interaksi yang stabil—menyusun suatu sistem sosial. Ketika sistem sosial tersebut besar dan tersusun dari berbagai institusi yang saling terkait, maka institusi ini secara khusus dipandang sebagai subsistem. Total masyarakat didefinisikan sebagai suatu sistem yang besar yang terdiri dari institusi-institusi yang saling berhubungan. Pada setiap waktu, untuk maksud analitis, perlu untuk diingat bahwa sebuah sistem sosial dibatasi oleh pola-pola kultural dan dimasukkan dalam sistem personalitas.

Dalam komitmennya, pada perkembangan konsep yang merefleksikan properti keseluruhan sistem tindakan, Parsons dibawa pada serangkaian konsep yang menunjukkan beberapa properti variabel dari sistem-sistem ini, dinamakan *pattern variables*, variabel-variabel tersebut memungkinkan kategorisasi model orientasi dalam sistem personalitas, pola-pola nilai budaya dan kebutuhan normatif dalam sistem sosial. Variabel-variabel dipaparkan dalam dikotomi yang berlawanan yang tergantung pada sistem yang dianalisis, yang memungkinkan adanya kategorisasi keputusan kasar yang dibuat oleh para pelaku, nilai orientasi budaya, atau permintaan normatif pada peran status.



1. Afektivitas-penetralan afektif berkaitan dengan jumlah emosi atau *affect* yang pas di dalam suatu situasi interaksi yang ada. Haruskah sejumlah besar *affect* atau sejumlah kecil saja yang diekspresikan?
2. Pendisfusi-an-spesifitas menunjukkan permasalahan bagaimana seharusnya kewajiban dalam sebuah situasi interaksi. Haruskah kewajiban tersebut disempitkan dan dispesifikasikan atau diperluas atau diperbanyak?
3. Universalisme-partikularisme mengarah pada masalah apakah evaluasi dan penilaian dari pihak lain dalam suatu situasi interaksi berdasar pada kriteria-kriteria standar dan disepakati, ataukah berdasar kepada penilaian yang subjektif. Haruskah evaluasi diwujudkan dalam kriteria yang objektif dan universal ataukah dalam standar yang lebih subjektif dan khusus ?
4. Askripsi-prestasi berhubungan dengan masalah bagaimana menilai seorang pelaku, baik dalam penampilan fisik mampu berdasar kualitas bawaan seperti jenis kelamin, umur, ras, dan status keluarga. Haruskah seorang pelaku memperlakukan orang lain atas dasar prestasi atau kualitas askripsi yang tidak dihubungkan dengan performa?
5. Kolektivitas diri menunjuk pada tingkat di mana tindakan diorientasikan pada kepentingan diri sendiri dan tujuan individu, atau pada interes dan tujuan grup. Haruskah seorang pelaku mempertimbangkan dirinya sendiri atau tujuan-tujuan terhubung dirinya di atas grup tersebut, atau kolektivitas yang lebih besar di mana dia terlibat?

Beberapa konsep ini, seperti kolektivitas diri, telah hilang dari bentuk tindakan; sementara yang lainnya, seperti universalisme-partikularisme, mempunyai posisi yang lebih penting. Tetapi, maksud dari variabel-variabel tetaplah sama: untuk mengategorikan dikotomi keputusan, tuntutan normatif, dan orientasi nilai. Akan tetapi, dalam *The Social System* Parsons cenderung memandang mereka sebagai orientasi nilai yang membatasi norma-norma sistem sosial dan keputusan sistem personalitas. Jadi, pola-pola dari dua sistem tindakan—personalitas dan sosial—merupakan suatu refleksi dari pola-pola orientasi nilai



yang dominan. Penekanan implisit dalam budaya. Pengimplisitan ini menekankan pada akibat dari pola-pola kultural dalam mengatur dan mengontrol sistem-sistem tindakan lain menjadi lebih eksplisit.

Akan tetapi untuk sekarang ini, jelas bahwa Parsons telah menyusun sebuah sistem konseptual yang kompleks yang menekankan proses kelembagaan interaksi ke dalam pola-pola yang stabil yang disebut sistem sosial, yang dipenetrasi oleh personalitas dan dibatasi oleh budaya. Profil norma-norma yang terlembagakan dan keputusan pelaku dalam perannya serta orientasi nilai kultural dapat digolongkan dalam hal konsepsi, disebut variabel-variabel bentuk yang meliputi properti variabel pada masing-masing komponen tindakan.

Setelah membangun pola analitis ini, Parsons kembali lagi pada permasalahan awal dalam *The Structure of Social Action* yang telah membawa semua formulasi teori: Bagaimana sistem sosial dapat bertahan? Lebih khusus lagi, mengapa pola-pola interaksi yang terlembaga tetap dapat bertahan? Pertanyaan ini sekali lagi mengajukan permasalahannya, keharusan (*imperative*) atau syarat (*requisite*), ketika Parsons menanyakan bagaimana sistem dapat memecahkan masalah integratif. “Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini diberikan dengan suatu elaborasi konsep tambahan yang menunjuk pada cara bagaimana sistem personalitas dan budaya diintegrasikan ke dalam sistem sosial, dengan demikian memberikan jaminan/kepastian pada koherensi normatif dan sedikit komitmen para pelaku untuk menaati norma-norma dan memainkan peran mereka. Dalam mengembangkan konsep dari jenis ini, Parsons mulai meningkatkan analisisnya dalam arah suatu ontologi yang menekankan pada tendensi penyeimbang sistem sosial.

Hanya bagaimana sistem personalitas diintegrasikan ke dalam sistem sosial yang akhirnya menimbulkan keseimbangan? Pada level yang paling abstrak, Parsons mengonsep dua “mekanisme” yang mengintegrasikan personalitas ke dalam sistem sosial, mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial. Melalui pengoperasian mekanisme-mekanisme inilah sistem personalitas menjadi terstruktur, sehingga sistem tersebut bersifat *compatible* dengan struktur sistem sosial.



Pada istilah abstrak, mekanisme sosialisasi dipandang Parsons sebagai alat yang melalui pola-pola kultural—nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan simbol-simbol lain—diinternalisasi ke dalam sistem *personality*, yang akhirnya membatasi struktur kebutuhan terakhir. Melalui proses ini, para pelaku dipaksa untuk bersedia memberikan energi motivasional mereka dalam peran-peran mereka (akhirnya bersedia menaati norma-norma) dan diberikan *skill* interpersonal yang dibutuhkan untuk memainkan peran-peran tersebut. Fungsi lain mekanisme sosialisasi adalah membenarkan ikatan interpersonal yang aman dan stabil, yang dapat meredakan ketegangan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan keahlian yang “sesuai.”

Mekanisme kontrol sosial meliputi cara-cara tersebut, yang di dalamnya peran status diorganisasikan ke dalam sistem sosial untuk menurunkan tingkat ketegangan dan penyimpangan. Ada banyak mekanisme kontrol spesifik, yang meliputi: (a) pelembagaan, yang dapat membuat ekspektasi peran menjadi jelas dan tidak ambigu, karena memisahkan, dalam hal ruang dan waktu, ekspektasi-ekspektasi yang kontradiktif; (b) sanksi-sanksi dan tanda-tanda interpersonal; (c) aktivitas-aktivitas ritual, di mana para pelaku secara simbolis bertindak di luar sumber ketegangan yang dapat membuktikan dan pada waktu yang sama menekankan pada pola-pola kultural dominan; (d) struktur nilai keamanan dominan di mana kecenderungan “penyimpangan” yang perpasive dipisahkan dalam hal waktu dan ruang dari pola-pola institusional yang normal; (e) struktur reintegrasi yang secara khusus dicapai dengan penanggulangan dan pengembalian segala kecenderungan penyimpangan ke dalam garis-garis peraturan; dan akhirnya (f) pelembagaan (institusionalisasi) kemampuan untuk menggunakan kekuatan ke dalam beberapa sektor suatu sistem.

Dua mekanisme ini dipandang sebagai pemecahan salah satu dari masalah-masalah intergratif yang tetap yang dihadapi oleh sistem sosial. Masalah integratif pokok yang lain yang dihadapi oleh sistem sosial berhubungan dengan bagaimana pola-pola kultural memberi kontribusi dalam pemeliharaan aturan sosial dan keseimbangan. Pada level yang paling abstrak, Parsons menggambarkan dua hal ini terjadi: (a) Beberapa





komponen budaya, seperti bahasa, merupakan *resources* (sumber-sumber) dasar yang diperlukan agar interaksi dapat terjadi. Oleh sebab itu, tanpa sumber-sumber simbolik, komunikasi dan interaksi tidak mungkin dapat terjadi. (b) Pengaruh budaya yang berhubungan tetapi tetap terpisah terhadap interaksi digunakan melalui substansi “pemikiran” yang ada dalam pola-pola kultural (nilai-nilai, kepercayaan, ideologi, dan sebagainya). Pemikiran-pemikiran ini memberikan pelaku sebagai sudut pandang umum, ontologi-ontologi personal, atau meminjam istilah W.I. Thomas, “definisi situasi” yang umum. “Makna-makna umum ini (memakai istilah G.H. Mead) memungkinkan interaksi dapat berlangsung dengan lancar dan gangguan minimal.

Parsons menyadari bahwa mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial tidak selalu dapat sukses, akibatnya memungkinkan adanya penyimpangan dan terjadinya perubahan sosial. Tetapi sudah jelas, bahwa konsep-konsep yang dikembangkan di sini, dalam *The Social System* menitikberatkan analisis dalam arah pencarian proses yang menjaga integrasi dan dengan implikasi keseimbangan sistem sosial. Perkembangan “teori tindakan” menyajikan suatu usaha untuk melakukan suatu ekspansi melalui pola analitis dasar dalam *The Social System*, sementara juga mencoba untuk mengakomodasi beberapa kritik tentang adanya bias konseptual yang statis dan konservatif. Kritik-kritik dari teori tindakan belum diredakan, akan tetapi beberapa elaborasi menarik dari pola telah muncul dalam dua dekade yang mengikuti karya fungsional pertama Parsons.

## H. TEORI PILIHAN RASIONAL (RITZER)

Prinsip dasar dari teori pemilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik (seperti utilitarianisme dan teori permainan; Levi *et al.*, 1990). Berdasarkan suatu varietas dari bentuk-bentuk perbedaan, Friedman dan Hecter (1988) telah meletakkan secara bersama-sama apa yang mereka gambarkan sebagai suatu model “skeletal” (kerangka) dari teori pemilihan rasional.

Fokus pada teori pilihan rasional adalah pada para pelaku. Para pelaku sering dipandang sebagai entitas yang memiliki tujuan/maksud,



yang berarti bahwa para pelaku memiliki batas akhir atau tujuan dari tindakan-tindakan mereka. Para pelaku juga memiliki pilihan/preferensi (atau nilai-nilai, kegunaan). Teori pemilihan rasional tidak berkaitan dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan tersebut, atau sumber-sumber mereka. Dan, yang terpenting adalah fakta bahwa tindakan mereka dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka yang konsisten dengan hierarki preferensi seorang pelaku.

Meskipun teori pilihan rasional dimulai dengan tujuan atau maksud-maksud sang pelaku, tetapi harus tetap diingat bahwa setidaknya ada dua batasan utama yang membatasi tindakan tersebut. Pertama adalah kelangkaan *resources*. Para pelaku memiliki *resources* berbeda seperti halnya memiliki akses-akses yang berbeda pula terhadap *resources* lainnya. Bagi pelaku yang memiliki banyak *resources*, pencapaian tujuan mungkin menjadi relatif lebih mudah. Akan tetapi, bagi yang hanya memiliki sedikit *resources*, hasil akhir yang dicapai mungkin menjadi lebih sulit atau bahkan menjadi suatu hal yang tidak mungkin/mustahil.

Berkaitan dengan kelangkaan *resources*, maka munculah konsep *opportunity cost* atau *cost* (biaya) yang berkaitan dengan tindakan yang paling menarik sebelumnya (Friedman dan Hechter, 1988: 202). Di dalam mencapai tujuan, para pelaku harus tetap memusatkan perhatian mereka pada biaya-biaya dari tindakan paling menarik (*attractive*) sebelumnya. Seorang aktor dapat menentukan untuk tidak mengejar nilai yang dianggap paling tinggi jika *resources*-nya dianggap terlalu kecil, di mana hasil yang akan dicapai mungkin tidak akan memuaskan. Di sini para pelaku dianggap berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Batasan yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial (*social institutions*). Batasan lembaga ini memberikan sanksi negatif dan positif yang menekankan perlunya dilakukan tindakan-tindakan tertentu dan sebaliknya.

Friedman dan Hechter menjelaskan tentang dua ide/konsep lain yang dia pandang sebagai dasar dari *rational choice theory*. Pertama adalah mekanisme agregat, atau proses yang dengannya “tindakan individu yang terpisah-pisah dikombinasikan untuk menghasilkan hasil sosial (*social outcome*).” Kedua adalah tumbuhnya konsep tentang



pentingnya informasi di dalam membuat pilihan-pilihan rasional. Dalam satu sisi, diasumsikan bahwa para pelaku memiliki informasi yang lengkap, atau setidaknya mencukupi, untuk membentuk pilihan-pilihan purposif di antara alternatif tindakan. Walaupun demikian, suatu perhatian terhadap kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia adalah sangat banyak. Keanekaragaman informasi ini memiliki efek yang besar terhadap pilihan pelaku.

## I. KEUNTUNGAN KOMPARATIF PILIHAN RASIONAL (DEHRA FRIEDMAN & M. HETCHLER)

Dalam bentuk metateori yang paling umum, pilihan rasional (*rational choice*) berusaha untuk menjelaskan pentingnya akibat-akibat sosial melalui tindakan agen-agen yang bersangkutan, yang tunduk terhadap berbagai macam tipe yang mungkin berasal dari batasan-batasan institusional dan lingkungan. Peristiwa apa pun yang dihasilkan oleh interaksi antara dua atau lebih agen, dipandang sebagai akibat sosial. Agen-agen yang bersangkutan memiliki beberapa rangkaian kepentingan khusus (yakni suatu jadwal kegunaan) yang memungkinkan mereka mendapatkan tujuan secara sadar dan bahkan lebih efisien. (Seberapa efisien pilihan tersebut, saat ini masih menjadi perdebatan.)

Dua elemen tambahan yang ada pada setiap RCT antara lain: *pertama*, asumsi tentang jumlah informasi yang dimiliki oleh agen tentang konsekuensi dari tindakan mereka; dan *kedua*, asumsi tentang mekanisme di mana preferensi individu (atau tindakan) agen diagregat sehingga menghasilkan produk sosial yang relevan.

Karena semua teori *rational choice* menyangkut informasi dan mekanisme agregasi, maka di sini ada tiga jalur yang digunakan untuk menggambarkan secara teoretis tentang tindakan pelaku sampai membuahkan produk sosial. *Pertama*, argumen yang didasarkan atas preferensi pelaku untuk menjelaskan berbagai produk sosial. *Kedua*, argumen di mana produk-produk tersebut merupakan fungsi biaya oportunitas. Ketiga argumen bahwa produk-produk sosial yang berbeda dapat dilacak melalui variasi-variasi di dalam batasan-batasan institusional.



## J. MENUJU RATIONAL CHOICE THEORY MASA DEPAN

Tiga subjek yang bisa dijadikan subjek kajian teori pilihan rasional di masa depan antara lain: (1) isu-isu yang berkaitan dengan pengukuran komponen-komponen kunci dari teori; (2) pendekatan-pendekatan terhadap isu-isu pemunculan institusi; dan (3) cara-cara yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang preferensi yang dimiliki oleh individu.

### 1. Kontribusi dalam Aspek Pengukuran

Ada dua peluang utama RCT dalam memberikan kontribusi bagi aspek pengukuran. Peluang pertama berkaitan dengan asumsi rasionalitas pengukuran itu sendiri. Peluang kedua berkaitan dengan cara-cara alternatif untuk melakukan agregasi pilihan dan pelaku individu untuk secara cepat menghasilkan produk-produk sosial.

### 2. Peluang Pengukuran dalam Proses Pembuatan Keputusan

Perhatian besar yang diberikan pada riset laboratorium, yang bertujuan untuk mengukur proses-proses pembuatan keputusan aktual (Danes, 1998). Perlu dicatat bahwa karya para psikolog, seperti Kahneman dan Tversky (1979), yang menunjukkan bias sistematis dalam persepsi-persepsi risiko dan bias di dalam produk-produk perilaku yang diberi beberapa bentuk kerangka yang berbeda, telah banyak didiskusikan di antara para ekonom, ilmuwan politik, dan para ahli RCT lainnya (Schoemaker, 1982). Walaupun jenis karya ini pada umumnya dilakukan di luar karya sosiologi, tetapi masih ada ruang bagi karya sosiologi, beberapa di antaranya studi laboratorium. Jika dimungkinkan untuk mengukur motivasi secara independen terhadap tindakan yang diinformasikan, maka kita akan dapat menghasilkan pengetahuan tentang batasan-batasan internal dari rasionalitas. Mengingat bahwa perilaku “secara normatif itu diarahkan,” maka secara sosiologis akan berbeda dan bahkan berlawanan dengan “perilaku yang diarahkan secara rasional.” Bahwa riset dalam konteks seperti ini akan memiliki banyak implikasi bagi *rational choice theory*.



### 3. Dimensi Oportunitas dalam Agregasi

Mungkin permasalahan pengukuran yang paling serius yang dihadapi oleh para teoretisi RCT adalah sama dengan apa yang dihadapi oleh para teoretisi yang tertarik untuk menjelaskan produk-produk level analisis yang berbeda, dan bukan produk dari mekanisme sebab akibat yang terpostulat. Tidak seperti yang lainnya, yang biasanya bersifat teoretis dan bahkan empiris—tidak ada karya yang bersifat teoretis murni dalam permasalahan agregasi (Markovsky, 1988).

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk ini. Strategi pertama digambarkan dengan baik melalui analisis jaringan (Burt, 1980) dan melalui karya eksperimental dalam “*exchange theory*” (Cook, *et al.*, 1983). Dalam contoh ini, agregasi menjadi struktur, dan struktur tersebut selanjutnya menunjukkan pada para individu yang telah “menyusun” struktur tadi. Di satu sisi, ini merupakan solusi yang sederhana, yaitu level analisis individu dan struktural dihubungkan, dan oleh sebab itu muncullah jaringan. Jaringan didefinisikan sebagai bangunan individu yang “menyusun” jaringan tersebut. Kemudian, produk-produk sosial tertentu seperti tindakan kolektif—dapat dilihat dari konfigurasi jaringan tertentu.

Tetapi, untuk dapat menggunakan strategi ini sebagai suatu solusi bagi problem agregasi—maka para teoretisi *rational choice*, perlu mengetahui dari mana asal jaringan tersebut—yaitu alasan-alasan individual di dalam pembentukan struktur jaringan (dan sudut pandang RC, jaringan merupakan barang-barang kolektif yang ekstensinya berupa sesuatu yang problematik).



# BAB 10

## TOKOH-TOKOH TEORI SOSIAL MODERN DAN POSTMODERN

---

### A. JEFFREY C. ALEXANDER<sup>1</sup>

#### 1. Konteks Sosial Politik yang Melatarbelakangi Teori

Kehadiran Neofungsionalisme merupakan kelanjutan dari teori fungsionalisme struktural. Neofungsionalisme lahir sebagai kritik terhadap teori struktural fungsional yang cakupannya dianggap lebih sempit sehingga perlu diperluas. Neofungsionalisme tidak mengubah teori dasar, tetapi bertujuan mengembangkan teori secara sintesis. Teori struktural fungsional dianggap oleh Jeffrey C. Alexander mengabaikan orientasi sintesisnya. Oleh karena itu, Jeffrey Alexander mengembangkan neofungsionalisme yang dipandang sebagai usaha mengungkap orientasi tersebut.

#### 2. Realitas Sosial yang Melahirkan Teori

Beberapa realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya neofungsionalisme antara lain: *pertama*, teori struktural fungsional memiliki tiga kelemahan, yakni: (1) sangat abstrak, kurang empiris, dan terfokus pada sejarah, (2) kurang memberikan perhatian pada kelompok-kelompok konkret dan proses-proses sosial, atau kepada *power* dan konflik; dan (3) lebih mendasarkan pada hasil integrasi dari perubahan struktural.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan sumbangan dari Dr. Nasruddin.

*Kedua*, neofungsionalisme dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah, antara lain anti-individualisme, konservatisme, idealisme, dan anti-empiris. Usaha untuk mengatasi masalah ini dilakukan secara terprogram pada level teori yang lebih spesifik, misalnya dalam mendefinisikan teori diferensiasi.

### 3. Arus Pemikiran Intelektual yang Memengaruhi Teori

Pemikiran filsafat yang memengaruhi teori Jeffrey C. Alexander adalah perdebatan klasik antara empirisme dan rasionalisme dalam bentuk materialisme dan idealisme. Beberapa pemikir sosial seperti Durkheim dan Marx juga sangat mewarnai pemikiran Jeffrey C. Alexander.

### 4. Latar Belakang Pribadi dan Sosial Perumus Teori

Jeffrey C. Alexander adalah warga negara Amerika Serikat, lulusan Harvard dan Barkeley University California, ia dikenal sebagai *new left Marxism*. Teori dan orientasi politiknya beralih sekitar tahun 1970 menuju fungsionalisme dan pluralisme. Ia merupakan profesor sosiologi di Universitas California, Los Angeles. Dia adalah pendiri pemikiran sosiologi yang dikenal sebagai neofungsionalisme dan merupakan salah seorang ahli teori kontemporer.

Jeffrey C. Alexander dikenal banyak terlibat dalam gerakan mahasiswa di Harvard maupun Barkeley. Karya Alexander antara lain: *Theoretical Logic in Sociology, Twenty Lactures, Sociological Theory Since World War II*.

### 5. Fenomena Sosial yang Hendak Dijelaskan

Teori Alexander adalah teori metateori, yaitu teori dari suatu teori yang memiliki nilai lebih dari teori sebelumnya. Alexander membuat seperangkat kriteria terhadap teori klasik, yakni dengan mengemukakan *statement* tentang bagaimana teori itu seharusnya dan bagaimana melakukannya.

Alexander mengemukakan bahwa dunia adalah multidimensional yang memiliki aspek normatif dan instrumental, adanya keseimbangan



antara order dan aksi dan rekonsiliasi antara aspek-aspek tersebut.

Lahirnya neofungsionalisme merupakan kritik terhadap struktur fungsional yang dianggap terlalu menekankan pada masyarakat manusia yang bersifat harmoni, stabil, dan terintegrasi dengan baik. Karena penekanannya yang berlebihan kepada harmoni dan stabilitas, maka fungsionalitas cenderung mengabaikan potensi konflik sosial yang merupakan ciri dasar dari kebanyakan masyarakat. Dengan mengabaikan konflik sosial dan mengedepankan harmoni dalam masyarakat, maka fungsionalis mengarah pada bias konservatif dalam kehidupan sosial, yakni cenderung mempertahankan segala yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang dikaji hanya tertuju pada satu masa tertentu saja, sehingga mengabaikan dimensi historis dalam mengkaji kehidupan masyarakat. Akibatnya, sangat sulit menjelaskan perubahan sosial dalam konteks perspektif materialis dan perspektif konflik.

## 6. Jenis Penjelasan yang Ditawarkan

Beberapa orientasi dasar neofungsionalisme, yakni: *pertama*, neofungsionalisme dijalankan dengan suatu model deskripsi masyarakat yang memandang masyarakat sebagai kesatuan elemen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dan membentuk pola. Pola tersebut memungkinkan terjadinya diferensiasi sistem dari lingkungannya. Bagian-bagian dari sistem berhubungan secara simbiotik, dan interaksinya tidak ditentukan oleh beberapa kekuatan.

*Kedua*, neofungsionalisme mencurahkan perhatian yang sama pada aksi dan order. Hal ini berarti menghindari kecenderungan fungsionalisme struktural yang hanya terfokus pada order level makro. Neofungsionalisme juga memberikan pengertian yang luas bukan hanya bersifat rasional, melainkan juga aksi ekspresif.

*Ketiga*, neofungsionalisme mempertahankan kepentingan struktural fungsional dalam integrasi, bukan hanya sebagai fakta sosial melainkan juga sebagai suatu sosial *possibility*. Pertahanan dan kontrol sosial merupakan kenyataan dalam sistem sosial. Perhatian mengenai keseimbangan dalam neofungsionalisme lebih luas dibanding dalam struktur fungsional. Keseimbangan diartikan dalam referensi analisis





fungsional, tetapi bukan sebagai deskripsi kehidupan individu dalam sistem sosial.

*Keempat*, neofungsionalisme berfokus pada perubahan sosial dalam proses diferensiasi termasuk sosial, budaya, dan sistem personalitas. Perubahan bukan hasil dari konformitas dan harmoni, melainkan dari ketegangan individu dan institusi. Oleh karena itu, neofungsionalisme berimplikasi pada komitmen kebebasan konseptualisasi dan teorisasi.

## 7. Lingkup Realitas Sosial yang Dikaji (Makro vs. Mikro)

Menurut Alexander, teoretisasi sosial harus memilih antara perspektif kolektif (makro) dan individual (mikro). Jika memilih posisi kolektivis maka hanya mengumpulkan negosiasi individu yang sangat terbatas, sebaliknya jika memilih teori individual maka akan menghadapi dilema individual dengan mencoba fenomena teori supra-individual untuk mendapatkan *random* dalam teori tersebut. Dilema ini hanya dapat dipecahkan jika aspek formal terhadap individualisme diabaikan.

Di antara dua perspektif tersebut, Alexander memberikan prioritas pada teori kolektif normatif dan berfokus pada norma kehidupan sosial. Alasan yang mendasarinya adalah perspektif individual (mikro) tidak dapat diprediksi dan sangat acak dibanding order. Oleh karena itu, kerangka umum untuk teori sosial hanya dapat diperoleh dari perspektif kolektif (makro).

## 8. Jenis Realitas yang Dikaji (Objektif vs. Subjektif)

Posisi teori sosial Jeffrey C Alexander dalam paradigma ilmu sosial, yakni antara realitas subjektif dan objektif. Hal itu disebabkan karena realitas sosial yang ditelaah berada pada dua pilihan. Alexander mengemukakan bahwa selalu terdapat dua hal dalam perdebatan epistemologi ilmu sosial, yakni: *Pertama*, apakah observasi perilaku manusia dapat didekati secara subjektif atau objektif, apakah sadar atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. *Kedua*, apakah tindakan itu dilakukan secara sukarela atau karena adanya paksaan. Dua hal ini mendorong untuk



diperbincangkan. Di satu pihak menganggap bahwa perilaku manusia adalah hasil dari kesadaran, dan pihak lain mengatakan bahwa perilaku manusia adalah sukarela. Dalam level analisis, Alexander menyebutnya sebagai modulasi antara individu dan kolektif.

### 9. Lokus Realitas Sosial yang Menjadi Fokus Kajian (Agency vs. Struktur)

Jeffrey C. Alexander dalam neofungsionalisme menggunakan istilah *action* dan *order* sebagai istilah lain dari *agency* dan struktur. Alexander mengemukakan bahwa terdapat keseimbangan antara aksi dan order.

Isu utama dalam teori aksi adalah apakah aksi diterima secara rasional atau tidak. Alexander memberikan makna rasionalitas sebagai aksi untuk mencapai tujuan normatif yang lebih luas dalam perilaku manusia. Adapun permasalahan order adalah bagaimana pola penempatan unit individu pada struktur sosial *nonrandom* dengan segala motivasinya. Order sebagai kategori *residual* merupakan segmen yang kuat dan melekat pada masyarakat dan juga merupakan hasil dari komitmen norma kolektif individu. Meskipun diakui bahwa dualisme aksi dan order merupakan dua hal yang saling bersilangan.

### 10. Lokus Penjelasan yang Menjadi Sumber Penjelasan (Body vs Mind)

Perhatian Alexander juga terfokus pada sosialisasi sistem aksi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Parsons mengenai subsistem aksi yang terdiri dari sistem sosial, budaya, dan kepribadian. Alexander menambahkan bahwa ketiga hal itu bukan konseptualisasi dari aksi itu sendiri, melainkan konseptualisasi lingkungan yang membentuk aksi.

Menurutnya, sistem sosial memengaruhi aksi dengan cara menyiapkan objek dan *setting*, yakni pembagian kerja dan institusi otoritas politik yang merupakan arena kritik; memengaruhi solidaritas sosial yang ditujukan pada kepentingan komunitas, membentuk *canel* partisipasi melalui peran-peran sosial.

Sistem budaya memengaruhi aksi dengan cara: menyediakan simbol klasifikasi aksi, mengindikasikan manfaat dan signifikansinya, menyusun pola pilihan yang dapat diterapkan secara luas dan konkret.



Adapun kepribadian memengaruhi aksi dengan cara: membentuk ikatan emosional dengan objek, dan membentuk pertahanan dan represi yang memungkinkan partisipasi yang berbeda.

Berdasarkan analisis tersebut, maka teori sosial Alexander berada pada tataran *mind* atau sosiologi idealisme.

## 11. Bias Kekuasaan, Nilai, dan Kepentingan

Bias yang dikandung dalam neofungsionalisme adalah mendeskripsikan masyarakat sebagai himpunan berbagai elemen yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu pola hubungan yang simbiosis.

Fokus perhatian pada perubahan sosial dalam bentuk proses yang bertentangan dengan masyarakat, budaya, dan sistem kepribadian. Selain itu, Alexander juga mendasarkan kerjanya pada fokus masyarakat sipil, meskipun diakuinya bahwa masyarakat sipil tidak masuk dalam pembahasan neofungsionalisme.

## B. TEORI FOULCAULT: POST-STRUKTURALIS<sup>2</sup>

### 1. Latar Belakang Sosiopolitik

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di abad XX terakhir ini justru membuat manusia semakin tidak manusiawi. Perang Dunia I (1914-1918) berlanjut dengan Perang Dunia II (1939-1945), dan Perang Dunia II berlanjut ke Perang senjata (*power*) yang merupakan hasil ilmu pengetahuan (*knowledge*) sangat signifikan korelasinya dengan kekuasaan (*power*). Karena itu, Foucault selalu mengidentikkan kekuasaan dengan pengetahuan (*power/knowledge*).

Seks yang sangat manusiawi menjadi terabaikan oleh hiruk pikuk kekuasaan. Abad pertengahan telah menyusun suatu wacana yang benar-benar tunggal di sekitar tema birahi dan pengakuan dosa. Selama tiga abad terakhir, ketunggalan itu telah melebar dan pudar, kemudian tersebar dalam suatu ledakan wacana yang berbeda-beda melalui: demografi, biologi, kedokteran, psikiatri, psikologi, moral, pedagogi, kritik politis, dan seni. Lebih dari itu, ikatan kuat yang dahulu

<sup>2</sup> Tulisan ini merupakan sumbangan dari sejawat Ali Sukamtono, Kandidat Doktor Ilmu Sosial Unair.



mempersatukan teologi moral tentang nafsu dan kewajiban pengakuan dosa, kini menjadi longgar dan beragam. Objektivitas seks dalam wacana yang rasional dan dinamik mendorong setiap orang untuk menceritakan seksnya sendiri, sesuai dengan fantasi dan pengalaman masing-masing.

## 2. Realitas Sosial yang Melahirkan Teori

Ratu Victoria I (1819-1910) tidak hanya mengendalikan kerajaan, tetapi juga mengontrol tingkah laku, etika, dan sopan-santun bagi para kawulanya termasuk perilaku seksualnya. Bagi kaum Victorian, kesantunan puritan ini sangat penting. Perilaku seksual dikekang dan bahkan dibungkam. Pengaruh Victoria ini merambah sampai ke daratan Eropa, termasuk Perancis tempat Fuolcault, pencetus teori ini lahir dan tinggal.

Ketiga abad ini diwarnai dengan reaksi diskursif terhadap Victorian. Perlawanan terhadap setiap usaha umum untuk menyembunyikan seks (sok alim) memancar luas melalui pengetahuan dan teknologi modern (*power/knowledge*) yang diciptakan untuk membicarakan seks. Sejak kesantunan bahasa dipaksakan pada zaman klasik, di sekeliling seks telah disusun satu jaringan pewacanaan yang rumit dan beragam, khas, dan menekan, yaitu satu sensor yang menyeluruh. Maka, yang terjadi sekarang adalah suatu rangsangan polimorf dan terstruktur untuk berwacana tentang seks.

## 3. Arus Pemikiran Intelektual yang Berpengaruh

Filsafat positivistik Nietzsche sangat berpengaruh terhadap alur pemikiran teoretik Fuolcault. Tentang *power and knowledge* tampak jelas buah hasil adopsi dari arus pemikiran intelektual Nietzsche. Diketuknya patung berhala ternyata gerowong. Ia terkejut, ia bongkar, ia preteli, ia urai, dan ia rajut ulang, sehingga jelas pola hubungan yang selama ini dianggap tabu. Foucault membongkar dari segala penjuru perilaku seksual. Ia menawarkan prosedur yang memungkinkan untuk mengatakan kebenaran tentang seks yang dilandasi dengan kekuasaan pengetahuan (*power and knowledge*). Bukunya yang berjudul *Power/Knowledge*, 1980, membuktikan kesungguhan mengenai hal tersebut.



Pemikiran semiotik dari Saussure tampak juga memengaruhi alur pemikiran Foucault. Dua istilah dari Saussure yang sering digunakan oleh Foucault dalam menjelaskan realitas sosial: *signifiant* yang berarti penanda, yaitu bagian dari tanda bahasa yang berupa bentuk dan bunyi; dan *signifie* yang berarti pertanda, yaitu bagian dari tanda bahasa yang berupa konsep, makna, atau nilai.

#### 4. Latar Belakang Pribadi dan Sosial

Foucault termasuk seorang *libertin*, orang yang tidak kuat menjalankan ibadah agamanya dengan mengumbar hawa nafsunya. Obsesinya yang unik, ia ingin menguasai hidup dan menentukan ajal. Ia meninggal pada tahun 1984 pada usia 57 tahun, karena kegilaannya terhadap pengetahuan. Sebagai seorang ilmuwan sejati ia tidak segan-segan mengorbankan raga dan jiwanya terjun ke kancah penelitian yang sangat berbahaya. Ia termasuk dalam komunitas kaum *gay* yang gemerlapan di San Francisco sebagai partisipan aktif. Ia berhubungan seks ala *gay* termasuk sodomi. Akhirnya ia terjangkit penyakit AIDS dan mati oleh penyakit seks yang ganas ini. Obsesinya tentang seks yang begitu besar tercermin dalam trilogi karyanya mengenai seks: (1) *The History of Sexuality*, (2) *The Care of the Self*, (3) *The Use of Pleasure*.

#### 5. Fenomena Sosial yang Hendak Dijelaskan

Seks yang tidak henti-hentinya menimbulkan dorongan akan semakin besar dalam pembentukan wacana (*discourse*). Begitu banyak pembicaraan tentang seks dan begitu banyak mekanisme yang mendorong seks untuk dibicarakan, namun dengan syarat yang ketat. Bukankah hal itu membuktikan bahwa seks tetap merupakan rahasia dan orang masih berusaha untuk mempertahankannya? Kita justru harus mempertanyakan tema yang sering muncul, bahwa seks berada di luar wacana yang hanya dengan menghilangkan hambatan dan membongkar rahasia itu, kelas baru akan terbuka.

Bukankah tema itu justru menjadi bagian dari anjuran untuk merangsang pembentukan wacana? Bukankah justru mendorong orang membicarakan seks? Untuk mulai membicarakannya lagi, maka seks



dibuat berkilau, di batas luar setiap wacana riil, seperti rahasia yang mau tak mau harus dibuka, sesuatu yang dibungkam secara sepihak dan yang dirasakan sulit sekaligus perlu, berbahaya untuk dibicarakan dan sekaligus bernilai untuk dikatakan. Seks bukanlah sesuatu yang bersifat keras untuk menampakkan dirinya, melainkan sebagai sesuatu yang terus bersembunyi di mana-mana. Seks seperti suatu hal yang hadir secara terselubung dan kurang dihiraukan suaranya, karena kehadiran itu berbisik begitu lembut dan sering kali samar-samar.

## 6. Jenis Penjelasan yang Ditawarkan

Bagi Foucault kekuasaan (*power*) selalu berimplikasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan sebaliknya. Ia berpendapat bahwa kekuasaan itu berada pada strategi yang dioperasikan pada setiap tingkatan. Jadi, kekuasaan itu bukan monopoli kalangan atau kelas tertentu. Kekuasaan bersifat produktif, bahkan akan memproduksi pengetahuan.

Foucault menyajikan pemikiran-pemikiran segar yang belum pernah dijumpai pada masa sebelumnya. Konsep metafisika kekuasaan dari Foucault merupakan suatu bentuk mikrofisik. Konsep tersebut merupakan fokus studi dari suatu kalangan yang sering disebut sebagai “kaum filsuf *nouveaux*” yang sama sekali berbeda dari konsep metafisik Marxis atau teori totalitarianisme, karena teori ini menganjurkan adanya suatu kekuasaan terpusat yang tidak disukai oleh Foucault.

## 7. Jenis Realitas Sosial yang Dikaji

Foucault melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (*discursive field*), yang merupakan kompetisi bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Pengetahuan harus dijelaskan berdasarkan institusi dan peristiwa yang berlangsung dalam institusi, baik yang bersifat teknis, ekonomis, sosial, maupun politik. Namun institusi-institusi itu sendiri tidak dapat berfungsi tanpa adanya kekuasaan. Untuk itu Foucault mengadakan analisis kekuasaan yang bersifat institusional—tidak personal. Tetapi tidak seperti kaum Marxis, Foucault tidak mempelajari kekuasaan dalam suatu proses mekanisme. Kekuasaan tidak dipandang sebagai



perwujudan atau konsekuensi logis dari kepemilikan ekonomis, tetapi sekadar sebagai strategi untuk melaksanakan sesuatu. Istilah strategi yang dimaksudkan bukanlah suatu kelompok individu dalam melaksanakan sesuatu, melainkan “dampak dari suatu posisi strategis.”

Dia menjelaskan bahwa tipe-tipe *power* bukan berfungsi atau memfungsikan makna tindakan atau ucapan, karena ketentuan-ketentuan untuk bertindak dapat dibentuk langsung tanpa lewat perantara makna.

## 8. Lingkup Realitas Sosial yang Dikaji

Bagian yang terpenting dari seks selalu lepas dari perhatian, karena itu kita harus menelitinya, kata Foulcault. Mungkin masyarakat kita yang paling tidak pernah lelah dan tidak sabar untuk membahas seks. Mungkin tidak ada satu pun masyarakat yang pernah mengumpulkan secara mendalam dalam jangka waktu yang relatif singkat wacana tentang seks dan kekuasaan sebanyak itu, kecuali Foulcault.

Realitas sosial yang kita saksikan adalah suatu realitas penuturan yang luar biasa besarnya. Kita dituntut dan diatur oleh peradaban kita sendiri. Kita lebih banyak membicarakan seks daripada hal lain. Kita telah melaksanakan “tugas” itu dengan tekun. Kita meyakinkan diri sendiri, karena perasaan takut bersalah yang aneh.

## 9. Lokus Realitas Sosial yang Dianggap Otonom

Foulcault bisa dimasukkan dalam jajaran filsuf Perancis. Ia sangat berhasil dalam kariernya menjadi seorang dosen dan guru besar di Paris. Dilihat dari sejarah jabatannya, ia aktif terlibat dalam sejarah gagasan. Namun, ia sendiri tidak mau mendapat label apa pun. Karyanya yang berjudul *L'Archeologie du savoir* (1969) atau “Arkeologi Pengetahuan”, memang bisa disebut sebagai karya tentang sejarah gagasan, tetapi ia sendiri keberatan dengan label terbatas seperti itu. Ia menghendaki karyanya dipandang sebagai suatu kajian totalitas.

Dalam buku itu, ia mengkritik aspek-aspek tertentu dari karyanya sendiri yang dibuat sebelumnya. Antara lain: ia mulai meragukan adanya suatu “subjek umum sejarah” yang termuat dalam *Histoire de la Folie a l'age Classique* (1961) atau “Sejarah kegilaan dan peradaban.”



Adapun dalam karya lainnya yang berjudul *Les Mots et Les Choses* (1966) atau “Tatanan segala sesuatu,” Foulcault menyatakan bahwa kemanusiaan merupakan suatu penemuan modern dan di masa mendatang bisa hilang. Pendapat seperti ini bisa mendorong kita untuk menyebutnya sebagai seorang strukturalis karena ia menempatkan gagasan manusia dalam kerangka struktur pengetahuan atau *savoir*. Namun, dalam karyanya yang berjudul *L’Archeologie du Savoir* ia justru mempersoalkan nuansa strukturalis dalam tulisan-tulisannya terdahulu.

Konsep berikutnya, yang diperdebatkannya sendiri adalah konsep epistemik yang kurang lebih bisa diartikan sebagai suatu struktur pengetahuan, atau dalam istilahnya sendiri, suatu “formasi diskursif, yakni suatu sudut pandang tentang segala sesuatu yang ada di dunia berdasarkan fakta-fakta yang dipahami oleh orang yang melihatnya. Dapatkah studi sejarah tentang formasi epistemik itu didasarkan pada konsep epistemik sebagai suatu perangkat penjelas? Jika tidak, lantas apa yang dapat menjelaskan tatanan epistemik itu? Foulcault bersikeras bahwa penjelasannya pasti berada pada “rezim materialitas” yang di-tafsirkannya sebagai kumpulan institusi. Dalam rezim itu, hubungan-hubungan materi menjadi landasan struktur peristiwa-peristiwa diskursif. Dengan keteguhan, sangat layak kalau ia didorong masuk ke dalam kelompok pendukung “*post*-strukturalis.”

## 10. Lokus Penjelasan yang Dianggap Independen

Persoalan yang dilontarkan Foulcault adalah “Apakah ilmu sosial itu dibatasi oleh terminologi subjek-subjeknya?” Dia menjelaskan bahwa proses semacam ini bukanlah hasil dari motivasi sadar atau motivasi di bawah sadar. *Power* atau kekuasaan menurut Foulcault tidak membatasi kelompok atau individu memaksakan kehendaknya pada pihak lain, dan *power* itu bersifat mendasar bagi semua interaksi sosial.

Gagasan epistemik yang bersifat deskriptif dan strukturalis oleh Foulcault diletakkan di bawah konsepsi historis dari munculnya konfigurasi epistemik baru yang mencakup ilmu-ilmu pengetahuan baru yang bersifat materialis. Penjelasan kausal selanjutnya, bahwa kita sendiri dan badan kita sendiri yang berpikir dan berhubungan sebagai





hasil dari apa yang ia sebut ”drama dominasi yang terus berulang-ulang tanpa akhir” (*the endlessly repeated play of domination*) yang merupakan sejarah manusia.

### 11. Bias Kekuasaan, Nilai, dan Kepentingan

Ia memperkenalkan istilah “mikro fisik kekuasaan”, yakni kekuasaan yang terkandung dalam masyarakat secara keseluruhan. Ia juga melihat adanya benturan, namun bukan antara satu kalangan atau kelas dengan kelas atau kalangan yang lain, melainkan satu strategi dengan strategi yang lain. Apa yang dipentingkan olehnya adalah hasil dari benturan atau konflik itu, bukan pada proses. Karena keyakinannya yang begitu kuat pada metafisik kekuasaan, ia sering dikecam tidak memberikan sumbangan teoretis yang berarti kecuali sekadar memunculkan konsep.

Karya-karya Foulcault yang bebas nilai, berimplikasi negatif bagi kepiawaian intelektualnya. Bagaimanapun, agama sebagai sumber nilai yang masih dianut oleh sebagian besar umat manusia di dunia tidak bisa diabaikan begitu saja.

## C. JURGEN HABERMAS<sup>3</sup>

### 1. Konteks Sosial Politik yang Melatarbelakangi

Adanya perhatian Jurgen Habermas terhadap masalah ilmu sosial, politik, dan filsafat serta mengevaluasi potensi dan masalah masyarakat modern. Habermas meyakinkan bahwa kemajuan pengetahuan dilakukan melalui diskusi terbuka dan kritik. Jurgen Habermas melihat bahwa modernitas yang diarahkan oleh sistem kapitalisme itu mempunyai cacat. Ia memfokuskan segi-segi instrumental dan manipulatif yang terwujud dalam sistem ekonomi dan administrasi birokratif. Modernitas kapitalis menindas segi-segi hakiki masyarakat yang pada dasarnya bersifat komunikatif. Ia mengkritik rasionalisasi masyarakat, teknokratisme, depolitisasi massa, demokrasi radikal dan krisis legitimasi dalam kapitalisme. Adanya kelemahan-kelemahan postmodernisme yang mencampakkan modernitas sebagai proyek

<sup>3</sup> Tulisan ini merupakan sumbangan dari sejawat Dr. Lenny M. Tamunu.



sejarah. Cacat-cacat modernitas harus diatasi dengan pencerahan, adanya rasio komunikatif yang kritis terhadap rasionalitas yang menyembunyikan kekuasaan.

## 2. Realitas Sosial yang Melahirkan Teori

Habermas menekuni sosiologi dan filsafat pengetahuan sosial dengan memfokuskan pada dasar-dasar epistemologi teori kritik, baik secara fungsional maupun teori sistem. Ia berupaya meletakkan teori kritik dalam hubungan hermeneutik dan epistemologi positif dalam teori masyarakat Marxist. Pada pertengahan tahun 1970, Habermas mengarahkan perhatian kepada isu-isu substantif, tentang masalah-masalah sosial yang dikaitkan dengan datangnya modernitas. Adanya fakta krisis dalam kapitalis dengan komitmen motivasi dan integrasi normatif. Hal itu juga diikuti dengan komitmen evaluasi masyarakat. Ia juga mencoba untuk melengkapi ketetapan teori sejarah Marx, dengan memberikan identitas struktur pada pembangunan dan perubahan individu pada tingkat masyarakat.

Pernyataan ini merupakan pemikiran postmodern atau aliran kontemporer yang menganggap proyek modernitas adalah masyarakat rasional, yang merupakan perwujudan kekuasaan dalam sistem ekonomi dan administrasi birokratif. Aliran ini mengkritik rasionalitas Barat yang mendasari praktik-praktik totalitarisme modern.

## 3. Arus Pemikiran Intelektual yang Memengaruhi

Jurgen Habermas dikenal sebagai pembaru tradisi intelektual yang dirintis oleh Max Horkheimer. Di tangan Horkheimer paham Marxisme didekati dengan pendekatan akademis-filosofis. Tokoh ini menjadi peletak dasar pengembangan program multidisipliner pada abad XX yang disebutnya “*Public-Sphere*”, yaitu suatu wahana untuk mengungkapkan *discursive will formation* atau debat bebas yang tidak memaksa. Hal ini merupakan gagasan komunikasi rasional yang didasarkan pada filsafat pragmatik Amerika Serikat. Selain itu, Habermas juga dipengaruhi pemikiran Hegel, sehingga ia dikenal dengan sebutan “Demokratik Radikal Hegel.”



#### 4. Latar Belakang Pribadi dan Sosial

Ia dilahirkan pada tanggal 18 Juni 1929 dari keluarga kelas menengah dan sedikit tradisional. Ayah Habermas seorang direktur dewan perdagangan. Pada akhir Perang Dunia II, dengan jatuhnya NAZI membawa harapan baru pada orang Jerman termasuk Habermas untuk melakukan kemajuan. Pada tahun 1949—1954, Habermas mempelajari filosofi psikologi dan literatur Jerman di Gottingen, Zurich, dan Bonn selama dua tahun saat bekerja sebagai wartawan. Pada tahun 1956, Jürgen Habermas bergabung dengan lembaga penelitian sosial Frankfurt, kemudian ia menjadi seorang asisten peneliti dari Theodore Adorno yang paling terkenal di sekolah itu. Jürgen Habermas mendemonstrasikan pikiran-pikirannya yang kritis dan praktis. Namun, Max Horkheimer tidak menyetujuinya dan merekomendasikan sebagai dosen privat di Universitas Marboulgh. Habermas direkomendasikan menjadi seorang profesor filsafat pada Universitas Hildeberg dan menetap sampai dengan tahun 1964. Kemudian, ia pindah ke Universitas Frankfurt sebagai profesor ahli filsafat dan sosiologi. Tahun 1971 sampai dengan tahun 1981 ia menjadi direktur di lembaga Max Plan. Pada tahun 1994, ia menjadi seorang profesor Emeritus pada universitas tersebut. Jürgen telah memenangkan sejumlah prestasi akademik dan telah menerima profesor kehormatan pada sejumlah universitas.

Beberapa tahun lamanya Jürgen Habermas memimpin neo-Marxis di dunia dan memberi masukan-masukan teoretis yang berbeda. Jürgen Habermas mengungkapkan mengenai dunia modern ke depan yang dituangkan dalam tulisan-tulisannya tentang proyek modernitas. Kalau Marx memfokuskan pada efek perubahan struktur kerja masyarakat kapitalis, maka Habermas menekankan pada perubahan komunikasi struktur masyarakat modern. Kalau Marx meliputi dunia ke depan dengan tenaga kerja yang kreatif, maka Jürgen Habermas melihat masyarakat ke depan yang dicirikan oleh kebebasan dan keterbukaan komunikasi. Kedua penganut aliran modernitas ini sepakat, bahwa proyek modernitas itu tidak akan kunjung selesai. Jürgen Habermas melanjutkan kepercayaannya pada proyek modernitas dan menyokong teori-teori dasar yang tercatat dalam teori sosial modern sekaligus



sebagai pejuang postmodernis. Habermas dan pendukungnya dipandang sebagai penyelamat teori modernitas dan teori-teori besar dalam ilmu-ilmu sosial.

## 5. Fenomena Sosial yang Hendak Dijelaskan

Fenomena yang hendak dijelaskan oleh Habermas meliputi: (1) perubahan dan pertumbuhan masyarakat Jerman; (2) penyebaran instrumen rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan; (3) penyebaran konsep *aufklarung*; (4) komunikatif rasional dalam institusi demokrasi liberal dan *mutatis mutandis*, bagaimana suatu kritik tetap ada dalam masyarakat kontemporer; (5) tradisi filsafat Jerman; dan (6) debat menentang logika positivisme dan modernisasi Perancis dalam filsafat *enlightenment* dalam prinsip liberalisme politik.

## 6. Jenis Penjelasan yang Ditawarkan Oleh Habermas

Ada dua jenis penjelasan yang ditawarkan Habermas, yaitu: *Pertama*, sistem sosial adalah cara struktur sosial dan bentuk perintah fungsional melawan tindakan-tindakan masyarakat melalui media uang dan kekuasaan. Hal itu mempunyai objek studi dari perspektif eksternalis sebagai struktur fungsionalis atau teori sistem, khususnya penggunaan sumber-sumber organisasi negara yang efisien dan aktivitas organisasi. Sistem sosial memerlukan individu-individu yang disosialisasikan pada level budaya.

*Kedua*, dunia kehidupan (*life world*) adalah reproduksi sosial. Dalam hal ini masyarakat secara konstan berbuat melalui praktik-praktik rutinitas. Adanya perhatian tertutup dari pandangan internalis seperti fenomenologi dan etnometodologi.

## 7. Jenis Realitas Sosial yang Dikaji

Jenis realitas sosial yang dikaji, yaitu tentang realitas subjektif yang berpusat pada subjek. Dengan kata lain, realitas yang dikaji meliputi segala bentuk pemikiran yang menempatkan kenyataan baik masyarakat maupun alam. Pernyataan ini ada hubungannya dengan pemikir postmodern, yaitu sebuah aliran kontemporer yang cenderung menganggap



projek modernitas menuju masyarakat rasional sebagai perwujudan kekuasaan dalam bentuk sistem ekonomi dan administrasi birokratis. Jadi, menurut Habermas semua tindakan individu mempunyai makna subjektif terhadap seseorang.

## **8. Lingkup Realitas Sosial yang Dikaji**

Dilihat dari posisi teorinya dalam spektrum lingkup realitas makro-mikro, maka Jurgen Habermas berada dalam lingkup realitas makro, karena pekerjaan Marx selalu menjadi pusat perhatiannya yang utama. Marx memfokuskan pekerjaan pada efek perubahan struktur kerja masyarakat kapitalis, sedangkan ia melihat pada cara perubahan komunikasi struktur masyarakat modern. Marx melihat dunia secara menyeluruh ke depan dengan melihat tenaga kerja yang kreatif, sementara Habermas melihat masyarakat ke depan yang dicirikan oleh kebebasan dan keterbukaan komunikasi. Keduanya mempunyai komitmen pada modernisasi dan masa yang akan datang. Habermas melanjutkan proyek modernitas dengan menulis teori sosial postmodernis.

## **9. Lokus Realitas Sosial yang Dianggap Otonom**

Ralitas sosial yang dikembangkan dalam teori sosial Habermas adalah struktur atau determinisme struktur. Dalam penjelasan teorinya dipaparkan bahwa kerja Marx menjadi perhatian Jurgen Habermas dengan mempertimbangkan komunikasi. Menurut Jurgen Habermas, perubahan komunikasi struktur masyarakat modern dicirikan oleh kebebasan dan keterbukaan komunikasi. Komitmennya pada modernisasi dan kesetiiaannya pada “masa depan” yang dibangun oleh para pemikir kontemporer. Kreasi besar Jurgen Haberman adalah upaya ia melanjutkan teori dasar dalam teori sosial modern atau post-modernisasi. Dengan kata lain, Jurgen Habermas dapat dikatakan sebagai pemikir proyek modernisasi yang terakhir.

## **10. Lokus Penjelasan yang Dianggap Independen**

Lokus penjelasan yang dianggap independen adalah upaya Habermas memfokuskan pada rasionalitas dalam menciptakan suatu teori.



Pokok perhatiannya dipusatkan pada dominasi sistem rasionalitas dunia kehidupan. Jurgen Habermas melihat modernitas dengan cara memperkaya sistem rasionalitas dunia kehidupan.

### 11. Bias Kekuasaan, Nilai, dan Kepentingan

Bias teori sosial Jurgen Habermas yang sangat mencolok yaitu ada pada ambisiusnya untuk segera mengemas suatu masyarakat menjadi masyarakat yang modern. Pemikirannya juga bias kekuasaan dalam sistem ekonomi dan administrasi birokratif.

## D. GEORGE RITZER<sup>4</sup>

### 1. Konteks Sosial dan Politik Teori

Sebagai ilmuwan yang lulus dari universitas di Amerika (mulai dari B.A. sampai Ph.D.), maka salah satu ciri khas dalam karya-karya ilmuwan Amerika adalah mereka gelisah akan ide-ide yang sangat spekulatif, yang tidak mempunyai nilai praktisnya. Sifat khas lainnya adalah tekanan yang kuat pada individualisme. Dari awalnya memang nilai-nilai individualistik dikembangkan dalam menentang tuntutan-tuntutan yang menimbulkan konflik dari satu pemerintahan sentral kuat.

Konteks sosial yang melatarbelakangi perumusan teori Ritzer adalah adanya reformasi sosial yang sudah dikerjakan sebagaimana revolusi industri (Jhonson, 1986). Hal itu berkaitan dengan tekanan pragmatisme masyarakat Amerika sebagaimana telah disinggung di atas. Hanya saja tidak semua ilmuwan Amerika percaya bahwa perubahan yang diimpikan adalah harus meningkatkan kemajuan, karena bisa saja perubahan-perubahan yang direncanakan tidak harus membantu proses tersebut.

### 2. Realitas Sosial yang Mendasari Teori

Ritzer dalam mengembangkan teori-teorinya didasarkan pada realitas dalam masyarakat, yakni perkembangan mutakhir komoditas informasi. Dengan realitas seperti itu, Ritzer beranggapan bahwa terdapat

<sup>4</sup> Tulisan ini merupakan sumbangan dari sejawat Dr. Ir. Alisyahbana, M.A.



“perpanjangan tangan” Amerika ke seluruh dunia sehingga menjadi “desa dunia” yang namanya “Desa Amerika.” Dengan perkembangan seperti itu, tidak saja dapat memengaruhi dan memperpanjang badan atau syarat manusia, bahkan lebih fantastis lagi, mampu menghasilkan duplikat manusia, mampu menyulap fantasi, halusinasi, ilusi menjadi kenyataan.

Dalam keadaan seperti di atas, timbul kesadaran kolektif dan kesadaran kelompok untuk mematuhi realitas tersebut. Hal ini digambarkan Durkheim sebagai proses tumbuhnya “jiwa kelompok” yang memengaruhi jiwa individu (Durkheim dalam Abdullah dan A.C. Van de Leeden, 1986). Tingkah laku hidup adalah akibat “pemaksaan” perilaku itu datang dari luar dan memengaruhi pribadi, jika manusia itu menentang (dalam bentuk tingkah laku) yang berlawanan dengan tingkah laku kolektif, maka perasaan kolektif itu akan menentangnya.

### 3. Arus Pemikiran Intelektual yang Memengaruhi Teori

Jika memerhatikan karya Ritzer, salah satu aliran pemikiran yang memengaruhinya adalah aliran Weberian. Hal itu dilihat pada ide tentang perlunya rasionalitas dalam masyarakat. Meskipun tulisan-tulisan Ritzer secara metodologis menekankan pentingnya subjektif atau objektif, karya substantifnya juga dapat dihubungkan dengan analisis struktural dan fungsional yang lebih luas jangkauannya.

### 4. Latar Belakang Pribadi dan Sosial Pencetus Teori

George Ritzer (1988) memperoleh gelar B.A. dari City College di New York pada tahun 1962 dalam bidang psikologi, gelar M.B.A. dari Universitas Michigan pada tahun 1964 dalam bidang *personel administration*, dan Ph.D. diperoleh dari Universitas Cornell pada tahun 1968 dalam bidang *industrial and labour relations*. Pengetahuan sosiologi Ritzer dimulai ketika mengambil mata kuliah *sociological theory*, kemudian dengan tekun mempelajari sendiri untuk memahami ilmu ini.

Pada saat Ritzer sudah bekerja, ia selalu melihat ada konflik di tempat kerjanya dan mengharuskannya untuk memecahkan konflik itu sekaligus memberi pandangan dan orientasi. Ketika disertasinya



diterbitkan dan dipublikasikan, Ritzer semakin tertarik pada pekerjaannya, bersama staf untuk memecahkan konflik di antara mereka. Selama beberapa tahun, ia telah tertarik pada beberapa teknik untuk memecahkan konflik itu. Hal ini merupakan isu sentral dalam karya-karyanya di bidang sosiologi serta pekerjaannya, dan hal yang lebih penting lagi adalah memberi resolusi dari konflik, kemudian menjadi inti dalam merumuskan “*metatheory*”. Hal ini kemudian menjadi label karya-karya Ritzer.

### 5. Fenomena Sosial yang Hendak Dijelaskan

Adapun fokus yang hendak dijelaskan dari teori Ritzer antara lain:

*Pertama*, pembahasan tentang paradigma dalam sosiologi. Meminjam istilah Thomas Kuhn, Ritzer mencoba merumuskan pengertian paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan paradigma, maka dapat membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dalam pandangan Ritzer (1996), sosiologi itu terdiri atas beberapa paradigma (*multiple paradigm*). Pergulatan pemikiran tersebut terjelma juga dalam eksemplar, teori, metode, serta perangkat yang digunakan masing-masing komunitas ilmuwan yang termasuk ke dalam paradigma tertentu. Perbedaan paradigmatis di atas membentuk khazanah sosiologi yang dikategorikan sosiologi mikro dan sosiologi makro.

*Kedua*, perkembangan masyarakat. Tahapan masyarakat yang dimaksudkannya disebut dengan istilah *the mcdonaldization of society*. Dengan *Mcdonaldization* digambarkan dengan restoran *fast food* sebagai bentuk masyarakat yang eksklusif, rasional, efisien, terukur, seimbang. Pada masyarakat di atas banyak menggunakan *credit card* agar lebih efisien. Unsur penting lain dari perkembangan masyarakat adalah menggejalanya *Americanization* seperti pemakaian visa, mas-





*tercard* dan *American Express* di seluruh dunia, yang pada awalnya dikembangkan di Amerika.

Jika kita memerhatikan tulisan Ritzer, tidak ada budaya yang lebih hiperrealitas selain dari “padang pasir.” “Padang pasir” itu adalah *McDonald* dan Amerika. Ini tentunya hanya sebuah metafora yang digunakan oleh Ritzer untuk menerangkan aspek-aspek halusinasi, khayal dan fatamorgana yang telah menguasai budaya Amerika.

## 6. Jenis Penjelasan yang Ditawarkan

Jenis penjelasan yang hendak dikaji Ritzer tidak berada pada satu titik ekstrem objektif dan subjektif. Hal itu dapat dilihat pada posisi paradigma ilmu sosial (fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial). Ketika Ritzer menilai paradigma-paradigma tersebut ia bertanya: Bagaimana orang dapat memastikan bahwa sosiologi dalam kenyataannya dibedakan atas tiga paradigma? Bagaimana orang dapat menilai bahwa penganut salah satu paradigma tidak melupakan paradigma yang lain? Sebaliknya, apakah sosiologi itu tidak lebih baik ditandai dua atau satu paradigma saja?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, tidak ada suatu cara yang dikemukakan secara khusus untuk meyakinkan bahwa sosiologi itu hanya tiga paradigma. Selain tiga paradigma itu sendiri, ada satu hal lagi yang mempunyai perbedaan yang sangat bertolak belakang meskipun masih dalam satu paradigma, yaitu antara teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Namun demikian, di antara keduanya selalu ditemukan sejumlah asumsi dan perspektif yang sama, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan berkomunikasi.

Pandangan Ritzer, perbedaan antartetiga paradigma hanya bersifat estetis. Perbedaan itu sesuai dengan pengalaman penelitian di lapangan. Berbagai komponen dalam masing-masing paradigma saling menyesuaikan diri ke arah hubungan yang semakin harmonis. Teori dalam paradigma tertentu diakui pula oleh hampir semua orang yang termasuk ke dalam paradigma yang bersangkutan sebagai dasar bagi keseluruhan pendekatan mereka. Keseluruhan pendekatan teoretis dalam masing-masing paradigma diakui sebagai persamaan yang



mendasar, meskipun terdapat perbedaan dalam orientasi teoretis. Karena itu, dalam pandangan Ritzer paradigma dalam sosiologi itu saling berhubungan satu sama lain.

## 7. Jenis Realitas Sosial yang Dikaji (Objektif vs. Subjektif)

Ritzer merupakan salah seorang ilmuwan sosial yang mengemukakan bahwa dalam menjelaskan suatu fenomena tidaklah hanya mengandalkan pada logika positivistik, tetapi juga perlu membahas dari perspektif subjektif. Berdasarkan filsafat sosial, hal ini tergolong dalam fakta subjektif karena aspek yang dikaji adalah fakta subjektif dari kehidupan masyarakat. Misalnya dalam melihat fungsi sosial, Ritzer beranggapan bahwa yang dikaji tidaklah memadai jika mengandalkan dengan hal-hal *observable*, tetapi juga perlu disertai dengan pengamatan pribadi (*partisipan observable*) dari peneliti untuk mengungkap fenomena sesungguhnya. Dilihat dari paradigmanya, kita tidak bisa mengolongkan apakah ini termasuk dalam salah satu paradigma (fakta sosial, definisi sosial, atau perilaku sosial), karena sesungguhnya ia menganjurkan agar sosiologi mempunyai paradigma yang terpadu. Inti paradigma terpadu antara lain, (Ritzer, Alimandan [penyadur], 1980):

1. Makroobjektif, contohnya norma hukum, bahasa, dan birokrasi.
2. Makrosubjektif, contohnya termasuk norma-norma, nilai, dan kultur.
3. Mikroobjektif, contohnya berbagai bentuk interaksi sosial seperti konflik, kerja sama, dan pertukaran.
4. Mikrosubjektif, contohnya proses berpikir dan konstruksi sosial realitas.

## 8. Lingkup Realitas Sosial yang Dikaji (Makro-Mikro)

Secara konvensional ada dua jenis sosiologi, yakni sosiologi makro dan sosiologi mikro. Perbedaan kedua jenis ilmu ini turut memengaruhi lingkup realitas sosial yang akan dikaji. Sosiologi mikro adalah sosiologi yang menyelidiki berbagai pola pikiran dan perilaku yang muncul dalam kelompok-kelompok yang relatif berskala kecil. Orang-orang yang mengkhususkan diri pada kajian mikro, lebih tertarik pada



berbagai gaya komunikasi verbal dan nonverbal dalam hubungan *face to face*, seperti proses pengambilan keputusan oleh para hakim. Sebaliknya, sosiologi makro mempersembahkan segala usahanya untuk mengkaji berbagai pola sosial berskala besar.

Kedua pemilahan teori sosiologi di atas, akan dapat dikategorikan pula beberapa kelompok teori yang tergabung dalam sosiologi makro dan sosiologi mikro. Sosiologi makro terdiri atas teori fungsional dan teori konflik. Akar fungsionalisme sebagaimana dikembangkan Talcott Parsons bersumber dari tradisi Durkheimian dan akar teori konflik bersumber dari tradisi Marxian. Sosiologi mikro bersumber dari tradisi Weberian hingga melahirkan pemikir-pemikir teori mikro, seperti teori interaksionisme simbolis (terutama dikembangkan oleh Herbert Mead dan Herbert Blumer), etnometodologi, dan fenomenologi (dikembangkan oleh Alfred Schutz dan Harold Garfinkel), *social exchange* (dikembangkan oleh Erving Goffman dan Peter Blau). Dalam pandangan Ritzer, perbedaan-perbedaan di atas adalah paradigmatis. Kalau interaksionisme simbolik, etnometodologi dan fenomenologi masuk dalam kerangka paradigma definisi sosial, fungsionalisme struktural dan struktural konflik masuk ke dalam paradigma fakta sosial, maka *social exchange theory* masuk dalam paradigma perilaku sosial (Ritzer, Alimandan [penyadur], 1980).

Dalam pandangan Ritzer, ketiga paradigma diperlukan untuk membantu kita dalam memahami kenyataan sosial, seperti dikatakan Ritzer, “Sebenarnya tidak ada aspek kenyataan sosial yang dapat dijelaskan hanya dengan memadai satu paradigma” (Ritzer, 1988).

Demikian panjang dan unik perdebatan dalam sosiologi, secara khusus Ritzer membuat suatu kontinum yang disebutnya dengan *the Macroscopic-Microscopic Continuum*. Level kajian tersebut bergerak dari *microscopic* ke *macroscopic continuum*, mulai dari tindakan individual-interaksi-kelompok-masyarakat-sistem dunia. Semakin bergerak ke atas, wilayah kajiannya akan semakin bersifat makro, dan sebaliknya semakin bergerak ke bawah, wilayah kajiannya semakin bersifat mikro (Ritzer, 1988).



## 9. Posisi Teori dalam Metodologi Ilmu Sosial

Ritzer adalah ilmuwan sosial yang menganut aliran “*post-positivistik*”, dalam pendekatan *post-positivistik*, peneliti tidak lagi mengandalkan angka-angka, tetapi lebih mengandalkan narasi makna dan narasi atas suatu kejadian. Hal itu didasarkan karena dalam analisisnya, Ritzer cenderung menggunakan bahasa yang menggairahkan, menyatukan suatu kebudayaan, dan menggunakan mitos. Hal itu tampak jika kita memerhatikan karyanya, seperti *McDonaldization* dan *Americanization* adalah ruang yang sengaja diciptakan oleh Ritzer yang memungkinkan orang dapat secara ekstrem untuk menerima mitos dan representasi ciptaan Amerika dan McDonald yang dianggap sebagai kenyataan bagi orang lain.

## 10. Posisi Teori dalam Spektrum Agency vs. Struktur

Posisi teori Ritzer adalah mencoba untuk memadukan pentingnya *agency* dan struktur. Karena itu, ia melihat bahwa struktur dapat memengaruhi tindakan *agency*. Artinya, struktur dilihat sebagai sesuatu yang riil, berada secara terlepas dari *agency* yang kebetulan termasuk di dalamnya, dan bekerja menurut prinsip-prinsip yang khas. Di lain pihak, *agency* dilihat juga secara riil dan objektif. Komponen utama terbentuknya struktur adalah sekumpulan *agency*.

Jika dibandingkan posisi Ritzer dengan sosiolog lain, ia mempunyai perbedaan, yakni tidak bisa digolongkan secara ekstrem apakah ia lebih condong pada struktur atau *agency*.

## 11. Posisi Teori dalam Perdebatan Body vs. Mind

Posisi Ritzer dalam perbincangan *body* vs. *mind* adalah berada dalam posisi yang kontinum, yakni *body* dan *mind*. Dari posisi seperti itu, ide akan menentukan perilaku dan sebaliknya perilaku itu juga menentukan ide. Dengan demikian, studinya selain merupakan kajian terhadap realitas empiris atau realitas objektif juga kajian realitas non-empiris atau realitas subjektif. Sebagaimana diketahui bahwa teori-teori sosial pada umumnya beranjak dari gejala-gejala tentang sosial yang ada dalam masyarakat. Apa yang ada dalam gejala itu bukanlah semata



gagasan (ide) dari manusia untuk membentuk nilai. Walaupun mungkin dapat diasumsikan bahwa kehidupan semata-mata hanya merupakan perkembangan gagasan-gagasan tertentu. Gagasan itu tidak dapat dipersepsikan atau diketahui secara langsung, namun hanya melalui gejala yang merupakan sesuatu yang berbeda dengan gambarannya dalam pikiran manusia. Di sisi lain, emosi juga dapat memengaruhi (merusak) cara manusia berpersepsi dan menjelaskan perasaan.

## 12. Bias yang Terkandung dalam Teori

Keinginan Ritzer untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang memiliki paradigma terpadu menjadi salah satu titik lemah dari teorinya. Hal itu bisa diasumsikan bahwa Ritzer terlampau menyederhanakan suatu teori atau paradigma. Padahal, dengan mengikuti uraian Thomas Kuhn kemunculan suatu paradigma adalah melalui suatu tahap normal, anomali, krisis, revolusi, lalu muncul suatu paradigma.

Lalu, kita juga bisa menuduh bahwa penilaian Ritzer akan masyarakat ideal adalah McDonald dan Amerika adalah penilaian subjektifnya sendiri dan bukan penilaian dari masyarakat dan orang di tempat lain. Dalam penilaian itu, bisa jadi ia mempertahankan sikapnya yang agak konservatif. Kemudian, ide-ide yang diungkapkannya adalah tidak dikembangkan secara lebih sistematis, hal yang sebenarnya agak mengherankan jika dibandingkan dengan karyanya tentang *metatheory* yang melahirkan karya ilmiah yang cukup bermutu.

## E. PIERRE BOURDIEU 5

### 1. Konteks Sosiopolitik yang Melatarbelakangi Teori

Konteks sosial politik yang mendasari lahirnya teori sosial Bourdieu, yaitu keinginan untuk mengatasi apa yang dianggapnya sebagai “pertentangan yang keliru” antara objektivisme dan subjektivisme, atau “pertentangan yang tidak masuk akal antara individu dan masyarakat” (1990: 31). Di samping itu, Bourdieu juga mengemukakan, “Tujuan paling penting yang menuntun karya saya adalah untuk mengatasi pertentangan antara objektivisme dan subjektivisme” (1989: 15).

<sup>5</sup> Tulisan ini merupakan sumbangan dari sejawat Dr. T.M. Jamil.



Dia menentang aliran strukturalisme Saussure, Levi-Strauss, dan strukturalisme Marxist. Aliran atau perspektif ini dikritik karena berfokus pada struktur-struktur objektif dan mengabaikan proses konstruksi sosial melalui proses memahami, memikirkan, dan mengkonstruksi struktur-struktur. Kaum objektivisme mengabaikan agensi, sedangkan Bourdieu lebih menyukai posisi yang strukturalis tanpa mengabaikan agensi. Seperti dikutip oleh Jenkins (1992: 18), Bourdieu mengatakan, “Tujuan saya adalah untuk mengembalikan aktor-aktor kehidupan nyata yang telah hilang di tangan Levi-Strauss dan kaum strukturalis lainnya, khususnya Althusser.”

Tujuan yang dirumuskan Bourdieu ini ternyata menggeser pemikirannya ke arah posisi kaum objektivisme. Selain itu, fenomenologi Schutz, interaksionisme simbolik Blumer, dan etnometodologi Garfinkel dianggap sebagai contoh subjektivisme yang berfokus pada cara agen *memikirkan, menjelaskan, dan merepresentasikan* “dunia sosial,” sementara mereka mengabaikan struktur-struktur objektif tempat proses itu berada. Bourdieu menganggap teori ini berfokus pada “agensi” dan mengabaikan “struktur.” Akhirnya Bourdieu memfokuskan pada hubungan dialektif antara “struktur objektif” dan “fenomena objektif.”

## 2. Realitas Sosial yang Mendasari Lahirnya Teori Bourdieu

Realitas sosial yang mendasari teori sosial Bourdieu adalah dunia empirik (dunia sosial). Dia adalah penganut sebagian perspektif strukturalis. Namun, perspektif strukturalis yang dianutnya *berbeda* dengan strukturalisme Saussure dan Levi-Strauss serta strukturalisme Marxist. Meskipun akhirnya mereka berfokus pada struktur *bahasa* dan *kebudayaan*. Bourdieu berpendapat bahwa struktur juga terdapat dalam “dunia sosial”. Bourdieu berasumsi bahwa struktur objektif merupakan hal yang independen dari kesadaran dan kehendak agensi, yang mampu membimbing dan membatasi praktik dan representasinya (1989: 14). Bourdieu mengadopsi pemikiran konstruktivis untuk menguraikan asal usul skema persepsi, pemikiran, dan tindakan serta struktur-struktur sosial. Bourdieu menawarkan cara mengkaji dan menganalisis objeknya dengan riset data empiris.



### 3. **Pemikiran Intelektual yang Memengaruhi Teori**

Aspek penting pemikiran Bourdieu adalah cara membentuk gagasannya, yaitu pemikiran-pemikiran lain dalam dialog yang terus-menerus, kadang implisit dan kadang eksplisit. Misalnya, gagasan awalnya “dibentuk” dalam sebuah dialog dengan dua sarjana terkemuka saat itu, yaitu Jean Paul Sartre dan Claude Levi-Strauss. Dari pemikiran ekstensialisme Sartre inilah, Bourdieu mendapatkan pemahaman yang kuat tentang “aktor” sebagai pencipta “dunia sosialnya” sendiri. Tetapi, dalam pandangan Bourdieu sendiri merasa bahwa Sartre telah melangkah terlalu jauh dan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada aktor dan dalam proses mengabaikan batasan-batasan struktural terhadap mereka. Memang, bila ditarik pada arah struktur, Bourdieu biasanya kembali ke karya strukturalis Levi-Strauss.

### 4. **Latar Belakang Pribadi dan Sosial**

Bourdieu dilahirkan di sebuah kota kecil Perancis Tenggara pada tahun 1930. Kini ia menduduki kursi bergengsi dalam bidang sosiologi di College de France. Ayahnya seorang pegawai negeri sipil, dan Bourdieu dibesarkan dalam lingkungan rumah tangga kelas menengah rendah. Pada awal tahun 1950-an dia masuk perguruan tinggi dan memperoleh gelar dari Ecole Normale Superieure, sebuah perguruan tinggi pendidikan bergengsi di Paris. Hal menarik dari kehidupannya adalah dia menolak menulis tesis karena keberatan terhadap kualitas pendidikannya yang pas-pasan dan terhadap struktur sekolahnya yang otoriter.

Bourdieu pernah mengajar pada sebuah sekolah provinsi, tetapi pada tahun 1956 ia dipanggil untuk menjalani “wajib militer” dan tinggal selama dua tahun di Algeria dengan tentara Perancis. Dia menulis buku tentang pengalamannya dan tetap di Algeria selama dua tahun setelah jabatan tentaranya berakhir. Kemudian, pada tahun 1960 ia bekerja sebagai asisten di Universitas Paris. Dia sering menghadiri perkuliahan antropologi Levi-Strauss di College de France, dan bekerja sebagai asisten sosiologi Raymond Aron. Bourdieu pindah ke Universitas Lille selama tiga tahun dan kemudian kembali ke posisi



yang kuat sebagai Direktur Penelitian di L'Ecole Pratique des Hautes Etudes pada tahun 1964.

Dalam tahun-tahun berikutnya, Bourdieu menjadi tokoh utama di lingkungan intelektual Perancis dan akhirnya sebagai tokoh dunia. Karyanya telah berdampak terhadap sejumlah bidang yang berbeda, termasuk pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Ketika Raymond Aron pensiun pada tahun 1981, kursi ketua di College de France menjadi terbuka dan sebagian besar sosiolog Perancis terkemuka (misalnya, Raymond Boudon dan Alain Touraine) bersaing memperebutkannya. Tetapi, kursi ketua tersebut diserahkan kepada Bourdieu. Sejak saat itu, Bourdieu telah menjadi pemikir yang lebih terhormat daripada sebelumnya dan reputasinya terus menanjak.

## 5. Faktor Sosial yang Hendak Dijelaskan

Inti karya Bourdieu dan upayanya untuk menjembatani subjektivisme dan objektivisme terletak pada konsepnya tentang habitus dan bidang (*field*), serta hubungan dialektikalnya satu sama lain. Sementara habitus terdapat dalam pemikiran aktor, bidang terdapat di luar pemikirannya.

Realitas sosial tentang habitus adalah “struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh orang untuk berhubungan dengan dunia sosial (Bourdieu, 1989: 18). Pada kenyataannya, kita dapat menganggap habitus sebagai “struktur sosial yang terinternalisasi dan termanifestasi.” Realitas sosial seperti ini mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas, kelompok usia, gender, dan kelas-kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai hasil pendudukan jangka panjang di suatu posisi dunia sosial. Dengan demikian, habitus bervariasi dan bergantung pada sifat posisi seseorang di dunia itu; tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Akan tetapi, mereka yang menduduki posisi yang sama dalam dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Dengan pengertian ini, habitus dapat juga berupa fenomena kolektif. Habitus tersebut memungkinkan orang untuk memahami dunia sosial, tetapi keberadaan habitus dalam jumlah banyak berarti bahwa dunia sosial dan struktur-strukturnya tidak menentukan sendiri secara beragam pada semua aktor.





Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu pihak, habitus merupakan “struktur yang menyusun” dunia sosial. Di lain pihak, ia adalah “struktur yang tersusun” oleh dunia sosial. Dalam istilah lain, Bourdieu menggambarkan habitus sebagai “dialektika internalisasi atas eksternalitas dan eksternalisasi atas internalitas.” Dengan demikian, habitus memungkinkan Bourdieu menghindari dan memiliki antara subjektivisme dan objektivisme. Menghindari dari sifat filsafat subjektif tanpa menghilangkan agen serta dari filsafat struktur, tanpa melupakan untuk memperhitungkan pengaruh yang dimiliki struktur terhadap dan/atau melalui agen” (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 122).

Selanjutnya, “bidang” lebih dimaknai secara rasional daripada secara struktural. Bidang adalah suatu jaringan hubungan di antara posisi objektif (Bourdieu, 1992: 97). Bidang ini terpisah dari kehendak individu. Mereka bukan interaksi atau ikatan antarsubjektif di antara individu. Bourdieu menganggap bidang sesuai dengan definisi sebagai arena pertempuran. Menurutnya, bidang kekuasaan (politik)-lah yang paling penting, hierarki hubungan kekuasaan dalam bidang politik berfungsi untuk menyusun semua bidang lainnya.

## 6. Jenis Penjelasan yang Ditawarkan

Penjelasan yang diberikan adalah fungsional dan simbolis. Dengan menekankan pentingnya habitus dan bidang, Bourdieu menolak pembagian antara individualis metodologis dan holistik metodologis, dan menganut pendapat yang baru dengan istilah “relasionisme metodologis”. Bourdieu secara terfokus menjelaskan hubungan antara habitus dan bidang. Dia menganggap kedua hal ini bekerja dalam dua cara utama. Di satu pihak, bidang mengondisikan habitus, di pihak lain habitus (lingkungan) menciptakan bidang sebagai sesuatu yang berarti, yang memiliki kegunaan dan nilai serta berguna untuk menyimpan energi.



## 7. Jenis Realitas yang Dikaji

Adapun jenis realitas yang dikaji adalah objektif-subjektif. Bourdieu menyusun proses tiga langkah untuk menganalisis bidang. *Langkah pertama*, yang mencerminkan keunggulan bidang kekuasaan adalah untuk menemukan hubungan setiap bidang spesifik dengan bidang politik. *Langkah kedua*, untuk memetakan struktur objektif dalam hubungan posisi dan bidang. *Langkah ketiga*, analisis harus berusaha menentukan sifat *habitus* agen yang menduduki berbagai macam posisi dalam bidang tersebut. Bourdieu memberi contoh modal dalam bidang ekonomi, yang meliputi empat jenis modal. Modal *kultural* melibatkan berbagai macam pengetahuan yang sah. Modal *sosial*, terdiri dari hubungan sosial berharga antara orang-orang. Modal *ekonomi*, berkaitan dengan materi. Sementara modal *simbolis* berasal dari kehormatan dan prestise seseorang (Bourdieu, 1984: 244).

## 8. Lingkup Realitas Sosial yang Dikaji

Lingkup realitas sosial yang dikaji Bourdieu termasuk makro-objektif dan mikrosubjektif. Kenyataan ini disebabkan oleh karena teori Bourdieu berbicara antara lain: *language*, *society*, *symbolic norm*, dan *cultur* dalam paradigma terpadu (fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial) George Ritzer.

Sebagai contoh, Bourdieu menganggap negara sebagai tempat perjuangan atas monopoli yang disebut dengan “kekerasan simbolik”. Ini merupakan bentuk “halus” dari kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan pada agen sosial melalui keterlibatannya (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 167). Kekerasan simbolis dipraktikkan secara tidak langsung, umumnya melalui mekanisme kultural, dan berbeda dengan bentuk-bentuk kontrol sosial yang langsung dan sering dijadikan “fokus” oleh sosiolog.

## 9. Lokus Realitas Sosial yang Dianggap Otonom

Posisi teori Bourdieu berada dalam spektrum individualisme vs. strukturalisme. Realitas yang dikembangkan dalam teori sosial Pierre Bourdieu adalah struktur (determinisme). Dalam penjelasan teorinya,



ia mengkritik kaum objektivis karena kaum objektivis mengabaikan agensi, sedangkan Bourdieu lebih menyukai posisi yang strukturalis tanpa mengabaikan agensi.

Untuk menghindari dilema objektif-subjektif, Bourdieu (1977: 3) memfokuskan diri pada praktik yang dianggap sebagai hasil hubungan dialektikal antara struktur-agensi. Menurutnya, praktik tidak ditentukan secara objektif serta bukan pula “produk” kehendak yang bebas. Bourdieu memberi alasan mengapa ia memfokuskan pada praktik, yaitu untuk menghindari intelektualisme yang sering tidak relevan yang dikaitkan dengan objektivisme dan subjektivisme.

Dengan merefleksikan perhatiannya terhadap dialektika antara struktur dan cara orang mengkonstruksi realitas sosial, Bourdieu menanamkan sendiri dengan sebutan *constructivist structuralism*, *structuralist constructivism*, atau *genetic structuralism*. Cara Bourdieu mendefinisikan strukturalisme genetika adalah analisis struktur-struktur objektif—struktur di berbagai bidang—tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul, dalam individu-individu biologis, mengenai struktur-struktur mental yang ada pada tingkat tertentu merupakan hasil penyatuan struktur sosial. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari analisis asal usul mengenai struktur itu sendiri. Tempat sosial dan kelompok-kelompok yang mendudukinya adalah hasil dari perjuangan historis (di mana agensi berpartisipasi menurut posisinya dalam tempat sosial dan sesuai dengan struktur sosial di mana mereka hidup dan memahami tempat itu) (Bourdieu, 1990: 14).

## 10. Lokus Penjelasan yang Dianggap Independen

Inti karya Bourdieu dalam menjembatani subjektivisme-objektivisme terletak pada konsep tentang habitus dan bidang, serta hubungan dialektikanya satu sama lain. Habitus terdapat dalam pikiran aktor, sedangkan bidang terdapat di luar pikirannya. Ini berarti bahwa sumber penjelasannya adalah *body* dan *mind*.

Bourdieu melalui karyanya dituntun oleh “keinginan untuk memperkenalkan kembali praktik agen, yaitu kemampuannya untuk berimprovisasi” (1990: 13). Demikian juga, habitus memungkinkan orang



untuk memahami dunia sosial, tetapi keberadaannya di dunia sosial dan struktur-strukturnya tidak menentukan keseragaman semua aktor.

Meskipun habitus merupakan struktur terinternalisasi yang membatasi “pikiran” dan pilihan “tindakan,” habitus tidak menentukan pikiran dan pilihan tindakan tersebut. Kurangnya determinisme ini merupakan salah satu hal yang membedakan pendapat Bourdieu dari kaum strukturalis *mainstream* ( arus utama) lainnya. Habitus hanya “mengemukakan” apa yang seharusnya orang pikirkan dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dikerjakan.

Sementara itu, logika formal (relasionisme) Bourdieu penting dipahami karena membuat kita mengetahui habitus (bukan struktur tetap yang tidak berubah), melainkan disesuaikan oleh individu yang selalu berubah dalam menghadapi situasi-situasi bertentangan yang mereka jumpai. Habitus bekerja sebagai sebuah struktur, tetapi orang tidak hanya merespons secara mekanik terhadapnya atau terhadap struktur-struktur eksternal yang bekerja terhadap mereka. Dengan demikian, dalam pendekatan Bourdieu kita menghindari ekstrem hal-hal baru yang tidak terduga dan determinisme total.

## 11. Bias Kekuasaan yang Dikandung Teori

Meskipun Bourdieu telah berusaha menjembatani strukturalisme dan konstruktivisme (pada tingkat tertentu dia berhasil), tetapi dalam karyanya juga bias yang mengarah pada strukturalisme. Karena alasan inilah dia termasuk Foulcault dianggap sebagai “*poststrukturalist*”. Terdapat kontinuitas yang lebih dalam karyanya pada strukturalisme dibandingkan pada konstruktivisme. Berbeda dengan sebagian besar pendekatan lainnya (misalnya, kaum fenomenologis dan interaksionisme simbolis), konstruktivisme Bourdieu mengabaikan “subjektivisme dan intensionalitas.” Dia memang menganggap penting untuk memasukkan dalam sosiologisnya cara orang melakukan persepsi dan mengkonstruksi “dunia sosial” berdasarkan posisinya di tempat sosial. Akan tetapi, persepsi dan konstruksi yang terjadi di dunia sosial digerakkan ataupun dikekang oleh struktur.

Secara umum, Bourdieu menganggap sistem pendidikan sangat



terlibat dalam mereproduksi hubungan kekuasaan dan kelas yang ada. Dalam gagasannya tentang kekerasan simbolislah aspek politis karya Bourdieu dapat dianggap yang paling jelas. Bourdieu sendiri sangat tertarik terhadap kebebasan orang dari kekerasan, dari dominasi kelas, dan dominasi politik (Pastone, Li Pum, dan Calhoun, 1993: 6).

Pada sisi lain, Bourdieu juga dikenal sebagai “sosok pembangkang” dalam bidang politik dan kultural, sehingga berusaha dengan sekuat tenaganya untuk “menghilangkan budaya dominasi” dalam setiap bidang kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Bourdieu menolak teori murni yang kurang memiliki dasar empiris, tetapi ia juga mencemooh empiris murni yang dilakukan dalam kekosongan atau ketiadaan teoretis. Melainkan, dia menganggap bahwa penelitian yang empiris dan teoretis tidak dapat dipisahkan (penelitian tanpa teori adalah buta, dan teori tanpa penelitian adalah hampa) (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 162).

Akhirnya, dapat dikemukakan bahwa dalam karya Bourdieu terdapat sumber pengaruh teoretikus lainnya, khususnya pengaruh Weber dan Emile Durkheim. Akan tetapi, Bourdieu sendiri menolak disebut Marxian, Weberian, Durkheimian, atau yang lainnya. Dia menganggap sebutan seperti itu membatasi, terlalu menyederhanakan, dan melakukan kekerasan terhadap karyanya. Memang, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, Bourdieu telah mampu menyumbangkan gagasan-gagasannya dalam “dialog kritis” sejak ia masih mahasiswa sampai kini.

## **F. JAQUES DERRIDA<sup>6</sup>**

### **1. Konteks Sosio-Politik yang Melatarbelakangi Teori**

Konteks sosiopolitik yang melatarbelakangi lahirnya teori dekonstruksi postmodernisme diawali munculnya postmodernisme, ketika masyarakat dunia diwarnai pluralisme serta kemacetan berbagai sistem dalam masyarakat. Postmodernisme lahir sebagai suatu akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas metanarasi. Ketidakpercayaan itu

<sup>6</sup> Tulisan ini merupakan sumbangan dari Andiopenta Purba, Kandidat Doktor Ilmu Sosial Unair.



merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diwariskan oleh kemodernan telah ketinggalan zaman, kehilangan fungsinya, dan bahkan lenyap.

Konteks sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya teori dekonstruksi-postmodern adalah adanya kias *fin-de-sicle* dan periode sejarah lainnya yang mengalami krisis besar dan traumatis, khususnya di Eropa Barat. Postmodernisme pertama kali dikenal tahun 60-an, dalam kritik yang dikembangkan oleh teoretikus sastra Amerika terhadap budaya tinggi dan masuknya modernisme dalam arus utama. Dalam hal ini kritik postmodernisme Amerika terhadap dampak industri budaya yang berada dalam hubungan kesamaan dan kontinuitas dengan perintis Eropa yang lahir lebih awal.

Sekitar abad ke-16 hingga 20, (zaman postmodern), istilah modern tampak mirip dengan borjuisme atau kehidupan kelas menengah. Masyarakat Barat menjadi modern setelah mereka berhasil dalam borjuisme. Zaman postmodern sedang menanti kelas menengah modern yang makmur, senang, dan puas (tidak hanya menggerakkan sistem industri Barat, kehidupan modern yang aman dan memuaskan).

Di samping itu, konteks sosiopolitik di Perancis juga ikut memengaruhi lahirnya teori dekonstruksi-postmodern. Ketika itu di Perancis, kebudayaan postmodern melibatkan percampuran yang canggih antara “*kitsch culture*” dan “*houte culture*.”

## 2. Realitas Sosial yang Melahirkan Teori

Realitas sosial yang melatarbelakangi dan melahirkan teori dekonstruksi sistem-postmodernisme berawal dari gagalnya modernitas. Lyotard memberi contoh gagalnya modernitas dengan “*Auschwitz*” lambang pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi. Peristiwa pembantaian itu menghancurkan rasionalitas pada masyarakat. Padahal, Hegel yang termasuk tokoh modernisme mengatakan, bahwa segala sesuatu yang rasional dan segala sesuatu yang irasional adalah *real*. Pandangan ini mengandung arti, bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dimengerti. Namun demikian, peristiwa pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi, tidak dapat dimengerti dan memusnahkan



totalisasi Hegel.

Contoh lain adalah runtuhnya sosialisme. Sosialisme sebagai suatu kisah besar yang berperan penting dalam zaman modern, tetapi akhirnya tidak memikat lagi. Robohnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet dapat dilihat sebagai suatu kejadian postmodern yang khas. Proyek modernitas yang mengambil kesatuan sebagai idealnya telah diganti oleh keadaan yang terpecah belah.

Konsep postmodernisme pertama kali muncul dalam konteks sastra, yang berkenaan dengan reaksi konservatif dalam modernisme. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam hubungannya dengan rangkaian teks dan sensibilitas yang lebih luas, untuk menyifati teks atau narasi yang bersifat afirmatif dan kritis untuk menilai periode sejarah dan corak estetis, dan untuk menkonsepsikan perbedaan bentuk khas di luar yang modern sebagaimana kesamaan berbagai varian yang sebenarnya menjadi batas modernisme itu.

Dalam teori dan kritik sastra, dinyatakan bahwa bukti berubahnya teori dapat memberi arti menurunnya tingkat kreativitas seni dan sastra. Di samping itu, postmodernisme digambarkan sebagai kulminasi logis dari janji-janji tradisi romantis-modernis, sebagai kecenderungan reaksioner yang meningkatkan dampak masyarakat teknokratis dan birokratis.

### 3. Arus Pemikiran Intelektual yang Memengaruhi Teori

Dekonstruksi yang dikemukakan Derrida diawali dari pemikiran Jean Francois Lyotard, yang mengungkapkan tentang konsekuensi dari semantika pascastrukturalis dan dekonstruksionisme terhadap rasionalisme Barat. Di samping itu, Derrida juga dipengaruhi dan bahkan dapat dikatakan mengambil pemikiran Ferdinand de Saussure tentang *signifie* dan *signifiant* dalam upaya mendekonstruksikan teks.

Derrida juga sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas tentang modernitas sebagai proyek yang belum selesai. Kemudian juga, Derrida mengambil pemikiran Max Weber tentang sifat proses modernisasi Hegel mengenai rasionalitas, Arnold Toynbee dengan *Study in History* sebagai acuan dari pemikiran postmodernisme.



#### 4. Latar Belakang Pribadi dan Sosial

Jacques Derrida lahir di Aljazair, 1930, tetapi sudah menjadi warga Perancis dan akhirnya terkenal dengan filsuf Perancis. Sejak tahun 60-an, Derrida telah mulai menulis, dan sekitar tahun 70-an, Derrida menjadi terkenal karena tulisan-tulisannya sangat sulit dipahami. Berbagai tulisannya yang diterbitkan dalam bahasa Perancis pun, orang Perancis sangat kesulitan untuk memahaminya.

J. Derrida memperoleh pendidikan di Ecole Normale Superieure at Ulm, dan sekarang menjadi profesor di bidang filsafat di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Paris Perancis. Derrida sampai ke Amerika Serikat memperkenalkan teorinya dekonstruksi bahasa di Universitas Harvard, Irvine, dan Cornell.

#### 5. Fenomena Sosial yang Hendak Dijelaskan

Postmodern mempertajam kepekaan kita terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan untuk menoleransi segala sesuatu yang tidak bisa diukur. Postmodernisme membangkitkan kesadaran manusia akan kompleksitasnya kehidupan. Usaha mensistematisasi kehidupan tidak diperlukan lagi. Postmodernisme mengajukan dekonstruksi sistem kehidupan. Postmodernisme mau membongkar kesombongan mentalitas modernisme yang hendak memahami segala sesuatu dengan sistem.

Menurut postmodernisme, bahwa penciptaan makna ideal yang dilakukan oleh modernisme telah gagal. Penciptaan makna ideal itu telah meminta banyak korban, seperti halnya korban pembantaian enam juta orang Yahudi oleh Nazi. Postmodernisme memproklamasikan pluralitas, dekonstruksi sistem kehidupan, dan kesadaran-kesadaran sistem moral, politik, budaya, agama baru yang tidak bisa direduksi pada keseragaman. Pengakuan keanekaragaman membuat kehidupan lebih berarti dan manusiawi. Inilah fenomena yang ingin dijelaskan dekonstruksi postmodernitas.

Di samping itu, fenomena sosial seperti bahasa, sastra, budaya juga dijelaskan dalam postmodern. Melalui bahasa, tampaknya realitas sosial dapat diubah. Dekonstruksi dari Derrida tampaknya berusaha





membongkar teks-teks filosofis yang dapat mengungkapkan realitas sosial.

Gerakan feminisme termasuk juga fenomena sosial yang ingin dijelaskan oleh postmodern, seperti Lieteke Van Vuchf Tijssen dalam artikelnya “Perempuan, antara Modernitas dan Postmodern,” ingin menjelaskan bagaimana politik dan eksistensi perempuan pada masa modernitas dan postmodernitas.

## 6. Jenis Penjelasan yang Ditawarkan

Derrida menjelaskan teorinya melalui dekonstruksi sistem. Dekonstruksi berarti “*de-construct*,” yakni pembongkaran dalam arti dan tujuan membongkar kembali suatu teori yang dianggap kurang benar atau kurang tepat, maupun kurang relevan dan bahkan tidak relevan lagi dengan zamannya. Dekonstruksi bukan berarti pembongkaran dalam tujuan menghancurkan.

Derrida memandang bahwa pada modernisme pemikiran-pemikiran terstruktur secara opositif, yaitu struktur yang mempertentangkan dua hal. Berarti dua hal tersebut ada yang disingkirkan dan ada yang diistimewakan. Dengan demikian, pola berpikir terstruktur seperti ini berarti ada dominasi. Oleh karena itu, perlu ada pembongkaran kembali terhadap pola pikir yang terstruktur itu.

Derrida juga menjelaskan dekonstruksi itu melalui tradisi linguistik Perancis, secara khusus Derrida mengambil isu melalui asosiasi dari Ferdinand Daussure yang menyatakan tentang suatu ujaran (bahasa) ditandai adanya *signifier* (bunyi ujaran/bahasa) dan *signified* (makna dari ujaran/bahasa itu). Derrida berupaya untuk mendemonstrasikan sebuah proses dekonstruksi dari teks. Suatu teks memiliki sebuah sub-teks yang dapat dibaca, di mana teks tersebut bertentangan tetapi saling melengkapi posisinya masing-masing. Dengan demikian, melalui dekonstruksi teks-teks tersebut dapat dibongkar dan dibentuk sebuah teks. Melalui teks-teks filosofis itulah, Derrida berusaha untuk mengungkap berbagai realitas sosial yang hendak dikaji.

Derrida berpendapat bahwa pemikiran modernisme itu terstruktur secara opositif, berada pada struktur yang mempertentangkan dua



hal, misalnya: kaya-miskin, baik-jahat, dan pria-wanita. Posisi pertama selalu dianggap lebih baik daripada yang kedua. Dengan demikian, struktur antara kedua hal tersebut telah menunjukkan sikap adanya pengistimewaan dan penyingkiran. Akhirnya, struktur tersebut telah melahirkan adanya pengakuan terhadap makna dalam arti ada yang ideal. Makna ideal inilah yang diharapkan untuk dikejar.

Derrida tidak menyangkal adanya struktur pertentangan (oposisi), namun ia menolak adanya hierarki prioritas. Sebab setiap pemberian prioritas sama dengan pendindasan (dominasi) oleh yang satu terhadap yang lain. Dengan menyangkal adanya prioritas dalam struktur opositif, berarti Derrida menolak adanya makna ideal. Makna ideal itu hanyalah ilusi.

Inti dekonstruksi Derrida terletak pada usaha untuk membongkar struktur opositif yang telah menyebabkan munculnya makna ideal. Derrida tidak menolak makna sebagai makna, tetapi menolak prioritas, dominasi, klaim yang menyebabkan adanya makna ideal, struktur yang menyebabkan makna ideal inilah yang ingin dibongkar.

Metafisika modernisme melihat makna ideal dapat dimengerti dalam dirinya sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain untuk menjelaskan dirinya sendiri. Menurut Derrida, “ada” itu tidak mungkin dimengerti dalam dirinya secara sempurna. Ia membutuhkan segala sesuatunya untuk menjelaskan dirinya. Makna “ada” yang dilihat sebagai kebenaran tidak mungkin dipahami dalam dirinya sendiri, membutuhkan hal-hal lain untuk menjelaskan dirinya sendiri. Makna ideal itu ternyata sebagai suatu kebenaran. Pemikiran seperti ini sudah terstruktur, sehingga setiap kali menghendaki apa yang dikira sebagai suatu kebenaran, maka struktur itu harus dibongkar.

## 7. Jenis Realitas Sosial yang Dikaji (Objektif vs. Subjektif)

Derrida memfokuskan persoalan yang dikajinya secara objektif dalam dunia postmodern, melalui tradisi linguistik Perancis. Secara khusus, ia mengambil isu melalui asosiasi dari Sausure, yakni antara *signifier* (bunyi) dan *signified* (makna dari yang disuarakan). Derrida mendemonstrasikan sebuah proses dekonstruksi dari teks (bahasa).



Suatu teks mempunyai sebuah subteks yang dapat dibaca yang bertentangan dan melengkapi posisinya sendiri. Melalui dekonstruksi, ia mengungkapkan berbagai ragam teks filosofis sebagai dekonstruksi dari suatu kebenaran realitas secara objektif.

Postmodernisme mengedepankan pandangan bahwa berbagai lapangan atau spesialisasi dalam ilmu merupakan strategi utama atau kesepakatan di mana realitas bisa dibagi, terbuka sebagai akibat dari upaya yang serius untuk mencapai kebenaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam mencapai kekuasaan. Pandangan ini secara khusus menjelaskan sentralisasi tesis Nietzsche, bahwa: pencarian kebenaran selalu berarti membangun kekuasaan. Secara objektif, penekanan Nietzsche terhadap sifat arbitrer dari struktur argumen dan retorika bahasa, tetap merupakan bagian yang penting sebagai senjata kritik dekonstruktif postmodernisme. Perspektif Nietzsche telah memberikan landasan bagi penekanan kontemporer dalam tekstualitas kehidupan, dalam kehidupan sebagai sastra.

Secara subjektif, realitas sosial yang dikaji dalam postmodern ini adalah tentang kebudayaan postmodern yang merupakan produk budaya dari kelompok orang muda dan kaya yang menikmati keberhasilan sosial yang begitu besar selama masa 80-an, pada saat keuangan mengalami *booming*. Postmodernisme cenderung menempatkan kebudayaan postmodern dalam konteks kapitalisme yang tidak terorganisasi, masyarakat konsumen, dan produksi budaya massa.

Di samping itu, pada era postmodern ini, kultur, nilai-nilai, maupun norma secara subjektif dibiarkan pluralis dan tidak direduksi pada keseragaman. Pengakuan akan keberagaman membuat kehidupan lebih berarti dan manusiawi.

Secara objektif terlihat bahwa postmodernisme mengkaji realitas sosial yang menggambarkan postmodernisme sebagai komunikasi logis dari janji-janji romantis modernis, sebagai kecenderungan reaksioner yang meningkatkan dampak masyarakat teknokratis dan birokratis.

## 8. Lingkup Realitas Sosial yang Dikaji (Makro-Mikro)

Dalam skop makro, lingkup sosial yang dikaji dalam postmodern



meliputi berbagai sistem moral, politik, budaya, dan agama. Namun demikian, dalam mengkaji persoalan atau realitas sosial itu, secara makro Derrida berusaha mengadakan dekonstruksi, di mana semua realitas sosial itu harus plural. Realitas sosial itu tidak dapat direduksi sebagai sesuatu yang seragam, tetapi didekonstruksi sehingga tetap beraneka ragam. Keanekaragaman itu akan membuat kehidupan menjadi lebih berarti dan manusiawi.

Secara mikro, lingkup realitas sosial yang dikaji adalah pola tingkah laku, tindakan interaksi sosial, serta berbagai konstruksi tentang realitas sosial. Realitas sosial yang tampak direkonstruksi oleh Derrida adalah pola tingkah laku orang muda dan kaya yang menikmati keberhasilan sosial yang begitu besar selama masa 80-an. Di samping itu, realitas sosial dalam skop mikro, seperti kedudukan struktural cendekiawan. Dengan demikian, teori sosiologi postmodern tampaknya lebih banyak mengkaji lingkup realitas sosial dalam skop sosiologi mikro.

## 9. Lokus Realitas Sosial yang Dianggap Otonom (Agency vs. Struktur)

Sebagaimana dinyatakan oleh Derrida, pemikiran modernisme terstruktur secara opositif, yaitu struktur yang mempertentangkan dua hal. Struktur tersebut telah membentuk pengistimewaan dan penyingkiran. Struktur tersebut telah menyebabkan adanya pengakuan perbedaan antara dua hal tersebut. Derrida tidak menyangkal adanya struktur pertentangan (oposisi), namun ia menolak adanya hierarki prioritas. Sebab setiap pemberian prioritas sama dengan penindasan (dominasi) oleh yang satu terhadap yang lain. Oleh karena itu, lokus realitas sosial yang dianggap otonom adalah *agency*. *Agency* harus otonom dalam struktur tersebut. Individu sebagai salah satu bagian dari struktur itu harus otonom dan berdiri sendiri, tidak merupakan sesuatu yang hierarki, suatu individu lebih tinggi atau lebih penting dari yang lain. Struktur juga tidak dapat menekankan individu sebagai *agency* pembangun struktur tersebut. Dengan demikian, fokus perhatian kajian lokus realitas yang dianggap otonom adalah *agency*.

Adanya otonom pada individu sebagai *agency* dalam suatu struktur inilah yang diharapkan Derrida. Dengan demikian, Derrida bermaksud



mengadakan dekonstruksi pada struktur opositif. Ia ingin membongkar struktur opositif tersebut, yang dapat melahirkan prioritas, dominasi, dan penindasan lainnya. Dengan demikian, agency merupakan fokus kajian dari teorinya, karena lokus realitas sosial yang dianggap otonom. Tanpa ada individu struktur tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membiarkan struktur yang opositif, tanpa individu struktur itu tidak akan terbentuk. Semua individu dalam struktur tersebut sama kedudukannya, tidak ada prioritas tertentu, tidak ada perbedaan, dan tidak ada dominasi.

### 10. Lokus Penjelasan (Body vs. Mind)

Munculnya postmodern diawali ketika dunia diwarnai oleh pluralisme dan kemacetan berbagai sistem dalam masyarakat. Postmodern diperkenalkan oleh Jean Francois Lyotard, yakni sebagai suatu ketidakpercayaan atau kemurtadan atas metanarasi. Ketidakpercayaan ini adalah produk dari kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diwariskan kemodernan telah ketinggalan zaman, dan kehilangan fungsinya. Manusia tidak percaya lagi pada kemungkinan proyek modernitas. Lyotard memberi contoh gagalnya modernitas dengan “*Auschwitz*” dan runtuhnya sosialisme.

Robohnya tembok Berlin dan runtuhnya Uni Soviet dapat dilihat sebagai suatu kejadian postmodern yang khas. Memerhatikan kenyataan-kenyataan atau hal yang terjadi itu, lokus penjelasan yang dianggap independen adalah “*body*”, yakni hal-hal yang empiris, kenyataan atau fakta yang tampak, serta materi dijadikan sebagai dasar lokus penjelasan teori.

*Body* sebagai lokus penjelasan yang independen dalam teori postmodern adalah seperti yang dikemukakan Featherstone (1987), yang menyatakan bahwa kebudayaan postmodern merupakan produk budaya dari kelompok orang muda kaya yang menikmati keberhasilan sosial yang begitu besar selama masa 80-an, ketika kauangan mengalami *booming*. Demikian juga Bauman (1988) mengatakan, bahwa sosiologi postmodern berupaya untuk melihat dan memahami sifat dari krisis masa kini melalui analisis, misalnya terhadap kedudukan struktural



cendekiawan, serta mencoba mendekonstruksikan asumsi-asumsi dasar tersebut dan menganggap yang sosial sebagai problematis.

Derrida dalam dekonstruksinya banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir terdahulunya, seperti pada dekonstruksi bahasa yang ia asosiasikan dari ahli linguistik Ferdinand Dessausure, yakni *signifier* (bunyi bahasa) dan *signified* (makna dari bunyi bahasa itu). Kemudian ia berupaya mendemonstrasikan sebuah proses dekonstruksi dari teks, dan akhirnya Derrida berusaha juga mengungkap berbagai kebenaran realitas dari teks-teks filosofis. Dengan demikian, Derrida juga menggunakan *body* sebagai lokus penjelasan yang dianggap independen sebagai sumber penjelasan. Namun demikian, Derrida juga sebenarnya menggunakan *mind* sebagai lokus penjelasan teorinya, terutama dalam hal dekonstruksi yang dicetuskannya.

### 11. Bias Kekuasaan yang Dikandung Teori

Bias kekuasaan yang dikandung teori dekonstruksi postmodern adalah pembongkaran struktur opositif yang menyebabkan munculnya makna ideal. Adanya struktur pertentangan (oposisi) memang diakui Derrida, tetapi tidak sampai melahirkan penguasaan, dominasi, prioritas yang melahirkan makna ideal.

Bias nilai dari teori dekonstruksi-postmodern ini adalah menciptakan pluralitas dan dekonstruksi sistem kehidupan serta kesadaran sistem moral, politik, budaya, agama baru yang tidak bisa direduksi pada keseragaman. Pengakuan akan keanekaragaman menjadikan kehidupan manusia lebih berarti dan manusiawi.

Bias kepentingan teori dekonstruksi-postmodern ini menunjukkan adanya dukungan positif terhadap perkembangan serta mempertajam kepekaan manusia terhadap perbedaan, serta memperkuat kemampuan untuk menoleransi segala sesuatu yang tidak bisa diukur. Dekonstruksi-postmodern ini memberikan dukungan kepada manusia, bahwa prinsipnya bukan kesamaan (homologi) para ahli, melainkan yang diharapkan adalah keanekaragaman (paralogi) penentu. Di samping itu, dekonstruksi-postmodern ini memberikan dukungan terhadap pengembangan ilmu sosiologi, khususnya sosiologi postmodern.



Sosiologi postmodernisme yang tetap mempertahankan gagasan tentang hubungan sosial dan berupaya menjadikan yang kabur menjadi jelas. Bauman (1988: 231), melihat bahwa analisis sosiologi tentang postmodernitas yang berupaya untuk mempertahankan harapan dan ambisi modernitas, harus mengakui bahwa strateginya didasarkan pada nilai, asumsi, dan tujuan bukan hukum.



# BAB 11

## TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS<sup>1</sup>

---

### A. DASAR PEMIKIRAN TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDENS

Sejarah pemikiran ilmu sosial dibentuk oleh perdebatan dua kubu teoretis besar. Kubu pertama mengajukan prioritas pemikiran bahwa gejala keseluruhan di atas pengalaman pelaku perorangan (fungsionalisme, strukturalisme, dan fungsionalisme-strukturalisme). Pemikir kubu pertama ini, di antaranya Karl Marx, Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Louis Althusser. Kubu kedua mengajukan prioritas tindakan pelaku perorangan di atas gejala keseluruhan. Kubu kedua ini terdiri dari beberapa pemikiran seperti fenomenologi, etnometodologi, dan psikoanalisis. Mereka itu antara lain: Irving Goffman, Alfred Schuts, Harold Garfinkel, dan dalam hal tertentu juga Max Weber.

Kedua kubu besar dalam ilmu sosial tersebut telah terbelah secara ekstrem. Dalam fungsionalisme Parsons misalnya, pelaku dan tindakan perorangan tidak lebih dari sekadar boneka atau robot dari peran-peran sosial, entah fungsi sosial itu disebut buruh, direktur, istri, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam perspektif fenomenologi struktur cenderung menjadi sekadar lampiran dari pengalaman pribadi orang perorangan (Priyono, 1999: 48).

---

<sup>1</sup> Tulisan ini tidak lain merupakan kompilasi dari tulisan Ramlan Surbakti, "Hasil Pemilu 1992 dalam perspektif Strukturalisme" Laporan Hasil Penelitian (Surabaya, FISPOL Unair, 1995), dan tulisan Nyoman Subanda, "Kepemimpinan Lokal di Bali, (Surabaya: PPs Unair, 2001), serta beberapa tulisan di Basis Edisi Khusus Anthony Giddens, No. 01 dan 02 tahun ke-49 Januari-Februari 2000.



Menurut Giddens, perkara sentral ilmu sosial ialah “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.” Dalam masyarakat, karena tidak ada praktik sosial tanpa tindakan beberapa orang, maka tindakan pelaku (*agency*) tidak mungkin diabaikan oleh ilmu sosial. Giddens memberikan contoh bahwa tidak mungkin ada ke-diktatoran tanpa ada tindakan otoriter seseorang atau beberapa diktator.

Keterulangan “tindakan sosial” itu menunjukkan bahwa ada pola tetap yang berlaku, bukan sekali saja, melainkan berulang kali dalam lintas ruang dan waktu. Berdasarkan argumen di atas, maka Giddens menekankan bahwa perkara sentral ilmu sosial adalah hubungan antara “struktur” (*structure*) dan “pelaku” (*agency*). Karena gagasannya tentang hubungan antara struktur dan pelaku inilah, maka Giddens lebih dikenal dengan teori “strukturasinya,” yang banyak diartikan sebagai proses terbentuknya sebuah struktur (*ibid*).

Menurut Giddens, manusia selalu mempunyai ide tentang dunia sosial, tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya, dan tentang kondisi kehidupannya. Melalui idenya itu manusia masuk ke dalam dunia sambil mempunyai niat untuk memengaruhi dan mengubahnya. Dunia modern dicirikan oleh tumbuh dan berkembangnya refleksivitas. Hidup kita semakin hari semakin sedikit ditentukan oleh kepastian dan ketentuan tradisi. Kita mengambil keputusan karena refleksivitas. Risiko menjadi sebuah keniscayaan. Jadi, yang terpenting bukan menghindari risiko, melainkan manajemen risiko. Giddens mengajak kita untuk mengolah tantangan baru dengan cara yang baru pula. Resep untuk mengatasi masalah yang timbul karena peradaban masyarakat industri harus dengan cara meradikalkan dan mengembangkan modernitas secara lebih dinamis.

Menurut Giddens, ada paralelitas antara perspektif strukturalis dan fungsionalis, yaitu pengebawahan pelaku dan tindakan pelaku pada totalitas. Pelaku, tindakan pelaku, waktu, ruang, dan proses adalah soal kebetulan. Ia mengkritik bahwa perspektif ini merupakan penolakan yang penuh skandal pada subjek. Gejala penyingkiran subjek dalam strukturalisme ini dibawa ke implikasi terjuahnya oleh para penggagas *post*-strukturalisme.



Objektivitas struktur sosial dalam fungsionalisme ataupun strukturalisme bersifat berposisi dan mengekang pelaku, sedangkan menurut Giddens objektivitas struktur tidak bersifat eksternal, tetapi tidak terpisah dari tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Struktur bukanlah benda, melainkan skemata yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial (Giddens, 1984). Di samping hal tersebut, teori strukturisasi juga merupakan teori hasil sintesis dari pemikiran teoretisi besar seperti: Emile Durkheim sehingga Giddens oleh Etzhowitz dan Glassman disebut neo-Durkheim; Max Weber sehingga Giddens menyebut Giddens neo-Weberian; dan Karl Marx sehingga Giddens menganggap dirinya berhutang budi pada Marx (Lihat: Etzhowitz & Glassman, 1991: 50; Grabbs, 1990: 172; atau Subanda, 2002: 19).

Karena teori strukturisasi merupakan sintesis dari beberapa pemikiran teoretisi besar, maka teori strukturisasi dianggap merupakan hasil penyempurnaan dari berbagai teori, seperti fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, hermeneutik, serta strukturalis dan sekaligus berdampak pada rumitnya teori strukturisasi (Grabbs, 1990: 182-183).

Teori strukturisasi oleh Giddens diikatkan suatu label untuk meletakkan kepeduliannya dalam upaya mengembangkan suatu kerangka pemikiran ontologis bagi kepentingan pengkajian terhadap aktivitas sosial manusia. Giddens juga mengkaji hakikat tindakan manusia, institusi sosial, dan hubungan antara tindakan dan institusi (Giddens, 1991: 201).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa teori strukturisasi bukanlah hermeneutika, bukan pula sosiologi interpretatif, meskipun teori strukturisasi sangat sadar pentingnya tata bahasa. Teori strukturisasi bukanlah sosiologi struktural, meskipun strukturisasi mengakui bahwa masyarakat bukanlah hasil ciptaan subjek-subjek individual. Wilayah dasar strukturisasi bukanlah aktor individual, bukan pula totalitas masyarakat, melainkan praktik sosial yang terpolakan dalam lintas ruang dan waktu. *Teorem* dualitas sangat sentral bagi gagasan strukturisasi.



## B. DUALITAS STRUKTUR

Para teoretisi fungsionalisme cenderung mengartikan struktur sebagai “pola” hubungan sosial ataupun fenomena sosial, sedangkan para strukturalis dan *post*-strukturalis menggambarkan struktur sebagai perpotongan antara kehadiran dengan ketidakhadiran. Sepintas kedua konsep struktur ini tampak tidak berkaitan, tetapi bila dicermati lebih jauh tampak saling hubungan pada aspek-aspek yang di dalam strukturasi ditangkap dengan memahami perbedaan antara konsep struktur dan sistem. Dalam menganalisis hubungan sosial, hendaknya dibedakan antara dimensi “*syntagmatics*,” yaitu pemulaan hubungan sosial dalam ruang dan waktu yang melibatkan reproduksi praktik-praktik sosial; dan dimensi “*paradigmatik*,” yaitu aturan “*modes of structuring*” yang ada di dalam reproduksi tersebut. Dalam teori strukturasi, struktur diartikan sebagai peraturan dan sumber daya. Struktur dipandang sebagai penstrukturan sifat-sifat yang memungkinkan pengikatan ruang-waktu dalam sistem sosial, sifat yang memungkinkan praktik sosial sejenis ada pada berbagai ruang dan waktu, dan yang memberikan bentuk sistematis (Surbakti, 1995: 44-45).

Dalam teori strukturasi, Giddens pada dasarnya menolak dualisme subjek dan objek, agensi dan struktur, serta struktur dan proses, yang selama ini telah dipandang sebagai dualisme tersebut, oleh Giddens dikoreksi, yaitu dengan memunculkan istilah dualitas. Dengan koreksi yang dimaksudkan itu, Giddens (1985: 2) mengidami berakhirnya “*imperialisme*” yang saling berlawanan antara kutub subjektivisme (sosiologi interpretativisme) dan kutub objektivisme (sosiologi sosiologisme).

Dualitas struktur pada dasarnya memandang struktur dan individu-aktor berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil (*outcome*) dan struktur, tetapi aktor juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru (Surbakti, 1995: 45). Berkaitan dengan hal itu, secara padat dinyatakan oleh Giddens (2004: 25):

*The constitution of agents and structures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but represent a duality. According to the notion of the duality of structure, the structural proper-*



*ties of social systems are both medium and outcome of the practices they recursively organize. Structure is not 'external' to individuals; as memory traces, and as instantiated in social practices, it is in a certain sense more 'internal' than exterior to their activities in Durkheimian sense. Structure is not to be equated with constraint but is always both constraining and enabling.*

Struktur itu sendiri, oleh Giddens dipandang sebagai aturan-aturan (*rules*) dan sumber-sumber (*resources*). Aturan-aturan dimaksud bisa bersifat konstitutif dan regulatif, guna memberikan kerangka pemaknaan (*interpretative scheme*) dan norma. Adapun sumber menunjuk pada distribusi sumber alokatif (ekonomi) dan sumber otoritatif (politik), yang terkait secara langsung dengan soal *power* (Faisal, 1998: 65-66). Berkenaan konsep struktur, sebagian aturan dan sumber tersebut dikonseptualisasikan oleh Giddens (1984: xxi):

*Structure can be conceptualised abstractly as two aspects of rules normative elements and codes of signification. Resources are also of two kinds; authoritative resources, which derive from the coordination of the activity of human agents, and allocative resources, which stem from control of material products or of aspects of the material world.*

Jika kita bertanya, apakah struktur dalam pandangan Giddens mempunyai bentuk tertentu yang bisa dilihat secara kasatmata? Maka, jawabnya pastilah 'tidak'. Struktur dalam hal mirip skema yang bersarang dalam memori kita mengatasi waktu dan ruang, sehingga tidak kasatmata dan hanya tampak dalam praktik-praktik sosial. Struktur berupa skemata mirip "aturan" yang menjadi prinsip berlangsungnya praktik-praktik sosial (Subanda, 1991: 22).

Sama seperti tata bahasa (kaidah-kaidah bahasa), akan menciptakan ungkapan dan kalimat yang baik dan kalimat yang buruk ini akan membentuk bahasa, demikian pula struktur yang berisi peraturan dan sumber daya akan memberi kendala dan peluang bagi aktor untuk bertindak, dan berdasarkan peraturan dan sumber daya itu aktor akan menghasilkan kembali institusi dan hubungan-hubungan sosial (struktur) dalam masyarakat (Surbakti, 1995: 45).



Penting dicatat bahwa struktur tidak hanya menimbulkan kendala (*constraint*) bagi tindakan manusia, tetapi juga menimbulkan peluang bagi manusia untuk bertindak atas kehendak sendiri. Secara operasional, struktur yang melahirkan aturan dan sumber daya dapatlah dijabarkan ke dalam tiga bentuk kendala (Giddens, 1984: 174-175). *Pertama*, semua tipe peraturan yang digunakan sebagai alat menginterpretasi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh aktor, dan benda-benda yang dihasilkannya. Peraturan yang bersifat semantik ini berfungsi sebagai komunikasi makna. Bentuk yang pertama ini merupakan unsur-unsur struktural, seperti tata simbol dan dimensi-dimensi politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini merupakan kendala objektif bagi individu-aktor.

*Kedua*, semua tipe peraturan yang digunakan oleh aktor sebagai norma untuk mengevaluasi tingkah laku. Peraturan yang bersifat moral ini berfungsi sebagai evaluasi dan penilaian tingkah laku. Kendala ini dapatlah disebut sebagai sanksi-sanksi negatif terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan struktur.

*Ketiga*, semua fasilitas dan sumber daya materiel dan nonmateriel yang mungkin digunakan oleh aktor dalam suatu interaksi, mulai dari penguasaan keterampilan berbicara sampai pada penerapan sarana-sarana kekerasan. Sumber daya ini akan memberikan kemampuan melakukan transformasi (kekuasaan). Namun, tidak setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan tersebut. Perbedaan akses terhadap kekuasaan inilah yang membatasi kemampuan aktor memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang berarti (Surbakti, 1995: 46-47).

Sebagian besar peraturan yang terlibat di dalam produksi dan reproduksi praktik sosial dipahami oleh para aktor. Mereka mengetahui bagaimana harus bertindak. Formulasi diskursif dari sebuah peraturan sudah merupakan interpretasi dari peraturan tersebut, dan interpretasi itu sendiri mengubah bentuk aplikasinya. Di antara peraturan yang tidak hanya dirumuskan secara diskursif, tetapi juga dikodifikasi secara formal adalah undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu tipe peraturan sosial yang menerapkan sanksi, namun demikian akan merupakan kesalahan besar bila meremehkan kekuatan sanksi



yang dikenakan secara informal dalam hubungannya dengan praktik sehari-hari.

Kendala-kendala ini bekerja sesuai dengan konteks tindakan (Giddens, 1979: 56). Sebagai kendala ini sukar diubah, seperti peranan gender, sebagian lagi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengubahnya, seperti distribusi penduduk, dan sebagian lagi dapat diubah dalam waktu yang relatif cepat, seperti peraturan perpajakan. Di samping itu, sebagian kendala mungkin hanya muncul ketika hendak bertindak sesuatu, sedangkan sebagian lainnya sebagian kendala itu justru memberi peluang bagi aktor bertindak. Pada suatu kasus, pada peringkat tertentu kendala itu membatasi tindakan, tetapi pada peringkat lain justru membuka peluang bagi individu untuk bertindak (Surbakti, 1995: 43).

Teori ini menempatkan manusia tidak sekadar penanggung beban struktur ekonomi-politik. Individu-aktor juga tidak dilihat sekadar makhluk yang selalu menyesuaikan diri dengan atau mencari persetujuan dari sistem nilai utama, ataupun subkultur yang telah diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam motivasi. Individu-aktor memiliki pengetahuan mengenai masyarakatnya dan berdasarkan pemahaman itu bertindak untuk mengubah realitas sekelilingnya. Tetapi, ia tidak jatuh atau terjebak ke dalam kesalahan pendekatan hermenutik dan kesalahan fenomenologi yang cenderung menganggap masyarakat sebagai ciptaan subjek manusia dengan karakteristik seperti plastik (Surbakti, 1995: 48).

Menurut teori strukturasi, masa produksi aksi adalah juga masa reproduksi di dalam konteks penerapan kehidupan sehari-hari. Teori ini menganggap tidak akurat melihat sifat struktur sosial dari sistem sosial sebagai produk sosial, karena hal ini sama dengan mengatakan bahwa para aktor berkumpul untuk menciptakan mereka. Di dalam memproduksi sifat-sifat struktural, para agen juga mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan aksi tersebut dilakukan. Manusia agen selalu mengetahui apa yang mereka lakukan pada tingkat kesadaran diskursif di bawah deskripsi tertentu, tetapi mereka mungkin tidak dapat memahami apa yang mereka lakukan di bawah deskripsi



lain (Surbakti, 1995: 49).

Dualitas struktural pada gilirannya mensyaratkan pemantauan refleksi para agen di dalam aktivitas sosial sehari-hari. Aktor manusia tidak hanya memonitor aktivitasnya dan aktivitas orang lain di dalam keteraturan perilaku sehari-hari. Mereka juga dapat memonitor pemantauan tersebut dalam kesadaran diskursif. Skema-skema interpretatif merupakan “*modes of tyification*” yang dimasukkan ke dalam perbendaharaan pengetahuan para aktor yang kemudian dipakai secara reflektif di dalam komunikasi. Perbendaharaan pengetahuan yang digunakan para aktor di dalam produksi dan reproduksi interaksi adalah sama dengan perbendaharaan pengetahuan melalui mana mereka dapat membuat penjelasan, dan memberikan alasan (*ibid*).

Pengetahuan manusia selalu terbatas. Rangkaian aksi secara terus-menerus menghasilkan konsekuensi yang tidak disengaja oleh para aktor, dan konsekuensi ini juga dapat membentuk kondisi aksi yang tidak diakui dalam pola *feedback*. Sejarah manusia diciptakan oleh aktivitas yang disengaja, tetapi bukan merupakan sebuah proyek yang disengaja. Sejarah manusia menolak usaha menempatkan sejarah di bawah arah sadar. Tetapi usaha ini dilakukan secara terus-menerus oleh manusia yang beroperasi di bawah ancaman dan kondisi lingkungan.

Pengetahuan dan kemampuan itu dapat dilihat dalam stratifikasi kesadaran dan tindakan manusia berikut ini (Kilsminster, 1991: 79-80). *Pertama*, individu memiliki kemampuan memonitor dan merefleksikan setiap tindakan yang akan dilakukannya, sehingga dapat menerangkan kondisi-kondisi tindakan mereka sendiri (kesadaran diskursif). *Kedua*, individu melakukan rasionalisasi atas tindakannya, sehingga dapat mengetahui secara implisit kondisi-kondisi tindakannya walaupun mungkin tidak mampu merumuskannya secara jelas (kesadaran praktis). Dan *ketiga*, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi tertentu walau sebagian di antaranya mungkin tidak disadari karena tertekan di bawah sadar. Derajat pengetahuan dan keadaran ini tidak hanya tidak sama di antara individu, tetapi juga tidak sama di antara daerah dan negara.



Premis nilai yang tidak dinyatakan secara eksplisit dari pandangan tentang tindakan manusia seperti ini ialah martabat individu, ekspresi diri dan kebebasan harus dimaksimalkan terhadap dan di dalam parameter kelembagaan dan terhadap akses kekuasaan yang tidak sama. Proposisi seperti ini mungkin terlalu libertarian, tetapi bukankah memilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pilihan individual?

Secara singkat dualitas struktur dapatlah dirumuskan sebagai struktur yang melahirkan kendala dan peluang, berinteraksi dengan individu yang bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi. Individu bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi tertentu, sehingga dapat menggunakan peluang dan kemudahan yang tersedia, tetapi terkendala oleh struktur yang objektif pada satu pihak dan oleh ketidaksadarannya pada pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa antara struktur dan agensi bukanlah suatu dualisme, melainkan suatu dualitas. Struktur merupakan medium dari agensi, namun pada saat yang bersamaan juga sebagai *outcome* dari agensi. Agensi tidak sekadar mereproduksi struktur, tetapi juga memproduksi struktur. Atas dasar itu, Giddens memunculkan konsep dualitas struktur yang merupakan konsep sentral dalam teori strukturalisme.

### C. DUALISME SUBJEK-OBJEK

Perangkat konsep yang kedua ialah dualisme subjek-subjek (Giddens: 164-165). Dualisme ini pada dasarnya menyangkut orientasi individu terhadap struktur. Orientasi individu terhadap struktur dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, orientasi rutin-praktis, yaitu para aktor yang secara psikologis hanya mencari rasa aman dan berusaha menghindari akibat-akibat tindakan yang tidak disadari atau belum terbayangkan. Mereka ini hanya berperan sebagai penanggung beban struktur dan medium reproduksi struktur belaka. Sama sekali tidak ada upaya mempersoalkan, apalagi mengubah struktur tersebut. Orientasi seperti ini menempatkan dirinya sebagai objek dan objek. Sebagian besar rakyat pemilih di Indonesia mungkin termasuk ke dalam kategori ini.





*Kedua*, orientasi yang bersifat teoretis. Para aktor memiliki kemampuan memelihara jarak antara dirinya dan struktur masyarakat, sehingga ia memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur itu dan merespons apa yang dilahirkan dan ditimpakan struktur kepadanya. Kelompok masyarakat yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori ini ialah kelas menengah, kalangan terpelajar, dan orang-orang yang telah menarik pelajaran dari pengalaman masa lalu mengenai struktur.

*Ketiga*, orientasi yang bersifat strategik-pemantauan. Para individu tidak hanya mampu memelihara jarak antara dirinya dan struktur, tetapi juga berkepentingan atas apa yang dilahirkan struktur (karena itu terus-menerus memantau struktur), sehingga dengan sigap dapat menanggapi struktur tersebut. Kelompok-kelompok kepentingan seperti organisasi petani dan semacamnya termasuk ke dalam kategori ini. Karena mampu memelihara jarak antara dirinya (subjek) dan struktur (objek), orientasi kedua dan ketiga cenderung melahirkan dualisme subjek-objek (Surbakti, 1995: 51-52).

#### **D. KONTEKS RUANG DAN WAKTU**

Perangkat konsep yang ketiga ialah dimensi ruang dan waktu. Berkaitan dengan ruang dan waktu, dalam teori strukturasi Giddens memberi kritik terhadap beberapa teori sosial yang cenderung memperlakukan ruang dan waktu sebagai lingkungan (*environment*) tempat ketika suatu tindakan sosial dilaksanakan ataupun sebagai salah satu faktor tidak tetap (Giddens, 1998: 110-141). Padahal, menurut Giddens ruang dan waktu secara integral turut membentuk kegiatan sosial, sehingga teori strukturasi mengkorporasikan ruang waktu dalam jantung teori sosial. Jadi yang dimaksud dengan ruang (*space*) di sini bukan sekadar fisik melainkan ruang sosial (*social space*), yaitu interaksi manusia dengan ruang fisik, seperti pedesaan dan perkotaan, tempat kerja dan tempat tinggal, pasar tradisional dan pasar swalayan besar, kampus dan kantor birokrasi, dan lapangan yang mampu menampung massa yang besar dan gedung pertemuan berkapasitas terbatas. Dan yang dimaksud dengan waktu (*time*) di sini bukan sekadar sejarah kronologis melainkan pengalaman belajar dari peristiwa masa lalu,



seperti pemilihan pemula dan pemilih kerap, trauma politik, dan pendidikan politik pada masa lalu (Surbakti, 1995: 53). Giddens dalam teori strukturasi mengemukakan sebagai berikut:

*“Sifat-sifat struktural sistem sosial hanya ada sejauh bentuk-bentuk tingkah laku sosial direproduksi secara berkala melintasi ruang dan waktu. Strukturasi lembaga-lembaga dapat dimengerti dalam rangka bagaimanakah kegiatan-kegiatan sosial dapat menjadi ‘terentang’ melintasi jangkauan ruang-waktu yang lebar.”* (Giddens: xxi)

Giddens melihat kegiatan sosial “mencengkeram ruang—waktu” (*biting info space and time*) serta berada pada akar pembentukan, baik subjek maupun objek. Suatu konsep fundamental dalam teori strukturasi adalah “rutinitas” (*routinization*), karena yang rutin adalah dasar kegiatan sosial hari demi hari. Istilah “hari demi hari” mengungkapkan dengan tepat sifat rutinisasi yang diperoleh dalam kehidupan sosial selagi terentang melintas ruang-waktu (Giddens, 1984: xii-xiii). Dengan mengambil konsep waktu reversibel dari Levi-Strauss, Giddens membedakan tiga dimensi waktu, yaitu: *Pertama*, dari pengalaman hari demi hari: *reversible time*, hal ini berkenaan dengan keberlangsungan waktu pengalaman hari demi hari yang dapat dibalik, misalnya berangkat dari rumah-berada di jalan-sampai di pabrik-pulang dari pabrik-berada di jalan-sampai di rumah. *Kedua*, jangka waktu individual. *Irreversible time*. Hal ini berkenaan dengan rentang waktu kehidupan individu yang tidak dapat dibalik seperti yang digambarkan oleh Heidegger mengenai hidup manusia yang mengarah ke kematian (*zein-zum-tode*), yaitu lahir hidup mati. *Ketiga*, *Longue dugree* lembaga-lembaga: *reversible time* yang ketiga ini berkenaan dengan waktu keberlangsungan jangka panjang dan dapat dibalik dari lembaga-lembaga (Giddens, 1984: 435).

Konsep waktu tidak bisa dipisahkan dengan konsep ruang. Karena kontekstualitas kehidupan sosial menyangkut keduanya baik waktu maupun ruang. Untuk memahami ruang, Giddens lebih cenderung menggunakan konsep “memosisikan diri” (*positioning*) ketimbang istilah status. Hal ini didasarkan karena status berkonotasi lebih statis, sedangkan Giddens mempersoalkan segi-segi proses yang sifatnya



dinamis. Lebih lanjut, Giddens mengatakan bahwa sangat penting menyadari posisi tubuh (*positioning of the body*) untuk memahami ruang. Tubuh dipandang sebagai tempat kedudukan diri yang aktif (*the locus of the active self*) (Giddens, 1984).

Dalam berbicara tentang ruang, Giddens juga mengartikan ruang lebih sebagai lokal (*locale*) daripada sebagai tempat (*place*). Dalam konteks tempat (*place*), Giddens menawarkan konsep regionalisasi (*regionalization*). Konsep regionalisasi tersebut menunjuk pada pola lokalisasi atau penzanaan aktivitas sosial sehari-hari dalam ruang-waktu. Saat rumah misalnya, terdapat ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Berbagai ruang tersebut tidaklah sama penggunaan, menyangkut waktu penggunaannya, siapa yang menggunakan, untuk aktivitas apa digunakan, maupun tata cara menggunakannya. Itu suatu ilustrasi sederhana yang mengisyaratkan adanya regionalisasi, atau adanya penzanaan aktivitas sosial sehari-hari dalam ruang-waktu.

Aktivitas atau praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh berbagai rupa regionalisasi, sebagai akibat logis dari terkaitnya praktik (aktivitas) sosial pada ruang-waktu tertentu. Sesuai dengan sifat struktur sebagai “penjilid ruang-waktu,” yang karenanya sifat-sifat struktural senantiasa “hadir” di mana pun dan kapan pun, maka wajar pula bila struktur juga hadir sebagai “tatanan bayangan” dalam regionalisasi. Suatu regionalisasi bisa tergolong “kawasan pusat” (*central region*), “kawasan pinggiran” (*peripheral region*), tergantung pada beberapa utama suatu aktivitas beserta seberapa besar curahan waktu pada lokal atau zona bersangkutan; bisa pula tergolong “kawasan depan” (*front region*), ataukah “kawasan belakang” (*back region*), bergantung pada sifat artikulasi zona tersebut, apakah lebih ke “dalam” ataukah “ke-luar”, dan bisa pula tergolong “kawasan terbuka” (*disclosure*), ataukah “kawasan tertutup” (*enclosure*), bergantung pada kadar keterbukaan/ketertutupan zona tersebut bagi “pihak luar” (Giddens, 1984: 19-131).

Dalam mengkaji masalah ruang dan waktu dalam teori strukturalis, konsep perentangan waktu (*time space distancing*) perlu juga mendapat fokus perhatian. Menurut Giddens, *time space distancing* adalah “merentangkan sistem-sistem sosial melintasi ruang-waktu,



atas dasar mekanisme sistem sosial dan integrasi sistem.” Dalam konteks ini, integrasi sistem adalah hubungan timbal balik antarpelaku individual atau kelompok dalam rentang ruang-waktu yang diperluas, di luar kehadiran satu sama lain (*co-presence*). Semakin luas jangkauan perentangan ruang waktu suatu sistem sosial tersebut tertanam dalam ruang dan waktu serta semakin tahan (*resistent*) pula terhadap perubahan oleh pelaku individual (Giddens, 1984: 171).

Setiap peristiwa empiris terdistribusi berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, setiap institusi dan hubungan-hubungan sosial berlangsung dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Interaksi sosial tidak hanya berlangsung di dalam dan dibentuk oleh waktu dan ruang sebagai lingkungan eksternal, tetapi pada gilirannya ruang-waktu itu juga menjadi internal bagi hubungan-hubungan sosial karena telah memberi makna sosial bagi interaksi tersebut.

Ruang dan waktu adakalanya menjadi kendala bagi individu untuk bertindak atas kehendak bebas, tetapi adakalanya pula justru memungkinkan individu bertindak sebagai subjek. Karena itu, yang perlu dipertanyakan ialah ruang dan waktu macam apa sajakah yang menjadi kendala bagi tindakan aktor, dan waktu-ruang macam apa sajakah yang memungkinkan para aktor memiliki pengetahuan, orientasi, dan kemampuan untuk bertindak sebagai subjek yang memiliki kehendak bebas? Apakah konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ruang waktu terhadap dorongan untuk melakukan perlawanan, oposisi, otonomi ataupun perasaan diperlakukan secara tidak adil?

## E. PEMAHAMAN (HERMENEUTIKA) GANDA

Dalam teori strukturalis di dalam menekankan adanya “*knowledgeable agent*”, yaitu siapa pun dia akan selalu tahu apa yang dilakukannya dan mengapa melakukannya. Berbeda dengan aliran positivistik yang menganggap awam hanya sebagai objek pengetahuan, teori strukturalis menganggap awam sebagai subjek dan objek pengetahuan sekaligus. Kalangan awam dipandang memiliki kemampuan memahami realitas sekelilingnya dan mampu menggunakan pemahaman itu untuk bertindak. Giddens dalam teori strukturalis menyatakan:



*“To be a human being”*. Kata Giddens, *“is to be a purposive agent who both has reasons for his or her activities and is able, if asked, to elaborate discursively upon those reasons.”* (Giddens, 1984: xxxiii).

Hermeneutika ganda dalam penelitian sosial, yaitu suatu proses penafsiran terhadap fenomena sosial (praktik sosial) melalui dua tingkatan, yaitu penafsiran tingkat pertama (*the first order understanding*) dan penafsiran tingkat kedua (*the second order understanding*). Penafsiran tingkat pertama menunjukkan pada pemahaman terhadap suatu praktik sosial berdasarkan apa yang dimengerti, dipahami, dikonsepsikan, dan ditafsirkan oleh para pelaku tindakan sosial itu sendiri. Sebab, mereka itulah “guru besar” (*social theorist*) yang memahami betul tentang apa dan mengapa praktik sosial itu dilakukan. Adapun pemahaman tingkat kedua lebih merupakan “kawasan bermain” peneliti sosial untuk mengangkat hasil tafsiran tingkat pertama ke dalam “bahasa tingkat tinggi” (*metalanguage*); suatu proses penafsiran lebih lanjut dengan melibatkan penggunaan konsep atau konstruk yang beredar dalam khazanah dunia keilmuan (Giddens, 1984: xxxv, 2, 3, 284, 374).

Menurut Faisal (1998), hermeneutika ganda yang disarankan Giddens sejalan, namun ada perbedaan mendasar dengan ide dasar dari *The Discovery of Grounded Theory* yang ditawarkan Glaser dan Strauss (1967). Keduanya sama-sama memandang bahwa manusia itu bertindak (dalam praktik sosial) atas dasar makna atau interpretasi yang diberikan terhadap sesuatu. Karenanya, untuk memahami suatu tindakan (praktik sosial) haruslah dengan jalan memahami makna-makna yang melandasi tindakan atau praktik sosial tersebut. Perbedaan antara keduanya terletak pada bagaimana menemukan makna-makna dimaksud. Pada metode penelitian teori *grounded* Glaser dan Strauss, makna-makna itu diperoleh dengan menyimak proses interaksi, dan selanjutnya (oleh peneliti) dimaknakan (ditafsirkan maknanya). Dengan begitu, makna yang ditemukan sesungguhnya lebih bersifat etik daripada demikian. Berbeda dengan tafsiran tingkat pertama (dalam hermeneutika ganda Giddens) yang tekanannya lebih ke perspektif demikian daripada ke perspektif etik, prosedurnya inheren dalam analisis perbuatan strategik



(*analysis of strategic conduct*) sebagaimana dimaksudkan Giddens (1984: 288-293). Hermeneutika ganda didefinisikan Giddens sebagai berikut:

*The intersection of two frames of meaning as a logically necessary part of social science, the meaningful social world as constituted by lay actors and the metalanguages invented by social scientist; there is a constant 'slippage' from one to the other involved in the social sciences.* (1984: 374).

Metodologi yang hermeneutika ini juga berangkat dari asumsi mengenai realitas yang kompleks. Kenyataan jauh lebih kompleks daripada apa yang berhasil diketahui oleh manusia, dan apa yang diketahui oleh manusia jauh lebih lengkap daripada apa yang dapat diungkapkan manusia (Brown, 1991: 191). Kenyataan geografik selalu lebih kompleks daripada apa yang terlihat dalam peta. Bahasa (ucapan) memang dapat mengungkapkan kebenaran, tetapi tidak jarang justru menyembunyikan kebenaran. Apa yang tidak dinyatakan secara lisan dan tertulis mungkin terungkap melalui tindakan, tetapi tindakan pun sering kali bukan refleksi dari kenyataan yang sesungguhnya. Kondisi yang dapat dijadikan kebenaran itu ialah pengalaman yang seutuhnya dari subjek yang bersangkutan (Surbakti, 1995: 55).

Sekalipun teori strukturalis memiliki implikasi metodologis tertentu, seperti memusatkan perhatian pada praktik sosial, menerapkan hermeneutika ganda, menempatkan pelaku praktik sosial sebagai *knowledgeable agent*, dan mementingkan analisis perbuatan strategik, tetapi ia bukanlah suatu program riset tersendiri, yang memiliki teknik khas sebagaimana etnometodologi Garfinkel atau tatanan interaksi Goffman (Giddens, 1991: 213).

Oleh karena itu, realitas sosial harus diungkapkan melalui observasi mendalam, baik observasi ilmuwan maupun observasi awam, terhadap realitas panggung depan, dan dialog yang komprehensif, intensif, dan partisipatif antarkedua pihak subjek pengetahuan tersebut untuk mengungkap realitas panggung belakang. Kesimpulan suatu pemahaman akan memiliki kredibilitas apabila kedua pemahaman itu berhasil direkonsiliasikan melalui dialog.



## F. KONSEP KEKUASAAN POWER

Dari berbagai prinsip struktural, Giddens melihat tiga gugus besar struktur. *Pertama*, struktur signifikasi (*signification*) menyangkut skemata simbolis, penyebutan, dan wacana. *Kedua*, struktur dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). *Ketiga*, struktur legitimasi menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Giddens, 1984: 28-31).

Jika dikaitkan dengan konsep kekuasaan, dualitas struktur seperti terurai di atas dapat berfungsi sebagai alat analisis kehidupan sosial yang penting terutama mengenai hubungan antara tindakan manusia dengan struktur.

Berdasarkan hal tersebut, Davis (1988: 86-91) menyimpulkan bahwa karakteristik utama dari kekuasaan menurut pandangan strukturalis antara lain:

1. Kekuasaan sebagai bagian integral dari interaksi sosial (*power as integration to social interaction*). Dalam setiap interaksi sosial selalu melibatkan kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat diterapkan pada semua jenjang kehidupan sosial mulai dari yang sempit sampai dengan yang luas.
2. Kekuasaan adalah hal yang penting pokok dalam diri manusia (*power as intrinsic to human agency*). Kekuasaan adalah kemampuan aktor untuk memengaruhi dan mengintervensi serangkaian peristiwa, sehingga ia dapat mengubah jalannya peristiwa tersebut.
3. Kekuasaan adalah konsep relasional, termasuk hubungan otonomi dan ketergantungan. (*Power as relational concept, involving relations of otonomy and dependence*). Kekuasaan bukan sekadar kapasitas transformasi aktor untuk mencapai tujuannya, melainkan juga konsep relasional. Ini berarti setiap aktor dapat memengaruhi lingkungan di mana peristiwa interaksi itu terjadi, agar aktor lain memenuhi keinginannya.
4. Kekuasaan selain bersifat membatasi juga memberi kebebasan (*power as contraining as well as enabling*). Dalam kehidupan se-



hari-hari kekuasaan bergandengan tangan dengan dominasi yang terstruktur. Anggota masyarakat tidak hanya mengintervensi jalannya interaksi, tetapi juga mencoba melakukan kontrol terhadap perilaku orang lain. Ini dilakukan dengan sarana sanksi yang telah tersedia secara struktural.

5. Kekuasaan sebagai proses (*power as process*). Hubungan dialektik antara aktor dan struktur tidaklah bersifat statis, tetapi secara kontinu melakukan produksi dan reproduksi lewat proses strukturalisasi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa konsep Giddens tentang kekuasaan lebih berfokus pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi secara terus-menerus dan rutin membangun, memelihara, mengubah, dan mentransformasi hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada level mikro maupun makro, mencakup dominasi dan subordinasi yang dibangun secara terus-menerus dalam proses interaksi oleh faktor-faktor untuk memelihara hubungan kekuasaan tadi (Davis, 1988: 86-91; Mslamy, 1996:41-48).

## G. PERILAKU TINDAKAN (AGENCY)

Teori strukturalisasi Giddens mendapatkan tempat utama dalam teori agensi. Selain menjadi ahli waris baru bagi tradisi agensi, ia menempatkan kembali agensi pada *mainstream* teori sosiologi, suatu pencapaian yang harus dipuji. Teori strukturalisasi adalah teori agensi terbaik dan menjadi contoh terbaik dari pendekatan yang dapat menjadi fokus yang sah dari kritisisme pendekatan tersebut.

Model susunan perilaku tindakan (*agency*) yang diajukan Giddens didasari oleh gagasan Freud tentang tiga dimensi internal manusia (ego dan superego). Berdasarkan pada tiga dimensi internal manusia tersebut, Giddens mengolah menjadi tiga unsur dalam diri manusia, yaitu: motivasi tak sadar (*unconscious motive*), kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), dan kesadaran praktis (*practical consciousness*).

Motivasi tak sadar menunjuk pada keinginan perilaku yang merupakan potensi tindakan, tetapi bukanlah tindakan itu sendiri. Itulah





sebabnya sangat jarang tindakan kita digerakkan secara langsung oleh motivasi yang sadar.

Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita untuk merefleksi dan memberi penjelasan atas tindakan yang kita lakukan. Kalau kita ditanya kenapa kita melakukan tindakan tersebut, kita akan menjawab dengan penjelasan berdasarkan tindakan yang kita lakukan secara sadar dengan skema aturan tertentu. Adapun kesadaran praktis adalah kawasan diri pelaku yang berisi berbagai pengetahuan praktis dan tidak selalu bisa diuraikan secara eksplisit. Inilah level hidup yang berisi pengetahuan yang diandaikan (*taken for granted*) dan merupakan kawasan instingtif hidup yang sangat jarang kita pertanyakan lagi. Sebagai contoh, kita jarang bertanya mengapa kita tertawa sewaktu senang dan kenapa kita menangis pada waktu sedih dan sebagainya (Giddens, 1984: 5-7).

Banyak hal dalam hidup harian kita berlangsung pada level ini, dan dalam kesadaran praktis ini berakar “rasa aman ontologis” kita (*ontological security*). Kadar rendah kesadaran praktis menjadi salah satu akar kecemasan ontologis (*ontological onxiety*). Proses tentang kecemasan ontologis menjadi rasa aman ontologis berlangsung lewat rutinisasi. Rutinisasi merupakan proses penampilan (*enacting*) secara berulang skemata yang ada di lingkungan baru itu. Proses itu berlangsung sampai periode ketika cara melakukan hal-hal praktis di tempat baru itu menjadi pengetahuan instingtif hidup harian orang tersebut.

Dari uraian di atas, perlu ditekankan kembali tentang gagasan Giddens bahwa pelaku bukanlah sesuatu yang sama sekali terpisah dari struktur dan struktur bukan hal yang terpisah dari pelaku. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses bahwa struktur merupakan hasil keterulangan praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh para pelaku dan tindakan-tindakan para pelaku terbatas pada ruang dan waktu yang disebut “struktur”. Antara pelaku dan struktur tidak terdapat keterpisahan total atau dualisme, tetapi dualitas (Priyono, 1999: 55-55).



## H. ARUS PEMIKIRAN YANG MEMENGARUHI TEORI

Sampai saat ini nama Anthony Giddens dikenal sebagai pemikir sosial terkemuka di kalangan ilmuwan sosial. Sentuhan pemikiran Giddens berhasil mengombinasikan suatu eksegesis yang saksama atas karya-karya klasik dengan kepekaan terhadap isu-isu penting teori sosial kontemporer. Giddens memulai telaahnya dari tradisi besar pemikiran Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. Selanjutnya, ia mengarahkan refleksi pada berbagai pemikiran yang telah menjadi “isme” dewasa ini, seperti fungsionalisme Parsons, dramaturgi Goffman, interaksionisme simbolis Blumer, Marxisme, strukturalisme Saussure, dan *post*-strukturalisme Derrida.

Giddens mengungkapkan bahwa teori sosial semenjak mazhab klasik hingga tahun 1960-an ditandai oleh serangkaian asumsi pra-teoretis yang kurang memadai bagi studi tentang kehidupan sosial. Pemikir sosial klasik cenderung menggunakan interpretasi naturalis dalam merumuskan teorinya dan terlampau berpijak pada paradigma filsafat positivistik. Gaya berpikir ini menghasilkan bentuk-bentuk reduksionis dan esensialis dalam berteori. Dalam skema positivistik, pelaku (*the actor*) telah direduksi menjadi produk kekuatan-kekuatan sosial yang impersonal dan deterministik. Perilaku sosial dalam masyarakat dipandang sebagai hasil mekanis dari suatu proses aktif dan penuh kemungkinan yang dijalankan oleh pelaku.

Persoalan paling jelas yang ia kritisi dari pandangan positivistik adalah paham fungsionalisme-struktural Talcott Parsons. Giddens bahkan berantipati pada pandangan ini dan mengatakan bahwa, “*Saya ingin menghapus terminologi fungsi dari seluruh kamus ilmu-ilmu sosial.*” Apa yang tidak dapat diterima dari fungsionalisme? Menurut Giddens ada tiga hal yang ia sebutkan, yakni: *Pertama*, fungsionalisme memberangus fakta bahwa kita anggota masyarakat bukanlah orang-orang dungu. Kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita, bukan robot yang bertindak berdasarkan naskah atau peran yang sudah dipatenkan. *Kedua*, fungsionalisme merupakan cara berpikir yang mengklaim bahwa sistem sosial punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut Giddens, sistem sosial tidak punya kebutuhan apa pun, tetapi yang pu-



nya kebutuhan adalah para pelaku itu sendiri. *Ketiga*, fungsionalisme membuang dimensi waktu dan ruang dalam menjelaskan proses sosial (Giddens, 1979). Akibatnya, terjadi polarisasi antara kondisi statik dan dinamik, atau terjadi dualisme. Pendekatan ini lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, sehingga terperosok dalam objektivisme yang sesat.

Di samping itu, Giddens juga menyoroti mazhab yang mengikuti tradisi-tradisi hermeneutik, filsafat bahasa sehari-hari, dan fenomenologi yang dianggap telah menghindari asumsi-asumsi positivis, dan diakui telah banyak menyumbang banyak pemikiran bagi konseptualisasi tindakan yang lebih memadai (simak lebih lanjut, Beilharz; 2002). Akan tetapi, mazhab pemikiran interpretatif tersebut memfokuskan perhatian hampir secara eksklusif pada produksi aktif kehidupan sosial tanpa mengembangkan konsep analisis struktural sama sekali.

Mazhab interpretatif memandang bahwa sekelompok manusia menciptakan masyarakat, namun mazhab ini sulit mengakui bahwa kelompok manusia tersebut tidak melakukan hal itu dalam kondisi yang dipilihnya sendiri. Giddens berpendapat bahwa pendekatan interpretatif tidak memiliki cukup kemampuan untuk memperhitungkan baik kondisi kausal maupun konsekuensi tindakan yang tidak terduga. Bentuk pemikiran interpretatif lebih mengutamakan pelaku daripada masyarakat, sehingga tergelincir dalam subjektivisme.

Mencermati gagalnya pemikiran tradisional untuk mengonseptualisasikan secara memadai hakikat struktur dan tindakan serta relasi antarkeduanya, Giddens memutuskan bahwa teori sosial perlu direkonstruksi. Dalam upaya ini, ia menempuh jalan dengan melakukan kritik terhadap tiga aliran penting dalam khazanah ilmu sosial yaitu sosiologi *interpretif* (interpretatif), fungsionalisme, dan strukturalisme. Giddens berusaha mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kelemahannya dan menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Gagasan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur, dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi model teoretis yang baru. Giddens menyebut nama pendekatan



barunya ini dengan sebutan “*teori strukturalisme*”.

## I. FENOMENA SOSIAL YANG HENDAK DIJELASKAN

Telaah kritis Anthony Giddens harus diakui telah memiliki jangkauan yang lebih luas. Ia telah menunjukkan kemampuannya melalui kritiknya terhadap materialisme historis, fungsional, strukturalisme, fenomenologi, dan sebagainya. Dari telaah kritis tersebut setidaknya ada dua fenomena sentral yang hendak dijelaskan berdasarkan gagasan Giddens, yaitu hubungan *pelaku-struktur dan sentralitas ruang-waktu*.

Bagaimanakah hubungan pelaku (*agency*) dan struktur? Giddens melihat bahwa ilmu sosial dijajah oleh gagasan dualisme pelaku-struktur. Ilmu sosial mencandra (mendeskripsikan) pelaku-struktur memiliki hubungan layaknya pihak yang sedang bertanding, atau dilawankan satu sama lain. Giddens ingin menggeser paradigma tersebut, dengan memproklamasikan hubungan keduanya sebagai hubungan dualitas bukan dualisme. Tindakan (yang dilakukan pelaku) dan struktur saling mengandaikan. Pelaku menunjuk pada orang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Struktur bukan nama bagi totalitas, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas. Struktur ialah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan praktik sosial (Giddens, 1993). Dualitas struktur pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial. Struktur analog dengan *langue* (mengatasi waktu-ruang), sedang praktik sosial analog dengan *parole* (dalam waktu-ruang). Berdasarkan prinsip dualitas struktur pelaku ini, Giddens menawarkan teori baru, yaitu teori strukturalisme (Giddens, 1998).

Dalam melihat hubungan sentralitas ruang-waktu, biasanya dipahami sebagai arena panggung tindakan; dalam arti ke mana kita masuk dan dari mana kita keluar. Giddens menyatakan bahwa ruang-waktu bukanlah arena tindakan, melainkan unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Oleh sebab itu, harus menjadi unsur integral dalam pembahasan teoretis ilmu sosial (Giddens, 1981).



Konstitusi ruang-waktu ini menempati posisi sentral dalam gagasan Giddens. Menurutnya, perbedaan bentuk-bentuk masyarakat bukan terletak pada perbedaan cara produksi seperti dijelaskan dalam Marxisme, melainkan dalam cara masing-masing masyarakat mengorganisasi hubungan antarruang-waktu. Negara adalah pemuat kekuasaan yang didasarkan pada kontrol atas pengaturan ruang-waktu. Globalisasi sebagai perentangan sekaligus pemadatan waktu dan ruang. Individu dan masyarakat hidup dalam rentangan ruang dan waktu. Berdasarkan pengamatan Giddens tentang sentralitas ruang dan waktu tersebut, juga turut menyumbang lahirnya teori strukturasi.

Manusia secara riil hidup dalam ruang dan waktu. Menurut Martin Heidegger, yang mengilhami filsafat pemikiran sosial Giddens, manusia bukan sekadar ada dalam waktu melainkan mengambil sikap terhadap waktu, yaitu konteks relasi manusia terhadap masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagi manusia yang penting bukanlah hanya bahwa dia hidup dalam ruang dan waktu, melainkan juga bagaimana ruang dan waktu itu dihidupi (pen: dimaknai). Manusia menurut Giddens, jangan hanya ditentukan oleh ruang dan waktu, tetapi juga harus mampu menentukan ruang dan waktu itu sendiri.

Dari gerak ayun pendulum pemikiran yang bergoyang dari satu ekstrem kiri ke ekstrem yang lain sehubungan dengan gagasan mengenai ruang-waktu, jelas bahwa pendekatan yang paling aman adalah jalan alternatif. Pemikiran Giddens mengenai masyarakat modern, yang terkenal dengan “Jalan Ketiga”—merupakan jalan alternatif yang mencoba meleraikan berbagai konflik, kontradiksi, ekstremitas dalam berbagai khazanah pemikiran ilmu sosial klasik maupun modern.

Teori strukturasi mengonsentrasikan diri terutama pada keprihatinan-keprihatinan ontologis yang terlupakan, karena orang terlalu memberi tekanan pada masalah-masalah epistemologis dalam penelitian ilmu sosial. Akibat dari penekanan pada persoalan epistemologis tersebut, terjadilah polarisasi yang bersifat dualisme, dan terus bergulir bagaikan bola salju jatuh dari lereng bukit, bahkan sampai muncul terminologi objektif dan subjektif.

Melalui teori strukturasi, Giddens bertujuan mengawinkan dualisme



antara objektivisme (yang nampak jelas dalam pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme) dan subjektivisme (yang diperjuangkan oleh hermeneutika dan fenomenologi). Menurut Giddens (1984), teori strukturalisme didasarkan pada premis bahwa dualisme ini harus dikonseptualisasikan kembali sebagai suatu dualitas; yakni dualitas struktur. Artinya, subjek dan objek tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri, lepas satu sama yang lain, tetapi dua hal yang saling tergantung serta saling mengandaikan satu sama lainnya. Dasar teori strukturalisme adalah bahwa subjek tidak ditempatkan pada titik pusat (*decentred subject*), namun hal ini tidak berarti subjek digantikan oleh suatu semesta yang kosong tanda-tanda. Giddens melihat kegiatan sosial berkaitan erat dengan ruang dan waktu, serta berada pada akar pembentukan, baik itu subjek maupun objek sosial.

## J. JENIS PENJELASAN YANG DITAWARKAN

Secara garis besar teori strukturalisme melibatkan hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Menurut Giddens, praktik sosial inilah yang selanjutnya menjadi objek ilmu sosial. Dualitas terletak dalam fakta bahwa skemata yang mirip aturan itu menjadi prinsip bagi praktik di berbagai tempat dan waktu. Skemata tersebut merupakan hasil (*outcome*) keterulangan tindakan kita dan sekaligus menjadi medium bagi berlangsungnya praktik sosial. Giddens menyebut skemata itu sebagai struktur. Berbeda dengan pengertian Durkheimian tentang struktur yang lebih bersifat mengekang, maka struktur dalam gagasan Giddens ini lebih bersifat memberdayakan (*enabling*) dalam arti lebih memungkinkan berlangsungnya praktik-praktik sosial dalam masyarakat.

Objektivitas struktur sosial dalam paham fungsionalisme ataupun strukturalisme lebih banyak mengarah pada sifat “berposisi” (berseberangan) dan mengekang pelaku. Sementara menurut Giddens, objektivitas struktur tidak bersifat eksternal tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Struktur bukanlah benda, melainkan skemata yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial (Giddens, 1984).



Dari berbagai prinsip strukturasi, Giddens memperlihatkan tiga gugus besar dalam struktur: (1) struktur signifikasi, menyangkut skemata simbolis, penyebutan, dan wacana; (2) struktur dominasi, yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi); (3) struktur legitimasi, menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Prinsip signifikasi pada gilirannya juga mencakup skemata dominasi dan legitimasi, karena skemata signifikasi “orang yang mengajar disebut guru” akan menuju ada skemata dominasi “kekuasaan guru atas murid” dan juga skemata legitimasi “melaksanakan ujian” bagi siswa. Dalam konteks ini, maka konsepsi struktur dapat berlaku sebagai medium praktik sosial. Tindakan dan praktik sosial ketika berkomunikasi selalu mengandaikan struktur signifikasi tertentu, misalnya bahasa. Penguasaan atas barang (ekonomi) dan orang (politik) akan melibatkan skemata dominasi; sebagaimana “penerapan sanksi” atas pelanggaran sebagai wujud pengandaian skemata legitimasi.

Reproduksi sosial berlangsung lewat struktur dan praktik sosial. Namun, yang menjadi akar persoalan adalah apakah kita sebagai para pelaku tahu akan hal itu atau kita hanya seperti wayang di tangan para dalang dalam berbagai lakon yang telah ditentukan; seperti status pelaku dalam fungsionalisme Parsons atau Marxisme Althusser? Jawaban Giddens lugas, “*we know*” (kita tahu). Tetapi tahu tidak harus diartikan sebagai sadar. Dalam berperilaku, maka aktor dapat dibedakan menjadi tiga dimensi internal pelaku, yakni: (a) motivasi tidak sadar; (b) kesadaran praktis; dan (c) kesadaran diskursif. Motivasi tidak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukanlah tindakan itu sendiri. Seperti konsep bekerja bagi pegawai negeri, sangat jarang digerakkan oleh motif mencari uang. Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai, seperti bersikap diam atau tenang pada saat masuk ke tempat ibadah. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksi dan memberi penjelasan eksplisit atas tindakan yang sudah dilakukan. Mengapa saya memakai seragam abu-abu ketika pergi ke kantor, atau memakai dasi saat acara resmi? Jawabannya dapat bervariasi.



Melalui pemahaman pada dimensi pelaku tersebut, individu menjadi tahu bagaimana melangsungkan hidup keseharian tanpa mempertanyakan terus-menerus apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Rutinitas hidup personal dan sosial terjadi melalui gugus kesadaran praktis ini. Kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami teori strukturasi. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial. Menurut Giddens (1979), perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi betapapun kecilnya perubahan itu. Mengambil dasar pemikiran dari gagasan Erving Goffman, Giddens selanjutnya mengajukan argumen, bahwa sebagai pelaku, individu mempunyai kapasitas memonitor diri secara reflektif (*strategic monitoring of conduct*). Perubahan terjadi ketika kapasitas ini menggejala secara luas sehingga terjadilah derutinisasi. Derutinisasi menyangkut proses di mana skemata yang selama ini menjadi aturan dan sumber daya; tidak lagi memadai sebagai prinsip pengorganisasian berbagai praktik sosial, atau yang sedang diperjuangkan sebagai praktek sosial baru. Dalam pandangan Giddens, sistem sosial itu eksis sebagai praktik-praktik yang direproduksi, dan oleh sebab itu praktek sosial senantiasa mengalami dinamikanya sendiri. Praktik sosial adalah proses yang penuh kemungkinan dan didasarkan pada aktivitas para pelaku. Inilah sketsa ringkas dari teori strukturasi Giddens.

## K. BIAS TEORI STRUKTURASI

Kendatipun teori strukturasi dapat mengatasi pelbagai kekurangan dalam pemikiran tradisional, teori tersebut masih mengandung jawaban yang kurang memadai bagi tugas penyempurnaan teori sosial kontemporer. Proyek rekonstruksi dan sintesis yang dikerjakan Giddens secara inheren adalah teori yang konservatif. Menjadikan tindakan (perilaku) dan struktur lebih bisa terbuka, saling mengandaikan satu sama lain, memang diakui merupakan gagasan penyempurnaan, namun hal ini sama sekali belum membantu melenyapkan perbedaan di antara keduanya. Mengubah dualisme menjadi dualitas belum cukup untuk memecahkan masalah tersebut.

Pengujian secara lebih mendalam atas strategi rekonstruksi dan





synthesis Giddens tersebut menyingkapkan adanya bias ilmiah yang mencolok dalam pemikirannya. Proses synthesis mencakup pembongkaran serta penyusunan kembali struktur-struktur logis dari berbagai perspektif teoretis, dan hal ini hanya dapat berlangsung sebagai epistemologi. Aktivitas synthesis seperti itu memerlukan dipisahkannya segi metodologis dari segi substantifnya serta diberikannya prioritas pada segi metodologisnya.

Adanya keyakinan bahwa teori dapat disempurnakan secara terpisah dari objeknya mengandung asumsi tersembunyi. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya anggapan bahwa teori dapat lebih sempurna dari objeknya. Padahal, strategi rekonstruksi dan synthesis yang berusaha memisahkan teori dari akar sejarahnya serta mendistorsikan pertautan antara keduanya dapat mengakibatkan reifikasi atas teori. Bias ilmiah ini terjadi pada teori strukturasi Giddens.

Bila dicermati benar, teori strukturasi Giddens ini kurang memiliki kemampuan untuk melahirkan konsep-konsep yang substantif. Teori strukturasi, sifatnya bagaikan parasit terhadap karya para pemikir terdahulu (strukturalis dan interpretatif). Ini menunjukkan adanya upaya eklektisisme dalam karya Giddens, dan sekaligus menunjukkan indikasi betapa kurang orisinalnya pemikiran Giddens.

Di samping itu, berbagai prinsip struktural yang terdapat dalam teori strukturasi juga menuai kritik yang cukup tajam. Giddens melihat adanya tiga gugus besar struktur yang saling mengandaikan, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Ada kekhawatiran dengan munculnya wacana atau produksi signifikasi akan mengakibatkan monopoli interpretasi. Prinsip signifikasi pada gilirannya juga mencakup skemata dominasi dan legitimasi, karena skemata signifikasi dalam konteks “orangtua sebagai ayah” pada gilirannya menyangkut dominasi “kekuasaan ayah atas anak,” dan juga skemata legitimasi “menyuruh atau menugasi.” Skemata ini mengasumsikan adanya linieritas dalam pola perilaku sosial atau perilaku dikendalikan oleh struktur. Padahal, tidak semua orang yang memiliki akses kekayaan (materi) akan mempunyai keinginan pula untuk mendominasi pihak lain. Artinya, tidak semua orang yang memegang signifikasi dan ber-



peluang mendominasi akan mesti memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendominasi pihak lain dalam masyarakat. Tiap-tiap individu memiliki interest dan intensionalitasnya masing-masing. Jadi, kalau ketiga gugus struktur tersebut dipaksakan untuk menjelaskan fenomena sosial kontemporer, maka sesungguhnya telah terjadi bias metodologis dalam teori strukturasi.

Dalam memaknai dualitas, Giddens berupaya mengintegrasikan dua kutub yang paradoksal. Proses pengintegrasian ini bila tidak dilakukan secara hati-hati akan mengandung sejumlah ambiguitas. Melalui metode memadu, Giddens memandang semua variabel dianggap fungsional dalam proses sosial. Bahkan sampai muncul adagium, “*setan pun ada gunanya bagi Giddens*.” Padahal, dalam tradisi sosiologi dikenal bahwa dalam sistem sosial terdapat dua fenomena yaitu perilaku yang fungsional dan perilaku yang disfungsional. Proses dan hasil sintesis yang dikemas dalam teori strukturasi Giddens memang sah-sah saja, tetapi sangat rentan terhadap bias epistemologis, nilai, dan kepentingan.

Kedudukan teori strukturasi Giddens memang masih relatif “*ringkih*,” terutama bila digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial kekinian yang variannya sangat *sophisticated*. Teori ini bukan merupakan suatu penyelidikan terhadap realitas empiris, bukan paparan mengenai munculnya berbagai kemungkinan, dan hanya sebatas mengajukan rekonseptualisasi mengenai teori sosial sebagai kritik. Memang masih terdapat keberatan untuk menyatakan bahwa teori strukturasi menyumbangkan sesuatu yang orisinal pada teori sosial, tetapi setidaknya telah berkontribusi dalam pengembangan pemikiran yang lebih komprehensif dalam melihat realitas sosial. Teori strukturasi dianggap merupakan pemikiran alternatif yang paling memadai untuk memandang dunia dengan fenomena yang menyertainya. Namun, perlu sikap kehati-hatian dalam menerapkan teori strukturasi Giddens untuk menjelaskan fenomena sosial yang sedang terjadi.





# Daftar Pustaka

---

- Abidin, Zainal. 2000. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Baert, Patrick. 1989. *Social Theory in the Twentieth Century*. CooxvwmW; Polity Press.
- Berger, L. Peter, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jurgen Habermas. 1987. *Cultural Analysis*. London & New York: Routledge & Paul Kegan.
- Berger, L. Peter & Thomas Luckmann. 1994. *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*. Alih bahasa Hasan Basari, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Blumer, Herbert. 1966. "Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead," dalam *The American Journal of Sociology*, 71 March, p. 535-544.
- Bogdan, Robert C. & Steven J. Taylor. 1982. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in the Social Sciences*. Alih bahasa Arief Furchan, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Brewer, Anthony. 1999. *Das Kapital Karl Marx*. (Terjemahan Joebaar Ajoeb). Jakarta. Teplok Press.
- Cabin, P. dan Jean Francois Dortier (ed.) 2008. *Sosiologi; Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, (terjemahan). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Campbell, Tom. 1994. *Seven Theories of Human Society*. Alih bahasa Budi Hardiman, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Craibb, Ian. 1984. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cuff, E.C. and Payne, G.C.F. *Perspectives in Sociology*. London: Geore Allen and Unwim.
- Co. Water, Malcoms. 1994. *Modern Sociological Theory*. London: New Delhi: SAGE Publication
- Collin, Finn. 1997. *Social Reality*. London and New York: Routledge.
- Coser, Lewis. 1964. *The Function of Social Conflict*. New York: The Press A Division of McMillan Publishing, Co.Inc.
- Coser, Lewis. 1964. *The Function of Social Conflict*. New York: The Press, A Division of McMillan Publishing, Co.Inc.
- Coser A. Lewis and Bernard Rosenberg. 1975. *Sociological Theory*. Fourth Edition Collier-McMillan: International Editions.
- Craib, Ian. 1986. *Teori-teori Sosial Modern dan Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dimiyati, Mochammad. 2000. *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan, Metode, dan Terapan*. Malang: PPS Universitas Negeri Malang.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Rules of Sociological Method*. London: CollierMacMillan.
- Dyson, L. 2001. "Peran Etnometodologi dalam Penelitian Sosial," dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ferguson, Harvie. 2001. *Phenomenology and Social Theory*, dalam George Ritzer & Bary Smart (ed.), *Handbook of Social Theory*, London, California, New Delhi: SAGE Publications Ltd.
- Garfinkel, H. 1967. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice Hall Heritage.



- Gerth. & Talcot Parsons. 1995. *From Max Weber, Essays in Sociology*. London: Routledge.
- Giddens, Anthony. 1982. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. Hutchinson.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya-karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. (Terjemahan Soeheba Kramadibrata). Jakarta: UI Press.
- Giddens, Anthony & Jonathan H. Turner. 1987. *Social Theory Today*. California: Stanford University Press.
- Giddens, Anthony and Jonathan H. Turner, 1988. *Social Theory Today* Stanford California; Stanford University Press.
- Giddens, Anthony. 1990. *Central Problems in Social Theory*. London: Macmilan Education LTD.
- Hadiwiyono, Harun. 1980. *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hamilton, P. 1998. *Talcott Parsons dan Pemikirannya; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Horton B. Paul, and Chester L. Hunt. 1987. (Edisi Indonesia); terjemahan Amunuddin Ram, dkk. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Johnson, P. Doyle, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Edisi Indonesia); terjemahan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia.
- Laeyendecker. 1983. *Tata Perubahan dan Ketimpangan; Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. (Edisi Indonesia) Jakarta ; Penerbit PT. Gramedia.
- Lawang, M.Z. Robert. 1986. *Buku Materi Pokok Sistem Sosial Indonesia*. Universitas Terbuka, Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lawer, H. Robert. 1987. *Perspective on Social Change*. (Edisi Indonesia); terjemahan Alimandan. Jakarta: Bina Aksara.
- Lawang, Robert. 1986. *Buku Materi Pokok Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Universitas Terbuka.



- Magnis Suseno, Frans. 1999. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisioner*. Jakarta: Gramedia.
- Merton, R.K. 1957. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin Pelly.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Orleans, Myron. 2000. *Phenomenology*, dalam *Kumpulan Bahan Mata-ajaran Metodologi Penelitian Kualitatif* oleh Daniel T. Sparringa. FISIP Unair.
- Parsons, Talcott & Robert F. Bales. 1955. *Family, Socialization and Interaction Process*. New York: Free Press.
- Pelly, Usman. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Parsons, Talcott. 1949. *The Structure of Social Action*. New York: Free Press.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. London: Routledge.
- Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Yasogama.
- Poloma, M. Margaret, 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Poloma, Margaret, M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja-Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 1983. *Contemporary Sociological Theory*. New York: Alfreda Knopf.
- Ritzer, George. 1988. *Contemporary Sociological Theory*. New York: Alfreda Knopf.
- Ritzer, George. 1992. *Sociologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Terjemahan Alimandan). Jakarta: Rajawali Press.
- Ritzer, George. 1994. *Sociological Theory*. New York: McGraw Hill Companies.
- Ritzer, George. 1996. *Modern Sociological Theory*; Fourth Edition; New York: McGraw-Hill International Edition.



- Ritzer, George. 2001. *Sociology; A Multiple Paradigm Science*. Revised Edition Boston. London, Sydney, Toronto: Ally and Bacon, Inc.
- \_\_\_\_\_. 1969. *Symbolic Interactionsm: Perspective and Method*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma ganda*. (Saduran); Alimandan, Jakarta: PT Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Sociology; A Multiple Paradigms Science*, (Revised Ed.). Boston, London, Sydney, Toronto: Ally and Bacon. Inc.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*, Ed. Ke-6; (terjemahan: Alimandan). Jakarta: Prenada Media Group.
- Sadli, Sarpinah. 1984. "Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang." *Desertasi* Tidak Dipublikasikan. PPS UL.
- Santoso, Thomas. "Etnometodologi dan Kasus Beberapa Penelitian Sosial," dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanderson K. Stephen. 1993. *Sosiologi Makro (Sebuah Pendekatan Realitas Sosial)*. Edisi Kedua. Jakarta. Rajawali Press.
- Schellberg, James A. 1997. *Tokoh-tokoh Psikologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, M. Hotman. 2001. *Kumpulan Bahan Mata Kuliah Realitas Sosial*. (Tidak diterbitkan). Surabaya: Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana-Universitas Airlangga.
- Sparringa, Daniel T. 2000. "Metode Penelitan Kualitatif Kumpulan Bahan Kuliah. Buku I-Ver: 1.02. Surabaya: Fisip Unair.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-Universitas Indonesia.
- Surbakti, Ramlan,.....
- Sutaryo. 1992. *Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik*. Yogyakarta: FISIPOL- Universitas Gadjah Mada.
- Syam, Nur. 2000. "Etnometodologi: Sosiologi Garfinkel" Makalah tidak dipublikasikan. Surabaya: PPs Unair.





- Turner, Jonathan, H. 1974. *The Structure of Sociological Theory*. Homewood Illionis, Limited Georgetown, Octario: The Darsey Press.
- Turner, H. Jonathan. 1978. *The Structure of Sociological Theory*. Revised Edition. Homewood, Illinois, Irwin-Dorsey Limited, Georgetown, Ontario: The Dorsey Press.
- Tim Redaksi Dyarkara. 1993. *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja ilmu-ilmu*. Jakarta: PT Gramedia
- Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Frontiers of Social Theory; The New Syntheses*. New York: Columbia University Press.
- \_\_\_\_\_. and Barry Smart, (Eds.). 2001. *Handbook of Social Theory*: London: SAGE Publications, Ltd.
- Veeger, J. Karel. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Buku panduan mahasiswa. Diterbitkan atas kerja sama APTIK dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wallace, A. Ruth and Alison Wolf. 1986. *Contemporary Sociological Theory, The Continuing Classical Tradition*. Second Edition. New Jersey, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Waters, Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publications.
- Weber, Max. 2000. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Surabaya. Pustaka Prometheus.
- Widyanta, AB. 2002. *Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan George Simmel*, (Kata pengantar: St. Sunardi) Kerja sama Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Zamroni. 1988. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Zeitlin, Irving, M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi*. (Terjemahan Ashori dan Juhandi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Zeitlin, Irving, M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zeitlin, Irving, M. 1973, *Rethinking Sociology, A Critique of Contemporary Theory*. New Jersey: Meredith Publication.
- Zenju, Nandang Saefudin. 2001. “*Teori Pertukaran Sosial dari George Homans*,” Makalah. Surabaya: PPs Unair.



